Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024
DI LARANTUKA





DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG

Nomor : 78.A/LHP/XIX.KUP/06/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

Buku I



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024
DI LARANTUKA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

   Laporan ini memuat:

   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

   b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan

   c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

   Laporan ini memuat:

   a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

   c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 6

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 7

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 9

III. NERACA 10

IV. LAPORAN OPERASIONAL 12

V. LAPORAN ARUS KAS 14

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 16

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 17

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Flores Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang tersebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 78.B/LHP/XIX.KUP/06/2025 tanggal 19 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kupang, 19 Juni 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN
PROVINSI NTT

Triyantoro S.E., M.M., CSFA

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;

c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang memiliki 50 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2024;

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Arus Kas (LAK);

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern. Pemanfaatan hasil pemeriksaan sebelumnya baik interim, kinerja maupun dengan tujuan tertentu (DTT) digunakan untuk melihat dampak hasil pemeriksaan tersebut terhadap kewajaran laporan keuangan yang akan diperiksa dan kaitannya dengan penentuan kecukupan cakupan pemeriksaan LKPD.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 60 hari, terdiri dari pemeriksaan interim mulai tanggal 16 Februari s.d. 22 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 53/ST/XIX.KUP/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan pemeriksaan terinci mulai tanggal 28 April s.d. 22 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 126/ST/XIX.KUP/04/2025 tanggal 25 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

BUPATI FLORES TIMUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Larantuka, 19 Juni 2025

Bupati Flores Timur

Ir. Antonius Doni Dihen

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(*AUDITED*)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.1.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.1**				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	17.460.890.000,00	16.314.902.964,41	93,44	15.068.129.862,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	5.728.914.924,00	3.629.820.420,00	63,36	24.458.316.606,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	3.845.122.715,00	2.013.815.603,00	52,37	3.845.122.715,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	28.264.655.000,00	33.839.224.934,10	119,72	6.969.310.255,12
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)**		**55.299.582.639,00**	**55.797.763.921,51**	**100,90**	**50.340.879.438,12**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**				
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**5.1.1.2.1**				
10	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	2.694.575.000,00	3.376.009.264,00	125,29	3.269.621.000,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	3.261.560.000,00	3.282.192.000,00	100,63	5.322.843.646,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	681.097.648.000,00	680.488.339.610,00	99,91	616.204.723.700,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	314.047.623.800,41	310.035.980.784,00	98,72	252.478.859.039,00
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)**		**1.001.101.406.800,41**	**997.182.521.658,00**	**99,61**	**877.276.047.385,00**
15	**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**	**5.1.1.2.2**				
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	5.633.738.000,00	5.633.738.000,00	100,00	0,00
17	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	177.120.946.000,00	183.768.682.000,00	103,75	180.183.689.349,00
18	**Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (16+17)**		**182.754.684.000,00**	**189.402.420.000,00**	**103,64**	**180.183.689.349,00**
19	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**5.1.1.2.3**				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	38.921.459.327,00	31.429.584.909,00	80,75	29.238.171.069,00
21	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	150.000.000,00	3.615.250.000,00	2.410,17	0,00
22	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20+21)**		**39.071.459.327,00**	**35.044.834.909,00**	**89,69**	**29.238.171.069,00**
23	**Jumlah Pendapatan Transfer (14+18+22)**		**1.222.927.550.127,41**	**1.221.629.776.567,00**	**99,89**	**1.086.697.907.803,00**
24	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**				
25	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	72.863.835,00	10.862.851,59	14,91	0,00
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	14.811.586.676,00	12.826.069.411,00	86,59	12.138.548.316,00
27	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (25+26)**		**14.884.450.511,00**	**12.836.932.262,59**	**86,24**	**12.138.548.316,00**
28	**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (7+23+27)**		**1.293.111.583.277,41**	**1.290.264.472.751,10**	**99,78**	**1.149.177.335.557,12**
29	**BELANJA DAERAH**	**5.1.2**				
30	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**				
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	537.461.711.125,00	511.746.215.171,00	95,22	446.582.102.987,00
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	318.389.625.369,00	279.301.125.411,00	87,72	258.213.655.046,45
33	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	47.320.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	59.994.414.729,00	59.165.926.097,00	98,62	43.137.517.667,00
35	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	214.500.000,00	214.362.291,00	99,94	224.278.770,00
36	**Jumlah Belanja Operasi (31 s.d. 35)**		**916.107.571.223,00**	**850.427.628.970,00**	**92,83**	**748.157.554.470,45**

No	Uraian	Reff CaLK	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
37	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**				
38	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	50.846.577.597,00	48.525.952.256,00	95,44	29.293.431.301,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	112.934.826.490,00	102.571.655.870,00	90,82	38.537.628.682,00
41	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	37.875.179.611,00	36.585.207.223,00	96,59	33.172.488.493,00
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.150.805.880,00	2.122.885.450,00	98,70	2.552.390.444,00
43	**Jumlah Belanja Modal (38 s.d. 42)**		**203.897.389.578,00**	**189.895.700.799,00**	**93,13**	**103.555.938.920,00**
44	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**				
45	Belanja Tidak Terduga		5.534.950.980,00	2.423.055.403,00	43,78	518.234.437,00
46	**Jumlah Belanja Tidak Terduga (45)**		**5.534.950.980,00**	**2.423.055.403,00**	**43,78**	**518.234.437,00**
47	**Jumlah Belanja Daerah (36+43+46)**		**1.125.539.911.781,00**	**1.042.746.385.172,00**	**92,64**	**852.231.727.827,45**
48	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.3**				
49	Belanja Bagi Hasil	5.1.3.1	1.578.000.000,00	1.397.184.152,00	88,54	1.478.781.514,00
50	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.2	255.815.941.760,00	262.262.777.760,00	102,52	258.077.197.709,00
51	**Jumlah Belanja Transfer (49+50)**		**257.393.941.760,00**	**263.659.961.912,00**	**102,43**	**259.555.979.223,00**
52	**JUMLAH BELANJA DAERAH DAN TRANSFER (47 + 51)**		**1.382.933.853.541,00**	**1.306.406.347.084,00**	**94,47**	**1.111.787.707.050,45**
53	**SURPLUS/(DEFISIT) (28-52)**		**(89.822.270.263,59)**	**(16.141.874.332,90)**	**17,97**	**37.389.628.506,67**
54	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
55	**Penerimaan Pembiayaan**	**5.1.4.1**				
56	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		91.222.270.263,59	91.222.120.486,59	100,00	55.818.571.756,92
57	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		100.000.000,00	7.997.000,00	8,00	14.070.000,00
58	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (56+57)**		**91.322.270.263,59**	**91.230.117.486,59**	**99,90**	**55.832.641.756,92**
59	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.1.4.2**				
60	Penyertaan Modal Daerah		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
61	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (60)**		**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000.000,00**
62	**PEMBIAYAAN NETTO (58-60)**		**89.822.270.263,59**	**89.730.117.486,59**	**99,90**	**53.832.641.756,92**
63	**SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SiKPA) (53+62)**	**5.1.5**	**0,00**	**73.588.243.153,69**		**91.222.270.263,59**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(*AUDITED*)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	91.222.270.263,59	55.815.539.698,92
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	91.222.120.486,59	55.818.571.756,92
3	**Sub Total (1 – 2)**		**149.777,00**	**(3.032.058,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	5.2.3	73.588.243.153,69	91.222.270.263,59
5	**Sub Total (3 + 4)**		**73.588.392.930,69**	**91.219.238.205,59**
6	Koreksi Pembukuan Tahun sebelumnya	5.2.4	(149.777,00)	3.032.058,00
7	Lain Lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**5.2.5**	**73.588.243.153,69**	**91.222.270.263,59**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Flores Timur

Ir. Antonius Doni Dihen

III. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	**ASET**	**5.3.1**		
2	**ASET LANCAR**	**5.3.1.1**		
3	Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	64.044.049.010,12	87.618.943.155,88
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	12.047.400,00	32.730.341,17
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	881.315,47	313.305.306,00
7	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.4	4.350.452.660,00	0,00
8	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	417.644.719,10	820.491.133,44
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	1.257.278.218,00	238.039.255,00
10	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.7	3.424.303.075,00	2.192.125.949,00
11	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.8	457.154.618,02	649.696.313,12
12	Piutang	5.3.1.1.2		
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	10.308.358.788,59	7.956.175.393,00
14	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	1.495.454.608,00	1.275.588.678,00
15	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	11.168.828.225,69	2.193.682.658,00
16	Piutang Transfer	5.3.1.1.2.4	3.038.322.842,00	5.990.992.222,00
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.2.5	(7.825.026.414,42)	(6.661.133.819,80)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.3	8.076.003.974,00	0,00
19	Persediaan	5.3.1.1.4	31.935.412.173,01	49.774.051.229,28
20	**JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d. 19)**		**132.161.165.212,58**	**152.394.687.814,09**
21	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.3.1.2**		
22	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**			
23	Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1	31.655.755.302,00	31.663.752.302,00
24	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.2	(31.655.755.302,00)	(31.663.752.302,00)
25	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (23+24)**		0,00	0,00
26	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.3	72.626.589.622,54	68.867.011.474,64
27	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen (26)**		**72.626.589.622,54**	**68.867.011.474,64**
28	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (25+27)**		**72.626.589.622,54**	**68.867.011.474,64**
29	**ASET TETAP**	**5.3.1.3**		
30	Tanah	5.3.1.3.1	119.618.945.942,00	119.528.945.942,00
31	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	414.063.510.860,23	359.801.669.125,24
32	Bangunan dan Gedung	5.3.1.3.3	662.802.554.635,37	566.547.370.880,61
33	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.437.946.252.083,54	1.381.253.387.189,43
34	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	13.657.826.465,70	11.377.622.059,04
35	Kontruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	14.315.185.935,00	36.255.812.518,13
36	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.601.189.536.336,03)	(1.493.213.054.023,20)
37	**JUMLAH ASET TETAP (30 s.d. 36)**		**1.061.214.739.585,81**	**981.551.753.691,25**
38	**PROPERTI INVESTASI**	**5.3.1.4**		
39	Properti Investasi Tanah	5.3.1.4,1	102.000.000,00	102.000.000,00
40	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.4,2	1.083.114.179,00	1.083.114.179,00
41	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4,3	(89.956.699,15)	(73.962.699,16)
42	**JUMLAH PROPERTI INVESTASI (39+41)**		**1.095.157.479,85**	**1.111.151.479,84**
43	**ASET LAINNYA**	**5.3.1.5**		
44	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.5.1	11.631.433.322,95	9.684.859.402,84

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
45	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	1.534.035.815,00	1.534.035.815,00
46	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	0,00	1.338.550.000,00
47	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	83.740.250.599,70	82.110.497.523,74
48	**JUMLAH ASET LAINNYA (44 s.d. 47)**		**96.905.719.737,65**	**94.667.942.741,58**
49	**JUMLAH ASET (20+28+37+42+48)**		**1.364.003.371.638,43**	**1.298.592.547.201,40**
50	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**		
51	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.3.2.1**		
52	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	375.567.862,01	643.061.190,02
53	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	356.000,00	356.000,00
54	Utang Belanja	5.3.2.1.3	8.986.557.673,40	3.911.420.434,43
55	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (52 s.d. 54)**		**9.362.481.535,41**	**4.554.837.624,45**
56	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			
57	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
58	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
59	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (57+58)**		0,00	0,00
60	**JUMLAH KEWAJIBAN (55+59)**		**9.362.481.535,41**	**4.554.837.624,45**
61	**EKUITAS**	**5.3.3**		
62	Ekuitas		1.354.640.890.103,02	1.294.037.709.576,95
63	**JUMLAH EKUITAS (62)**		**1.354.640.890.103,02**	**1.294.037.709.576,95**
64	**KEWAJIBAN DAN EKUITAS (60+63)**		**1.364.003.371.638,43**	**1.298.592.547.201,40**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Flores Timur

Ir. Antonius Doni Dihen

IV. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL						
1	**PENDAPATAN - LO**	**5.4.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**5.4.1.1**				
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	18.667.086.360,00	16.291.738.056,00	2.375.348.304,00	14,58
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	3.849.686.350,00	20.085.729.256,00	(16.236.042.906,00)	(80,83)
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	4.270.908.241,54	3.845.122.715,00	425.785.526,54	11,07
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	40.316.713.862,13	6.618.787.892,17	33.697.925.969,96	509,13
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO (3 s.d. 6)**		**67.104.394.813,67**	**46.841.377.919,17**	**20.263.016.894,50**	**43,26**
8	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**5.4.1.2**				
9	**Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO**	**5.4.1.2.1**				
10	Dana Bagi Hasil Pajak-LO		3.066.558.264,00	4.924.992.643,00	(1.858.434.379,00)	(37,73)
11	Dana Bagi Hasil SDA-LO		2.917.873.000,00	3.103.699.012,00	(185.826.012,00)	(5,99)
12	Dana Alokasi Umum-LO		680.488.339.610,00	616.204.723.700,00	64.283.615.910,00	10,43
13	Dana Alokasi Khusus Fisik-LO		166.392.708.767,00	108.044.563.225,00	58.348.145.542,00	54,00
14	Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO		143.643.272.017,00	144.434.295.814,00	(791.023.797,00)	(0,55)
15	**Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO (10 s.d. 14)**		**996.508.751.658,00**	**876.712.274.394,00**	**119.796.477.264,00**	**13,66**
16	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO**	**5.4.1.2.2**				
17	Dana Insentif Daerah-LO		5.633.738.000,00	0,00	5.633.738.000,00	0,00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO (17)**		**5.633.738.000,00**	**0,00**	**5.633.738.000,00**	**0,00**
19	**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO**	**5.4.1.2.3**				
20	Pendapatan Bagi Hasil-LO		28.476.915.529,00	27.208.551.189,00	1.268.364.340,00	4,66
21	Bantuan Keuangan-LO		3.615.250.000,00	0,00	3.615.250.000,00	0,00
22	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO (20+21)**		**32.092.165.529,00**	**27.208.551.189,00**	**4.883.614.340,00**	**17,95**
23	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-LO (15+18+22)**		**1.034.234.655.187,00**	**903.920.825.583,00**	**130.313.829.604,00**	**14,42**
24	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO**	**5.4.1.3**				
25	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	12.103.551.449,74	9.816.140.080,48	2.287.411.369,26	23,30
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	12.826.069.411,00	12.088.548.316,00	737.521.095,00	6,10
27	**JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO (25+26)**		**24.929.620.860,74**	**21.904.688.396,48**	**3.024.932.464,26**	**13,81**
28	**JUMLAH PENDAPATAN - LO (7+23+27)**		**1.126.268.670.861,41**	**972.666.891.898,65**	**153.601.778.962,76**	**15,79**
29	**BEBAN**	**5.4.2**				
30	**BEBAN OPERASI**					
31	Beban Pegawai	5.4.2.1	514.613.540.854,00	445.757.474.172,80	68.856.066.681,20	15,45
32	Beban Persediaan	5.4.2.2	167.658.475.278,87	88.477.366.223,26	79.181.109.055,61	89,49
33	Beban Jasa	5.4.2.3	81.119.296.663,00	88.905.390.966,00	(7.786.094.303,00)	(8,76)
34	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	1.811.707.856,00	2.348.743.125,46	(537.035.269,46)	(22,86)
35	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	46.825.798.831,00	48.589.932.105,00	(1.764.133.274,00)	(3,63)

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
36	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.6	5.331.368.726,00	2.106.466.928,00	3.224.901.798,00	153,10
37	Beban Hibah	5.4.2.7	51.044.922.123,00	42.583.809.667,00	8.461.112.456,00	19,87
38	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8	214.362.291,00	207.542.820,00	6.819.471,00	3,29
39	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9	111.787.926.062,12	87.478.838.446,20	24.309.087.615,92	27,79
40	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.10	1.163.892.594,61	804.514.129,00	359.378.465,61	44,67
41	Beban Transfer	5.4.2.11	79.891.279.912,00	79.372.289.874,00	518.990.038,00	0,65
42	Beban Lain-Lain	5.4.2.12	7.997.000,00	0,00	7.997.000,00	0,00
43	**JUMLAH BEBAN OPERASI (31 s.d. 42)**		**1.061.470.568.191,60**	**886.632.368.456,72**	**174.838.199.734,88**	**19,72**
44	**SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (28 – 43)**		**64.798.102.669,81**	**86.034.523.441,93**	**(21.236.420.772,12)**	**(24,68)**
KEGIATAN NON-OPERASIONAL						
45	**Surplus Non-Operasional – LO**	**5.4.3.1**				
46	Surplus Dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO		10.000.000,00	1.339.805.101,00	(1.329.805.101,00)	(99,25)
47	**Jumlah Surplus Non-Operasional – LO (46)**		**10.000.000,00**	**1.339.805.101,00**	**(1.329.805.101,00)**	**(99,25)**
48	**Defisit Non-Operasional – LO**	**5.4.3.2**				
49	Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO		1.199.640.795,89	546.936.600,68	652.704.195,21	119,34
50	**Jumlah Defisit Non-Operasional – LO (49)**		**1.199.640.795,89**	**546.936.600,68**	**652.704.195,21**	**119,34**
51	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL (47 – 50)**	**5.4.3**	**(1.189.640.795,89)**	**792.868.500,32**	**(1.982.509.296,21)**	**(250,04)**
52	**POS LUAR BIASA**	**5.4.4**				
53	Pendapatan Luar Biasa – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Beban Luar Biasa – LO		2.485.870.735,40	0,00	2.485.870.735,40	0,00
55	**JUMLAH POS LUAR BIASA**		**(2.485.870.735,40)**	**0,00**	**(2.485.870.735,40)**	**0,00**
56	**SURPLUS/DEFISIT – LO (44+51+55)**	**5.4.5**	**61.122.591.138,52**	**86.827.391.942,25**	**(25.704.800.803,73)**	**(29,60)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



V. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas**			
3	Pendapatan Pajak Daerah		16.314.902.964,41	15.068.129.862,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		3.629.820.420,00	24.458.316.606,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.013.815.603,00	3.845.122.715,00
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		33.839.224.934,10	6.833.251.089,12
7	Dana Perimbangan		997.182.521.658,00	877.276.047.385,00
8	Dana Insentif Daerah (DID)		5.633.738.000,00	-
9	Dana Desa		183.768.682.000,00	180.183.689.349,00
10	Bantuan Keuangan		35.044.834.909,00	29.238.171.069,00
11	Pendapatan Hibah		10.862.851,59	50.000.000,00
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		12.826.069.411,00	12.088.548.316,00
13	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 12)**		**1.290.264.472.751,10**	**1.149.041.276.391,12**
14	**Arus Keluar Kas**			
15	Belanja Pegawai		511.746.215.171,00	446.582.102.987,00
16	Belanja Barang dan Jasa		279.301.125.411,00	258.213.655.046,45
17	Belanja Hibah		59.165.926.097,00	43.137.517.667,00
18	Belanja Bantuan Sosial		214.362.291,00	224.278.770,00
19	Belanja Tak Terduga		2.423.055.403,00	518.234.437,00
20	Bagi Hasil		1.397.184.152,00	1.478.781.514,00
21	Bantuan Keuangan		262.262.777.760,00	258.077.197.709,00
22	**Jumlah Arus Keluar Kas (15 s.d 21)**		**1.116.510.646.285,00**	**1.008.231.768.130,45**
23	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI (13-22)**		**173.753.826.466,10**	**140.809.508.260,67**
24	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**5.5.2**		
25	**Arus Masuk Kas**			
26	Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		0,00	136.059.166,00
27	**Jumlah Arus Masuk Kas (26)**		**0,00**	**136.059.166,00**
28	**Arus Keluar Kas**			
29	Belanja Modal – Tanah		90.000.000,00	0,00
30	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		48.525.952.256,00	29.293.431.301,00
31	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		102.571.655.870,00	38.537.628.682,00
32	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan		36.585.207.223,00	33.172.488.493,00
33	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		2.122.885.450,00	2.552.390.444,00
34	Belanja Modal - Aset Lainnya		0,00	0,00
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
36	**Jumlah Arus Keluar Kas (29 s.d 35)**		**191.395.700.799,00**	**105.555.938.920,00**
37	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (27-36)**		**(191.395.700.799,00)**	**(105.419.879.754,00)**

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
38	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**5.5.3**		
39	**Arus Masuk Kas**			
40	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		7.997.000,00	14.070.000,00
41	**Jumlah Arus Masuk Kas (40)**		**7.997.000,00**	**14.070.000,00**
42	**Arus Keluar Kas**			
43	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
44	**Jumlah Arus Keluar Kas (43)**		**0,00**	**0,00**
45	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (40-44)**		**7.997.000,00**	**14.070.000,00**
46	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**5.5.4**		
47	**Arus Masuk Kas**			
48	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		40.241.421.316,30	17.052.340.002,91
49	Kiriman Uang Masuk		0,00	286.105.375,00
50	**Jumlah Arus Masuk Kas (48+49)**		**40.241.421.316,30**	**17.338.445.377,91**
51	**Arus Keluar Kas**			
52	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		40.508.914.644,30	17.051.719.882,00
53	Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		0,00	8.688.838,00
54	Kiriman Uang Keluar		0,00	109.051,00
55	**Jumlah Arus Keluar Kas (52 s.d 54)**		**40.508.914.644,30**	**17.060.517.771,00**
56	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (50-55)**		**(267.493.328,00)**	**277.927.606,91**
57	**Kenaikan / (Penurunan) Kas (23+37+45+56)**	**5.5.5**	**(17.901.370.660,90)**	**35.681.626.113,58**
58	**Saldo Awal Kas**		**91.865.331.453,61**	**56.180.673.282,03**
59	**Koreksi SILPA Tahun Lalu**		**(149.777,00)**	**3.032.058,00**
60	**Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK**		**0,00**	**0,00**
61	**Saldo Akhir Kas (57+58+59+60)**		**73.963.811.015,71**	**91.865.331.453,61**
	Saldo Akhir Kas terdiri dari:			
	- Kas di Kas Daerah		64.044.049.010,12	87.618.943.155,88
	- Kas di Bendahara Penerimaan		12.047.400,00	32.730.341,17
	- Kas di Bendahara Pengeluaran		881.315,47	313.305.306,00
	- Kas di BLUD		4.350.452.660,00	0,00
	- Kas Dana BOS		417.644.719,10	820.491.133,44
	- Kas Dana Kapitasi pada FKTP		1.257.278.218,00	238.039.255,00
	- Kas Dana BOK Puskesmas		3.424.303.075,00	2.192.125.949,00
	- Kas Lainnya		457.154.618,02	649.696.313,12

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Flores Timur

Ir. Antonius Doni Dihen

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Reff CaLK	2024	2023
1	**Ekuitas Awal**	**5.6.1**	**1.294.037.709.576,95**	**1.277.144.833.681,69**
2	**Surplus/(Defisit) LO**	**5.6.2**	**61.122.591.138,52**	**86.827.391.942,25**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:**	**5.6.3**	**(519.410.612,45)**	**(69.934.516.046,99)**
4	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar		1.864.733.043,11	186.381.355,07
5	Koreksi Ekuitas - Investasi		-	(1.242.769,68)
6	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		(1.734.592.105,15)	(10.713.568.066,74)
7	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(1.070.840.000,00)	-
8	Koreksi Ekuitas - Kewajiban		1.444.062.853,44	-
9	Koreksi Ekuitas - Lainnya		(1.022.774.403,85)	(59.406.086.565,64)
10	**Ekuitas Akhir**	**5.6.4**	**1.354.640.890.103,02**	**1.294.037.709.576,95**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Flores Timur

Ir. Antonius Doni Dihen

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Laporan

1.1.1. Maksud

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 189 dan Pasal 193 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Kedua regulasi ini mewajibkan entitas pelaporan, yaitu Pemerintah Daerah, untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, penyusunan laporan ini juga mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara. Antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Juga termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi komitmen bersama. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola otonomi daerah secara efektif dan efisien. Ini mencakup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antardaerah, serta pemanfaatan potensi daerah. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah keuangan daerah, yang mencakup penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan ini digunakan untuk:

a. Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan;

b. Menilai kondisi keuangan;

c. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran; dan

d. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap entitas pelaporan wajib menyajikan upaya yang telah dilakukan beserta hasil yang dicapai secara sistematis dan terstruktur dalam satu periode pelaporan, guna memenuhi prinsip akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan kesinambungan antargenerasi.

1.1.2. Tujuan

Pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan mendukung pengambilan keputusan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

a. Kecukupan penerimaan untuk membiayai pengeluaran;

b. Kesesuaian antara perolehan dan penggunaan sumber daya dengan anggaran;

c. Penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai;

d. Cara pendanaan dan pemenuhan kebutuhan kas;

e. Posisi keuangan jangka pendek dan panjang; dan

f. Perubahan kondisi keuangan selama periode pelaporan.

Laporan ini juga memiliki fungsi prediktif, yaitu membantu memperkirakan kebutuhan sumber daya, hasil yang akan dicapai, serta risiko dan ketidakpastian ke depan. Selain itu laporan keuangan menunjukkan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai anggaran penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan memuat informasi tentang:

a. Aset, Kewajiban dan Ekuitas;

b. Pendapatan, Belanja dan Transfer;

c. Arus Kas;

d. Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan

e. Perubahan Ekuitas

1.2. Landasan Hukum

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024;
q. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
r. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
s. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
2.4. *Mandatory Spending* dalam Penyusunan APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

4.5. Kebijakan Akuntansi

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Transfer

5.1.4. Pembiayaan

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

5.2. Laporan Perubahan SAL

5.2.1. Perubahan SAL

5.3. Neraca

5.3.1. Aset

5.3.2. Kewajiban

5.3.3. Ekuitas

5.4. Laporan Operasional

5.4.1. Pendapatan

5.4.2. Beban

5.4.3. Kegiatan Non Operasional

5.4.4. Pos Luar Biasa

5.4.5. Surplus/Defisit

5.5. Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas dari Operasi

5.5.2. Arus Kas dari Investasi

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1. Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro mencerminkan perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar secara luas. Bagi Pemerintah Daerah, ekonomi makro berfungsi sebagai alat untuk menetapkan dan mengevaluasi kebijakan, khususnya dalam alokasi sumber daya dan penetapan target pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis ekonomi makro digunakan untuk menentukan cara terbaik dalam mencapai target kebijakan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja, dan keseimbangan neraca secara berkelanjutan.

Pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro yang diperkirakan terjadi hingga tahun 2024. Oleh karena itu, realisasi pendapatan perlu dianalisis secara berkala, terutama setiap triwulan, agar respons terhadap perubahan ekonomi lebih akurat.

Untuk itu, diperlukan kajian berdasarkan data indikator ekonomi makro, kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis dan asumsi utama sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi: 3,15%;
b. Tingkat Inflasi: 4,14%;
c. PDRB Harga Berlaku: Rp6.062.050,8; dan
d. PDRB ADHK: Rp3.695.629,3.

2.2. Kebijakan Keuangan

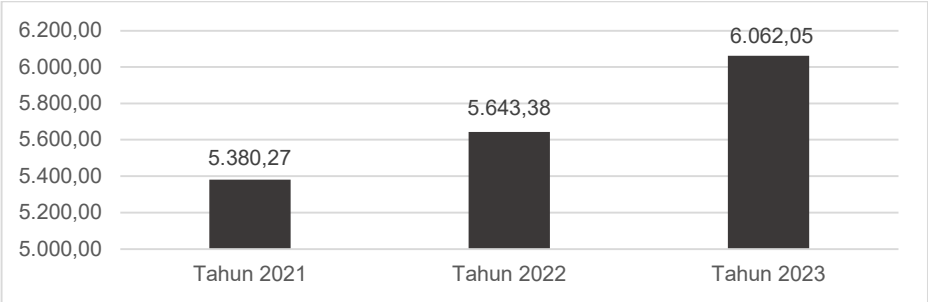
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator utama dalam menilai perkembangan ekonomi suatu daerah secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber dayanya selama periode tertentu dan digunakan untuk menilai kinerja perekonomian wilayah tersebut. PDRB terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB): Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga aktual pada tahun berjalan; dan
b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK): Menggambarkan nilai tambah dengan menggunakan harga tetap pada tahun dasar, sehingga dapat mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi.

Data PDRB ADHB Kabupaten Flores Timur Tahun 2021–2023 ditampilkan pada grafik berikut:

Gambar 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku



Sumber: BPS, Kabupaten Flores Timur dalam Angka, 2024

Berdasarkan data yang tersedia, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Flores Timur menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2023.

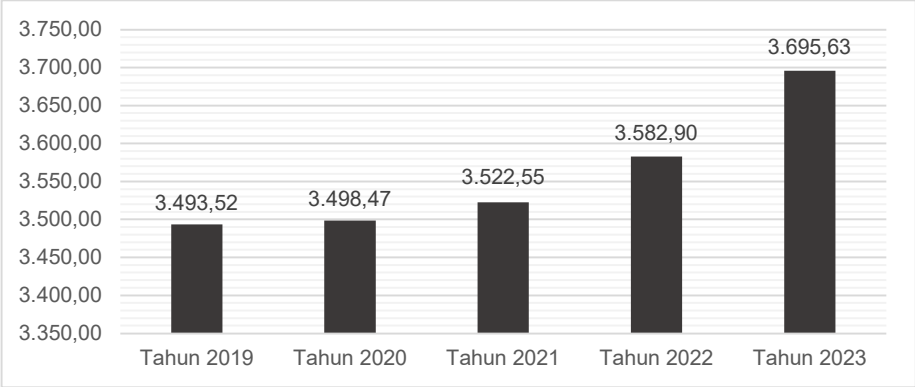
a. Tahun 2021: Rp5.380,27 miliar;

b. Tahun 2022: Rp5.643,38 miliar; dan

c. Tahun 2023: Rp6.062,05 miliar

Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan nilai tambah barang dan jasa di wilayah Flores Timur dari tahun ke tahun. Selanjutnya, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Flores Timur Tahun 2019–2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan



Sumber: BPS, Kabupaten Flores Timur dalam Angka, 2024

PDRB ADHK Kabupaten Flores Timur tahun 2019-2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebesar Rp3.493,52, pada tahun 2020 menjadi Rp.3.498,47 pada tahun 2021 menjadi Rp3.522,53, pada Tahun 2022 meningkat menjadi Rp3.582,90 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi Rp3.695,63.

a. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa. Nilai tambah yang dihasilkan dari setiap sektor mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap aktivitas ekonomi tertentu, serta menggambarkan peran masing-masing sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan komposisi kontribusi sektor-sektor seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan,

dan jasa dalam keseluruhan perekonomian daerah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Distribusi PDRB per Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	Kontribusi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 435,92	1 446,38	1.510,00	1.631,01	1.760,67
2	Pertambangan dan Penggalian	46,79	47,23	47,61	48,01	50,26
3	Industri Pengolahan	44,28	44,14	44,35	46,58	56,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,93	4,42	4,52	5,08	5,87
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,40	1,45	1,55	1,68	1,72
6	Konstruksi	251,27	225,50	239,35	249,78	269,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	451,38	437,46	438,69	473,33	535,79
8	Transportasi dan Pergudangan	282,81	274,06	277,20	299,06	325,79
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	4,84	4,04	4,07	4,48	5,08
10	Informasi dan Komunikasi	229,30	259,78	251,81	262,47	272,54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	198,16	217,04	233,53	254,49	264,16
12	Real Estate	162,89	159,77	157,82	170,08	179,52
13	Jasa Perusahaan	8,20	5,39	4,26	4,47	4,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	896,88	931,69	967,16	974,00	1.012,21
15	Jasa Pendidikan	842,50	850,93	837,79	852,03	924,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,77	135,07	145,52	147,20	164,79
17	Jasa Lainnya	262,73	225,18	215,04	219,63	227,89
PDRB		**3810,13**	**3823,15**	**5.380,27**	**5.643,38**	**6.062,04**

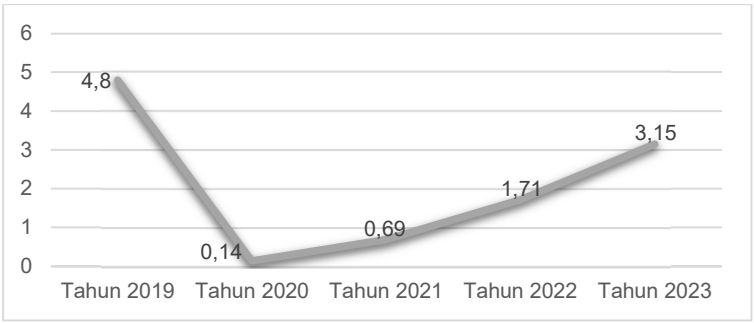
Sumber: BPS, Kabupaten Flores Timur dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023, dengan nilai sebesar Rp1.760,67 miliar. Sementara itu, kontribusi terendah berasal dari sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang hanya sebesar Rp1,27 miliar.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah yang tercermin dari kenaikan pendapatan nasional atau regional. Di Kabupaten Flores Timur, laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun, sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur



Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur

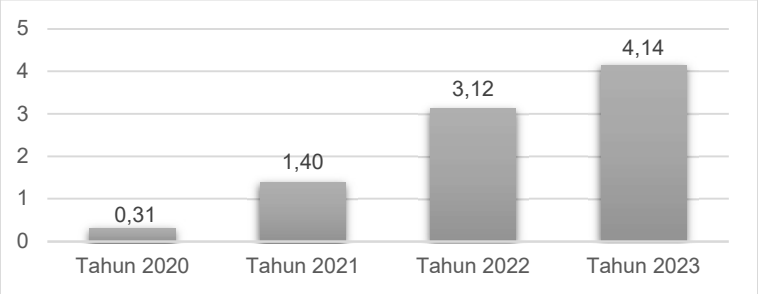
Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur pada periode 2019–2023 menunjukkan pola fluktuatif. Tahun 2019 tumbuh sebesar 4,8%,

namun turun tajam pada 2020 menjadi 0,145% akibat dampak pandemi. Pada 2021, pertumbuhan sedikit meningkat menjadi 0,69%, kemudian naik lagi menjadi 1,71% di tahun 2022, dan mencapai 3,15% pada tahun 2023.

2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, kelebihan likuiditas, spekulasi, dan gangguan distribusi barang. Inflasi menjadi indikator perubahan harga yang terjadi secara berkelanjutan. Inflasi dibagi menjadi empat kategori berdasarkan tingkat kenaikan harga per tahun: ringan (<10%), sedang (10–30%), berat (30–100%), dan hiperinflasi (>100%). Data inflasi di Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.4 Inflasi Kabupaten Flores Timur



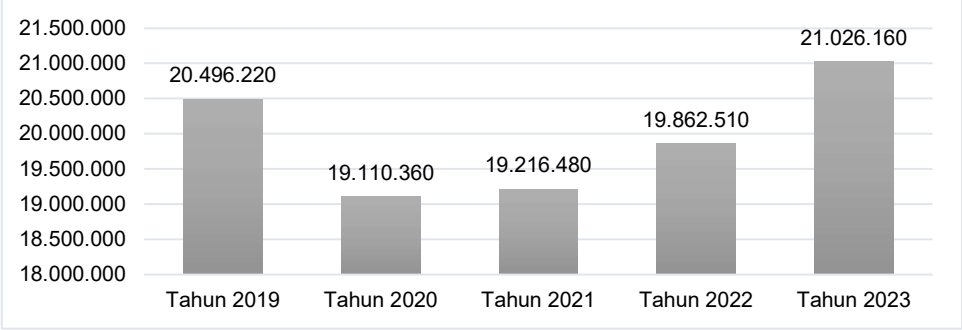
Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan data, inflasi di Kabupaten Flores Timur meningkat dari 1,40% pada tahun 2021 menjadi 3,12% pada 2022, lalu mencapai 4,14% pada 2023. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan, mempermudah masuknya barang impor, meningkatkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum serta operasi pasar, dan mengawasi distribusi barang masuk dan keluar wilayah Kabupaten Flores Timur.

2.1.3. Pendapatan

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah, dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Data pendapatan per kapita Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.5 Pendapatan Perkapita Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Flores Timur

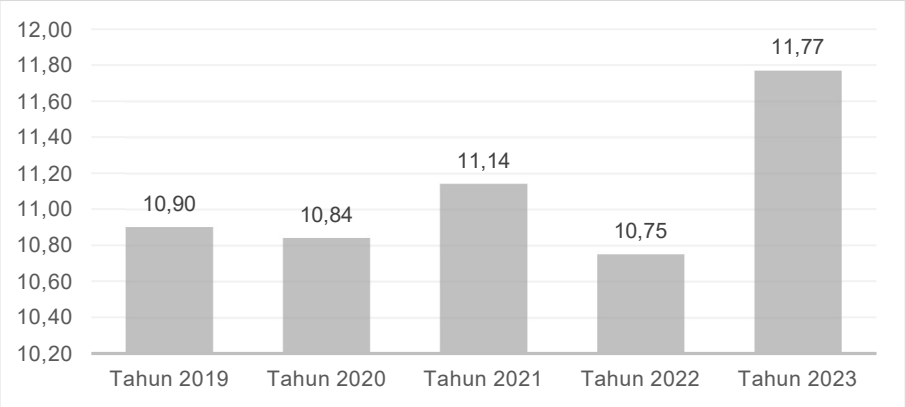
Berdasarkan data di atas, pendapatan per kapita Kabupaten Flores Timur mengalami fluktuasi antara tahun 2019 hingga 2023, dengan nilai Rp20.496.220 pada 2019, turun menjadi Rp19.110.360 pada 2020, lalu meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp21.026.160 pada 2023. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, upaya yang dilakukan meliputi perluasan lapangan kerja dan penguatan bantuan modal bagi masyarakat setempat.

2.1.4. Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Flores Timur mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,144%. Pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 11,77% dengan garis kemiskinan Rp405.486,00 per kapita per bulan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 ini lebih rendah dari persentase penduduk miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Nasional.

Garis kemiskinan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2019 sebesar Rp279.2687 terus meningkat menjadi Rp364.117 pada tahun 2022. Data persentase penduduk miskin Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.6 Penduduk Miskin Kabupaten Flores Timur dari Tahun 2019 s.d. 2023



*Sumber: **BPS** Kabupaten **Flores Timur***

Adapun profil kemiskinan di Kabupaten Flores Timur dijelaskan lebih lanjut melalui tabel berikut.

Tabel 2.2 Profil Kemiskinan Kabupaten Flores Timur

No.	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk miskin	28,90	28,08	30,93
2	Persentase penduduk miskin (%)	11,14	10,75	11,77
3	Indeks kedalaman kemiskinan	1,32	1,54	1,74
4	Indeks keparahan kemiskinan	0,23	0,39	0,37
5	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	329,340	364,117	405,486

Sumber BPS Kabupaten Flores Timur

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan, yaitu mencapai 11,77% pada tahun 2023, naik 1,02% dari 10,75%

pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, persentase ini menempatkan Flores Timur sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan kedua terendah setelah Kota Kupang di Provinsi NTT. Rincian lebih lanjut tentang garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/ Bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Sumba Barat	395.592	422,382	37,06	37,15	27,47	27,17
Sumba Timur	414.832	443,502	75,28	75,66	28,22	28,08
Kupang	425.75	471,901	88,02	90,23	21,7	21,78
Timor Tengah Selatan	382.167	420,783	120,45	119,51	25,45	25,18
Timor Tengah Utara	440.155	485,744	55,88	57,19	21,5	21,85
Belu	416.519	459,111	33,98	33,19	14,84	14,30
Alor	400.858	438,013	42,30	41,91	20,25	19,97
Lembata	464.542	508,575	37,88	37,94	25,18	24,78
Flores Timur	364.117	405,486	28,08	30,93	10,75	11,77
Sikka	389.455	428,352	40,87	40,81	12,61	12,56
Ende	473.403	518,939	63,40	63,10	23	22,86
Ngada	435.916	477,84	20,14	20,57	11,93	12,06
Manggarai	407.261	443,908	69,68	70,00	19,84	19,69
Rote Ndao	372.179	410,491	52,43	53,55	27,45	27,05
Manggarai Barat	405.746	444,474	49,95	49,95	17,15	16,82
Sumba Tengah	341513	362,089	24,49	24,24	32,51	31,78
Sumba Barat Daya	432.375	475,879	98,50	101,40	27,16	27,48
Nagekeo	422.982	472,041	18,01	18,57	12,05	12,33
Manggarai Timur	411.670	446,504	74,55	74,40	25,35	25,06
Sabu Raijua	480.844	526,831	30,00	30,43	28,73	28,37
Malaka	419.292	458,399	30,48	29,19	15,26	14,42
Kota Kupang	648.982	732.921	40,2	41,2	8,61	8,61
Nusa Tenggara Timur	460.823	507.203	1.131,62	1.141,11	20,05	19,96

Sumber BPS Kabupaten Flores Timur

Garis kemiskinan diukur dari belanja per kapita per bulan. Belanja ditentukan oleh pendapatan. sehingga perlakuan yang diperlukan haruslah memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian sektor ekonomi seperti pertanian, Pertambangan, industri, perdagangan, Koperasi dan UKM memainkan peranan yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.Upaya dalam penurunan kemiskinan:

a. Menyempurnakan program perlindungan sosial;

b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar;

c. Pemberdayaan masyarakat; dan

d. Pembangunan yang inklusif.

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gabungan dari tiga indikator utama, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita. IPM mengukur pencapaian masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk menilai standar hidup yang layak. Data usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil per kapita, serta IPM Kabupaten Flores Timur tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Komponen				IPM
	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata–rata Lamanya Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Riil per kapita disesuaikan (000 Rp)	
Sumba Barat	71,16	13,26	6,92	7.993	66,82
Sumba Timur	71,31	12,86	7,57	10.008	69,63
Kupang	69,24	13,89	7,42	8.220	67,51
Timor Tengah Selatan	71,02	12,61	6,97	7.450	65,39
Timor Tengah Utara	70,75	13,35	8,16	6.889	66,56
Belu	73,97	12,31	7,39	7.907	67,50
Alor	70,55	12,28	8,45	7.565	66,82
Lembata	73,00	12,46	8,26	7.962	68,41
Flores Timur	73,57	12,95	8,04	8.223	69,24
Sikka	73,97	13,66	6,98	8.678	69,41
Ende	72,74	13,82	8,20	9.739	71,77
Ngada	74,12	12,74	8,82	9.350	71,61
Manggarai	72,20	13,71	7,63	7.903	68,48
Rote Ndao	69,55	13,22	7,82	7.061	65,79
Manggarai Barat	72,59	12,53	7,94	7.913	67,84
Sumba Tengah	69,21	13,13	7,00	6.484	63,63
Sumba Barat Daya	68,99	13,10	6,38	7.080	63,74
Nagekeo	72,24	12,59	8,14	8.706	69,03
Manggarai Timur	72,79	12,59	7,70	6.276	65,05
Sabu Raijua	66,46	13,18	6,98	5.899	61,37
Malaka	71,28	12,82	7,13	6.569	64,50
Kota Kupang	74,66	16,44	11,62	13.762	82,77
Nusa Tenggara Timur	71,57	13,22	7,82	8.248	68,40

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup yang dibangun berdasarkan tiga dimensi utama, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir; dimensi pengetahuan melalui gabungan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; serta dimensi kehidupan layak diukur berdasarkan pengeluaran per kapita sebagai indikator daya beli masyarakat. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Flores Timur mencapai angka 69,24, menempatkannya pada peringkat keenam di antara kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di atas rata-rata provinsi sebesar 68,40. Meskipun demikian, peningkatan IPM masih menghadapi kendala terkait keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, seperti jumlah tenaga pengajar yang belum memadai, serta sarana dan prasarana kesehatan yang perlu diperkuat, termasuk pembangunan puskesmas dan peningkatan tenaga medis.

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah mencakup semua hak, kewajiban, dan kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang, meliputi pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran, serta pengelolaan kekayaan daerah sendiri maupun yang dikuasai untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dengan pembagian kewenangan serta sumber pendanaan yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hubungan tersebut meliputi pemberian pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, serta pinjaman, hibah, dan insentif fiskal. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama di era

otonomi daerah yang menuntut pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, berbasis sistem anggaran kinerja. Oleh karena itu, rencana pendapatan harus disusun secara cermat berdasarkan potensi dan kemampuan realisasi, sedangkan belanja daerah harus direncanakan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan dengan proses perhitungan dan penetapan yang terukur, rasional, serta berlandaskan data potensi yang ada dan perkembangan ekonomi yang diperkirakan, sambil mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan strategis karena targetnya dapat diukur secara akurat dan pemungutannya langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jenis PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan sektor Pajak Daerah sebagai sumber utama penerimaan. Penetapan target pajak dan retribusi daerah mengacu pada kebijakan makro ekonomi daerah serta ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sementara itu, target pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah mempertimbangkan modal penyertaan dan realisasi tahun sebelumnya. Kebijakan PAD diarahkan pada peningkatan efektivitas optimalisasi sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat, pengelolaan aset daerah yang potensial, serta peningkatan manajemen keuangan.

Sementara itu, pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Desa, serta pendapatan bagi hasil pajak provinsi, diatur berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-128/PK/2023 dan Peraturan Gubernur terkait alokasi dana bagi hasil tahun 2023. Optimalisasi pendapatan transfer dilaksanakan dengan koordinasi aktif serta pemutakhiran data secara berkelanjutan dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, selain PAD dan pendapatan transfer, direncanakan pada 2024 mencakup pendapatan hibah dan dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Berdasarkan asumsi makro ekonomi dalam Kebijakan Umum Anggaran, telah ditetapkan target pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan seluruh sumber pendapatan tersebut.

Dalam menargetkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan asumsi ekonomi makro yang tertuang di dalam Kebijakan Umum Anggaran telah ditetapkan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Target Pendapatan Daerah

KODE	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	PAnggaran Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**49.890.020.639,00**	**55.299.582.639,00**	5.409.562.000,00	5,14
4.1.01	Pajak Daerah	17.460.890.000,00	17.460.890.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.728.914.924,00	5.728.914.924,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.845.122.715,00	3.845.122.715,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.855.093.000,00	28.264.655.000,00	5.409.562.000,00	10,58
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.212.651.099.000,00**	**1.222.927.550.127,41**	10.276.451.127,41	0,42
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.180.131.571.000,00	1.183.856.090.800,41	3.724.519.800,41	0,16
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.519.528.000,00	39.071.459.327,00	6.551.931.327,00	9,15
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**12.082.406.875,00**	**14.811.586.676,00**	2.729.179.801,00	10,15
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.082.406.875,00	14.811.586.676,00	2.729.179.801,00	10,15
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.274.623.526.514,00**	**1.293.038.719.442,41**	**18.415.192.928,41**	**0,72**

2.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah serta pengeluaran lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dan menjadi kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2024, belanja daerah diarahkan untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu "Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas," dengan fokus pada peningkatan produktivitas sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat. Belanja daerah juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing serta memperbaiki kualitas infrastruktur guna mempermudah akses terhadap sumber daya alam dan teknologi tepat guna, yang mendorong transformasi ekonomi menuju nilai tambah di sektor industri manufaktur dan jasa.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program dan kegiatan yang konkret, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, manfaat bagi masyarakat, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Belanja daerah harus mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2024, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Alokasi anggaran disesuaikan dengan target kinerja pelayanan publik berdasarkan prioritas

pembangunan, bukan berdasarkan pemerataan atau alokasi tahun sebelumnya. Fokus penganggaran diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, terutama urusan wajib dan mandatory spending serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program yang ada.

Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun 2024 meliputi: (a) optimalisasi anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan di bidang perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan; (b) alokasi belanja wajib pelayanan dasar, khususnya pendidikan minimal 20% dari total belanja; (c) peningkatan anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal, pengentasan stunting, dan kemiskinan ekstrim; (d) pengalokasian dana sesuai ketentuan pada Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan penggunaannya dengan prioritas pada pencapaian target pembangunan daerah; (e) dukungan anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC); (f) peningkatan kualitas belanja melalui pola penganggaran berbasis kinerja; dan (g) alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Kebijakan belanja daerah sampai dengan Perubahan Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp.1.382.933.853.541 mengalami kenaikan sebesar 8,49% dari sebelum perubahan sebesar Rp.1.274.723.526.514 Proyeksi atau perkiraan belanja daerah pada tahun 2024 dengan rincian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Perkiraan Belanja

Kode	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**846.912.557.403,00**	**916.107.571.223,00**	69.195.013.820,00	3,92
5.1.01	Belanja Pegawai	516.102.870.641,00	537.461.711.125,00	21.358.840.484,00	2,03
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.419.920.033,00	318.389.625.369,00	47.969.705.336,00	8,15
5.1.04	Belanja Subsidi	47.352.000,00	47.320.000,00	(32.000,00)	(0,03)
5.1.05	Belanja Hibah	60.174.414.729,00	59.994.414.729,00	(180.000.000,00)	(0,15)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	168.000.000,00	214.500.000,00	46.500.000,00	12,16
5.2	**BELANJA MODAL**	**169.583.027.351,00**	**203.897.389.578,00**	34.314.362.227,00	9,19
5.2.01	Belanja Modal Tanah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.094.401.746,00	50.846.577.597,00	10.752.175.851,00	11,82
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.097.683.854,00	112.934.826.490,00	16.837.142.636,00	8,05
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.175.135.871,00	37.875.179.611,00	6.700.043.740,00	9,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.125.805.880,00	2.150.805.880,00	25.000.000,00	0,58
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.500.000.000,00**	**5.534.950.980,00**	4.034.950.980,00	57,36
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	5.534.950.980,00	4.034.950.980,00	57,36
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**256.727.941.760,00**	**257.393.941.760,00**	666.000.000,00	0,13
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.578.000.000,00	1.578.000.000,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.149.941.760,00	255.815.941.760,00	666.000.000,00	0,13
	Jumlah Belanja	**1.274.723.526.514,00**	**1.382.933.853.541,00**	**108.210.327.027,00**	**4,07**

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Tahun anggaran 2024 berasal dari dua sumber penerimaan, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 merupakan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 tidak direncanakan pengeluaran pembiayaan. Skema Pembiayaan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Pembiayaan Daerah

KODE	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	PAnggaran Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**100.000.000,00**	**89.822.270.263,59**	**89.722.270.263,59**	**99,78**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**100.000.000,00**	**91.322.270.263,59**	91.222.270.263,59	**99,78**
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**1.500.000.000,00**	1.500.000.000,00	100
	Pembiayaan Netto	**100.000.000,00**	**89.822.270.263,59**	**89.722.270.263,59**	**99,78**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1. Capaian Target Pendapatan Daerah

Dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.293.111.583.277,00 terealisasi 99,78% atau senilai Rp1.290.264.472.751,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.8 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah	**1.293.111.583.277,00**	**1.290.264.472.751,10**	**99,78**
Pendapatan Asli Daerah	**55.299.582.639,00**	**55.797.763.921,51**	**100,90**
Pajak Daerah	17.460.890.000,00	16.314.902.964,41	93,44
Retribusi Daerah	5.728.914.924,00	3.629.820.420,00	63,36
Hasil Pengl. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.845.122.715,00	2.013.815.603,00	52,37
Lain-Lain PAD Yang Sah	28.264.655.000,00	33.839.224.934,10	119,72
Pendapatan Transfer	**1.222.927.550.127,00**	**1.221.629.776.567,00**	**99,89**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.183.856.090.800,00**	**1.186.584.941.658,00**	**100,23**
Dana Perimbangan	1.001.101.406.800,00	997.182.521.658,00	99,61
Dana Desa	177.120.946.000,00	183.768.682.000,00	103,75
Dana Insentif Daerah (DID)	5.633.738.000,00	5.633.738.000,00	100
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**39.071.459.327,00**	**35.044.834.909,00**	**89,69**
Pendapatan Bagi Hasil	38.921.459.327,00	31.429.584.909,00	80,75
Bantuan Keuangan	150.000.000,00	3.615.250.000,00	2.410,17

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	**14.884.450.511,00**	**12.836.932.262,59**	**86,24**
Pendapatan Hibah	72.863.835,00	10.862.851,00	14,91
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.811.586.676,00	12.826.069.411,00	86,59

2.3.2. Capaian Target Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan dana untuk Belanja Daerah sebesar Rp1.382.933.853.541,00 sampai dengan akhir tahun anggaran per 31 Desember 2024, direalisir 94,46% atau sebesar Rp1.306.361.367.284,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.9 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah	**1.382.933.853.541,00**	**1.306.406.347.084,00**	**94,47**
Belanja Operasi	**916.107.571.223,00**	**850.427.628.970,00**	**92,83**
Belanja Pegawai	537.461.711.125,00	511.746.215.171,00	95,22
Belanja Barang Dan Jasa	318.389.625.369,00	279.301.125.411,00	87,72
Belanja Subsidi	47.320.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	59.994.414.729,00	59.165.926.097,00	98,62
Belanja Bantuan Sosial	214.500.000,00	214.362.291,00	99,94
Belanja Modal	**203.897.389.578,00**	**189.895.700.799,00**	**93,13**
Tanah	90.000.000,00	90.000.000,00	100
Peralatan dan Mesin	50.846.577.597,00	48.525.952.256,00	95,44
Gedung dan Bangunan	112.934.826.490,00	102.571.655.870,00	90,82
Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.875.179.611,00	36.585.207.223,00	96,59
Aset Tetap Lainnya	2.150.805.880,00	2.122.885.450,00	98,70
Belanja Tak Terduga	**5.534.950.980,00**	**2.423.055.403,00**	**43,78**
Belanja Tak Terduga	5.534.950.980,00	2.423.055.403,00	43,78
Transfer Daerah	**257.393.941.760,00**	**263.659.961.912,00**	102,43
Bagi Hasil	**1.578.000.000,00**	**1.397.184.152,00**	**88,54**
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.578.000.000,00	1.397.184.152,00	88,54
Bantuan Keuangan	**255.815.941.760,00**	**262.262.777.760,00**	**102,52**
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	255.815.941.760,00	262.262.777.760,00	102,52
Jumlah Belanja Dan Transfer Daerah	**1.382.933.853.541,00**	**1.306.406.347.084,00**	**94,47**

2.4. *Mandatory Spending* dalam Penyusunan APBD Kabupaten Flores Timur

Mandatory spending adalah belanja tertentu atau pengeluaran daerah yang wajib dianggarkan oleh daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan undang-undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun *mandatory spending* pada Kabupaten Flores Timur diantaranya sebagai berikut.

2.4.1. *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Merupakan amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) ‘Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya

pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan selain mencerdaskan kehidupan bangsa juga untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan pada Pemerintah kabupaten Flores Timur.

Alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp421.986.142.049,00 dari total Anggaran Belanja Daerah pada APBD Perubahan sebesar Rp1.382.933.853.541,00 atau sebesar 30,51%. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut.

Tabel 2.10 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	APBD (Rp)	APBD-Perubahan(Rp)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	367.241.094.571,00	399.381.197.386,00
	1) Belanja operasi	327.394.445.236,00	343.363.813.368,00
	a. belanja pegawai	253.338.635.917,00	258.552.292.392,00
	b. belanja barang dan jasa	51.535.409.319,00	63.318.620.976,00
	c. belanja hibah	22.520.400.000,00	21.492.900.000
	2) Belanja Modal	39.846.649.335,00	56.017.384.018 ,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	3.290.359.280,00	3.694.117.742,00
	1) Belanja operasi	3.290.359.280,00	3.682.117.742,00
	a. belanja pegawai	2.243.021.410,00	2.375.654.872,00
	b. belanja barang dan jasa	1.047.337.870,00	1.306.462.870,00
	2) Belanja Modal	0,00	12.000.000,00
	c. Urusan Bidan Perpustakaan	13.663.798.034,00	13.779.382.495,00
	1) Belanja operasi	2.943.413.757,00	2.772.998.218,00
	a. belanja pegawai	2.085.580.511,00	1.834.442.137,00
	b. belanja barang dan jasa	857.833.246,00	938.556.081,00
	2) Belanja Modal	10.720.384.277,00	11.006.384.277,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.249.995.041,00	4.243.444.891,00
	1) Belanja operasi	4.086.100.041,00	4.243.444.891,00
	a. belanja pegawai	8.500.000,00	13.750.000,00
	b. belanja barang dan jasa	3.727.600.041,00	3.179.694.891,00
	c. belanja hibah	350.000.000,00	1.050.000.000,00
	2) Belanja Modal	163.895.000,00	0,00
	e Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan	887.999.535,00	887.999.535,00
	1) Belanja Transfer		
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	86.999.740,00	86.999.740,00
	3) Sub Kegitan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	800.999.795,00	800.999.795,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan	389.333.246.461,00	421.986.142.049,00
3.	Total Belanja Daerah	1.274.723.526.514,00	1.382.933.853.541,00
4.	Rasio Anggaran Pendidikan	30,54%	30,51%

2.4.2. *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kesehatan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di luar

belanja gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, telah mengalokasikan anggaran pada fungsi kesehatan sebesar Rp229.274.441.059,00 dari total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.382.933.853.541,00. Jumlah ini setara dengan 16,58% dari total belanja daerah, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian pembangunan di sektor kesehatan secara berkelanjutan. Dengan penjelasan dalam tabel berikut.

Tabel 2.11 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	APBD (Rp)	APBD-Perubahan(Rp)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	274.996.224.978,00	312.481.320.064,00
	1) Belanja Operasi;	188.259.540.039,00	219.350.397.836,00
	a. belanja pegawai;	103.382.989.885,00	116.847.051.672,00
	b. belanja barang dan jasa;	84.426.550.154,00	102.033.346.164,00
	e. belanja hibah;	450.000.000,00	470.000.000,00
	2) Belanja Modal	86.736.684.939,00	93.130.922.228,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan:	0,00	0,00
	1) Belanja Transfer		
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	2) Belanja Sub kegiatan	0,00	0,00
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a + b)	274.996.224.978,00	312.481.320.064,00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan	83.609.618.952,00	83.206.879.005,00
4	Anggaran Fungsi Kesehatan di Luar Gaji dan Tunjangan (a + b)	191.386.606.026,00	229.274.441.059,00
5	Total Belanja Daerah	1.274.723.526.514,00	1.382.933.853.541,00
6	Rasio Anggaran Kesehatan (6:5) x 100%	15,01%	16,58%

2.4.3. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Kesenjangan infrastruktur antar daerah di Indonesia masih terjadi di tahun 2024. Kondisi jalan misalnya, masih terdapat 116 daerah yang memiliki kondisi jalan tidak mantap di atas 50%. Untuk kondisi air minum dan sanitasi, masih terdapat daerah yang memiliki persentase rumah tangga dengan akses sumber air minum dan sanitasi layak di bawah 75% masing-masing sebanyak 123 dan 190 daerah.Oleh karena itu UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Transfer Umum (DTU) penggunaannya, minimal 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Mandatory spending fungsi infrastruktur adalah Belanja Infrastruktur yang merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar kecamatan pada wilayah Kabupaten Flores Timur.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Flores Timur dialokasikan sebesar Rp295.437.805.573,00 dari total belanja infrastruktur pelayanan publik daerah sebesar Rp1.017.995.584.754,00 atau sebesar 29,02%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Flores Timur dialokasikan sebesar Rp345.351.246.580,00 dari total belanja infrastruktur pelayanan publik daerah pada APBD Perubahan sebesar Rp1.125.539.911.781,00 atau sebesar 30,68%, sebagai berikut.

Tabel 2.12 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	APBD (Rp)	APBD-Perubahan(Rp)
1.	a) Belanja Modal		
	1) Tanah	90.000.000,00	90.000.000,00
	2) peralatan dan mesin	40.094.401.746,00	50.846.577.597,00
	3) bangunan dan gedung	96.097.683.854,00	112.934.826.490,00
	4) jalan, irigasi dan jaringan	31.175.135.871,00	37.875.179.611,00
	5) aset tetap lainnya	2.125.805.880,00	2.150.805.880,00
	b) Belanja Pemeliharaan	1.917.943.500,00	3.196.171.230,00
	Jumlah 1	**171.500.970.851,00**	**207.093.560.808,00**
2	a) Belanja Hibah	123.768.834.722,00	138.043.185.772,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	168.000.000,00	214.500.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan		
	Jumlah 2	**123.936.834.722,00**	**138.257.685.772,00**
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	295.437.805.573,00	345.351.246.580,00
4	Persentase belanja infrastruktur	29,02%	30,68%

2.4.4. *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah memenuhi ketentuan tersebut dengan mengalokasikan Rp78.028.995.760,00 atau 11,36% dari total Dana Transfer Umum sebesar Rp687.053.783.000,00 dalam APBD Induk Tahun 2024, dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 2.13 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Dana Desa

No	Komponen Perhitungan	APBD	APBD Perubahan
1	Dana Transfer Umum		
	a) DAU	681.097.648.000,00	681.097.648.000,00
	b) DBH	5.956.135.000,00	5.956.135.000,00
	Jumlah Penerimaan	687.053.783.000,00	687.053.783.000,00
2	Alokasi Dana Desa (ADD) = 10% x Dana Transfer Umum	68.705.378.300,00	68.705.378.300,00
3	Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam APBD	78.028.995.760,00	78.028.995.760,00
4	Persentase Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam APBD	11,36%	11,36%

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Flores Timur tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan daerah pada tahun pelaporan. Atas kinerja tersebut, Kabupaten Flores Timur memperoleh penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat "B" dan nilai 60,10. Penilaian ini disampaikan melalui Surat Nomor: B/354/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Selain itu, pembangunan budaya kinerja birokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil juga dinilai telah berjalan dengan baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	20,26
b. Pengukuran Kinerja	30	17,51
c. Pelaporan Kinerja	15	8,61
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,72
Nilai Hasil Evaluasi	100	60,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan bobot komponen, subkomponen, serta kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi tahun 2024 lebih menekankan pada implementasi akuntabilitas kinerja, baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 disampaikan sebagai berikut:

3.1.1. Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan upaya perbaikan pada dokumen perencanaan kinerja pada level kabupaten dan beberapa perangkat daerah dengan cara melakukan reviu perjanjian kinerja yang dimiliki untuk dapat merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang lebih menggambarkan outcome dan didukung dengan indikator kinerja yang lebih terukur dan relevan mengukur kondisi kinerja yang ditetapkan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja sebagai betrikut:

a. Penetapan target kinerja yang dimiliki pada level kabupaten dan perangkat daerah belum sepenuhnya ditetapkan secara realistis dan logis, hal ini disebabkan masih terdapat beberapa target kinerja yang ditetapkan lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja tahun lalu;

b. Pada sebagian Perangkat Daerah masih ditemukan penetapan indikator kinerja yang tidak relevan dan cukup untuk mengukur kondisi kinerja sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak diketahui sejauh mana perwujudan kondisi kinerja sasaran strategis tersebut;

c. Upaya penyusunan pohon kinerja belum sepenuhnya menerapkan kerangka berpikir logis, karena penjenjangan kinerja pada pohon kinerja masih dikaitkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan sehingga belum tercipta hubungan sebab antar level kinerja pada pohon kinerja;

d. Belum sepenuhnya aktivitas-aktivitas yang dimiliki perangkat daerah menunjang pencapaian kinerja strategis yang ditetapkan, karena masih ditemukan aktivitas-aktivitas yang tidak relevan jika dikaitkan dengan pencapaian kinerja strategis perangkat daerah.

3.1.2. Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan upaya perbaikan pada pengukuran kinerja dengan cara melakukan reviu pada penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) baik level kabupaten dan beberapa perangkat daerah. Pelaksanaan reviu tersebut diutamakan pada perbaikan definisi operasional dan formulasi perhitungan nindikator sehingga pengumpulan data kinerja menjadi lebih jelas. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut.

a. Meskipun telah terdapat perbaikan formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU), namun masih terdapat beberapa data pencapaian kinerja pada perangkat daerah yang tidak andal, antara alat ukur dan penetapan target tidak relevan;

b. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan IT;

c. Rencana aksi yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja. Hal ini disebabkan penetapan target sebagai dasar pengukuran kinerja belum secara berkala atau masih satu tahun sekali;

d. Belum sepenuhnya pimpinan berkomitmen untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pengukuran pencapaian kinerja. Hal ini dapat dilihat belum adanya umpan balik yang diberikan pimpinan perangkat daerah untuk pencapaian kinerja yang dimiliki.

3.1.3. Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada level kabupaten dan laporan kinerja (LAKIP) pada level perangkat daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai pada tahun tersebut. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut.

a. Informasi faktor keberhasilan atau kegagalan yang terdapat pada LPPD dan LAKIP beberapa perangkat daerah masih bersifat umum dan cenderung sama sehingga kualitas faktor keberhasilan yang dituangkan belum secara spesifik menjelaskan hal-hal teknis apa saja yang menyebab kinerja itu terealisasi dengan baik atau tidak;

b. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategis perencanaan kinerja tahun berikutnya, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya.

3.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan evaluasi AKIP internal pada perangkat daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal, di antaranya sebagai berikut.

a. Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya menyajikan temuan dan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap perangkat daerah sehingga belum mampu memberikan perbaikan yang signifikan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP setiap perangkat daerah;

b. Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sehingga perbaikan yang diharapkan belum optimal dirasakan.

3.1.5. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

a. Mendorong dilakukannya reviu atas penetapan target yang dimiliki pada level kabupaten dan perangkat daerah dengan memastikan target tahun ini penetapannya lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh tahun lalu sehingga target kinerja lebih realistis dan logis;

b. Memastikan kembali penetapan indikator kinerja yang dimiliki oleh sebagian perangkat daerah agar lebih relevan dan cukup untuk mengukur kondisi kinerja sasaran strategis yang ditetapkan sehingga indikator kinerja dapat dijadikan alat ukur untuk mengetahui pencapaian kondisi kinerja sasaran strategis yang ditetapkan;

c. Mereviu kembali pohon kinerja yang dimiliki agar lebih mengutamakan kerangka berpikir logis, khususnya terkait dengan penyusunan penjenjangan kinerja dengan mengutamakan hubungan sebab antar level kinerja;

d. Memastikan kembali aktivitas-aktivitas yang dimiliki PD dapat menunjang pencapaian kinerja strategis yang ditetapkan sehingga tercipta perencanaan kinerja yang efektif dan efisien;

e. Mendorong adanya reviu kembali penetapan IKU pada beberapa PD, khususnya dalam menetapkan alat ukur dan penetapan target agar lebih relevan sehingga data pencapaian kinerja dapat andal;

f. Mendorong Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan IT sehingga mempermudah pimpinan daerah atau Perangkat Daerah untuk memantau pencapaian kinerja yang dimiliki dan pengumpulan data kinerja menjadi lebih berkualitas;

g. Mengoptimalkan rencana aksi yang dimiliki untuk dijadikan dasar monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dengan memastikan penetapan target yang disusun sudah secara berkala atau minimal triwulanan;

h. Mendorong adanya komitmen dari seluruh pimpinan untuk terlibat pengambilan keputusan dalam pengukuran pencapaian kinerja dengan cara memberikan umpan balik untuk setiap pencapaian kinerja yang dimiliki;

i. Meningkatkan kualitas informasi faktor keberhasilan atau kegagalan pada LAKIP diseluruh PD dengan menuangkan secara spesifik penjelasan teknis terkait faktor apa saja yang menyebab kinerja itu terealisasi dengan baik atau tidak;

j. Memanfaatkan informasi yang tertuang dalam LPPD maupun LAKIP seluruh Perangkat Daerah agar menjadi dasar dalam menetapkan perbaikan strategi perencanaan kinerja baik pada tahun depan maupun periode perencanaan jangka menengah berikutnya;

k. Memastikan kembali laporan hasil evaluasi internal telah memberikan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik dan tidak hanya pada pemenuhan dokumen saja, namun juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen SAKIP sehingga setiap PD mampu melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dengan baik dan mampu memberikan perbaikan yang signifikan; dan

l. Mendorong seluruh Perangkat Daerah agar menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil evaluasi AKIP internal. Selain itu, tim evaluasi internal agar melakukan reviu atas tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap PD sehingga kualitas tindak lanjut yang diberikan telah sesuai dengan rekomendasi yang dimaksud dalam laporan hasil evaluasi AKIP internal.

Selanjutnya pada tahun yang sama berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/427/RB.06/2024 hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Flores Timur memperoleh Nilai 44,48 dengan Kategori C.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut.

Tabel 3.2 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Florres Timur

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2023
A	RB General	100	43,01
B	RB Tematik	20	1,47
C	Indeks RB	120	44,48
			C

Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui https://portalrb.menpan .go.id.

Dari semua Komponen hasil menunjukan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Flores Timur memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3 Komponen Hasil Evaluasi Tata Kelola Birokrasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai 2023	Sumber Data
1	Opini BPK	0-100	WTP	BPK
2	Nilai SAKIP	0-100	53,05	Kementerian PANRB
3	Nilai RB	0-100	44,48	Kementerian PANRB

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

a. Mendorong Tim Reformasi Birokrasi yang telah dibentuk untuk membuat dokumen Road Map RB Kabupaten Flores Timur yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perubahan. Selain itu, tingkat perangkat daerah juga perlu dibuat rencana kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga perlu menentukan agent of change dan diformalkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara maksimal. Agen perubahan yang sudah ditentukan nantinya akan membuat rencana aksi yang dapat dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya;

b. Menyusun peta keterkaitan antarkebijakan dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang masih berlaku kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal maupun eksternal;

c. Melakukan penjabaran terhadap peta proses blsnls. menjadi SOP dan membuat peta proses bisnis di masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada kinerja utama organisasi;

d. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;

e. Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, mengimplementasikan Human Capital Development Plan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan melakukan reviu atas pelaksanaannya. Peningkatan pelaksanaan sistem merit dapat dilakukan dengan menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;

f. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari tingkat tertinggi sampai terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;

g. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas serta meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan; dan

h. Mendorong seluruh perangkat daerah melaksanakan survei dan menginformasikan hasilnya kepada stakeholder serta melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

3.2. Hambatan dan Kendala Capaian Kinerja Keuangan

3.2.1. Pendapatan

Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan kewenangan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana dari pemerintah tingkat atas dalam Tahun Anggaran 2024 masih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh:

a. Belum adanya sinergitas antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah;
b. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah masih rendah;
c. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antara SKPD selaku koordinator pendapatan daerah dan SKPD pengelola pendapatan; dan
d. Kurangnya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

3.2.2. Belanja

a. Kurangnya konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
b. Belum semua peraturan pengelolaan keuangan daerah memiliki peraturan pelaksanaan;
c. Masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; dan
d. Masih kurangnya profesionalisme para pelaku penyedia barang dan jasa terutama untuk pengadaan jasa konstruksi.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban. berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran) pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur TA. 2024 terdiri dari 50 SKPD sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Entitas Akuntansi pada Pemkab Flores Timur TA 2024

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah
	Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Bagian Administrasi Pembangunan
	Bagian Perekonomian
	Bagian Hukum
	Bagian Organisasi
	Bagian Umum
	Bagian Humas dan Protokol
	Bagian Sumber Daya Alam
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Bagian Perencanaan dan Keuangan
2	Sekretariat DPRD
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan
6	Dinas Sosial
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan KBPPPA
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Dinas Perikanan
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19	Dinas Perkebunan dan Peternakan
20	Dinas Perdagangan dan Industri
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
22	Inspektorat
23	Badan Kesbangpol
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
26	Badan Pendapatan Daerah
27	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM
28	Satuan Polisi Pamong Praja
29	RSUD. dr. Hendrikus Fernandez
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Kecamatan Wulanggitang

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
32	Kecamatan Titehena
33	Kecamatan Ile Bura
34	Kecamatan Larantuka
35	Kecamatan Ile Mandiri
36	Kecamatan Demon Pagong
37	Kecamatan Lewolema
38	Kecamatan Tanjung Bunga
39	Kecamatan Adonara Timur
40	Kecamatan Wotanulumado
41	Kecamatan Ile Boleng
42	Kecamatan Witihama
43	Kecamatan Kelubagolit
44	Kecamatan Adonara Barat
45	Kecamatan Adonara Timur
46	Kecamatan Adonara
47	Kecamatan Adonara Tengah
48	Kecamatan Solor Barat
49	Kecamatan Solor Timur
50	Kecamatan Solor Selatan

4.2. Basis Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3. Basis Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini sesuai Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

Secara umum pengakuan aset dilakukan (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, dan Setara Kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas terdiri dari Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, dan Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

(a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Untuk Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang - undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya

4) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar di Muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban Dibayar di Muka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Beban Dibayar di Muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan. Beban Dibayar di Muka tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Beban Dibayar di Muka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang - barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/ penerimaan dan pengeluaran barang persediaan. Pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (*First In, First Out*/FIFO).

6) Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD. Pengukuran aset untuk

dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dapat berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah, dan Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*). Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa Dividen Tunai; dan/atau Dividen Saham

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu Metode Biaya, Metode Ekuitas, Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur harus mencatat aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Tabel 4.2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya Perolehan dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) adalah

pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria (a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah masa manfaat, dan/atau bertambah kapasitas, dan/atau bertambah kualitas/efisiensi, dan/atau bertambah mutu produksi/kinerja, dan/atau bertambah volume, serta (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

$$Penyusutan\ Per\ Periode = \frac{Nilai\ yang\ dapat\ disusutkan}{Masa\ manfaat}$$

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). Periode penghitungan penyusutan dilakukan per Tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a) Tanah;
b) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
c) Aset Tetap Lainnya selain Alat Musik Modern;
d) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;

Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena: Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing - masing jenis aset tetap yaitu (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying*

amount), (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya, serta Informasi penyusutan, meliputi Nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk memenuhi kebutuhan dengan pembiayaan relatif besar yang tidak dapat ditanggung dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dan peruntukannya diatur melalui peraturan daerah, sehingga tidak dapat digunakan untuk tujuan lain di luar ketentuan tersebut. Dana cadangan umumnya digunakan untuk pembangunan aset seperti rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga, dan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan, yang kemudian dirinci berdasarkan tujuan pembentukannya. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan dan diukur berdasarkan nilai nominal kas yang diklasifikasikan. Pencairan dana cadangan akan mengurangi jumlahnya, sedangkan pembentukan dan hasil pengelolaannya akan menambah nilai dana cadangan yang bersangkutan. Dalam neraca, dana cadangan disajikan sebagai bagian dari Aset Non-Lancar dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, dan ditambahkan kembali ke dana cadangan melalui mekanisme pembentukan dana cadangan, yang juga harus diungkapkan dalam CaLK.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset milik pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, maupun dana cadangan. Jenis aset ini meliputi Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau ketika kepemilikan dan/atau penguasaannya berpindah, dan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Dalam neraca, Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari Aset Non-Lancar dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset ini mengalami amortisasi, kecuali untuk Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Amortisasi dilakukan secara bertahap menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat yang dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak, dan diakui pada akhir tahun saat penyusunan laporan keuangan atau saat aset dialihkan kepemilikannya. Masa manfaat aset lainnya ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Masa manfaat Aset Lainnya

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	*Software Komputer*	10
2	Lisensi	10
3	*Franchise*	10
4	Paten Biasa	10
5	Merek	10
6	*Detailed Engineering Design*	10

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasinoal sebagai "Beban Amortisasi".

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

   Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

   Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah Utang Dalam Negeri, Utang Luar Negeri, dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank, Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Utang kepada Masyarakat (Obligasi).

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP 9 tentang Kewajiban disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Sesuai Paragraf 32 PSAP 9 tentang Kewajiban, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga

sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. Ekuitas disajikan dalam neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CALK.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah pendapatan yang mencakup:

a. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk disahkan dan diakui sebagai pendapatan daerah.

d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

Pendapatan Transfer-LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN maupun APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah-LRA, Dana Darurat-LRA, dan Pendapatan Lainnya-LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata - mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;

b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;

c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dilakukan pengesahan;

d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Belanja – LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

a. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

b. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

c. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding)

termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

d. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

f. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer, dan dijelaskan dalam CaLK.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan akuntansi ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari Surplus/Defisit – LRA, Pembiayaan Netto, SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan), dan Perubahan SAL.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dan Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.

a. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
b. Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan – LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. Beban diklasifikasikan menjadi: Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, dan Beban Tak Terduga.

a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial.
b. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
c. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
d. Beban Tak Terduga adalah beban berupa pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Beban diakui pada Saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset, dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada

saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban diukur sesuai dengan (a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah, dan (2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi. 3)Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain Pengeluaran beban tahun berkenaan, Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja, danInformasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos – pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

a. Koreksi Kesalahan

   Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

   Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan – laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

   Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau

kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa – peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan: (a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas, (b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; (c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas, dan (d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban. Jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan Daerah – LRA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.293.111.583.277,41	1.290.264.472.751,10	1.149.177.335.557,12

Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	55.299.582.639,00	55.797.763.921,51	100,90	50.340.879.438,12
2	Pendapatan Transfer	1.222.927.550.127,41	1.221.629.776.567,00	99,89	1.086.697.907.803,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	14.884.450.511,00	12.836.932.262,59	86,24	12.138.548.316,00
	Jumlah	**1.293.111.583.277,41**	**1.290.264.472.751,10**	**99,78**	**1.149.177.335.557,12**

Pada TA 2024, Pendapatan Daerah direalisasikan senilai Rp1.290.264.472.751,10 atau 99,78% dari yang dianggarkan senilai Rp1.293.111.583.277,41. Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LRA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
55.299.582.639,00	55.797.763.921,51	50.340.879.438,12

Pada TA 2024, PAD direalisasikan senilai Rp55.797.763.921,51 atau 100,90% dari yang dianggarkan senilai Rp55.299.582.639,00. Penjelasan atas masing-masing pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	17.460.890.000,00	16.314.902.964,41	93,44	15.068.129.862,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.728.914.924,00	3.629.820.420,00	63,36	24.458.316.606,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.845.122.715,00	2.013.815.603,00	52,37	3.845.122.715,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	28.264.655.000,00	33.839.224.934,10	119,72	6.969.310.255,12
	Jumlah	**55.299.582.639,00**	**55.797.763.921,51**	**100,90**	**50.340.879.438,12**

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
17.460.890.000,00	16.314.902.964,41	15.068.129.862,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Flores Timur selama TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	92.849.640,00	46,42	123.515.909,00
2	Pajak Restoran	1.884.485.000,00	1.855.654.642,00	98,47	1.614.443.095,00
3	Pajak Hiburan	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	1.500.000,00
4	Pajak Reklame	435.505.000,00	119.919.301,00	27,54	76.775.033,00
5	Pajak Penerangan Jalan	6.000.000.000,00	7.460.481.187,00	124,34	6.697.945.570,00
6	Pajak Parkir	5.000.000,00	500.000,00	10,00	-
7	Pajak Air Tanah	20.900.000,00	3.671.800,00	17,57	6.147.400,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.850.000.000,00	3.144.416.725,00	169,97	2.533.156.705,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.000,00	2.809.891.143,41	46,83	2.886.142.774,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.050.000.000,00	825.018.526,00	78,57	1.128.503.376,00
	Jumlah	**17.460.890.000,00**	**16.314.902.964,41**	**93,44**	**15.068.129.862,00**

Pada TA 2024, Pendapatan Pajak Daerah direalisasikan senilai Rp16.314.902.964,41 atau 93,44% dari yang dianggarkan senilai Rp17.460.890.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.246.773.102,41 jika dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2023.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.728.914.924,00	3.629.820.420,00	24.458.316.606,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Flores Timur. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan realisasi selama TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	**Retribusi Jasa Umum**	**3.974.617.600,00**	**2.279.773.500,00**	**57,36**	**23.154.139.036,00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.500.000.000,00	2.116.477.500,00	60,47	22.515.945.836,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00	70.016.000,00	100,02	70.692.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.117.600,00	18.748.000,00	601,36	2.646.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	0,00	0,00	179.375.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.000.000,00	36.052.000,00	180,26	47.965.000,00
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	181.500.000	38.480.000,00	21,20	337.515.200,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.654.297.324,00**	**1.330.577.170,00**	**80,43**	**1.216.054.320,00**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	865.000.000,00	566.123.570,00	65,44	730.370.310
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	440.000.000,00	408.014.500,00	92,73	327.343.500,00
	Retribusi Terminal	24.066.000,00	24.036.000,00	99,88	9.806.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.379.000,00	20.881.000,00	327,34	5.441.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	15.000.000,00	89.924.000,00	599,49	12.395.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	137.227.324,00	188.316.500,00	137,23	79.246.510,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	121.000.000,00	21.737.600,00	17,97	29.739.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	45.625.000,00	11.544.000,00	25,30	21.713.000,00
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**100.000.000,00**	**19.469.750,00**	**19,47**	**88.123.250**
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	100.000.000,00	19.469.750,00	19,47	88.123.250,00
	Jumlah	**5.728.914.924,00**	**3.629.820.420,00**	**63,36**	**24.458.316.606,00**

Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sebagaimana dapat dilihat pada daftar berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
1	**Badan Pendapatan Daerah**	**537.500.000,00**	**396.821.570,00**	**73,83**
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	452.500.000,00	379.529.070,00	83,87
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	2.909.500,00	0,00
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	60.000.000,00	2.016.000,00	3,36
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	25.000.000,00	12.367.000,00	49,47
2	**Dinas Perikanan**	**100.000.000,00**	**19.469.750,00**	**19,47**
	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	100.000.000	19.469.750,00	19,47
3	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	**40.000.000,00**	**99.668.000,00**	**249,17**
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	15.000.000,00	89.924.000,00	599,49
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	5.000.000,00	0,00	0,00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	10.000.000,00	2.744.000,00	27,44
4	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**330.000.000,00**	**159.285.000,00**	**48,27**
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	330.000.000,00	159.285.000,00	48,27
5	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	**121.000.000,00**	**21.737.600,00**	**17,96**
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	121.000.000,00	21.737.600,00	17,96
6	**Dinas Perhubungan**	**345.789.924,00**	**239.614.500,00**	**69,29**
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	6.379.000,00	20.881.000,00	327,34
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.117.600,00	18.748.000,00	601,36
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	24.066.000,00	24.036.000,00	99,88
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	112.227.324,00	175.949.500,00	156,78
7	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	**400.000.000,00**	**442.050.500,00**	**110,51**
	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	20.000.000,00	36.052.000,00	180,26
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	380.000.000,00	405.998.500,00	106,84
8	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**181.500.000,00**	**38.480.000,00**	**21,20**
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	181.500.000,00	38.480.000,00	21,20
9	**Dinas Kesehatan**	**2.500.000.000,00**	**1.952.960.700,00**	**82,12**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.500.000.000,00	1.952.960.700,00	82,12
10	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**103.125.000,00**	**26.200.000,00**	**25,41**
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	82.500.000,00	24.400.000,00	29,58
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	20.625.000,00	1.800.000,00	8,73
11	**Dinas Lingkungan Hidup**	**70.000.000,00**	**70.016.000,00**	**100,02**
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00	70.016.000,00	100,02
12	**RSUD Adonara**	**1.000.000.000,00**	**163.516.800,00**	**16,35**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000.000,00	163.516.800,00	16,35
	Jumlah	**5.728.914.924,00**	**3.629.820.420,00**	**63,36**

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
3.845.122.715,00	2.013.815.603,00	3.845.122.715,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah/dividen dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) TA 2024. Pada TA 2024, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasikan senilai Rp2.013.815.603,00 atau 52,37% dari yang dianggarkan senilai Rp3.845.122.715,00.

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
28.264.655.000,00,00	33.839.224.934,10	6.969.310.255,12

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap maupun rutin, dengan realisasi TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.059.166,00**
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	136.059.166,00
2	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**527.155.000,00**	**479.200.000,00**	**90,90**	**405.685.000,00**
	Hasil Sewa BMD	527.155.000,00	479.200.000,00	90,90	405.685.000,00
3	**Jasa Giro**	**1.460.000.000,00**	**1.459.076.991,37**	**99,94**	**1.251.820.134,35**
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.400.000.000,00	1.447.405.240,98	103,39	1.218.779.346,26
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000,00	10.867.742,48	108,68	479.641,20
	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	804.007,91	1,61	1.498.501,89
	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	31.062.645,00
4	**Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**20.000.000,00**	**175.000,00**	**0,88**	**2.081.000,00**
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	20.000.000,00	175.000,00	0,88	2.081.000,00
5	**Pendapatan Bunga**	**250.000.000,00**	**242.037.452,00**	**96,81**	**302.807.437,00**
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	250.000.000,00	242.037.452,00	96,81	302.807.437,00
6	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**1.000.000.000,00**	**560.057.978,25**	**56,00**	**697.665.726,09**
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000,00	560.057.978,25	56,00	697.665.726,09
7	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**790.233.005,91**	**0,00**	**1.685.475.963,12**
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	790.233.005,91	0,00	1.685.475.963,12
8	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**10.000.000,00**	**1.492.598,56**	**14,93**	**14.813.545,00**
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000,00	1.492.598,56	14,93	14.813.545,00
9	**Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**	**0,00**	**697.938.455,72**	**0,00**	**763.625.389,44**
	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	697.938.455,72	0,00	763.625.389,44
10	**Pendapatan dari Pengembalian**	**1.000.000.000,00**	**1.592.637.660,29**	**159,26**	**1.613.082.169,12**
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	151.293.439,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	423.390,00	0,00	130.319.717,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	109.664.620,00	0,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	198.966.488,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	117.000.000,00	0,00	446.597.382,48
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	326.975.493,00	0,00	241.537.600,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	3.474.000,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	731.387,00	0,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	32.535.955,24	0,00	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan-Jalan dan Jembatan	0,00	710.531.912,82	0,00	631.368.277,64
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	6.491.753,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	95.808.414,23	0,00	0,00
11	**Pendapatan BLUD**	**23.997.500.000,00**	**28.016.375.792,00**	**116,75**	**0,00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	23.997.500.000,00	28.016.375.792,00	116,75	0,00
12	**Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.194.725,00**
	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	96.194.725,00
	Jumlah	**28.264.655.000,00**	**33.839.224.934,10**	**119,72**	**6.969.310.255,12**

Pada TA 2024, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direalisasikan senilai Rp33.839.224.934,10 atau 119,72% dari yang dianggarkan senilai Rp28.264.655.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

1. Penerimaan dari Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 direalisasikan senilai Rp479.200.000,00 atau 90,90% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu senilai Rp527.155.000,00;
2. Penerimaan dari Jasa Giro Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu senilai Rp1.459.076.991,37 atau 99,94% dari yang dianggarkan senilai Rp1.460.000.000,00. Rincian lebih lanjut atas penerimaan Jasa Giro TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Rincian Pendapatan Jasa Giro TA 2024

	Uraian	Nilai (Rp)
a.	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.447.405.240,98
b.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara SKPD	10.867.742,48
c.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	804.007,91
	Jumlah	**1.459.076.991,37**

3. Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir TA 2024 yaitu senilai Rp175.000,00 atau 0,88% dari yang dianggarkan senilai Rp20.000.000,00;
4. Penerimaan dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah senilai Rp242.037.452,00 atau 96,11% dari yang dianggarkan senilai Rp250.000.000,00;
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun 2024 adalah senilai Rp560.057.978,25, dengan rincian sebagai berikut.
    a. Setoran kembali ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas LKPD TA 2014 atas nama Mathias W. Enay senilai Rp4.000.000,00;
    b. Setoran kembali ke Kas Daerah sesuai hasil temuan BPKP TA 2015 atas nama Silverius Sabon Amang, SH senilai Rp1.200.000,00;
    c. Setoran kembali ke Kas Daerah sesuai hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2016 atas nama Silverius Sabon Amang, SH senilai Rp800.000,00;
    d. Setoran kembali ke Kas Daerah sesuai hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur atas pengelolaan keuangan TA 2017 senilai Rp26.098.000,00;
    e. Setoran kembali ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT atas LKPD TA 2022 senilai Rp45.000.000,00;
    f. Penyetoran kembali ke kasda atas kelebihan pembayaran Guru Honorer pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp102.000.000,00;
    g. Penyetoran kembali ke Kas Daerah atas kekurangan volume paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp76.817.739,70 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp182.728.215,55;
    h. Penyetoran temuan BPK atas kelebihan bayar belanja lembur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp33.786.000,00 dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp3.245.750,00;
    i. Penyetoran temuan BPK atas belanja listrik TA 2023 sesuai LHP Nomor: 127.A/LHP/XIX.KUP/06/2024 senilai Rp11.346.000,00;
    j. Penyetoran temuan BPK atas kelebihan pembayaran pada paket pengawasan pembangunan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp7.448.000,00;
    k. Penyetoran temuan BPK atas kelebihan pembayaran paket perencanaan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp10.780.000,00;
    l. Penyetoran kembali ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran atas tenaga ahli yang bekerja lebih dari tiga paket pada periode yang bersamaan pada paket

pekerjaan pengawasan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan ke rumah (SR) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.013.100,00;

m. Penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran tenaga konsultan yang tidak melakukan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp15.533.953,00, dan Dinas P2KBP3A senilai Rp430.000,00; dan

n. Penyetoran kembali ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sesuai LHP Kepatuhan Belanja TA 2022 dan 2023 pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp1.320.000,00, Dinas Perkebunan dan Peternakan senilai Rp2.876.220,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp840.000,00, Dinas Tenaga Kerja senilai Rp9.090.000,00, Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp5.920.000,00, dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp14.745.000,00.

6. Penerimaan dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp790.233.005,91. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan merupakan pendapatan yang bersumber dari sanksi kepada rekanan/pihak ketiga yang berkaitan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
7. Penerimaan dari Pendapatan Denda Pajak Daerah senilai Rp1.492.598,56. Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dari sanksi/denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena keterlambatan pembayaran Pajak Daerah atau pelanggaran atas ketentuan perpajakan daerah lainnya;
8. Penerimaan dari Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan senilai Rp697.938.455,72. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan penerimaan yang diperoleh dari pencairan jaminan yang disediakan oleh penyedia jasa konstruksi karena penyedia tersebut gagal melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak;
9. Penerimaan dari Pengembalian direalisasikan senilai Rp1.592.637.660,29 atau 159,26% dari yang dianggarkan senilai Rp1.000.000.000,00; dan
10. Penerimaan dari Pendapatan BLUD direalisasikan senilai Rp28.016.375.792,00 atau 116,75% dari yang dianggarkan senilai Rp23.997.500.000,00, yang merupakan pendapatan BLUD bersumber dari Jasa Layanan.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer – LRA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.222.927.550.127,41	1.221.629.776.567,00	1.086.697.907.803,00

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pada Tahun 2024, Pendapatan Transfer dianggarkan dan direalisasikan dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.001.101.406.800,41	997.182.521.658,00	99,61	877.276.047.385,00
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	182.754.684.000,00	189.402.420.000,00	103,64	180.183.689.349,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	39.071.459.327,00	35.044.834.909,00	89,69	29.238.171.069,00
	Jumlah	**1.222.927.550.127,41**	**1.221.629.776.567,00**	**99,89**	**1.086.697.907.803,00**

Rincian Pendapatan Transfer lebih lanjut sebagai berikut.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.001.101.406.800,41	997.182.521.658,00	877.276.047.385,00

Penjelasan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dijelaskan sebagai berikut.

1. Bagi Hasil Pajak

Pada TA 2024, Bagi Hasil Pajak pada TA 2024 sebesar Rp3.376.009.264,00 dari anggaran sebesar Rp2.694.575.000,00 atau 125,29% yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan	535.249.000,00	542.913.264,00	101,43	593.348.000,00
2	PPh Pasal 21	2.159.326.000,00	2.732.926.000,00	126,56	2.612.143.000,00
3	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	100.170.000,00	0,00	64.130.000,00
	Total	**2.694.575.000,00**	**3.376.009.264,00**	**125,29**	**3.269.621.000,00**

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pada TA 2024, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam pada TA 2024 sebesar Rp3.282.192.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.261.560.000,00 atau 100,63% yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Cukai Hasil Tembakau (CHT)	343.687.000,00	364.319.000,00	106,00	2.046.815.646,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	124.509.000,00	124.679.750,00	100,14	127.158.000,00
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	683.000,00	512.250,00	75,00	1.246.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.792.681.000,00	2.792.681.000,00	101,43	3.147.624.000,00
	Jumlah	**3.261.560.000,00**	**3.282.192.000,00**	**100,63**	**5.322.843.646,00**

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada TA 2024, Dana Alokasi Umum (DAU) direalisasikan senilai Rp680.488.339.610,00 atau 99,91% dari yang dianggarkan senilai Rp681.097.648.000,00. Rincian lebih lanjut atas Dana Alokasi Umum (DAU) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	DAU (Tidak Ditentukan Penggunaannya)	529.432.771.000,00	529.432.771.000,00	100,00	432.450.416.700,00
2	DAU Pendanaan Kelurahan	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	100,00	4.200.000.000,00
3	DAU Penggajian Formasi PPPK	25.999.200.000,00	25.389.891.610,00	97,66	29.298.576.000,00
4	DAU Bidang Pendidikan	64.368.215.000,00	64.368.215.000,00	100,00	72.601.942.000,00
5	DAU Bidang Kesehatan	47.736.249.000,00	47.736.249.000,00	100,00	61.343.421.000,00
6	DAU Bidang Pekerjaan Umum	9.361.213.000,00	9.361.213.000,00	100,00	16.310.368.000,00
	Jumlah	**681.097.648.000,00**	**680.488.339.610,00**	**99,91**	**616.204.723.700,00**

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp310.035.980.784,00 atau 98,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp314.047.623.800,41. Realisasi DAK dapat dirincikan sebagai berikut:

a) DAK Fisik

Pada TA 2024, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Pemerintah Kabupaten Flores Timur direalisasikan senilai Rp166.392.708.767,00 atau 97,91% dari yang dianggarkan senilai Rp169.940.830.000,00. Rincian lebih lanjut atas DAK disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	**Bidang Pendidikan**				
	PAUD	1.506.880.000,00	1.469.297.000,00	97,51	1.103.177.150,00
	SD	12.641.244.000,00	11.776.457.754,00	93,16	21.674.312.067,00
	SMP	5.848.574.000,00	5.415.293.307,00	92,59	11.479.845.832,00
	Perpustakaan Daerah	10.800.000.000,00	10.758.256.350,00	99,61	0
2	**Bidang Kesehatan dan KB**				
	Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	10.055.923.366,00

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.781.106.000,00
	Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.209.029.300,00
3	**Bidang Pertanian**				
	Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	20.200.000.000,00	19.592.000.000,00	96,99	15.600.000.000,00
4	**Bidang Kelautan dan Perikanan**				
	Penugasan	4.482.587.000,00	4.258.872.497,00	95,01	0,00
5	**Bidang Jalan**				
	Reguler	7.042.956.000,00	7.003.734.000,00	99,44	0,00
	Penugasan	8.236.449.000,00	8.197.449.000,00	99,53	15.946.030.402,00
6	**Bidang Air Minum**				
	Penugasan	10.846.710.000,00	10.275.565.234,00	94,73	7.313.298.485,00
7	**Bidang Sanitasi**				
	Reguler	0,00	0,00	0,00	7.210.545.000,00
	Penugasan	7.777.822.000,00	7.777.812.000,00	100	0,00
8	**Bidang Irigasi**				
	Penugasan	2.368.103.000,00	2.368.000.552,00	100	0,00
9	**Bidang Kesehatan dan KB**				
	Penguatan Sistem Kesehatan	78.189.505.000,00	77.499.971.073,00	99,12	14.671.295.623,00
	Jumlah	**169.940.830.000,00**	**166.392.708.767,00**	**97,91**	**108.044.563.225,00**

b) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik

Pada TA 2024, DAK Non-Fisik untuk Non-Fisik direalisasikan senilai Rp143.643.272.017,00 atau 99,68% dari yang dianggarkan senilai Rp144.106.793.800,41. Rincian lebih lanjut atas DAK Non-Fisik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi DAK Non-Fisik TA 2024 dan 2023

No.	DAK Non-Fisik	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	BOS Reguler	40.116.988.866,41	40.727.042.206,00	101,52	42.316.131.295,00
2	BOS Kinerja	2.978.398.883,00	1.875.000.000,00	62,95	1.582.500.000,00
3	TPG PNSD	53.086.288.000,00	55.691.964.000,00	104,91	49.269.002.245,00
4	Tamsil Guru PNSD	2.331.577.000,00	2.331.577.000,00	100,00	1.599.499.999,00
5	TKG PNSD	2.593.544.000,00	2.847.205.000,00	109,78	2.044.086.000,00
6	BOP PAUD	4.337.100.000,00	4.309.137.400,00	99,36	4.257.612.600,00
7	BOP Pendidikan Kesetaraan	948.090.000,00	836.760.000,00	88,26	681.600.000,00
8	BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	33.218.213.214,00
9	BOKB-KB	6.968.165.000,00	5.482.651.060,00	78,68	6.800.207.400,00
10	PK2UKM	477.620.000,00	470.341.425,00	98,48	0,00
11	Fasilitasi Penanaman Modal	588.938.000,00	580.886.277,00	98,63	537.158.436,00

No.	DAK Non-Fisik	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
12	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	650.000.000,00	625.398.875,00	96,22	1.597.350.000,00
13	Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	10.521.724.000,00	9.800.791.946,00	93,15	0,00
14	Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	443.993.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana BOK-BOK Puskesmas	18.064.367.051,00	18.064.516.828,00	100	0,00
16	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	530.934.625,00
	Jumlah	**144.106.793.800,41**	**143.643.272.017,00**	**99,68**	**144.434.295.814,00**

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

1. Dana Insentif Daerah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.633.738.000,00	5.633.738.000,00	0,00

Pada TA 2024, tidak terdapat anggaran dan realisasi untuk Dana Dana Insentif Fiskal senilai Rp.5.633.738.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan senilai Rp5.633.738.000,00 sedangkan TA 2023 tidak ada realisasi.

2. Dana Desa

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
177.120.946.000,00	183.768.682.000,00	180.183.689.349,00

Pada TA 2024, Dana Desa direalisasikan senilai Rp183.768.682.000,00 atau 103,75% dari yang dianggarkan, yaitu senilai Rp177.120.946.000,00 untuk 229 desa. Pada TA 2023, Dana Desa direalisasikan senilai Rp180.183.689.349,00. Rincian Penerima Dana Desa dimuat dalam **Lampiran 1**.

5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
38.921.459.327,00	31.429.584.909,00	29.238.171.069,00

Pada TA 2024, Pendapatan Bagi Hasil direalisasikan senilai Rp31.429.584.909,00 atau 80,75% dari yang dianggarkan, yaitu senilai Rp38.921.459.327,00. Realisasi tersebut merupakan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk TA 2024, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.776.341.733,00	4.947.109.887,00	73,01	2.846.703.256,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.480.193.685,00	2.713.544.459,00	77,97	4.870.249.437,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.460.996.242,00	8.641.435.562,00	82,61	6.773.677.190,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	28.115.538,00	23.614.580,00	83,99	4.552.225,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.175.812.129,00	15.103.880.421,00	83,10	14.742.988.961,00
	Jumlah	**38.921.459.327,00**	**31.429.584.909,00**	**80,75**	**29.238.171.069,00**

2. Bantuan Keuangan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
150.000.000,00	3.615.250.000,00	0,00

Pada TA 2024, realisasi untuk Bantuan Keuangan senilai Rp3.615.250.000,00 atau 2.410,17% dari yang dianggarkan senilai Rp150.000.000,00 sedangkan TA 2023 tidak ada realisasi.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
14.884.450.511,00	12.836.932.262,59	12.138.548.316,00

Pada TA 2024, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direalisasikan senilai Rp12.836.932.262,59 atau 86,24% dari yang dianggarkan senilai Rp14.884.450.511,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri dan penerimaan Dana Kapitasi JKN Tahun 2024 yang dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di 21 puskesmas. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 dan 2023 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
72.863.835,00	10.862.851,59	0,00

Pada TA 2024, Pendapatan Hibah direalisasikan senilai Rp10.862.851,59 atau 14,91% dari yang dianggarkan senilai Rp72.863.835,00. Realisasi tersebut merupakan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sedangkan TA 2023 tidak ada realisasi.

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
14.811.586.676,00	12.826.069.411,00	12.138.548.316,00

Pada TA 2024, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direalisasikan senilai Rp12.826.069.411,00 atau 86,59% dari yang dianggarkan senilai Rp14.811.586.676,00. Realisasi tersebut merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sedangkan TA 2023 senilai Rp12.138.548.316,00 yang merupakan jenis pendapatan yang sama.

5.1.2. Belanja Daerah – LRA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.125.539.911.781,00	1.042.746.385.172,00	852.231.727.827,45

Pada TA 2024, terdapat sebanyak 50 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang merupakan pengguna anggaran. Berdasarkan jenis kelompoknya, Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2024 senilai Rp1.042.746.385.172,00 atau 92,64% dari anggaran senilai Rp1.125.539.911.781,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	916.107.571.223,00	850.427.628.970,00	92,83	748.157.554.470,45
2	Belanja Modal	203.897.389.578,00	189.895.700.799,00	93,13	103.555.938.920,00
3	Belanja Tak Terduga	5.534.950.980,00	2.423.055.403,00	43,78	518.234.437,00
	Jumlah	**1.125.539.911.781,00**	**1.042.746.385.172,00**	**92,64**	**852.231.727.827,45**

5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
916.107.571.223,00	850.427.628.970,00	748.157.554.470,45

Belanja Operasi Kabupaten Flores Timur meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Pada TA 2024, Belanja Operasi direalisasikan senilai Rp850.427.628.970,00 atau 92,83% dari yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp916.107.571.223,00 Secara umum Rencana Belanja Operasi tidak terealisasikan secara keseluruhan karena adanya upaya rasionalisasi dan penghematan disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan Kas di Pemerintah Daerah dan selanjutnya hal tersebut ditempuh dengan prinsip anggaran belanja yang direncanakan adalah pagu tertinggi sehingga tidak harus direalisasikan semua. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	537.461.711.125,00	511.746.215.171,00	95,22	446.582.102.987,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
2	Belanja Barang dan Jasa	318.389.625.369,00	279.301.125.411,00	87,72	258.213.655.046,45
3	Belanja Subsidi	47.320.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	59.994.414.729,00	59.165.926.097,00	98,62	43.137.517.667,00
5	Belanja Bantuan Sosial	214.500.000,00	214.362.291,00	99,94	224.278.770,00
	Jumlah	**916.107.571.223,00**	**850.427.628.970,00**	**92,83**	**748.157.554.470,45**

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
537.461.711.125,00	511.746.215.171,00	446.582.102.987,00

Pada TA 2024, Belanja Pegawai direalisasikan senilai Rp511.746.215.171,00 atau 95,22% dari yang dianggarkan senilai Rp537.461.711.125,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	380.087.958.158,00	372.482.749.854,00	98,00	323.439.010.636,00
2	Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK	67.687.259.964,00	54.501.212.819,00	80,52	33.806.690.676,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	78.450.108.685,00	73.830.003.788,00	94,11	77.730.759.471,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.431.428.120,00	10.149.201.062,00	97,29	10.994.371.714,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	294.076.198,00	281.407.648,00	95,69	100.390.490,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	501.640.000,00	98,19	510.880.000,00
	Jumlah	**537.461.711.125,00**	**511.746.215.171,00**	**95,22**	**446.582.102.987,00**

Adapun rincian Belanja Pegawai masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18 Realisasi Belanja Pegawai Per SKPD TA 2024

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	246.214.871.233,00
2	Dinas Kesehatan	111.480.540.511,00
3	Dinas PUPR	3.801.008.014,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	2.114.736.160,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.873.270.716,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.333.663.292,00
7	Dinas Sosial	2.801.476.023,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.433.864.719,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.763.626.694,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.750.817.336,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.108.941.030,00

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.508.720.378,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.356.680.094,00
14	Dinas Perhubungan	2.985.913.043,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.057.275.047,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.714.530.501,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.435.767.969,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.699.238.680,00
19	Dinas Perikanan	2.467.207.656,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.268.628.840,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.512.932.627,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.711.592.518,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.939.579.383,00
24	Sekretariat DPRD	13.055.350.345,00
25	Sekretariat Daerah	10.729.471.656,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.908.925.487,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.679.277.363,00
28	Badan Pendapatan Daerah	3.610.931.769,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.929.633.358,00
30	Inspektorat Daerah	4.538.095.092,00
31	Kecamatan Wulanggitang	1.610.447.946,00
32	Kecamatan Titehena	1.183.327.622,00
33	Kecamatan Larantuka	8.736.223.809,00
34	Kecamatan Ile Mandiri	1.553.146.129,00
35	Kecamatan Tanjung Bunga	1.443.040.243,00
36	Kecamatan Solor Barat	1.337.551.432,00
37	Kecamatan Solor Timur	1.276.533.397,00
38	Kecamatan Adonara Barat	1.660.504.539,00
39	Kecamatan Wotan Ulumado	1.002.637.930,00
40	Kecamatan Adonara Timur	2.342.815.348,00
41	Kecamatan Klubagolit	1.687.272.967,00
42	Kecamatan Witihama	1.255.863.653,00
43	Kecamatan Ile Boleng	1.640.838.584,00
44	Kecamatan Demon Pagong	1.211.194.622,00
45	Kecamatan Lewolema	1.028.123.927,00
46	Kecamatan Ile Bura	1.261.405.615,00
47	Kecamatan Adonara	1.338.594.809,00
48	Kecamatan Adonara Tengah	1.214.784.602,00
49	Kecamatan Solor Selatan	1.175.340.463,00
	Jumlah	**511.746.215.171,00**

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
318.389.625.369,00	279.301.125.411,00	258.213.655.046,45

Belanja Barang dan Jasa direalisasikan senilai Rp279.301.125.411,00 atau 87,72% dari yang dianggarkan senilai Rp318.389.625.369,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	126.463.824.092,00	107.267.396.852,00	84,82	105.603.617.594,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
2	Belanja Jasa	85.394.548.163,00	73.411.998.866,00	85,97	79.687.001.796,00
3	Belanja Pemeliharaan	3.196.171.230,00	2.887.955.602,00	90,36	2.556.959.641,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	50.213.007.343,00	44.231.280.470,00	88,09	46.359.724.839,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.232.797.900,00	5.361.313.091,00	86,02	2.106.466.928,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	22.323.266.641,00	21.910.407.398,00	98,15	21.899.884.248,45
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	568.510.000,00	564.850.000,00	99,36	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.997.500.000,00	23.665.923.132,00	98,62	0,00
	Jumlah	**318.389.625.369,00**	**279.301.125.411,00**	**87,72**	**258.213.655.046,45**

Rincian Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2024

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan OlahRaga	54.588.434.639,00
2	Dinas Kesehatan	89.816.219.493,00
3	Dinas PUPR	20.475.374.314,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	2.304.008.400,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.771.641.950,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.735.802.315,00
7	Dinas Sosial	2.047.122.398,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.088.389.759,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.164.143.586,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	6.318.984.761,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.456.288.441,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.154.651.913,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.745.733.503,00
14	Dinas Perhubungan	1.821.804.150,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	959.431.954,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.147.848.172,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.168.799.780,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.043.732.218,00
19	Dinas Perikanan	7.420.253.395,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.097.685.957,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.347.941.644,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.590.733.015,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	919.715.612,00
24	Sekretariat DPRD	7.399.855.555,00
25	Sekretariat Daerah	9.081.780.638,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.635.495.729,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.051.186.254,00
28	Badan Pendapatan Daerah	1.936.364.360,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.172.885.134,00
30	Inspektorat Daerah	977.487.245,00
31	Kecamatan Wulanggitang	410.304.688,00
32	Kecamatan Titehena	319.111.472,00
33	Kecamatan Larantuka	5.235.707.870,00
34	Kecamatan Ile Mandiri	511.868.087,00

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai
35	Kecamatan Tanjung Bunga	304.744.786,00
36	Kecamatan Solor Barat	595.602.128,00
37	Kecamatan Solor Timur	345.527.120,00
38	Kecamatan Adonara Barat	399.589.870,00
39	Kecamatan Wotan Ulumado	237.501.840,00
40	Kecamatan Adonara Timur	975.993.448,00
41	Kecamatan Klubagolit	378.085.644,00
42	Kecamatan Witihama	388.378.900,00
43	Kecamatan Ile Boleng	418.774.375,00
44	Kecamatan Demon Pagong	413.578.000,00
45	Kecamatan Lewolema	335.206.150,00
46	Kecamatan Ile Bura	401.317.305,00
47	Kecamatan Adonara	490.644.444,00
48	Kecamatan Adonara Tengah	388.100.000,00
49	Kecamatan Solor Selatan	311.293.000,00
	Total	**279.301.125.411,00**

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
47.320.000,00	0,00	0,00

Belanja Subsidi direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan senilai Rp47.320.000,00.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
59.994.414.729,00	59.165.926.097,00	43.137.517.667,00

Belanja Hibah direalisasikan senilai Rp59.165.926.097,00 atau 98,62% dari yang dianggarkan senilai Rp59.994.414.729,00 dengan sebagai berikut.

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.044.198.200,00	37.439.198.200,00	98,41	26.156.815.400,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	16.776.220.000,00	16.688.363.968,00	99,48	16.523.385.738,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	457.316.529,00	457.316.529,00	100,00	457.316.529,00
4	Belanja Hibah Dana BOSP	4.716.680.000,00	4.581.047.400,00	97,12	0,00
	Jumlah	**59.994.414.729,00**	**59.165.926.097,00**	**98,62**	**43.137.517.667,00**

Pada TA 2024, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direalisasikan senilai Rp37.439.198.200,00 dengan rincian:

Tabel 5.22 Rincian Belanja Hibah Per SKPD TA 2024

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan OlahRaga	Rp	21.819.411.368,00
2	Dinas Kesehatan	Rp	470.000.000,00
3	Dinas PUPR	Rp	130.000.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	35.745.514.729,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	300.000.000,00
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	50.000.000,00
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp	651.000.000,00
	Jumlah	Rp	**59.165.926.097,00**

Sedangkan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada TA 2024 direalisasikan senilai Rp457.316.529,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024

No	Partai Politik		Nilai
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	Rp	48.873.810,00
2	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Rp	43.402.017,00
3	Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Rp	109.949.577,00
6	Partai NasDem	Rp	55.113.822,00
7	Partai Persatuan Indonesia	Rp	29.541.084,00
8	Partai Golongan Karya (Golkar)	Rp	55.957.449,00
9	Partai Kebangikat Bangsa (PKB)	Rp	57.394.914
11	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Rp	57.083.856,00
	Jumlah	**Rp**	**457.316.529,00**

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
214.500.000,00	214.362.291,00	224.278.770,00

Belanja Hibah direalisasikan senilai Rp214.362.291,00 atau 99,94% dari yang dianggarkan senilai Rp214.500.000,00 dengan sebagai berikut.

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	179.500.000,00	179.390.500,00	99,94	165.515.095,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	58.763.675,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	35.000.000,00	34.971.791,00	99,92	0,00
	Jumlah	**214.500.000,00**	**214.362.291,00**	**99,94**	**224.278.770,00**

5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
203.897.389.578,00	189.895.700.799,00	103.555.938.920,00

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Pada TA

2024, Belanja Modal direalisasikan senilai Rp189.895.700.799,00 atau 93,13% dari yang dianggarkan senilai Rp203.897.389.578,00 Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal – Tanah	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal – Peralatan dan Mesin	50.846.577.597,00	48.525.952.256,00	95,44	29.293.431.301,00
3	Belanja Modal – Gedung dan Bangunan	112.934.826.490,00	102.571.655.870,00	90,82	38.537.628.682,00
4	Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.875.179.611,00	36.585.207.223,00	96,59	33.172.488.493,00
5	Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya	2.150.805.880,00	2.122.885.450,00	98,70	2.552.390.444,00
	Jumlah	**203.897.389.578,00**	**189.895.700.799,00**	**93,13**	**103.555.938.920,00**

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
90.000.000,00	90.000.000,00	0,00

Pada TA 2024, Belanja Modal Tanah dianggarkan senilai Rp90.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp90.000.000,00 atau 100,00%. Belanja Modal Tanah merupakan belanja modal atas pembebasan lahan untuk enam sekolah dan satu puskesmas oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 5.26 Rincian Belanja Modal Tanah TA 2024

No.	Uraian	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Uang Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja Puskesmas sagu Tahun 2024	53.06/04.0/000556/LS/ 1.02.0.00.0.00.01.000/ PPR2/12/2024	11 Des 2024	90.000.000,00
	Jumlah			**90.000.000,00**

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
50.846.577.597,00	48.525.952.256,00	29.293.431.301,00

Pada TA 2024, Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan senilai Rp48.525.952.256,00 atau 95,44% dari yang dianggarkan senilai Rp50.846.577.597,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	2.173.725.950,00	2.173.725.350,00	100,00	4.107.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	6.500.040.650,00	6.455.488.500,00	99,31	587.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	86.506.900,00	85.628.400,00	98,98	8.000.000,00

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	101.800.032,00	97.033.320,00	95,32	60.542.500,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.971.459.006,00	5.452.115.409,00	91,30	1.572.288.047,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	297.141.200,00	280.142.664,00	94,28	151.560.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	25.777.090.441,00	24.760.945.914,00	96,06	21.925.430.339,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.627.700.000,00	1.627.700.000,00	100,00	1.042.434.000,00
9	Belanja Modal Komputer	4.806.398.118,00	4.537.174.579,00	94,40	1.287.497.790,00
10	Belanja Modal Alat Pengeboran	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	0,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.120.927.066,00	677.344.000,00	60,43	0,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	550.000,00	318.000,00	57,82	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.368.238.234,00	2.363.351.120,00	99,79	2.654.571.625,00
	Jumlah	**50.846.577.597,00**	**48.525.952.256,00**	**95,44**	**29.293.431.301,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.28 Rekapitulasi Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Per SKPD TA 2024

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah	88.027.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	39.452.500,00
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	51.813.400,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68.871.033,00
5	Badan Pendapatan Daerah	137.584.170,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	350.768.000,00
7	Sekretariat Daerah	1.553.193.380,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	25.994.500,00
9	Dinas Kesehatan	34.699.988.260,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	41.725.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	56.633.320,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	9.248.000,00
13	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	28.000.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	306.074.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	39.244.000,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.200.000,00
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	5.975.235.245,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	334.700.000,00
19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	74.953.500,00
20	Dinas Perhubungan	22.985.340,00
21	Dinas Perikanan	441.353.000,00
22	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	100.370.000,00
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	784.665.350,00

No.	SKPD	Nilai (Rp)
24	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	125.434.500,00
25	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	41.513.500,00
26	Dinas Sosial	39.111.500,00
27	Dinas Tenaga Kerja	141.366.050,00
28	Inspektorat Daerah	10.667.500,00
29	Kecamatan Adonara	8.861.796,00
30	Kecamatan Adonara Barat	48.239.250,00
31	Kecamatan Adonara Tengah	46.500.000,00
32	Kecamatan Adonara Timur	90.359.862,00
33	Kecamatan Demon Pagong	25.613.500,00
34	Kecamatan Ile Boleng	22.045.000,00
35	Kecamatan Ile Bura	21.034.250,00
36	Kecamatan Ile Mandiri	16.642.500,00
37	Kecamatan Kelubagolit	20.205.500,00
38	Kecamatan Larantuka	386.480.500,00
39	Kecamatan Lewolema	22.890.000,00
40	Kecamatan Solor Barat	38.660.000,00
41	Kecamatan Solor Selatan	46.795.000,00
42	Kecamatan Solor Timur	25.020.000,00
43	Kecamatan Tanjung Bunga	37.540.000,00
44	Kecamatan Titehena	43.662.000,00
45	Kecamatan Witihama	13.000.000,00
46	Kecamatan Wotan Ulumado	22.068.500,00
47	Kecamatan Wulanggitang	23.020.000,00
48	Satuan Polisi Pamong Praja	18.388.000,00
49	Sekretariat DPRD	1.948.754.550,00
	Total	**48.525.952.256,00**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
112.934.826.490,00	102.571.655.870,00	38.537.628.682,00

Belanja Gedung dan Bangunan direalisasikan senilai Rp102.571.655.870,00 atau 90,82% dari yang dianggarkan senilai Rp112.934.826.490,00 dengan rincian berdasarkan sebagai berikut.

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	220.250.000,00	220.028.000,00	99,90	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	288.900.000,00	288.690.000,00	99,93	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	53.759.357.108,00	52.894.895.837,00	98,39	9.156.406.358,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	47.636.456.902,00	38.549.049.228,00	80,92	28.166.521.260,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.186.000.000,00	10.150.770.000,00	99,65	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	280.962.480,00	30.305.905,00	10,79	147.515.064,00
8	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	90.950.000,00	90.834.900,00	99,87	1.067.186.000,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00	55.300.000,00	69,13	0,00
10	Belanja Modal Pagar	291.950.000,00	291.782.000,00	99,94	0,00
	Jumlah	**112.934.826.490,00**	**102.571.655.870,00**	**90,82**	**38.537.628.682,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.30 Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD TA 2024

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	53.183.585.837,00
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	220.028.000,00
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	38.549.049.228,00
4	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	90.834.900,00
5	Dinas Perikanan	85.605.905,00
6	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	197.782.000,00
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.150.770.000,00
8	Kecamatan Larantuka	94.000.000,00
	Jumlah	**102.571.655.870,00**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
37.875.179.611,00	36.585.207.223,00	33.172.488.493,00

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan direalisasikan senilai Rp36.585.207.223,00 atau 96,59% dari yang dianggarkan senilai Rp37.875.179.611,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.543.573.740,00	31.419.552.497,00	99,61	31.821.243.543,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	2.540.378.200,00	2.003.505.173,00	78,87	70.100.000,00
3	Belanja Modal Instalasi	1.593.852.671,00	1.357.429.000,00	85,17	817.772.802,00
4	Belanja Modal Jaringan	2.197.375.000,00	1.804.720.553,00	82,13	463.372.148,00
	Jumlah	**37.875.179.611,00**	**36.585.207.223,00**	**96,59**	**33.172.488.493,00**

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.945.786.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.278.610.670,00
3	Dinas Perhubungan	972.406.278,00
4	Dinas Perikanan	332.845.000,00
5	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	16.999.875,00
6	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	35.000.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja	3.559.400,00
	Jumlah	**36.585.207.223,00**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
2.150.805.880,00	**2.122.885.450,00**	**2.552.390.444,00**

Pada TA 2024, Belanja Aset Tetap Lainnya direalisasikan seluruhnya pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp2.122.885.450,00 atau 98,70% dari anggaran senilai Rp2.150.805.880,00.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian Belanja Modal	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	55.250.000,00	35.000.000,00	63,35	0,00
2	Belanja Modal Tanaman	34.170.000,00	33.871.200,00	99,13	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.061.385.880,00	2.054.014.250,00	99,64	2.552.390.444,00
	Jumlah	**2.150.805.880,00**	**2.122.885.450,00**	**98,70**	**2.552.390.444,00**

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
5.534.950.980,00	2.423.055.403,00	518.234.437,00

Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan pada APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam dan pelaksanaan kewenangan daerah lainnya. Pada TA 2024, Belanja Tidak Terduga direalisasikan senilai Rp2.423.055.403,00 atau 43,78% dari yang dianggarkan senilai Rp5.534.950.980,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Belanja Tidak Terduga TA 2024

No	Uraian		Nilai
1	Bantuan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang	Rp	2.207.287.687,00
2	Belanja Tidak terduga untuk Pengembalian dana Bos karena kesalahan penyetoran yang seharusnya setor ke rekening BOS Sekolah namun di setor ke rekening Kas Daerah Tahun 2024	Rp	17.030.716,00
3	Belanja Tidak terduga untuk Kepulangan Jenasah PNS Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur An. PPM Tahun 2024	Rp	11.408.000,00
4	Belanja Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non Alam Konflik Sosial yang terjadi antara masyarakat Desa Ile Pati dan Masyarakat Desa Bugalima di Kecamatan Adonara Barat.	Rp	187.329.000,00
	Jumlah	**Rp**	**2.423.055.403,00**

Rincian lebih lanjut atas Belanja Bantuan Tanggap Darurat Bencana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Rincian Belanja Bantuan Tanggap Darurat Bencana TA 2024

Uraian	Nomor SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Nilai Pertanggungjawaban(Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)	STS
Pembayaran Tambah Uang (TU) untuk Pembayaran Belanja Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang	53.06/04.0/000012/TU/5.02.0.00.0.00.02.0000/M/1/2024	639.510.000,00	528.330.500,00	111.179.500,00	008/BTT/239/2024, 16 Febi 2024
Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tidak terduga untuk Pengembalian dana Bos SDI Adabang karena kesalahan penyetoran yang seharusnya setor ke rekening BOS Sekolah namun di setor ke rekening Kas Daerah Tahun 2024	53.06/04.0/000196/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/9/2024	4.600.716,00	4.600.716,00	0,00	-
Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tidak terduga untuk Pengembalian dana Bos SDI Woka karena kesalahan penyetoran yang seharusnya setor ke rekening BOS Sekolah namun di setor ke rekening Kas Daerah Tahun 2024	53.06/04.0/000197/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P2/9/2024	12.430.000,00	12.430.000,00	0,00	-
Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tidak terduga untuk Kepulangan Jenasah Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur An. PETRUS PATI MARAN Tahun 2024	53.06/04.0/000234/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/10/2024	11.408.000,00	11.408.000,00	0,00	-
Pembayaran Tambah Uang (TU) untuk Pembayaran Belanja Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Non Alam Konflik Sosial yang terjadi antara masyarakat Desa Ile Pati dan Masyarakat Desa Bugalima di Kecamatan Adonara Barat.	53.06/04.0/000259/TU/5.02.0.00.0.00.02.0000/PR/11/2024	332.000.000,00	187.329.000,00	144.671.000,00	003/S3TU/BTT/236/2024, 29 Nov 2024
Pembayaran Langsung (LS) Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Alam Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki	53.06/04.0/000289/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/PPR2/12/2024	4.000.000.000,00	1.678.957.187,00	2.321.042.813,00	0098/STS/BTT/239/2024, 31 Des 2024
Jumlah		**4.999.948.716,00**	**2.423.055.403,00**	**2.576.893.313,00**	

5.1.3. Belanja Transfer

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
257.393.941.760,00	263.659.961.912,00	259.555.979.223,00

Pada TA 2024, Belanja Transfer direalisasikan senilai Rp263.659.961.912,00 atau 102,43% dari yang dianggarkan senilai Rp257.393.941.760,00, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian Belanja Transfer	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil	1.578.000.000,00	1.397.184.152,00	88,54	1.478.781.514,00
2	Bantuan Keuangan	255.815.941.760,00	262.262.777.760,00	102,52	258.077.197.709,00
	Jumlah	**257.393.941.760,00**	**263.659.961.912,00**	**102,43**	**259.555.979.223,00**

5.1.3.1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.578.000.000,00	1.397.184.152,00	1.478.781.514,00

Pada TA 2024, Transfer Bagi Hasil Pendapatan direalisasikan senilai Rp1.397.184.152,00 atau 88,54% dari yang dianggarkan senilai Rp1.578.000.000,00, yang merupakan bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibagi hasil kepada pemerintah desa di Kabupaten Flores Timur. Rincian Belanja Bagi Hasil Pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	1.578.000.000,00	1.397.184.152,00	88,54	1.478.781.514,00
	Jumlah	**1.578.000.000,00**	**1.397.184.152,00**	**88,54**	**1.478.781.514,00**

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa direalisasikan sebesar 88,54% dari yang dianggarkan, yang merupakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak ke Desa berdasarkan pencapaian Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa yang bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 2 Tahun2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa diberikan kepada 229 desa di Kabupaten Flores Timur.

5.1.3.2. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
255.815.941.760,00	262.262.777.760,00	258.077.197.709,00

Pada TA 2024, Belanja Bantuan Keuangan direalisasikan senilai Rp262.262.777.760,00 atau 102,52% dari yang dianggarkan senilai Rp255.815.941.760,00. Realisaso tersebut merupakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diberikan kepada 229 desa di

Kabupaten Flores Timur.

Belanja Bantuan Keuangan ke Desa – Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Untuk Tahun Anggaran 2024, telah disalurkan 100% ke 229 desa di Kabupaten Flores Timur dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024.

5.1.4. Pembiayaan Daerah

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
89.822.270.263,59	89.730.117.486,59	53.832.641.756,92

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2024 sebesar Rp89.730.117.486,59 atau 99,90% dari yang dianggarkan senilai Rp89.822.270.263,59

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	91.322.270.263,59	91.230.117.486,59	99,90	55.832.641.756,92
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	**89.822.270.263,59**	**89.730.117.486,59**	**99,90**	**53.832.641.756,92**

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
91.322.270.263,59	91.230.117.486,59	55.832.641.756,92

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Flores Timur TA 2024 senilai Rp91.230.117.486,59 atau 99,90% dari yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp91.322.270.263,59 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	91.222.270.263,59	91.222.120.486,59	100,00	55.818.571.756,92
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.000.000,00	7.997.000,00	8,00	14.070.000,00
	Jumlah	**91.322.270.263,59**	**91.230.117.486,59**	**99,90**	**55.832.641.756,92**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 yang digunakan pada TA 2024 adalah senilai Rp91.865.331.453,61. Rincian SiLPA TA 2024 tersebut terdiri dari:

Tabel 5.40 Rincian SiLPA TA 2024

No.	Uraian		Nilai
1	Sisa Kas di Kas Daerah	Rp	64.044.049.010,12
2	Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	12.047.400,00
3	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	881.315,47
4	Sisa Kas di BLUD	Rp	4.350.452.660,00
5	Sisa Kas Dana BOS	Rp	417.644.719,10
6	Sisa Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	1.257.278.218,00
7	Sisa Kas di Bendahara BOK	Rp	3.424.303.075,00
8	Kas Lainnya	Rp	457.154.618,02
	Jumlah	Rp	**73.963.811.015,71**

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00

Pada TA 2024, Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Flores Timur adalah senilai Rp1.500.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan senilai Rp1.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000.000,00**

5.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2024 senilai Rp73.588.243.153,69 Terdapat penurunan SILPA senilai Rp17.634.027.109,90 jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 senilai Rp91.222.270.263,59. Rincian lebih lanjut terkait SILPA Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

a.	Surplus/Defisit	Rp	(16.141.874.332,90)	
b.	Pembiayaan Netto	Rp	89.730.117.486,59	+
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	73.588.243.153,69	

5.2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Flores Timur Awal Tahun 2024 senilai Rp91.222.270.263,59 Terdapat kenaikan Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp35.406.730.564,67 jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 senilai Rp55.815.539.698,92.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada Tahun 2024 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai Rp91.222.120.486,59.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 senilai Rp73.588.243.153,69. Terdapat penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran senilai Rp17.634.027.109,90 jika dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 senilai Rp91.222.270.263,59.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(149.777,00)	3.032.058,00

Saldo Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp149.777,00 merupakan nilai pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara yang tidak dapat disetorkan kembali ke Kas Daerah dikarenakan retur Belanja Insentif UKM Esensial yang bersumber dari Dana BOK pada Puskesmas Waiwadan.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 senilai Rp73.588.243.153,69 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 senilai Rp91.222.270.263,59 Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.42 Daftar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024

No	Uraian		Nilai
1	Kas di Kas Daerah	Rp	64.044.049.010,12
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	12.047.400,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	881.315,47
4	Kas di BLUD	Rp	4.350.452.660,00
5	Kas Dana BOS	Rp	417.644.719,10
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp	1.257.278.218,00
7	Kas di Bendahara BOK	Rp	3.424.303.075,00
8	Kas Lainnya	Rp	457.154.618,02
9	**Jumlah 1 s.d. 9**	**Rp**	**73.963.811.015,71**

10	Utang PFK	Rp	(375.567.862,01)
11	**Jumlah 10**	**Rp**	**(375.567.862,01)**
12	**Sisa Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024**	**Rp**	**73.588.243.153,69**

5.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.364.003.371.638,43	1.298.592.547.201,40

Saldo Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.365.341.921.638,43 dan Rp1.298.592.547.201,40 mengalami kenaikan Aset tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 senilai Rp66.749.374.437,03 atau 5,14%. Rincian lebih lanjut atas jumlah Aset per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43 Saldo Aset per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Lancar	132.161.165.212,58	152.394.687.814,09
2	Investasi Jangka Panjang	72.626.589.622,54	68.867.011.474,64
3	Aset Tetap	1.061.214.739.585,81	981.551.753.691,25
4	Properti Investasi	1.095.157.479,85	1.111.151.479,84
5	Aset Lainnya	96.905.719.737,65	94.667.942.741,58
	Jumlah	**1.364.003.371.638,43**	**1.298.592.547.201,40**

5.3.1.1. Aset Lancar

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
132.161.165.212,58	152.394.687.814,09

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp132.161.165.212,58 dan Rp152.394.687.814,09. Aset Lancar pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 senilai Rp20.233.522.601,51 atau turun 13,28%.

Tabel 5.44 Saldo Aset Lancar per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	73.963.811.015,71	91.865.331.453,61
2	Piutang	26.010.964.464,28	17.416.438.951,00
3	Penyisihan Piutang	(7.825.026.414,42)	(6.661.133.819,80)
4	Beban Dibayar Dimuka	8.076.003.974,00	0,00
5	Persediaan	31.935.412.173,01	49.774.051.229,28
	Jumlah	**132.161.165.212,58**	**152.394.687.814,09**

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
73.963.811.015,71	91.865.331.453,61

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Rincian Kas dan Setara Kas Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.45 Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	64.044.049.010,12	87.618.943.155,88
2	Kas di Bendahara Penerimaan	12.047.400,00	32.730.341,17
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	881.315,47	313.305.306,00
4	Kas di BLUD	4.350.452.660,00	0,00
5	Kas Dana BOS	417.644.719,10	820.491.133,44
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.257.278.218,00	238.039.255,00
7	Kas di Bendahara BOK	3.424.303.075,00	649.696.313,12
8	Kas Lainnya	457.154.618,02	2.192.125.949,00
	Jumlah	**73.963.811.015,71**	**91.865.331.453,61**

5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
64.044.049.010,12	87.618.943.155,88

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2024 pada PT Bank NTT Cabang Larantuka, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Larantuka, dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Larantuka. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp64.044.049.010,12 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp87.618.943.155,88 Rincian Kas Daerah di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.46 Rincian Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Rekening Kas Daerah	Per 31 Desember 2024		Per 31 Desember 2023	
A	**Rekening Giro**	**Rp**	**60.544.049.010,12**	**Rp**	**83.618.943.155,88**
1	Bank NTT Cabang Larantuka 1013514417	Rp	60.435.736.834,18	Rp	83.498.752.626,34
2	Bank NTT Cabang Larantuka 1013648995	Rp	108.307.378,94	Rp	118.655.350,54
3	BRI Cabang Larantuka 0246.01.00111130.7	Rp	0,00	Rp	1.530.382,00
4	BNI Cabang Larantuka 54926641	Rp	4.797,00	Rp	4.797,00
B	**Rekening Deposito**	**Rp**	**3.500.000.000,00**	**Rp**	**4.000.000.000,00**
1	BPR Bina Usaha Dana 001.301.000428	Rp	3.500.000.000,00	Rp	4.000.000.000,00
	Jumlah	**Rp**	**64.044.049.010,12**	**Rp**	**87.618.943.155,88**

Penjelasan mengenai Kas di Kas Daerah sebagai berikut.

1. Pada Bank NTT Cabang Larantuka, terdapat dua Rekening BUD, yaitu:
   a. Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten

Flores Timur dengan Nomor Rekening Bank NTT Larantuka (1013514417) merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang meliputi penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pengeluaran atas belanja daerah. Saldo Akhir Bank pada rekening Rp60.435.736.834,18; dan

b. Rekening Penerimaan Daerah (Rekening Penampung PAD Pemerintah Kabupaten Flores Timur) dengan Nomor Rekening Bank NTT Cab. Larantuka (1013648995) merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung seluruh Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur antara lain Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebelum akhirnya dipindahbukukan ke RKUD. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengusulkan penutupan Rekening Penampungan PAD untuk kemudian memusatkan seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran pada satu Rekening Kas Daerah. Saldo Akhir Bank per 31 Desember 2024 senilai Rp108.307.378,94.

2. Pada BNI Cabang Larantuka dengan Nomor Rekening (54926641) merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung bunga deposito dimana rekening deposito tersebut sudah di tutup pada tahun 2020. Saldo Akhir pada rekening BNI Cabang Larantuka Rp4.797,00;
3. Penempatan deposito pada BPR Bina Usaha Dana dengan Nomor Rekening (001.301.000428) senilai Rp3.500.000.000,00. pada tanggal 30 Desember 2024

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
12.047.400,00	32.730.341,17

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp12.047.400,00 merupakan saldo penerimaan yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan, RSUD Adonara, dan Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

1. Kas di Bendahara Penerimaan Penerimaan Dinas Perhubungan yang merupakan penerimaan Retribusi Daerah senilai Rp1.160.000,00 telah disetor ke RKUD tanggal 31 Januari 2025 berdasarkan STS Nomor 006/STS/245/2025 senilai Rp1.160.000,00;
2. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata yang merupakan penerimaan Retribusi Jasa Usaha senilai Rp1.294.400,00; dan
3. Kas di Bendahara Penerimaan RSUD Adonara yang merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.243.000,00 telah disetor ke RKUD tanggal 31 Januari 2025 berdasarkan STS Nomor 900/011/RSPA/TU/I/2025.
4. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan yang merupakan penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas senilai Rp1.130.500,00 yang disetor ke RKUD tanggal 28 Februari 2025 berdasarkan STS Nomor 000007/STS/211/2025, dan senilai Rp6.219.500 yang disetor ke RKUD pada tanggal 17 Februari 2025 berdasarkan STS Nomor 000006/STS/211/2025.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 senilai Rp32.730.341,17 merupakan saldo pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan senilai Rp11.171.841,17 dan saldo pada Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Adonara senilai Rp21.558.500,00 Saldo senilai Rp32.730.341,17 tersebut telah disetor ke RKUD masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024 senilai Rp21.558.500,00, tanggal 5 Januari 2024 senilai Rp5.401.453,17 berdasarkan STS Nomor 00001/STS/211/2024, tanggal 29 Desember 2023 senilai Rp.2.858.676,00 dengan STS nomor 000115/STS/211/2023 dan tanggal 21 Maret 2024 senilai Rp2.911.712,00 dengan STS nomor 0000/STS/211/2024.

5.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
881.315,47	313.305.306,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 senilai Rp881.315,47 yang merupakan sisa kas baik tunai maupun nontunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran SKPD dan belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Nilai per 31 Desember 2024	Penyetoran 2025		31 Desember 2023
			Nilai Setoran	Tanggal Setor	
1	Kantor Lurah Lokea	203.000,00	203.000,00	6 Januari 2025	0,00
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	512.000,00	512.000,00	6 Maret 2025	153.009.779,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	166.315,47	166.315,47	24 April 2025	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	-	6.200,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	-	119.000,00
6	Kantor Camat Adonara Timur	0,00	0,00	-	9.071.000,00
7	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	-	151.099.327,00
	Jumlah	**881.315,47**	**881.315,47**		**313.305.306,00**

5.3.1.1.1.4. Kas di BLUD

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.350.452.660,00	0,00

RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Kabupaten Flores Timur terhitung sejak tanggal 29 Mei 2023 sesuai dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 159 Tahun 2023. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp4.350.452.660,00 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka. Penjelasan mutasi saldo Kas di BLUD sebagai berikut.

Tabel 5.48 Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024

No	Uraian		Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	Rp	0,00
2	Koreksi Saldo Awal	Rp	0,00
	a. Tambah	Rp	0,00
	b. Kurang	Rp	0,00

No	Uraian		Nilai (Rp)
3	Saldo Awal Setelah Koreksi	Rp	0,00
4	Pendapatan	Rp	28.016.375.792,00
5	Belanja	Rp	
	a. Pegawai	Rp	0,00
	b. Barang dan Jasa	Rp	23.665.923.132,00
	c. Modal	Rp	0,00
	Saldo Akhir	**Rp**	**4.350.452.660,00**

5.3.1.1.1.5. Kas Dana BOS

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
417.644.719,10	820.491.133,44

Saldo Kas Dana Bos per 31 Desember 2024 senilai Rp417.644.719,10 Saldo tersebut mengalami penurunan senilai Rp402.846.414,34 atau 49,10% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp820.491.133,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.49 Rincian Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas BOS SD Negeri	297.655.606,37	550.930.070,46
2	Kas BOS SMP Negeri	119.989.112,73	269.561.062,98
	Jumlah	**417.644.719,10**	**820.491.133,44**

Satuan pendidikan negeri di Kabupaten Flores Timur yang menerima dan mengelola dana BOS pada Tahun 2024 adalah sebanyak 194 Sekolah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.50 Rincian Satuan Pendidikan Negeri yang Menerima dan Mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOP PAUD)

No.	Status Satuan Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD Negeri	152 sekolah	Dana BOS
2	SMP Negeri	42 sekolah	Dana BOS
	Jumlah	**194 sekolah**	

Rincian saldo akhir Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.257.278.218,00	238.039.255,00

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 senilai Rp1.257.278.218,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.019.238.963,00 atau 428,18% dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp238.039.255,00 Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan jumlah seluruh sisa saldo rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 22 (dua puluh dua) Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Rincian Saldo Kas Dana Kapitasi pada Masing – Masing FKTP

No	Nama Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Baniona	101.382.135,00	27.235.430,00
2	Puskesmas Boru	34.922.075,00	3.857.197,00
3	Puskesmas Ile Boleng	58.291.760,00	17.339.525,00
4	Puskesmas Lambunga	66.184.762,00	622,00
5	Puskesmas Lewolema	33.898.551,00	309,00
6	Puskesmas Lite	38.751.159,00	5.424.186,00
7	Puskesmas Nagi	157.648.300,00	28.490.047,00
8	Puskesmas Oka	50.032.288,00	7.249,00
9	Puskesmas Waiklibang	46.805.531,00	39.375.397,00
10	Puskesmas Witihama	100.834.800,00	37.577,00
11	Puskesmas Demon Pagong	22.501.884,00	929,00
12	Puskesmas Ile Bura	34.030.858,00	3.852.192,00
13	Puskesmas Kalike	103.240.878,00	461.436,00
14	Puskesmas Lato	37.991.052,00	11.725.693,00
15	Puskesmas Lewolaga	46.060.949,00	30.520.690,00
16	Puskesmas Menanga	46.467.546,00	1,00
17	Puskesmas Ritaebang	61.859.116,00	29.044,00
18	Puskesmas Sagu	73.396.209,00	2.076.002,00
19	Puskesmas Waimana	37.413.220,00	11.524.495,00
20	Puskesmas Waiwadan	27.755.798,00	12.969.145,00
21	Puskesmas Waiwerang	73.943.225,00	43.112.089,00
22	RSUD Adonara	3.866.122,00	0,00
	Jumlah	**1.257.278.218,00**	**238.039.255,00**

Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas/FKTP diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Kepada SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD selaku BUD. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran dana kapitasi JKN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap Puskesmas/FKTP dan diakui sebagai pendapatan dan belanja setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD selaku BUD.

Daftar rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 3** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.1.7. Kas di Bendahara BOK

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.424.303.075,00	2.192.125.949,00

Saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) per 31 Desember 2024 senilai Rp3.424.303.075,00, yang merupakan saldo akhir kas Dana BOK yang terdapat di Puskesmas Kabupaten Flores Timur. Dana BOK ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dana BOK Puskesmas merupakan dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Kesehatan yang digunakan

untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat di puskesmas sesuai Permenkes Nomor 11 Tahun 2015.

Adapun jumlah Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Flores Timur yang menerima dan mengelola Dana BOK pada Tahun 2024 sebanyak 21 Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52 Puskesmas Pengelola Dana BOK di Kabupaten Flores Timur TA 2024

No.	Puskesmas	Saldo per 31 Desember 2024
1	Puskesmas Baniona	350.095.408,00
2	Puskesmas Boru	325.394.787,00
3	Puskesmas Demon Pagong	140.658.550,00
4	Puskesmas Ile Boleng	498.177,00
5	Puskesmas Ile Bura	382.478.826,00
6	Puskesmas Kalike	50.024.738,00
7	Puskesmas Lambunga	146.167.783,00
8	Puskesmas Lato	82.247.139,00
9	Puskesmas Lewolaga	94.940.741,00
10	Puskesmas Lewolema	177.197.709,00
11	Puskesmas Lite	321.775.908,00
12	Puskesmas Menanga	194.944.123,00
13	Puskesmas Nagi	44.703.529,00
14	Puskesmas Oka	81.202.184,00
15	Puskesmas Ritaebang	154.236.184,00
16	Puskesmas Sagu	137.908.218,00
17	Puskesmas Waiklibang	23.936.100,00
18	Puskesmas Waimana	127.955.411,00
19	Puskesmas Waiwadan	307.364.982,00
20	Puskesmas Waiwerang	170.006.177,00
21	Puskesmas Witihama	110.566.401,00
	Total	**3.424.303.075,00**

5.3.1.1.1.8. Kas Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
457.154.618,02	649.696.313,12

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp457.154.618,02 merupakan saldo akhir kas pada rekening Dana BOS yang tidak terdaftar dalam SK Bupati dan saldo akhir Utang PFK, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Saldo Kas Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Prolanis	93.528.403,00	0,00
2	Kas Lainnya Dana BOS	110.000,00	692.105,87
3	Pajak Resto dari Dana BOS	7.940.900,00	1.495.000,00
4	Kas Lainnya BUD	355.575.315,02	355.575.315,02
5	Kas Lainnya Dinas Kesehatan untuk belanja honorarium	0,00	266.855.375,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
6	Kas Lainnya Kantor Camat Adonara untuk belanja honorarium	0,00	1.600.000,00
7	Jasa giro pada rekening Dana BOS SMPN Batupayung	0,00	2885,26
8	Jasa giro pada bendahara rutin SMPN Batupayung	0,00	273,97
9	Koreksi saldo awal kas pada bendahara rutin SMPN Lamatewelu	0,00	5.247.858,00
10	Utang PFK PPh 21 pada bendahara rutin SMPN Lembah Seburi	0,00	577.500,00
11	Belanja barang dan jasa atas GU yang belum dibayarkan pada bendahara rutin SMPN 1 Adonara Timur dan SMPN Satap Bilal	0,00	17.650.000,00
	Jumlah	**457.154.618,02**	**649.696.313,12**

5.3.1.1.2. Piutang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
26.010.964.464,28	17.416.438.951,00

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Flores Timur terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain. Saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebelum penyisihan senilai Rp26.010.964.464,28 mengalami kenaikan senilai Rp8.594.525.513,28 atau 49,35% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp17.416.438.951,00 Sedangkan saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp7.825.026.414,42 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp6.661.133.819,80. Saldo piutang pendapatan disajikan bersih/neto per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.54 Rincian Piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
A	**Piutang**			
1	Piutang Pajak Daerah	10.308.358.788,59	7.956.175.393,00	2.352.183.395,59
2	Piutang Retribusi Daerah	1.495.454.608,00	1.275.588.678,00	219.865.930,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.168.828.225,69	2.193.682.658,00	8.975.145.567,69
4	Piutang Transfer Antar Daerah	3.038.322.842,00	5.990.992.222,00	(2.952.669.380,00)
B	**Penyisihan Piutang**			
1	Penyisihan Piutang Pajak	(5.425.836.719,72)	(4.646.778.524,80)	(779.058.194,92)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.332.571.758,00)	(960.634.097,00)	(371.937.661,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(1.066.617.936,70)	(1.053.721.198,00)	(12.896.738,70)
4	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**18.185.938.049,86**	**10.755.305.131,20**	**7.430.632.918,66**

5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
10.308.358.788,59	7.956.175.393,00

Piutang Pajak merupakan Saldo Piutang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 senilai Rp10.308.358.788,59 mengalami kenaikan mencapai Rp2.352.183.395,59 dari saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 senilai Rp7.956.175.393,00 atau sebesar 29,56% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	14.662.152,00	14.662.152,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	83.486.600,00	83.486.600,00	0,00
3	Piutang Pajak Reklame papan/*Billboard*/Videotron/ Megatron	915.099.708,00	716.914.382,00	198.185.326,00
4	Piutang Pajak Hiburan Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	50.300.200,00	34.727.600,00	15.572.600,00
6	Piutang Pajak Bahan Galian Gol. C Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya	121.356.414,00	121.356.414,00	0,00
7	Piutang PBB-P2	9.120.683.714,59	6.982.258.245,00	2.138.425.469,59
8	Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**10.308.358.788,59**	**7.956.175.393,00**	**2.352.183.395,59**

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Piutang Pajak Hotel senilai Rp14.662.152,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp14.662.152,00, tidak terdapat penyetoran piutang pajak hotel tahun 2024;
2. Piutang Pajak Restoran senilai Rp83.486.600,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp83.486.600,00, tidak terdapat penyetoran piutang pajak restoran tahun 2024;
3. Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron senilai Rp915.099.708,00 merupakan penjumlahan saldo awal sebesar Rp716.914.382,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp203.796.326,00 dikurangi penyetoran piutang pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron pada tahun 2024 sebesar Rp5.611.000,00;
4. Piutang Pajak Hiburan Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya senilai Rp2.770.000,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp2.770.000,00, tidak terdapat penyetoran piutang pajak hotel tahun 2024;
5. Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp50.300.200,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp34.727.600,00 ditambah penambahan piutang tahun berjalan senilai Rp15.572.600,00 dan tidak terdapat penyetoran piutang pajak air tanah di tahun 2024;
6. Piutang Pajak Bahan Galian Gol. C Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya senilai Rp121.356.414,00 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp121.356.414,00,

tidak terdapat penyetoran piutang pajak bahan galian C di tahun 2024;

7. Piutang PBB-P2 pada tahun 2024 senilai Rp9.120.683.714,59 merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp6.982.258.245,00 ditambah penambahan Piutang tahun berjalan senilai Rp2.342.174.738,59 dikurangi total penyetoran Piutang tahun 2024 senilai Rp203.749.269,00.

Rincian Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.495.454.608,00	1.275.588.678,00

Saldo Piutang Retribusi merupakan Saldo Piutang Retribusi Daerah pada 3 (tiga) SKPD per 31 Desember 2024 senilai Rp1.495.454.608,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp219.865.930,00 dari saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 senilai Rp1.275.588.678,00 atau sebesar 17,24% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Jenis Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	22.610.700,00	61.090.700,00	(38.480.000,00)
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	307.618.620,00	263.580.690,00	44.037.930,00
3	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.165.225.288,00	950.917.288,00	214.308.000,00
	Jumlah	**1.495.454.608,00**	**1.275.588.678,00**	**219.865.930,00**

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pendapatan Daerah sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp61.090.700,00, pada tahun berjalan terdapat penyetoran piutang Retribusi senilai Rp38.480.000,00, sehingga saldo akhir senilai Rp22.610.700,00;
2. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendaoatan Daerah dengan saldo awal senilai Rp263.580.690,00 pada tahun berjalan terdapat penyetoran senilai Rp9.661.570,00 dan penambahan piutang baru pada tahun berjalan senilai Rp53.699.500,00, sehingga saldo akhir Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp307.618.620,00; dan
3. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp950.917.288,00 ditambah penambahan piutang pada tahun berjalan senilai Rp272.072.000,00, dan terdapat penyetoran pada tahun berjalan senilai Rp57.764.000,00 sehingga saldo akhir Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan senilai Rp1.165.225.288,00.

Rincian Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 5** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.2.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
11.168.828.225,69	2.193.682.658,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian, Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Pemanfaatan hasil BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Keuangan Kerugian Daerah dan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2024 senilai Rp11.168.828.225,69 mengalami kenaikan senilai Rp8.975.145.567,69 atau 409,14% dari saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 senilai Rp2.193.682.658,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	21.500.000,00	21.500.000,00
2	Piutang Pemanfaatan hasil BMD yang Tidak Dipisahkan	144.248.098,00	144.248.098,00
3	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Keuangan Kerugian Daerah	528.500.000,00	533.500.000,00
4	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	506.128.468,00
5	Piutang Pendapatan BLUD	7.007.259.288,03	0,00
6	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.955.903,00	312.847.795,00
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	3.166.364.936,66	675.458.297,00
	Jumlah	**11.168.828.225,69**	**2.193.682.658,00**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 yang tercatat di Neraca merupakan Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Sekretarian DPRD sebelum Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Dinas Perikanan merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp21.500.000,00, tidak terdapat penambahan maupun penyetoran piutang pada tahun berjalan;
2. Piutang Pemanfaatan hasil BMD yang Tidak Dipisahkan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan yang merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp144.248.098,00, tidak terdapat penambahan maupun penyetoran piutang pada tahun berjalan;

3. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Keuangan Kerugian Daerah pada Sekretarian DPRD merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp533.500.000,00 terdapat penyetoran di tahun berjalan senilai Rp5.000.000,00 sehingga saldo akhir menjadi Rp528.500.000,00;
4. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan pada Dinas PUPR merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp506.128.468,00, pada tahun berjalan terdapat pelunasan piutang senilai Rp506.128.468,00 sehingga saldo akhir menjadi Rp0,00;
5. Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka senilai Rp7.003.608.725,00 yang merupakan klaim BPJS tahun 2023 yang disetor ke Kas BLUD tahuan 2024
6. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp312.847.795,00 pada tahun berjalan terdapat penyetoran senilai Rp11.891.892,00 sehinnga saldo akhir senilai Rp300.955.903,00; dan
7. Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Pendidkan, Kepemudaan dan Olahraga, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjumlahan saldo awal senilai Rp675.458.297,00, ditambah dengan timbulnya piutang baru senilai Rp2.579.347.739,66 dan dikurangi dengan penyetoran pada tahun berjalan senilai Rp88.441.100,00, sehingga saldo akhir menjadi senilai Rp3.166.364.936,66.

5.3.1.1.2.4. Piutang Transfer

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.038.322.842,00	5.990.992.222,00

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.038.322.842,00 dan Rp5.990.992.222,00, yang merupakan saldo Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, rincian lebih lanjut atas Piutang Transfer Antar Daerah TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.58 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah TA 2024

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	397.770.759,00	2.024.887.193,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	913.393.543,00	891.340.796,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.727.158.540,00	3.064.652.526,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	-	10.111.707,00
	Jumlah	**3.038.322.842,00**	**5.990.992.222,00**

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2023 senilai Rp5.990.992.222,00 telah ditransfer pada tahun berjalan, saldo piutang per 31 Desember 2024 senilai Rp3.038.322.842,00 merupakan piutang baru pada tahun berjalan yang tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5.3.1.1.2.5. Penyisihan Piutang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(7.825.026.414,42)	(Rp6.661.133.819,80)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp7.825.026.414,42 dan Rp6.661.133.819,80, yang merupakan taksiran nilai piutang tidak tertagih dan/atau tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Rincian lebih lanjut atas saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.59 Rincian Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	(5.425.836.719,72)	(4.646.778.524,80)	(779.058.194,92)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.332.571.758,00)	(960.634.097,00)	(371.937.661,00)
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(1.066.617.936,69)	(1.053.721.198,00)	(12.896.738,70)
	Jumlah	**(7.825.026.414,42)**	**(6.661.133.819,80)**	**(1.163.892.594,62)**

1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp5.425.836.719,72 dan Rp4.646.778.524,80. Rincian lebih lanjut atas penyisihan Piutang Pajak Daerah berdasarkan jenis pajak daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.60 Rincian Penyisihan Piutang per Jenis Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(14.662.152,00)	(14.662.152,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(83.486.600,00)	(83.486.600,00)
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(381.965.218,33)	(246.770.887,50)
4	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(2.770.000,00)	(2.770.000,00)
5	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(14.513.243,00)	(7.750.680,00)
6	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Galian Golongan C	(121.356.414,00)	(121.356.414,00)
7	Penyisihan Piutang Pajak PBB	(4.807.083.092,39)	(4.169.981.791,30)
8	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	0,00
	Jumlah	**(5.425.836.719,72)**	**(4.646.778.524,80)**

Rincian lebih lanjut atas penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 6** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.332.571.758,00 dan Rp960.634.097,00. Rincian lebih lanjut atas penyisihan Piutang Retribusi Daerah berdasarkan jenis retribusi daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.61 Rincian Penyisihan Piutang per Jenis Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(22.613.600,00)	(22.800.229,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	(280.768.870,00)	(227.526.160,00)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	(662.475.788,00)	(514.715.468,00)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	(366.713.500,00)	(195.592.240,00)
	Jumlah	**(1.332.571.758,00)**	**(960.634.097,00)**

Rincian lebih lanjut atas penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 7** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

3) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.066.617.936,69 dan Rp1.053.721.198,00. Rincian lebih lanjut atas penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan jenis pendapatan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.62 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per Jenis Pendapatan TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	**Dinas PUPR**		
	a. Sewa Alat Berat	(122.948.098,00)	(122.948.098,00)
	b. Denda Keterlambatan atas Pekerjaan	(300.955.903,00)	(300.955.903,00)
	c. Kelebihan Pembayaran kepada Rekanan	(281.257.160,55)	(278.657.127,00)
2	**Dinas PKO**		
	a. Denda Keterlambatan atas Pekerjaan	0,00	0,00
	b. Belanja Pegawai	(26.266.570,00)	(26.266.570,00)
3	**Dinas Perhubungan**		
	a. Piutang Sewa Kios	(21.300.000,00)	(21.300.000,00)
4	**Dinas Perikanan**		
	a. Piutang Serah Kapal	(21.500.000,00)	(21.500.000,00)
5	**BPKAD**		
	a. Piutang Belanja Pegawai	(282.093.500,00)	(282.093.500,00)
6.	**Dinas Kesehatan**		
	a. Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan	(9.461.011,59)	0,00
7.	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**		
	a. Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan	(835.693,56)	0,00
	Jumlah	**(1.066.617.936,70)**	**(1.053.721.198,00)**

Rincian lebih lanjut atas penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 8** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.1.3. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
8.076.003.974,00	0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp8.076.003.974,00 dan Rp0,00, atau mengalami kenaikan senilai Rp8.076.003.974,00 atau 100% yang merupakan sisa dana hibah ke KPU dan Bawaslu yang belum dikembalikan per 31 Desember 2024 ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Flores Timur senilai Rp7.655.161.177,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Mei 2025; dan
2. Bawaslu Kabupaten Flores Timur senilai Rp420.842.797,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 11 April 2025.

5.3.1.1.4. Persediaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
31.935.412.173,01	49.774.051.229,28

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp31.935.412.173,01 dan Rp49.774.051.229,28, atau mengalami penurunan senilai Rp17.838.639.056,27 atau 35,84% yang merupakan saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada 50 SKPD. Rincian lebih lanjut atas saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Rincian Persediaan Per Jenis per SKPD dan per jenis barang sebagaimana disajikan pada **Lampiran 9**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
72.626.589.622,54	68.867.011.474,64

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp72.626.589.622,54 dan Rp68.867.011.474,64 yang merupakan Investasi Permanen.

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non-Permanen – Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
31.655.755.302,00	31.663.752.302,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non-Permanen – Lainnya per 31 Desember 2024 senilai

Rp31.655.755.302,00 mengalami penurunan senilai Rp7.997.000,00 atau sebesar 0,03% dari Saldo Investasi Jangka Panjang Non-Permanen – Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp31.663.752.302,00.

5.3.1.2.2. Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(31.655.755.302,00)	(31.663.752.302,00)

Saldo Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen per 31 Desember 2024 senilai Rp31.655.755.302,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.997.000,00 atau sebesar 0,03% dari Saldo Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen per 31 Desember 2023 senilai Rp31.663.752.302,00.

5.3.1.2.3. Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
72.626.589.622,54	68.867.011.474,64

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp72.626.589.622,54 dan Rp68.867.011.474,64. Kenaikan Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dibandingkan per 31 Desember 2023 adalah 5,46% atau senilai Rp3.759.578.147,90.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan saldo dana Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2024. Investasi Penyertaan Modal Kabupaten Flores Timur terdapat di Bank NTT, Perumda Air Minum Ina Gelekat, dan PT BPR Bina Usaha Dana Larantuka dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bank NTT	500.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Perumda Ina Gelekat	2.216.394.576,00	500.000.000,00
3	PT BPR Bina Usaha Dana	1.040.698.062,54	500.000.000,00
	Jumlah	**3.757.092.638,54**	**2.000.000.000,00**

1. Bank NTT

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 pada Bank NTT senilai Rp35.298.590.000,00 dan Rp34.798.590.000,00 mengalami kenaikan dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp500.000.000,00.

2. Perumda Air Minum Ina Gelekat

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 pada Perumda Air Minum Ina Gelekat senilai Rp13.452.352.827,00 mengalami kenaikan dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.216.394.576,00, berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Air Minum Ina Gelekat (*audited*).

Berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Air Minum Ina Gelekat (*audited*) mencatat

Ekuitas Tahun 2024 senilai Rp13.452.352.827,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Mutasi Saldo Penyertaan Modal Perumda Air Minum Ina Gelekat

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023	**11.235.958.251,00**
Penambahan Modal	500.000.000,00
Koreksi Saldo Laba	(71.544.968,00)
Laba (Rugi) Tahun 2024	1.787.939.544,00
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	**Rp13.452.352.827,00**

2. PT BPR Bina Usaha Dana

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Bina Usaha Dana per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp23.875.646.795,54 dan Rp22.834.948.733,00. Terdapat kenaikan atas saldo penyertaan modal pemerintah daerah pada PT BPR Bina Usaha Dana senilai Rp1.040.698.062,54 berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00014/2.1446/AU.2/07/1723-2/1/III/2025. 3. PT BPR Bina Usaha Dana didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Bank Perkereditan Rakyat.

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.061.214.739.585,81	981.551.753.691,25

Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.061.214.739.585,81 dan Rp981.551.753.691,25. Adapun rincian atas Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.65 Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	119.618.945.942,00	119.528.945.942,00
2	Peralatan dan Mesin	414.063.510.860,23	359.801.669.125,24
3	Gedung dan Bangunan	662.802.554.635,37	566.547.370.880,61
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.437.946.252.083,54	1.381.253.387.189,43
5	Aset Tetap Lainnya	13.657.826.465,70	11.377.622.059,04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.315.185.935,00	36.255.812.518,13
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.601.189.536.336,03)	(1.493.213.054.023,20)
	Jumlah	**1.061.214.739.585,81**	**981.551.753.691,25**

Selanjutnya, rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dengan Akumulasi Penyusutan per jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.66 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	119.618.945.942,00	0,00	119.618.945.942,00
2	Peralatan dan Mesin	414.063.510.860,23	(313.587.468.631,91)	100.476.042.228,33

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3	Gedung dan Bangunan	662.802.554.635,37	(158.278.127.656,04)	504.524.426.979,34
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.437.946.252.083,54	(1.128.812.673.868,08)	309.133.578.215,45
5	Aset Tetap Lainnya	13.657.826.465,70	(511.266.180,00)	13.146.560.285,70
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.315.185.935,00	0,00	14.315.185.935,00
	Jumlah	**2.662.404.275.921,84**	**(1.601.189.536.336,03)**	**1.061.214.739.585,81**

5.3.1.3.1. Tanah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
119.618.945.942,00	119.528.945.942,00

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp119.618.945.942,00 dan Rp119.528.945.942,00 atau bertambah senilai Rp90.000.000,00 atau 0,08%. Kenaikan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.67 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024

No.	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	**Saldo Awal Aset Tetap**	**119.528.945.942,00**
1	Saldo Awal Aset Tanah Tahun 2024	119.528.945.942,00
B	**Mutasi Tambah**	**90.000.000,00**
1	Belanja Modal Tahun Berjalan	90.000.000,00
2	Revaluasi Penambahan Aset Tetap	0,00
3	Penambahan Tanah dari Utang	0,00
C	**Mutasi Kurang**	**0,00**
1	Reklasifikasi Ke Persediaan	0,00
2	Aset Tetap yang dihapuskan karena dihibahkan	0,00
D	**Saldo Per 31 Desember 2024 (A + B – C)**	**119.618.945.942,00**

Mutasi tambah atas Aset Tetap Tanah TA 2024 berasal dari belanja Modal Tanah pada Dinas Kesehatan sesuai LRA senilai Rp90.000.000,00. Selanjutnya, tidak terdapat mutasi kurang atas Aset Tetap Tanah TA 2024. Rincian lebih lanjut atas Aset Tetap Tanah disajikan pada **Lampiran 10** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
414.063.510.860,23	359.801.669.125,24

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp414.063.510.860,23 dan Rp359.801.669.125,24 atau bertambah senilai Rp54.261.841.735,00 atau 15,08%. Penambahan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.68 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No.	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	**Saldo Awal Aset Tetap**	**359.801.669.125,23**
1	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024	359.801.669.125,23
B	**Mutasi Tambah**	**56.422.126.749,00**
1	Belanja Modal Tahun Berjalan	48.525.952.256,00
2	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	148.750.000,00
3	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi)	392.908.660,00
4	Belanja Barang dan Jasa menjadi aset baru karena kesalahan penganggaran	809.447.100,00
5	Hibah Masuk	1.702.494.724,00
6	Pindah antar aset dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.874.792.839,00
7	Pindah antar aset dari Aset Tetap Lainnya	59.969.050,00
8	Perolehan Aset dari Hutang Tahun Sebelumnya	659.740.000,00
9	Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	248.072.120,00
C	**Mutasi Kurang**	**2.160.285.014,00**
1	Hibah Keluar	608.393.750,00
2	Ekstrakomptabel	1.133.541.757,00
3	Pindah Antar Aset ke Aset Tetap Lainnya	3.916.300,00
4	Pindah Antar Aset ke KDP	197.430.000,00
5	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya	171.824.582,00
6	Reklas ke Barang Habis Pakai	45.178.625,00
D	**Saldo Per 31 Desember 2024 (A+B-C)**	**414.063.510.860,23**

Mutasi tambah senilai Rp56.422.126.749,00 atas Aset Tetap Peralatan Tanah dan Mesin. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Hibah Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan senilai Rp1.424.828.224,00 dengan BAST nomor: KN.01.08/C.I/631/2024, tanggal 7 Juni 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia kepada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp277.666.500,00 dengan BAST Nomor 2880/DJIKP.1/PL.04.03/12/2024, tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69 Daftar Hibah dari Kementerian Tahun 2024

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	Lap Top	6	129.870.000,00
2	Sound System	6	97.569.000,00
3	LCD Projector/Infocus	6	29.304.000,00
4	Overhead Projector	6	9.990.000,00
5	Clipp On	1	2.775.000,00
6	Telephone Mobile	1	8.158.500,00
7	Mesin TCM (Test Cepat Molekular)	1	554.666.666,00
8	Mesin TCM (Test Cepat Molekular)	1	574.260.606,00
9	Mikroskop Binokuler	1	23.536.040,00
10	IVA KIT (Test Mulut Rahim)	4	41.964.912,00
11	Oxygen Regulator (Oxygen Consentrator)	20	230.400.000,00
	Jumlah	**53**	**1.702.494.724,00**

Mutasi kurang atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp2.160.285.014,00. dijelaskan sebagai berikut.

1. Pada Tahun 2024 terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang dipindahkan ke aset lainnya senilai Rp171.824.582,00 yang merupakan aset tetap peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat berdasarkan surat pernyataan SKPD Tahun 2024, yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.70 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Rusak Berat ke Aset Lainnya

No.	SKPD	Nilai Mutasi (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	26.628.916,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.570.000,00
3	Dinas Sosial	21.430.666,00
4	Kantor Camat Wulanggitang	96.314.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.881.000,00
	Jumlah	171.824.582,00

2. Dari penambahan aset tetap peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat aset yang nilainya di bawah kapitalisasi aset tetap maka dilakukan pencatatan pada daftar ekstrakomptabel. Jumlah aset peralatan dan mesin di bawah Batasan minimal kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp1.133.541.757,00 Belanja Modal 2024 tidak menjadi Aset Tetap (di bawah nilai kapitalisasi).

Tabel 5.71 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Ekstrakompatabel

No.	SKPD	Nilai Mutasi (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.347.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.292.973,00
3	Badan Pendapatan Daerah	3.000.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	580.000,00
5	Dinas Kesehatan	89.026.205,00
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	250.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.100.000,00
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.706.000,00
9	Dinas Perhubungan	3.575.340,00
10	Dinas Perikanan	1.664.000,00
11	Dinas Perkebunan dan Peternakan	24.925.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.900.000,00
13	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	815.648.950,00
14	Dinas Tenaga Kerja	8.831.160,00
15	Kantor Camat Adonara Barat	24.185.000,00
16	Kantor Camat Adonara Timur	6.217.000,00
17	Kantor Camat Titehena	6.703.700,00
18	Puskesmas Boru	3.100.000,00
19	Puskesmas Ilebura	1.998.000,00
20	Puskesmas Kalike	450.000,00
21	Puskesmas Lewolema	1.618.000,00
22	Puskesmas Ritaebang	4.198.000,00
23	Puskesmas Waimana	180.000,00
24	Puskesmas Waiwerang	10.099.999,00
25	RSUD Adonara	74.448.500,00
26	Sekretariat Daerah Bagian Umum	17.496.930,00
	Jumlah	1.133.541.757,00

3. Mutasi kurang atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 karena merupakan bahan pakai habis/barang persediaan lainnya senilai Rp45.178.625,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.72 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Bahan Pakai Habis/Barang Persediaan Lainnya

No.	SKPD	Nilai Mutasi (Rp)
1	Dinas Perikanan	1.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.651.125,00
3	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	15.377.500,00
4	RSUD Adonara	27.150.000,00
Jumlah		**45.178.625,00**

4. Mutasi kurang atas aset peralatan dan mesin Tahun 2024 karena adanya hibah keluar aset senilai Rp608.393.750,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.73 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dihibahkan

No.	SKPD	Nilai Mutasi (Rp)
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	270.000.000,00
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	338.393.750,00
Jumlah		**608.393.750,00**

5. Mutasi kurang atas aset peralatan dan mesin Tahun 2024 karena adanya mutasi antar aset tetap ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.916.300 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
6. Mutasi kurang atas aset peralatan dan mesin Tahun 2024 karena adanya mutasi antar aset tetap ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp197.430.000,00 pada Dinas Kesehatan.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 11** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
662.802.554.635,37	566.547.370.880,61

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp662.802.554.635,37 dan Rp566.547.370.880,61 atau bertambah senilai Rp96.255.183.754,76 Penambahan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.74 Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	**Saldo Awal Aset Tetap (1)**	**566.547.370.880,61**
1	Saldo Awal Aset Gedung dan Bangunan 2024	566.547.370.880,61
B	**Mutasi Tambah (1 s.d.10)**	**123.903.509.115,87**
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan	102.571.655.870,00
2	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	223.000.000,00
3	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi)	2.622.775.247,00
4	Belanja Barang dan Jasa menjadi aset baru karena kesalahan penganggaran	411.091.663,00
5	Pindah antar aset dari aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	32.750.000,00
6	Pindah antar aset dari KDP	17.187.213.835,87
7	Pindah antar aset dari Aset lainnya	830.800.000,00
8	Koreksi tambah nilai aset tetap – Bangunan dan Gedung	24.222.500,00
C	**Mutasi Kurang (1 s.d.8)**	**27.648.325.361,11**
1	Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat)	535.053.240,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
2	Pindah antar Aset ke aset tetap Peralatan dan Mesin	3.874.792.839,00
3	Pindah antar Aset ke aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	3.991.215.530,31
4	Pindah antar Aset ke KDP	10.469.997.282,00
5	Reklas Ke Aset Lainnya	6.614.727.541,00
6	Reklas ke Barang Habis Pakai	3.500.000,00
7	Temuan atas Kekurangan Volume	2.059.341.028,80
8	Temuan atas Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi Konstruksi	99.697.900,00
	Saldo Per 31 Desember 2024 (A + B – C)	**662.802.554.635,37**

Mutasi tambah atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sesuai LRA senilai Rp102.571.655.870,00 dengan perincian:

Tabel 5.75 Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	53.183.585.837,00
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	220.028.000,00
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	38.549.049.228,00
4	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	90.834.900,00
5	Dinas Perikanan	85.605.905,00
6	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	197.782.000,00
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.150.770.000,00
8	Kecamatan Larantuka	94.000.000,00
	Jumlah	**102.571.655.870,00**

2. Kapitalisasi dari belanja pegawai yang diatribusikan menjadi Aset Tetap senilai Rp223.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Daftar Belanja Pegawai yang diatribusikan menjadi Aset Tetap

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	74.250.000,00
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.750.000,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.000.000,00
4	Dinas Perhubungan	1.000.000,00
5	Dinas Perikanan	1.500.000,00
6	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.250.000,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.500.000,00
8	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	122.750.000,00
9	Kantor Camat Larantuka	1.000.000,00
10	Kantor Lurah Lohayong	1.750.000,00
11	Kantor Lurah Pantai Besar	1.750.000,00
12	RSUD Adonara	5.500.000,00
	Jumlah	**223.000.000,00**

3. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa (Kapitalisasi) yang diatribusikan menjadi Aset Tetap senilai Rp2.622.775.247,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.77 Daftar Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi)

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	76.393.328,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	28.332.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.972.000,00
4	Dinas Kesehatan	178.047.124,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	215.010.550,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.322.581,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.967.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.189.625,00
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.790.000,00
10	Dinas Perhubungan	28.999.000,00
11	Dinas Perkebunan dan Peternakan	69.145.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81.417.600,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	147.368.950,00
14	Dinas Sosial	13.542.500,00
15	Dinas Tenaga Kerja	37.323.225,00
16	Kantor Camat Adonara	122.981.325,00
17	Kantor Camat Adonara Barat	7.694.250,00
18	Kantor Camat Adonara Tengah	31.930.000,00
19	Kantor Camat Demon Pagong	38.965.500,00
20	Kantor Camat Ile Boleng	31.573.500,00
21	Kantor Camat Ile Mandiri	163.609.400,00
22	Kantor Camat Lewolema	9.989.000,00
23	Kantor Camat Tanjung Bunga	3.922.500,00
24	Kantor Camat Titehena	32.642.750,00
25	Kantor Camat Wotan Ulumado	10.430.000,00
26	Kantor Lurah Larantuka	66.005.753,00
27	Kantor Lurah Lewolere	39.477.500,00
28	Kantor Lurah Pantai Besar	123.250.000,00
29	Kantor Lurah Postoh	35.000.000,00
30	Kantor Lurah Ritaebang	5.344.000,00
31	Kepala Daerah	48.984.000,00
32	Puskesmas Menanga	15.513.000,00
33	RSUD Adonara	250.000.000,00
34	RSUD Hendrikus Fernandez	608.227.161,00
35	Sekretariat DPRD	43.415.125,00
	Jumlah	**2.622.775.247,00**

3. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa (Aset Baru) yang diatribusikan menjadi Aset Tetap senilai Rp411.091.663,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.78 Daftar Belanja Barang dan Jasa (Aset Baru) yang diatribusikan menjadi Aset Tetap

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	12.258.100,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.477.000,00
3	Kantor Camat Adonara Barat	12.311.000,00

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
4	Kantor Camat Adonara Timur	19.971.563,00
5	Kantor Lurah Lewolere	67.222.500,00
6	Kantor Lurah Lohayong	123.250.000,00
7	Kantor Lurah Pohon Sirih	15.415.000,00
8	Puskesmas Ile Boleng	10.000.000,00
9	Puskesmas Lambunga	20.000.000,00
10	Puskesmas Oka	44.197.500,00
11	RSUD Hendrikus Fernandez	47.290.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	26.699.000,00
Jumlah		**411.091.663,00**

5. Mutasi antar aset tetap dari aset tetap jalan irigasi dan jaringan senilai Rp32.750.000,00 pada RSUD Adonara.

6. Mutasi antar aset tetap dari konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp17.187.213.835,87 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79 Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	11.542.657.461,54
2	Dinas Kesehatan	3.866.503.456,00
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez	1.778.052.918,33
Jumlah		**17.187.213.835,87**

7. Mutasi antar aset dari aset lainnya senilai Rp830.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Daftar Mutasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perkebunan	444.000.000,00
2	Kantor Lurah Ritaebang	210.000.000,00
3	Kantor Camat Ile Mandiri	176.800.000,00
Jumlah		**830.800.000,00**

8. Koreksi bertambah nilai aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp24.222.500,00 pada Dinas Sosial.

Mutasi kurang atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi kurang atas aset gedung dan bangunan Tahun 2024 karena adanya Hibah keluar aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp535.053.240,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Hibah Keluar

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Kantor Lurah Larantuka	91.734.000,00
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	443.319.240,00
Jumlah		**535.053.240,00**

2. Mutasi kurang atas aset gedung dan bangunan Tahun 2024 karena adanya Mutasi antar aset tetap ke aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp3.874.792.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Mutasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	3.668.088.750,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	206.704.089,00
	Jumlah	**3.874.792.839,00**

3. Mutasi kurang atas aset gedung dan bangunan Tahun 2024 karena adanya Mutasi antar aset tetap ke aset tetap jalan irigasi dan jaringan senilai Rp3.991.215.530,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Mutasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	3.040.222.335,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	220.028.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	583.870.195,31
4	RSUD Adonara	147.095.000,00
	Jumlah	**3.991.215.530,31**

4. Mutasi kurang atas aset gedung dan bangunan Tahun 2024 karena adanya Mutasi antar aset tetap ke konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp10.469.997.282,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Mutasi ke Konstrusksi Dalam Pengerjaan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	507.821.054,00
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	9.962.176.228,00
	Jumlah	**10.469.997.282,00**

5. Mutasi kurang atas aset gedung dan bangunan Tahun 2024 karena adanya Reklasifikasi ke aset lainnya senilai Rp6.614.727.541,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Daftar Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	4.563.713.041,00
2	Kantor Camat Wulanggitang	1.091.399.500,00
3	Kepala Daerah	14.000.000,00
4	Puskesmas Boru	192.000.000,00
5	RSUD dr. Hendrikus Fernandez	753.615.000,00
	Jumlah	**6.614.727.541,00**

6. Mutasi kurang atas aset gedung dan bangunan Tahun 2024 karena merupakan bahan pakai habis/barang persediaan lainnya senilai Rp3.500.000,00 pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

7. Mutasi berkurang atas temuan kekurangan volume pekerjaan aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2024 senilai Rp2.059.341.028,80 yaitu pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.892.202.317,34 dan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan snilai Rp167.138.711,46.

8. Mutasi berkurang atas temuan kelebihan pembayaran jasa konsultansi konstruksi pekerjaan aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2024 senilai Rp99.697.900,00, yaitu pada Dinas Kesehatan senilai Rp79.755.900,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp10.000.000,00, dan pada Dinas Perikanan senilai Rp9.942.000,00.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 12** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.437.946.252.083,54	1.381.253.387.189,43

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.437.946.252.083,54 dan Rp1.381.253.387.189,43 atau bertambah senilai Rp56.692.864.894,10 atau sebesar 4,10%. Penambahan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.86 Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2024

No.	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	**Saldo Awal Aset Tetap**	**1.381.253.387.189,44**
1	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 2024	1.381.253.387.189,43
B	**Mutasi Tambah**	**60.264.884.472,57**
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Berjalan	36.585.207.223,00
2	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	107.500.000,00
3	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi)	1.262.841.117,00
4	Belanja Barang dan Jasa menjadi aset baru karena kesalahan penganggaran	688.999.000,00
5	Pindah antar aset dari aset tetap Gedung dan Bangunan	3.991.215.530,31
6	Pindah antar aset dari KDP	17.629.121.602,26
C	**Mutasi Kurang**	**3.572.019.578,47**
1	Pindah antar Aset ke aset tetap Gedung dan Bangunan	32.750.000,00
2	Pindah antar Aset ke KDP	2.225.151.573,00
3	Reklas Ke Aset Lainnya	193.827.300,00
4	Koreksi Nilai aset tetap tahun berjalan	290.157.894,61
5	Temuan Kekurangan Volume	520.006.710,86
6	Temuan Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultansi Konstruksi	310.126.100,00
D	**Saldo Per 31 Desember 2024 (A+B-C)**	**1.437.946.252.083,54**

Mutasi tambah atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 senilai Rp36.585.207.223,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87 Daftar Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.434.499.000,00
2	RSUD Adonara	511.287.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.278.610.670,00

No	SKPD	Jumlah (Rp)
4	Dinas Sosial	3.559.400,00
5	Dinas Perhubungan	972.406.278,00
6	Dinas Perikanan	332.845.000,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.000.000,00
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan	16.999.875,00
	Jumlah	**36.585.207.223,00**

2. Belanja Pegawai yang diatribusikan menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp107.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88 Daftar Belanja Pegawai yang Diatribusikan Menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.250.000,00
2	Dinas Perhubungan	3.000.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.250.000,00
4	Dinas Perikanan	1.000.000,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.000.000,00
6	Kantor Lurah Waihali	1.750.000,00
7	Kantor Lurah Sarotari	2.750.000,00
8	Kantor Lurah Lokea	6.750.000,00
9	Kantor Lurah Weri	1.500.000,00
10	Kantor Lurah Sarotari Timur	1.500.000,00
11	Kantor Lurah Waiwerang	2.250.000,00
12	RSUD Adonara	8.500.000,00
	Jumlah	**107.500.000,00**

3. Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi) yang diatribusikan menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.262.841.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89 Daftar Belanja Barang dan Jasa (Kapitalisasi) yang Diatribusikan Menjadi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	656.576.119,00
2	Dinas Kesehatan	29.208.501,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	52.316.250,00
4	Dinas Perhubungan	50.000.000,00
5	RSUD dr. Hendrikus Fernandez	95.310.000,00
6	Kantor Lurah Pohon Sirih	100.686.000,00
7	Kantor Lurah Waihali	113.000.000,00
8	Kantor Lurah Larantuka	58.994.247,00
9	Kantor Lurah Sarotari	106.750.000,00
	Jumlah	**1.262.841.117,00**

4. Belanja Barang dan Jasa (Aset Baru) yang diatribusikan menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp688.999.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 117. Daftar Belanja Barang dan Jasa (Aset Baru) yang Diatribusikan Menjadi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada SKPD

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan	5.000.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	47.000.000
3	Kantor Lurah Pohon Sirih	8.599.000,00
4	Kantor Lurah Lokea	108.000.000,00
5	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	100.000.000,00
6	Kantor Lurah Weri	68.400.000,00
7	Kantor Lurah Sarotari Timur	114.000.000,00
8	Kantor Lurah Ritaebang	116.000.000,00
9	Kantor Lurah Waiwerang	122.000.000,00
	Jumlah	**688.999.000,00**

5. Mutasi bertambah aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang karena adanya mutasi masuk dari aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp3.991.215.530,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.040.222.335,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	583.870.195,31
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	220.028.000,00
4	RSUD Adonara	147.095.000,00
	Jumlah	**3.991.215.530,31**

6. Mutasi bertambah aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang karena adanya mutasi masuk dari konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp17.629.121.602,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.669.450.952,26
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	959.670.650,00
	Jumlah	**17.629.121.602,26**

Mutasi kurang atas Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi kurang atas aset tetap jalan irigasi dan jaringan Tahun 2024 karena adanya Mutasi antar aset tetap ke aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp32.750.000,00 pada RSUD Adonara;
2. Mutasi kurang atas aset tetap jalan irigasi dan jaringan Tahun 2024 karena adanya Mutasi antar aset tetap ke konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp2.225.151.573,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.966.912.573,00 dan Dinas Kesehatan senilai Rp258.239.000,00;

3. Mutasi kurang atas aset tetap jalan irigasi dan jaringan Tahun 2024 karena adanya Mutasi ke aset lainnya senilai Rp193.827.300,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
4. Mutasi kurang atas aset tetap jalan irigasi dan jaringan Tahun 2024 karena adanya Koreksi nilai aset tetap jalan irigasi dan jaringan senilai Rp290.157.894,61 pada Puskesmas Lambunga.
5. Mutasi kurang atas aset tetap jalan irigasi dan jaringan Tahun 2024 karena adanya temuan kekurangan volume pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp520.006.710,86.
6. Mutasi kurang atas aset tetap jalan irigasi dan jaringan Tahun 2024 karena adanya temuan kelebihan pembayaran jasa konsultansi konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp308.476.100,00, dan pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.650.000,00.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 13** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
13.657.826.465,70	11.377.622.059,04

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp13.657.826.465,70 dan Rp11.377.622.059,04 atau bertambah senilai Rp2.280.204.406,66 atau sebesar 20,04%. Penambahan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.92 Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No.	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	**Saldo Awal Aset Tetap**	**11.377.622.059,04**
1	Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 2024	11.377.622.059,04
B	**Mutasi Tambah**	**2.402.763.190,00**
1	Belanja Modal Tahun 2024 (LRA)	2.122.885.450,00
2	Kapitalisasi dari Belanja Pegawai	1.500.000,00
3	Belanja Barang dan Jasa menjadi aset baru karena kesalahan penganggaran	21.496.000,00
4	Hibah Masuk dari Kementerian Pendidikan TA 2024	242.965.440,00
5	Pindah antar aset dari aset tetap Peralatan dan Mesin	3.916.300,00
6	Koreksi tambah nilai aset tetap – Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00
C	**Mutasi Kurang**	**122.558.783,34**
1	Hibah	31.081.200,00
2	Pindah antar Aset ke aset tetap Peralatan dan Mesin	59.969.050,00
3	Koreksi Nilai aset tetap tahun berjalan	31.508.533,34
D	**Saldo Per 31 Desember 2024 (A + B – C)**	**13.657.826.465,70**

Mutasi tambah atas Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 (LRA) senilai Rp2.122.885.450,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.93 Daftar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaharga	2.089.014.250,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	33.871.200,00
	Jumlah	**2.122.885.450,00**

2. Belanja Pegawai (Kapitalisasi) yang diatribusikan menjadi Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.500.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Belanja Barang dan Jasa yang diatribusikan menjadi Aset Tetap Lainnya karena kesalahan penganggaran senilai Rp21.496.000,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
4. Hibah masuk aset tetap lainnya berupa buku umum yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Tahun 2024 senilai Rp242.965.440,00, dengan rincian sebagai berikut:
5. Mutasi bertambah Aset Tetap Lainnya karena adanya Mutasi antar aset tetap dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp3.916.300,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
6. Mutasi bertambah Aset Tetap Lainnya karena adanya Koreksi bertambah nilai Aset Tetap Lainnya senilai Rp10.000.000,00 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Mutasi kurang atas Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

1. Mutasi berkurang Aset Tetap Lainnya karena adanya hibah keluar aset senilai Rp31.081.200,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
2. Mutasi berkurang Aset Tetap Lainnya karena adanya mutasi keluar ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp59.969.050,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
3. Mutasi berkurang Aset Tetap Lainnya karena adanya koreksi berkurang atas nilai Aset Tetap Lainnya senilai Rp31.508.533,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Daftar Koreksi Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perkebunan dan Peternakan	27.308.533,34
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	4.200.000,00
	Jumlah	**31.508.533,34**

Rincian lebih lanjut atas saldo Aset Tetap Lainnya disajikan pada **Lampiran 14** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
14.315.185.935,00	36.255.812.518,13

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp14.315.185.935,00 dan Rp36.255.812.518,13 atau berkurang senilai Rp21.940.626.583,13 atau sebesar 60,52% yang dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.95 Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
A	**Saldo Awal Aset Tetap (1)**	**36.255.812.518,13**
1	Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 2024	36.255.812.518,13
B.1	**Mutasi Tambah (1 s.d. 4)**	**12.875.708.855,00**
1	Reklasifikasi Masuk (Mutasi antar Aset Tetap) menjadi KDP	12.875.708.855,00
B.2	**Mutasi Kurang (1 s.d. 2)**	**34.816.335.438,13**
1	Reklasifikasi Keluar menjadi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dan JIJ	34.816.335.438,13
C	**Saldo Per 31 Desember 2024 (A + B.3)**	**14.315.185.935,00**

Mutasi tambah atas Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan KDP Tahun 2024 senilai Rp12.875.708.855,00 yaitu pada SKPD:

Tabel 5.96 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 pada SKPD

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kepemudaan	9.945.306.228,00
2	Dinas Kesehatan	963.490.054,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.966.912.573,00
	Jumlah	**12.875.708.855,00**

Mutasi kurang atas Aset Konstruksi dalam Pengerjaan dijelaskan sebagai berikut.

1. Aset Tetap KDP yang direklas keluar (mutasi antar aset tetap) KDP jadi Aset senilai total Rp34.816.335.438,13 dengan rincian:

Tabel 5.97 Daftar Reklas Keluar Aset Tetap

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kepemudaan	12.502.328.110,64
2	Dinas Kesehatan	3.866.503.456,90
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.669.450.952,26
4	RSUD dr. Hendrikus Fernandez	1.778.052.918,33
	Jumlah	**34.816.335.438,13**

Rincian lebih lanjut atas saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada **Lampiran 15** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(1.601.189.536.336,03)	(1.493.213.054.023,20)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.601.189.536.336,03 dan Rp1.493.213.054.023,20 atau bertambah senilai

Rp107.976.482.312,83 atau 7,23% bertambah tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.98 Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Tanah	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(313.587.468.631,91)	(279.475.001.972,32)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(158.278.127.656,04)	(146.618.424.162,42)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.128.812.673.868,08)	(1.067.119.627.888,46)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(511.266.180,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah	**(1.601.189.536.336,03)**	**(1.493.213.054.023,20)**

Depresiasi/Penyusutan Aset-Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Flores Timur menganut metode garis lurus. Rincian mutasi untuk penyusutan tiap jenis aset dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

   Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 dan 2023 berturut-turut adalah Rp313.587.468.631,91 dan RpRp279.475.001.972,32 atau mengalami penambahan senilai Rp34.112.466.659,59. Rincian lebih lanjut atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin disajikan dalam **Lampiran 16** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

   Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp158.278.127.656,04 dan Rp146.618.424.162,42 atau mengalami penambahan senilai Rp11.659.703.493,62. Rincian lebih lanjut atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan disajikan dalam **Lampiran 17** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

   Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Bangunan pada tahun 2024 dan 2023 berturut-turut adalah Rp1.128.812.673.868,08 dan Rp1.067.119.627.888,46 atau mengalami penambahan senilai Rp61.693.045.979,62. Rincian lebih lanjut atas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan dalam **Lampiran 18** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

   Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 dan 2023 berturut-turut adalah Rp511.266.180,00 dan Rp0,00 atau mengalami penambahan senilai Rp511.266.180,00. Rincian lebih lanjut atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya disajikan dalam **Lampiran 19** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.4. Properti Investasi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.095.157.479,85	1.111.151.479,84

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.095.157.479,85 dan Rp1.111.151.479,84 atau berkurang senilai Rp15.993.999,99 atau berkurang senilai 1,44%. Penurunan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.99 Daftar Saldo Properti Investasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Properti Investasi Tanah	102.000.000,00	102.000.000,00
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	1.083.114.179,00	1.083.114.179,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(89.956.699,15)	(73.962.699,16)
	Jumlah	**1.095.157.479,85**	**1.111.151.479,84**

5.3.1.4.1. Properti Investasi Tanah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
102.000.000,00	102.000.000,00

Saldo Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp102.000.000,00 merupakan property investasi berupa tanah untuk bangunan industri yang dipergunakan untuk Tanah Pabrik Es ICS Wailolong berlokasi di Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka.

5.3.1.4.2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.083.114.179,00	1.083.114.179,00

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp1.083.114.179,00. Rincian properti investasi Gedung dan bangunan dirincikan sebagai berikut :

1. Bangunan gedung kantor yang digunakan untuk pabrik es ICS Wailolong yang berlokasi di desa mokantarak kecamatan larantuka senilai Rp565.207.179,00;
2. Bangunan gedung tempat kerja lainnya yang digunakan untuk ruang proses belakang ICS Wailolong berlokasi di desa mokantarak kecamatan larantuka senilai Rp327.035.000,00;
3. Bangunan gedung tempat kerja lainnya yang digunakan untuk ruang mekanik ICS Wailolong berlokasi di desa mokantarak kecamatan larantuka senilai Rp22.500.000,00;
4. Bangunan gedung untuk pos jaga yang digunakan untuk pos satpam ICS Wailolong berlokasi di desa mokantarak kecamatan larantuka senilai Rp58.355.000,00;
5. Bangunan gudang yang digunakan untuk gudang BPP ICS Wailolong di desa mokantarak kecamatan larantuka senilai Rp40.562.000,00;

6. Bangunan gudang yang digunakan untuk landasan kontainer ICS Wailolong di desa mokantarak kecamatan larantuka senilai Rp69.455.000,00;

5.3.1.4.3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(89.956.699,15)	(73.962.699,16)

Saldo akumulasi penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp89.956.699,15 dan Rp73.962.699,16 atau bertambah senilai Rp15.993.999,99. Rincian kenaikan akumulasi penyusutan properti investasi dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo akhir dan saldo awal akumulasi penyusutan properti investasi bangunan gedung kantor masing-masing senilai Rp58.882.279,15 dan Rp53.246.419,16 atau bertambah senilai Rp5.635.859,99 yang merupakan beban penyusutan properti investasi bangunan gedung kantor tahun berjalan;
2. Saldo akhir dan saldo awal akumulasi penyusutan properti investasi bangunan gedung kantor lainnya masing-masing senilai Rp20.972.100,00 dan Rp13.981.400,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp6.990.700,00 yang merupakan beban penyusutan properti investasi bangunan gedung kantor lainnya tahun 2024;
3. Saldo akhir dan saldo awal akumulasi penyusutan properti investasi bangunan gedung untuk pos jaga masing-masing senilai Rp3.501.300,00 dan Rp2.334.200,00 atau bertambah senilai Rp1.167.100,00 yang merupakan beban penyusutan properti investasi bangunan gedung untuk pos jaga tahun 2024;
4. Saldo akhir dan saldo awal akumulasi penyusutan properti investasi bangunan gudang masing-masing senilai Rp6.601.020,00 dan Rp4.400.680,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp2.200.340,00 yang merupakan beban penyusutan properti investasi bangunan gudang tahun berjalan.

5.3.1.5. Aset Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
96.905.719.737,65	94.667.942.741,58

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp96.905.719.737,65 dan Rp94.667.942.741,58 atau bertambah senilai Rp2.237.776.996,07 atau sebesar 2,36%. Penambahan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 5.100 Rincian Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang – Piutang TPTGR	11.631.433.322,95	9.684.859.402,84
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.534.035.815,00	1.534.035.815,00
3	Aset Tak Berwujud	1.338.550.000,00	1.338.550.000,00
4	Aset Lain-Lain	112.940.535.178,92	113.849.552.886,13
	Jumlah A	**127.444.554.316,87**	**126.406.998.103,97**

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(29.200.284.579,22)	(31.739.055.362,39)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.338.550.000,00)	0,00
	Jumlah B	**(30.538.834.579,22)**	**(31.739.055.362,39)**
	Jumlah Aset Lainnya (A + B)	**96.905.719.737,65**	**94.667.942.741,58**

5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
11.631.433.322,95	9.684.859.402,84

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp11.631.433.322,95 dan Rp9.684.859.402,84 atau bertambah senilai Rp1.946.573.920,11 atau 20,10%. Penambahan tersebut dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 20** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

5.3.1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.534.035.815,00	1.534.035.815,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.534.035.815,00 atau tidak terdapat mutasi, baik tambah maupun kurang. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan saldo yang timbul akibat penyelenggaraan hubungan mitra antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan kelompok masyarakat terkait penggunaan Truk Air Tangki dalam rangka penyaluran air bersih senilai Rp1.534.035.815,00.

5.3.1.5.3. Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
0,00	1.338.550.000,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp1.338.550.000,00 atau berkurang sebesar 100%. Saldo Aset Tidak Berwujud TA 2023 merupakan saldo atas Aset Tak Berwujud berupa Kajian Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pada Dinas PUPR dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Dinas Lingkungan Hidup yang masing-masing diperoleh pada tahun 2020. Rincian lebih lanjut atas saldo Aset Tidak Berwujud TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.101 Daftar Aset Tidak Berwujud Tahun 2024

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	530.200.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	808.350.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.338.550.000,00)
	Jumlah	**-**

5.3.1.5.4. Aset Lain-Lain

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
83.740.250.599,70	82.110.497.523,74

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp83.740.250.599,70 dan Rp82.110.497.523,74 atau bertambah senilai Rp1.629.753.075,96 Rincian lebih lanjut atas mutasi saldo Aset Lain-lain TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.102 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-lain TA 2024

Uraian			Nilai
1. Saldo Awal Aset Lain-Lain		**Rp**	**82.110.497.523,74**
2. Mutasi Bertambah dari Aset Lain – Lain (A + B + C +D)		**Rp**	**6.193.538.789,17**
A	**Rusak Berat Setelah Penyusutan (1 s.d. 3 – 4)**	**Rp**	**4.932.600.833,17**
	Aset Rusak Berat (1 s.d. 3)	**Rp**	**6.980.379.423,00**
1	Peralatan dan Mesin	Rp	171.824.582,00
2	Gedung dan Bangunan	Rp	6.614.727.541,00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	193.827.300,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat (a) + b) + c))	Rp	(2.047.778.589,83)
	a) Peralatan dan Mesin	Rp	(167.199.582,00)
	b) Gedung dan Bangunan	Rp	(1.874.293.764,50)
	c) Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	(6.285.243,33)
B	**Aset Yang Akan Dihibahkan (1 – 2)**	**Rp**	**0,00**
1	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	0,00
2	Akumulasi Penyusutan JIJ yang Akan diHibahkan	Rp	0,00
C	**Temuan Kelebihan Pembayaran**	Rp	**1.260.937.956,00**
1	Jasa Konsultansi Konstruksi Gedung dan Bangunan	Rp	162.212.265,00
2	Jasa Konsultansi Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	310.126.100,00
3	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	Rp	322.167.375,00
4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp	189.654.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	Rp	117.345.395,00
6	Beban Lembur	Rp	159.432.821,00
3. Mutasi Berkurang dari Aset Lain-Lain (A s.d. F)		**Rp**	**4.563.785.713,21**
A	**Penghapusan Aset Rusak Berat**	**Rp**	**2.472.923.800,00**
1	Peralatan dan Mesin	Rp	2.472.923.800,00
B	***Treasury Deposit Facility***	Rp	**673.770.000,00**
1	*Treasury Deposit Facility*	Rp	673.770.000,00
C	**Koreksi Tahun Sebelumnya**	**Rp**	**1.025.259.913,21**
D	**Penyesuain Saldo Awal 2023**	**Rp**	**0,00**
1	Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
E	**Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi**	**Rp**	**0,00**
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	**Rp**	0,00
F	**Pemindahan Aset Rusak Berat ke Aset Tetap**	**Rp**	**391.832.000,00**
1	Gedung dan Bangunan	Rp	830.800.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	(438.968.000,00)
	Jumlah (1 + 2 – 3)	**Rp**	**83.740.250.599,70**

Mutasi Tambah atas Aset Lain-Lain merupakan mutasi tambah Aset Rusak Berat setelah penyusutan senilai Rp4.932.600.833,17, penyesuaian nilai aset tetap yang merupakan dampak dari temuan Jasa Konsultansi Konstruksi senilai Rp472.338.365,00 (Rp162.212.265,00 + Rp310.126.100,00), dan temuan kelebihan pembayaran tahun anggaran 2024 senilai Rp788.599.591,00 (Rp322.167.375,00 + Rp189.654.000,00 + Rp117.345.395,00 + Rp159.432.821,00).

Mutasi Kurang Aset Lain-lain atas Penghapusan Aset Rusak Berat senilai Rp2.472.923.800,00, dengan rincian.

Tabel 5.103 Daftar Nilai Penghapusan Aset Lain-Lain per SKPD Tahun 2024

No	SKPD	Nilai Penghapusan Aset (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	72.280.125,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.761.675,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pengendalian Perempuan dan Perlindungan Anak	18.900.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja	1.022.000,00
5	Kantor Camat Adonara Timur	2.100.000,00
6	Kantor Camat Solor Barat	1.100.000,00
7	Kantor Camat Wulanggitang	587.380.000,00
8	RSUD dr. Hendrikus Fernandez	1.780.380.000,00
	Jumlah	**2.472.923.800,00**

1. Pembayaran *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp673.770.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pengurangan nilai aset atas koreksi kesalahan catat atas kekurangan volume tahun sebelumnya senilai Rp1.025.259.913,21 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Daftar Nilai Koreksi Kesalahan Pencatatan per SKPD Tahun 2024

No	SKPD	Nilai Penghapusan Aset (Rp)
1	Dinas Kesehatan	64.141.595,83
2	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	77.869.677,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	883.248.639,85
	Jumlah	**1.025.259.913,21**

3. Pemindahan Aset Rusak Berat ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp391.832.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105 Daftar Nilai Pemindahan Aset Rusak Berat

No	SKPD	Nilai Penghapusan Aset (Rp)
1	Dinas Perkebunan dan Peternakan	217.440.000,00
2	Kantor Lurah Ritaebang	96.600.000,00
3	Kantor Camat Ile Mandiri	77.792.000,00
	Jumlah	**391.832.000,00**

5.3.2. Kewajiban

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
9.362.481.535,41	4.554.837.624,45

Kewajiban merepresentasikan konsekuensi kepada pihak ketiga akibat transaksi keuangan di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar) dan kewajiban jangka panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp9.362.481.535,41 dan Rp4.554.837.624,45 atau mengalami kenaikan senilai Rp4.807.643.910,96.

Tabel 5.106 Rincian Saldo Kewajiban 31 Desember 2024 dan 2023

No	Akun	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	375.567.862,01	643.061.190,02
2	Pendapatan Diterima Dimuka	356.000,00	356.000,00
3	Utang Belanja	8.986.557.673,40	3.911.420.434,43
	Jumlah	**9.362.481.535,41**	**4.554.837.624,45**

Rincian Saldo Kewajiban diuraikan sebagai berikut.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
9.362.481.535,41	4.554.837.624,45

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp9.362.481.535,41 dan Rp4.554.837.624,45 atau bertambah senilai Rp4.807.643.910,97 Rincian lebih lanjut atas saldo Kewajiban Jangka Pendek TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.107 Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2024 dan 2023

No	Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	375.567.862,01	643.061.190,02
2	Pendapatan Diterima Dimuka	356.000,00	356.000,00
3	Utang Belanja dan Transfer	8.986.557.673,40	3.911.420.434,43
	Jumlah	**9.362.481.535,41**	**4.554.837.624,45**

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
375.567.862,01	643.061.190,02

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) senilai Rp375.567.862,01 merupakan saldo atas pungutan pajak dari belanja yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108 Rincian Utang PFK TA 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Taspen	796.000,00	796.000,00
2	Utang PPh 21	50.246.989,64	50.797.489,64
3	Utang PPh 23	3.510.160,00	0,00
4	Utang PPh Pasal 26	389.000,00	286.494.375,00
5	Utang PPN Pusat	18.748.160,37	11.036.673,38
6	Utang Taperum	109.859.195,00	109.859.195,00
7	Utang Iuran Wajib Pegawai	184.077.457,00	184.077.457,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
8	Utang PFK Lainnya	7.940.900,00	0,00
	Jumlah	**375.567.862,01**	**643.061.190,02**

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2024 terdiri atas saldo Utang PFK di BUD senilai Rp355.575.315,01 dan Utang PFK di sekolah senilai Rp19.992.547,00, antara lain sebagai berikut.

1. Utang PFK PPh 21 pada bendahara dana BOS sekolah SMPN Satap Riangpuho senilai Rp167.500,00, SDI Lamaojan senilai Rp60.000,00, dan SDN Waitiu senilai Rp25.000,00;
2. Utang PFK PPh 23 pada bendahara dana BOS sekolah SMPN Satap Riangpuho senilai Rp2.753.060,00, SDI Lamaojan senilai Rp296.400,00, SDI Muleng senilai Rp130.000,00, SDI Waitiu senilai Rp42.300,00, dan SDN Leter senilai Rp288.400,00;
3. Utang PFK PPN Pusat pada bendahara dana BOS sekolah SMPN Satap Riangpuho senilai Rp3.016.325,00, SDI Lamaojan senilai Rp655.143,00, SDN Waitiu senilai Rp262.117,00, dan SDN Leter senilai Rp4.355.402,00; dan
4. Pajak restoran senilai Rp7.940.900,00 yang belum disetor ke Kas Daerah masing-masing oleh Bendahara rutin sekolah SMPN Satap Riangpuho Rp5.984.900,00, SDI Watowiti senilai Rp262.500,00, SDI Lamaojan senilai Rp741.000,00, SDI Muleng senilai Rp325.000,00, SDN Waitiu senilai Rp171.500,00, dan SDN Leter senilai Rp456.000,00.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
356.000,00	356.000,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp356.000,00 dan Rp356.000,00. Nilai tersebut merupakan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak pada tahun 2022.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
8.986.557.673,40	3.911.420.434,43

Saldo Utang Belanja merupakan Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan nilai masing-masing Rp8.986.557.673,40 dan Rp3.911.420.434,43 yang terdapat pada lima SKPD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.109 Rincian Utang Belanja TA 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	**Utang Belanja Barang**		
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat	39.311.873,00	362.045.844,00
	Utang BLUD	2.555.535.332,00	
	Jumlah 1	**2.594.847.205,00**	**362.045.844,00**

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2	**Utang Belanja Pegawai**		
	Utang TPG-PNSD	4.654.144.300,00	118.729.200,00
	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan	78.481.720,00	1.986.582.537,00
	Utang TKG-PNSD	239.261.400,00	
	Utang Tamsil-PNSD	481.500.000,00	
	Jumlah 2	**5.453.387.420,00**	**2.105.311.737,00**
3	**Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**659.740.000,00**	**1.444.062.853,43**
4	**Utang Belanja Tidak Terduga**	**278.583.048,40**	**0,00**
	Total	**8.986.557.673,40**	**3.911.420.434,43**

Pada tahun 2024, terdapat Utang Belanja Tidak Terduga senilai Rp278.583.048,00 pada Dinas Sosial yang timbul akibat belum terbayarkannya sejumlah belanja kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Penanganan Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki November s.d. Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.110 Rincian Utang Belanja Tidak Terduga

No.	Uraian Belanja	Nama Pihak Ketiga	31 Desember 2024 (Rp)
1	Belanja Minyak Tanah	Rafael Duran Nama	3.300.000,00
2	Belanja Air Minum (Air Kemasan)	Suharti	1.900.000,00
3	Belanja kebutuhan pada 4 Poslap	Kosmas Kopong Suban, SST	5.380.000,40
4	Biaya bongkar muat beras dari gudang Dinsos ke Poslap Bokang	Stefanus Kendati Niron	328.500,00
5	Belanja Ikan	Indrawati	12.075.000,00
6	Belanja Ikan	Indrawati	12.075.000,00
7	Belanja Kecap	Suharti	1.050.000,00
8	Belanja kebutuhan pada 4 Poslap	M Anastasia Bewa Lema	4.250.000,00
9	Belanja Minyak Tanah	Artaban Musa Malaifani	2.250.000,00
10	Belanja kebutuhan pada 4 Poslap	Surianty S. Abdullah,SKM	22.638.548,00
11	Biaya sewa Pick Up untuk mobilisasi	Petrus Pedo Manuk	17.000.000,00
12	Belanja Telur	Kristina Weda Kleden	6.205.000,00
13	Belanja Telur	Kristina Weda Kleden	5.840.000,00
14	Belanja Ayam	Sri Mulyani	22.950.000,00
15	Belanja Ayam	Sri Mulyani	23.310.000,00
16	Belanja Ayam	Sri Mulyani	23.310.000,00
17	Belanja Sayur	Karni Adinda	114.721.000,00
	Total		**278.583.048,40**

5.3.3. Ekuitas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.354.640.890.103,02	1.294.037.709.576,95

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.354.640.890.103,02 dan Rp1.294.037.709.576,95, atau bertambah 61.941.730.526,06 atau sebesar 4,68%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.111 Rincian Ekuitas per 31 Desember 2024

Ekuitas Awal	**1.294.037.709.576,95**
Koreksi Ekuitas	(519.410.612,45)
Surplus Defisit – LO Tahun Berjalan	61.122.591.138,52
Ekuitas Akhir	**1.354.640.890.103,02**

Nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.112 Rincian Nilai Kekayaan Bersih Pemerintah Kabupaten Flores Timur

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Nilai bersih Aset Lancar	132.161.165.212,58	152.394.687.814,09
2	Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang	72.626.589.622,54	68.867.011.474,64
3	Nilai Bersih Aset Tetap	1.061.214.739.585,81	981.551.753.691,25
4	Nilai Bersih Properti Investasi	1.095.157.479,85	1.111.151.479,84
5	Nilai Bersih Aset Lainya	96.905.719.737,65	94.667.942.741,58
6	Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah	(9.362.481.535,41)	(4.554.837.624,45)
	Jumlah	**1.354.640.890.103,02**	**1.294.037.709.576,95**

5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tercermin dalam pendapatan – LO, beban dan surplus/defisit operasional.

5.4.1. Pendapatan – LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.126.268.670.861,41	972.666.891.898,65

Nilai Pendapatan – LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp1.126.268.670.861,41 dan Rp972.666.891.898,65 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.113 Rincian Pendapatan – LO TA 2024

No	Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	67.104.394.813,67	46.841.377.919,17
2	Pendapatan Transfer – LO	1.034.234.655.187,00	903.920.825.583,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	24.929.620.860,74	21.904.688.396,48
	Total Nilai Pendapatan – LO	**1.126.268.670.861,41**	**972.666.891.898,65**

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
67.104.394.813,67	46.841.377.919,17

Nilai Pendapatan Asli Daerah – LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp67.104.394.813,67 dan Rp46.841.377.919,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan 2023

No	Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	18.667.086.360,00	16.291.738.056,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	3.849.686.350,00	20.085.729.256,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	4.270.908.241,54	3.845.122.715,00
4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	40.316.713.862,13	6.618.787.892,17
	Total Pendapatan Asli Daerah – LO	**67.104.394.813,67**	**46.841.377.919,17**

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
18.667.086.360,00	16.291.738.056,00

Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp18.667.086.360,00 dan Rp16.291.738.056,00, yang merupakan saldo pendapatan atas penghimpunan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.115 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2024 dan 2023

No.	Nama Akun	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel – LO	92.849.640,00	123.515.909,00
2	Pajak Restoran – LO	1.855.654.642,00	1.614.443.095,00
3	Pajak Hiburan – LO	2.500.000,00	1.500.000,00
4	Pajak Reklame – LO	318.104.627,00	281.111.500,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	7.460.481.187,00	6.697.945.570,00
6	Pajak Parkir – LO	500.000,00	0,00
7	Pajak Air Tanah – LO	19.244.400,00	18.400.200,00
8	Pajak MBLB – LO	3.144.416.725,00	2.533.156.705,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – LO	4.948.316.613,00	3.893.161.701,00
10	BPHTB – LO	825.018.526,00	1.128.503.376,00
	Total Pendapatan Pajak Daerah – LO	**18.667.086.360,00**	**16.291.738.056,00**

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pendapatan Pajak Daerah – LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pendapatan Pajak Daerah – LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.116 Perbandingan Saldo Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO TA 2024

No	Pendapatan Pajak	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Pajak Hotel	92.849.640,00	92.849.640,00	0,00
2	Pajak Restoran	1.855.654.642,00	1.855.654.642,00	0,00
3	Pajak Hiburan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4	Pajak Reklame	119.919.301,00	318.104.627,00	(198.185.326,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	7.460.481.187,00	7.460.481.187,00	0,00
6	Pajak Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00

No	Pendapatan Pajak	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
7	Pajak Air Tanah	3.671.800,00	19.244.400,00	(15.572.600,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.144.416.725,00	3.144.416.725,00	0,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	2.809.891.143,41	4.948.316.613,00	(2.138.425.469,59)
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	825.018.526,00	825.018.526,00	0,00
	Jumlah	**16.314.902.964,41**	**18.667.086.360,00**	**(2.352.183.395,59)**

Selisih Pendapatan Pajak Daerah – LRA dan Pendapatan Pajak Daerah – LO dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Pajak Reklame-LO disebabkan karena timbulnya piutang baru senilai Rp203.796.326,00 dan terdapat pelunasan pajak reklame tahun 2024 senilai Rp5.611.000,00;
2. Selisih Pajak Air Tanah-LO disebabkan karena timbulnya piutang baru senilai Rp15.572.600,00 dan tidak ada pelunasan pajak air tanah tahun 2024;
3. Selisih PBBP2-LO disebabkan karena timbulnya piutang baru senilai Rp2.342.174.738,59 dan terdapat pelunasan PBBP2 tahun 2024 senilai Rp203.749.269,00.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3.849.686.350,00	20.085.729.256,00

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.849.686.350,00 dan Rp20.085.729.256,00, yang merupakan saldo pendapatan atas penghimpunan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.117 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2024 dan 2023

No	Nama Pegawai	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum – LO	2.241.293.500,00	18.560.328.536,00
2	Retribusi Jasa Usaha – LO	1.588.923.100,00	1.437.277.470,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu – LO	19.469.750,00	88.123.250,00
Total Pendapatan Retribusi Daerah – LO		**3.849.686.350,00**	**20.085.729.256,00**

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah – LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah – LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.118 Perbandingan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan LO TA 2024

No	Pendapatan Retribusi	Saldo LRA	Saldo LO	Selisih
1	Retribusi Jasa Umum	2.279.773.500,00	2.241.293.500,00	38.480.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.330.577.170,00	1.588.923.100,00	(258.345.930,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	19.469.750,00	19.469.750,00	0.00
	Jumlah	**3.629.820.420,00**	**3.849.686.350,00**	**(219.865.930,00)**

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah – LO dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih Retribusi Jasa Umum karena terdapat pelunasan piutang retribusi jasa umum tahun 2024 senilai Rp38.480.000,00; dan
2. Selisih Retribusi Jasa Usaha karena timbulnya piutang baru senilai Rp325.771.500,00 dan terdapat pelunasan piutang retribusi jasa usaha tahun 2024 senilai Rp67.425.570,00.

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4.270.908.241,54	3.845.122.715,00

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp4.270.908.241,54 dan Rp3.845.122.715,00, yang merupakan saldo pendapatan berupa pembagian laba atas penyertaan modal pada Bank NTT.

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
40.316.713.862,13	6.618.787.892,17

Saldo Lain-lain PAD yang Sah – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp40.316.713.862,13 dan Rp6.618.787.892,17, yang merupakan saldo pendapatan atas Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari BLUD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah – LO TA 2024 dan 2023

No.	Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	136.059.166,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	479.200.000,00	405.685.000,00
3	Jasa Giro – LO	1.459.076.991,37	1.251.820.134,35
4	Pendapatan Bunga – LO	242.037.452,00	302.807.437,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	175.000,00	2.081.000,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	560.057.978,25	697.665.726,09
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	778.341.113,91	1.697.367.855,12
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	1.492.598,56	14.813.545,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	191.809.987,72	403.511.276,49
11	Pendapatan dari Pengembalian – LO	1.580.887.660,29	1.611.082.169,12
12	Pendapatan dari BLUD – LO	35.023.635.080,03	0,00

No.	Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
14	Lain-lain	0,00	95.894.583,00
	Jumlah	**40.316.713.862,13**	**6.618.787.892,17**

Terdapat perbedaan antara Lain-lain PAD yang Sah – LRA dan Lain-lain PAD yang Sah – LO yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.120 Perbandingan Saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah LRA dan LO TA 2024

No	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Saldo LRA (Rp)	Saldo LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	479.200.000,00	479.200.000,00	0,00
3	Jasa Giro	1.459.076.991,37	1.459.076.991,37	0,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	175.000,00	175.000,00	0,00
5	Pendapatan Bunga	242.037.452,00	242.037.452,00	0,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	560.057.978,25	560.057.978,25	0,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	790.233.005,91	778.341.113,91	11.891.892,00
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.492.598,56	1.492.598,56	0,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	697.938.455,72	191.809.987,72	506.128.468,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	1.592.637.660,29	1.580.887.660,29	11.750.000,00
12	Pendapatan dari BLUD	28.016.375.792,00	35.023.635.080,03	(7.007.259.288,03)
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
14	Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**33.839.224.934,10**	**40.316.713.862,13**	**(6.477.488.928,03)**

Selisih Lain-lain PAD yang Sah – LRA dan Lain-lain PAD yang Sah – LO dijelaskan sebagai berikut.

1. Selisih pada Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan karena terdapat pelunasan piutang tahun 2024 senilai Rp11.891.892,00;
2. Selisih pada Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan karena terdapat pelunasan piutang tahun 2024 senilai Rp506.128.468,00;
3. Selisih pada Pendapatan dari Pengembalian karena terdapat pelunasan piutang tahun 2024 senilai Rp11.750.000,00; dan
4. Selisih pada Pendapatan BLUD karena timbulnya piutang baru pada tahun 2024 senilai Rp7.007.259.288,03.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.034.234.655.187,00	903.920.825.583,00

Saldo Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai

Rp1.034.234.655.187,00 dan Rp903.920.825.583,00 yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pemerintah Daerah. Rincian lebih lanjut atas saldo Pendapatan Transfer – LO dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.121 Rincian Nilai Pendapatan Transfer – LO

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.002.142.489.658,00	876.712.274.394,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	32.092.165.529,00	27.208.551.189,00
	Jumlah	**1.034.234.655.187,00**	**903.920.825.583,00**

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
996.508.751.658,00	876.712.274.394,00

Pendapatan Dana Perimbangan – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp996.508.751.658,00 dan Rp876.712.274.394,00 yang terdiri atas Dana Perimbangan – LO dan Dana Insentif Daerah – LO. Rincian lebih lanjut atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.122 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan–LO

Dana Perimbangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LO	3.066.558.264,00	4.924.992.643,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam – LO	2.917.873.000,00	3.103.699.012,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	680.488.339.610,00	616.204.723.700,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	166.392.708.767,00	108.044.563.225,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	143.643.272.017,00	144.434.295.814,00
Jumlah	**996.508.751.658,00**	**876.712.274.394,00**

Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan Dana Perimbangan antara LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.123 Perbandingan Saldo Dana Perimbangan LRA dan LO TA 2024

Dana Perimbangan	Saldo LRA (Rp)	Saldo LO (Rp)	Selisih (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LO	3.376.009.264,00	3.066.558.264,00	309.451.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam - LO	3.282.192.000,00	2.917.873.000,00	364.319.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	680.488.339.610,00	680.488.339.610,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	166.392.708.767,00	166.392.708.767,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	143.643.272.017,00	143.643.272.017,00	0,00
Jumlah	**997.182.521.658,00**	**996.508.751.658,00**	**673.770.000,00**

Selisih senilai Rp673.770.000,00 merupakan selisih yang timbul atas penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Insentif Daerah (DID)

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.633.738.000,00	0,00

Saldo Dana Insentif Daerah – LO per 31 Desember 2024 adalah Dana Insentif Daerah (DID) – LO senilai Rp5.633.738.000,00.

5.4.1.2.3. Pendapatan Pemerintah Provinsi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
32.092.165.529,00	27.208.551.189,00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp32.092.165.529,00 dan Rp27.208.551.189,00 merupakan saldo dari Pendapatan Bantuan Keuangan-LO dan Bagi Hasil Pajak – LO yang terdiri atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Rincian lebih lanjut atas saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO TA 2024 dan 2023

No	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	3.319.993.453,00	2.846.703.256,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.735.597.206,00	4.870.249.437,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	7.303.941.576,00	4.744.057.310,00
4	Pajak Air Permukaan	13.502.873,00	4.552.225,00
5	Pajak Rokok	15.103.880.421,00	14.742.988.961,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.615.250.000,00	0,00
	Jumlah	**32.092.165.529,00**	**27.208.551.189,00**

Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan Bagi Hasil Pajak antara LRA dengan LO yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.125 Perbandingan Nilai Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA dan LO TA 2024

Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	Saldo LRA (Rp)	Saldo LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	4.947.109.887,00	3.319.993.453,00	1.627.116.434,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.713.544.459,00	2.735.597.206,00	(22.052.747,00)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan	8.641.435.562,00	7.303.941.576,00	1.337.493.986,00
Pajak Air Permukaan	23.614.580,00	13.502.873,00	10.111.707,00
Pajak Rokok	15.103.880.421,00	15.103.880.421,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	3.615.250.000,00	3.615.250.000,00	0,00
Jumlah	**35.044.834.909,00**	**32.092.165.529,00**	**2.952.669.380,00**

Selisih pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA sebesar Rp2.952.669.380,00 merupakan piutang bagi hasil Pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor BU.900.1.14.3/05/BPAD/2025 tanggal 18 Maret 2025.

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
24.929.620.860,74	21.904.688.396,48

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp24.929.620.860,74 dan Rp21.904.688.396,48 yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan , dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO TA 2024

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	12.103.551.449,74	9.816.140.080,48
Lain – Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan – LO	12.826.069.411,00	12.088.548.316,00
Jumlah	**24.929.620.860,74**	**21.904.688.396,48**

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
12.103.551.449,74	9.816.140.080,48

Pendapatan Hibah senilai Rp12.103.551.449,74 bersumber dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah senilai Rp9.525.117.876,00 merupakan pendapatan hibah berupa persediaan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pendapatan Hibah senilai Rp242.965.440,00 merupakan pendapatan hibah berupa aset tetap lainnya berupa buku umum dari Kementerian Pendidikan yang disalurkan ke 60 Sekolah Negeri, masing-masing sekolah mendapatkan hibah buku umum senilai Rp4.049.424,00;
3. Pendapatan Hibah senilai Rp10.862.851,59 merupakan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat untuk bantuan erupsi Gunung Lewotobi; dan
4. Pendapatan Hibah senilai Rp2.324.605.282,15 merupakan pendapatan hibah berupa aset tetap peralatan dan mesin dan persediaan yang disalurkan oleh Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127 Pendapatan Hibah – LO TA 2024

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
A	**Peralatan dan Mesin**	
1	Alat Kedokteran Lainnya Lain-lain – *Antropometri* Kit	1.702.494.724,00
B	**Persediaan**	
1	Obat	130.436.144,05
2	Bahan Lainnya	491.674.414,10
	Jumlah	**2.324.605.282,15**

5.4.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
12.826.069.411,00	12.088.548.316,00

Saldo Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp12.826.069.411,00 dan Rp12.088.548.316,00 yang merupakan pendapatan dana kapitasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan – LO TA 2024 dan 2023

No.	Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi	12.826.069.411,00	12.088.548.316,00
2	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00
	Jumlah	**12.826.069.411,00**	**12.088.548.316,00**

Pendapatan Dana Kapitasi tersebut disalurkan langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada 21 puskesmas dan RSUD Adonara di Kabupaten Flores Timur, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi per Puskesmas TA 2024

No.	Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Boru	644.037.461,00
2	Puskesmas Ile Bura	381.657.051,00
3	Puskesmas Lato	293.490.078,00
4	Puskesmas Lewolaga	328.209.826,00
5	Puskesmas Demon Pagong	254.631.467,00
6	Puskesmas Lewolema	496.225.603,00
7	Puskesmas Oka	716.461.070,00
8	Puskesmas Nagi	1.075.443.331,00
9	Puskesmas Waimana	407.045.710,00
10	Puskesmas Waiklibang	735.996.235,00
11	Puskesmas Waiwadan	666.726.200,00
12	Puskesmas Lite	615.594.573,00
13	Puskesmas Sagu	537.867.760,00
14	Puskesmas Lambunga	577.653.893,00
15	Puskesmas Witihama	653.447.223,00
16	Puskesmas Ile Boleng	809.365.080,00
17	Puskesmas Waiwerang	1.282.084.225,00
18	Puskesmas Baniona	457.069.903,00
19	Puskesmas Menanga	742.954.141,00
20	Puskesmas Kalike	376.741.323,00
21	Puskesmas Ritaebang	570.106.586,00
22	RSP Adonara	203.260.672,00
	Jumlah	**12.826.069.411,00**

5.4.2. Beban

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.061.470.568.191,60	886.632.368.456,72

Saldo Beban – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai

Rp1.061.470.568.191,60 dan Rp886.632.368.456,72 yang terdiri Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.130 Rincian Beban Operasional – LO TA 2024 dan 2023

No.	Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai	514.613.540.854,00	445.757.474.172,80
2	Beban Persediaan	167.658.475.278,87	88.477.366.223,26
3	Beban Jasa	81.119.296.663,00	88.905.390.966,00
4	Beban Pemeliharaan	1.811.707.856,00	2.348.743.125,46
5	Beban Perjalanan Dinas	46.825.798.831,00	48.589.932.105,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.331.368.726,00	2.106.466.928,00
8	Beban Hibah	51.044.922.123,00	42.583.809.667,00
9	Beban Bantuan Sosial	214.362.291,00	207.542.820,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	111.787.926.062,12	87.478.838.446,20
11	Beban Penyisihan Piutang	1.163.892.594,61	804.514.129,00
12	Beban Transfer	79.891.279.912,00	79.372.289.874,00
13	Beban Lain-lain	7.997.000,00	0,00
	Jumlah	**1.061.470.568.191,60**	**886.632.368.456,72**

5.4.2.1. Beban Pegawai

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
514.613.540.854,00	445.757.474.172,80

Saldo Beban Pegawai – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp514.613.540.854,00 dan Rp445.757.474.172,80 yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Bunga terdiri atas Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/Wa. KDH), Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/Wa. KDH, Beban Pegawai BOS, dan Beban Pegawai BLUD. Rincian lebih lanjut atas saldo Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.131 Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

No	Beban Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO	372.482.749.854,00	323.439.010.636,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	54.501.212.819,00	33.806.690.676,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO	76.697.329.471,00	76.906.130.656,80
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO	10.149.201.062,00	10.994.371.714,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO	281.407.648,00	100.390.490,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH – LO	501.640.000,00	510.880.000,00
	Jumlah	**514.613.540.854,00**	**445.757.474.172,80**

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai – LRA dan Beban Pegawai – LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Belanja Pegawai – LRA dan Beban Pegawai – LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.132 Perbandingan Saldo Belanja Pegawai – LRA dan Beban Pegawai – LO TA 2024

No	Uraian	Belanja Pegawai – LRA	Beban Pegawai – LO	Selisih
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	372.482.749.854,00	372.482.749.854,00	0,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	54.501.212.819,00	54.501.212.819,00	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.830.003.788,00	76.697.329.471,00	(2.867.325.683,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.149.201.062,00	10.149.201.062,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	281.407.648,00	281.407.648,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.640.000,00	501.640.000,00	0,00
	Jumlah	**511.746.215.171,00**	**514.613.540.854,00**	**(2.867.325.683,00)**

Selisih Belanja Pegawai – LRA dan Beban Pegawai – LO senilai Rp2.867.325.683,00 yaitu sebagai berikut.

1. Mutasi bertambah Beban Pegawai senilai Rp5.453.387.420,00 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Timbulnya hutang baru atas belanja TPG PNSD senilai Rp4.654.144.300,00;
   b. Timbulnya hutang baru atas belanja TKG PNSD senilai Rp239.261.400,00;
   c. Timbulnya hutang baru atas belanja Tamsil Guru PNSD senilai Rp481.500.000,00; dan
   d. Timbulnya hutang baru atas belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN senilai Rp78.481.720,00.
2. Mutasi berkurang Beban Pegawai senilai Rp2.586.061.737,00 dengan rincian sebagai berikut.
   a. Terdapat kapitalisasi dari Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa ke Aset Tetap senilai Rp480.750.000,00;
   b. Terdapat pelunasan atas hutang belanja TPG PNSD senilai Rp118.729.200,00; dan
   c. Terdapat pelunasan atas hutang belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN senilai Rp1.986.582.537,00.

5.4.2.2. Beban Persediaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
167.658.475.278,87	88.477.366.223,26

Saldo Beban Persediaan – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp167.658.475.278,87 dan Rp88.477.366.223,26 yang merupakan konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang yang habis pakai, dengan rincian

sebagai berikut.

Tabel 5.133 Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

No	Beban Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Persediaan dan Jasa BLUD	25.796.169.893,00	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.214.076.954,00	1.184.615.811,00
3	Beban Bahan-Bahan Kimia	531.087.100,00	51.266.004,00
4	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.280.974.324,00	2.379.201.225,00
5	Beban Bahan-Bahan Baku	57.135.475,00	8.127.864.228,57
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	662.628.200,00	269.559.800,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.503.375,00	0,00
8	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	43.080.000,00	621.275.000,00
9	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	28.260.000,00	14.947.115,00
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.820.986.098,75	10.946.634.469,62
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	764.401.535,00	781.633.229,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	40.000.000,00	84.246.215,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	975.000,00	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	8.025.000,00	0,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.316.000,00	0,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	188.324.500,00	63.021.450,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.652.777.923,00	2.731.939.697,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1.463.536.830,00	0,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	5.834.619.829,00	4.212.867.461,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	163.005.580,00	167.282.500,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	354.244.250,00	148.169.002,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.858.015.681,00	1.393.514.690,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	615.957.098,00	530.761.119,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	689.589.884,00	557.579.278,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	233.006.600,00	0,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Pendukung Olahraga	142.097.440,00	2.300.000,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Suvenir/Cendera Mata	209.985.000,00	143.550.000,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	580.838.736,00	15.050.000,00
28	Beban Obat-Obatan-Obat	9.893.569.845,12	12.263.437.698,07
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.854.401.218,00	47.820.487,00
30	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	63.630.270.187,00	4.942.250.100,00
31	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	20.631.728.410,00	19.863.074.842,00
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	132.668.300,00	3.220.942.857,00
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	60.284.900,00	18.720.000,00

No	Beban Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
34	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	149.121.148,00	330.000.000,00
35	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.516.492.619,00	8.148.118.881,00
36	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.805.323.914,00	1.180.070.554,00
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.041.373.100,00	0,00
38	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.809.081.159,00	2.813.528.997,00
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	61.610.000,00
40	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	223.453.000,00	66.757.000,00
41	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	12.600.000,00
42	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	37.800.000,00
43	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23.145.000,00	0,00
44	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	13.875.000,00	10.450.000,00
45	Beban Pakaian Teknik	66.012.760,00	0,00
46	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	11.025.000,00	44.800.000,00
47	Beban Pakaian Adat Daerah	10.420.000,00	0,00
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	4.097.000,00	0,00
49	Beban Pakaian Olahraga	59.707.000,00	27.588.000,00
50	Beban Pakaian Paskibraka	59.873.000,00	132.765.000,00
51	Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.373.290.048,00	827.753.513,00
52	Koreksi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PKO	43.489.000,00	0,00
53	Koreksi atas Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan	2.155.365,00	0,00
	Jumlah	**167.658.475.278,87**	**88.477.366.223,26**

Terdapat perbedaan antara Belanja Barang – LRA dan Beban Persediaan – LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Belanja Barang – LRA dan Beban Persediaan – LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.134 Perbandingan Belanja Barang – LRA dan Beban Persediaan – LO TA 2024

No	Uraian	Belanja Barang – LRA	Beban Persediaan – LO	Selisih
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.865.268.764,00	1.214.076.954,00	651.191.810,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	531.960.000,00	531.087.100,00	872.900,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.259.699.274,00	2.280.974.324,00	(21.275.050,00)
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	57.135.475,00	(57.135.475,00)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	628.556.000,00	662.628.200,00	(34.072.200,00)
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.503.375,00	2.503.375,00	0,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	43.080.000,00	(43.080.000,00)
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	28.260.000,00	28.260.000,00	0,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.929.553.992,00	4.820.986.098,75	(1.891.432.106,75)
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	777.416.535,00	764.401.535,00	13.015.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	975.000,00	(975.000,00)

No	Uraian	Belanja Barang – LRA	Beban Persediaan – LO	Selisih
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	8.025.000,00	(8.025.000)
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	7.316.000,00	(7.316.000)
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	188.324.500,00	188.324.500,00	0,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.493.173.798,00	3.652.777.923,00	(2.159.604.125,00)
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	1.362.945.430,00	1.463.536.830,00	(100.591.400,00)
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	3.808.601.074,00	5.834.619.829,00	(2.026.018.755,00)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	114.776.080,00	163.005.580,00	(48.229.500,00)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	354.244.250,00	354.244.250,00	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.795.571.731,00	1.858.015.681,00	(62.443.950,00)
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	428.981.798,00	615.957.098,00	(186.975.300,00)
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	577.586.554,00	689.589.884,00	(112.003.330,00)
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	228.581.600,00	233.006.600,00	(4.425.000,00)
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Pendukung Olahraga	6.000.000,00	142.097.440,00	(136.097.440,00)
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Suvenir/Cendera Mata	143.000.000,00	209.985.000,00	(66.985.000,00)
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	253.521.000,00	580.838.736,00	(327.317.736,00)
27	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.357.877.945,00	9.893.569.845,12	(6.535.691.900,12)
28	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.854.401.218,00	2.854.401.218,00	0,00
29	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	46.184.154.070,00	63.630.270.187,00	(17.446.116.117,00)
30	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	20.858.855.010,00	20.631.728.410,00	227.126.600,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura	163.879.000,00	132.668.300,00	31.210.700,00
32	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	60.284.900,00	60.284.900,00	0,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	147.311.148,00	149.121.148,00	(1.810.000,00)
34	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.924.463.619,00	8.516.492.619,00	(592.029.000,00)
35	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.749.667.268,00	1.805.323.914,00	(55.656.646,00)
36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	2.041.373.100,00	(2.041.373.100,00)
37	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.809.081.159,00	3.809.081.159,00	0,00
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	95.473.000,00	223.453.000,00	(127.980.000,00)
40	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Belanja Barang – LRA	Beban Persediaan – LO	Selisih
41	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	22.745.000,00	23.145.000,00	(400.000,00)
43	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00
44	Belanja Pakaian Teknik	66.012.760,00	66.012.760,00	0,00
45	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00
46	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	10.420.000,00	(10.420.000,00)
47	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	4.097.000,00	(4.097.000,00)
48	Belanja Pakaian Olahraga	30.297.000,00	59.707.000,00	(29.410.000,00)
49	Belanja Pakaian Paskibraka	56.873.000,00	59.873.000,00	(3.000.000,00)
50	Belanja Modal Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	42.595.000,00	1.373.290.048,00	(1.330.695.048,00)
51	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	25.796.169.893,00	(25.796.169.893,00)
52	Koreksi atas Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PKO	0,00	43.489.000,00	(43.489.000,00)
53	Koreksi atas Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan	0,00	2.155.365,00	(2.155.365,00)
	Jumlah	**107.267.396.852,00**	**167.658.475.278,87**	**(60.391.078.426,87)**

Selisih Belanja Barang – LRA dan Beban Persediaan – LO dijelaskan sebagai berikut.

a. Mutasi bertambah Beban Persediaan senilai Rp96.268.447.857,43 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bertambahnya nilai Beban Persediaan karena adanya hibah masuk barang berupa obat dan bahan lainnya dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, dan RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka senilai Rp10.147.228.434,15;

2) Bertambahnya nilai Beban Persediaan karena adanya saldo persediaan awal barang senilai Rp49.774.051.229,28 yang tersebar di 24 SKPD;

3) Bertambahnya nilai Beban Persediaan karena adanya belanja barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi senilai Rp1.133.541.757,00;

4) Bertambahnya nilai Beban Persediaan karena adanya reklasifikasi dari belanja modal peralatan dan mesin dari Dinas Perikanan senilai Rp1.000.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp1.651.125,00, RSPA Adonara senilai Rp27.150.000,00, dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp15.377.500,00. Selain itu, dari belanja modal gedung dan bangunan pada RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka senilai Rp3.500.000,00;

5) Bertambahnya nilai Beban Persediaan karena adanya hutang baru belanja obat dan bahan lainnya pada Dinas Kesehatan tahun 2024 senilai Rp21.911.873,00;

6) Bertambahnya nilai Beban Persediaan karena adanya reklasifikasi dari akun BOS pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp9.188.661.965,00;

7) Bertambahnya nilai Beban Persediaan karena adanya reklasifikasi dari beban tidak terduga senilai Rp112.559.716,00;

8) Bertambahnya nilai Beban Persediaan yang merupakan Beban Persediaan dan Jasa BLUD senilai Rp25.796.169.893,00;

9) Bertambahnya nilai Beban Persediaan akibat koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PKO senilai Rp43.489.000,00; dan

10) Bertambahnya nilai Beban Persediaan akibat koreksi Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan senilai Rp2.155.365,00.

b. Mutasi berkurang Beban Persediaan senilai Rp35.877.369.430,56 dengan rincian sebagai berikut:

1) Berkurangnya nilai Beban Persediaan karena adanya sisa persediaan akhir pada 23 SKPD senilai Rp31.935.412.173,01;

2) Berkurangnya nilai Beban Persediaan karena adanya kapitalisasi ke nilai perolehan aset tetap tahun 2024 senilai Rp1.304.500.623,00;

3) Berkurangnya nilai Beban Persediaan karena adanya kesalahan penganggaran belanja. Seharusnya dianggarkan sebagai belanja modal, akan tetapi SKPD menganggarkan sebagai belanja barang. Kesalahan penganggaran belanja barang yang menjadi aset tetap baru tahun 2024 senilai Rp1.074.834.163,00;

4) Berkurangnya nilai Beban Persediaan karena adanya pelunasan hutang tahun sebelumnya senilai Rp344.645.844,00;

5) Berkurangnya nilai Beban Persediaan karena adanya persediaan barang yang sudah *expired* senilai Rp1.172.332.262,55. Persediaan *expired* tersebut terdapat di 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan senilai Rp1.033.039.129,25 dan RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka senilai Rp139.293.133,30;

6) Berkurangnya nilai Beban Persediaan karena adanya Beban Persediaan yang dijual/diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perikanan senilai Rp2.155.365,00 dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp43.489.000,00.

Selanjutnya, di antara Saldo Beban Persediaan – LO terdapat Saldo Beban Persediaan dan Jasa BLUD – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp25.796.169.893,00 dan Rp0,00. Rincian lebih lanjut atas Beban Persediaan dan Jasa BLUD-LO TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.135 Rincian Beban Persediaan dan Jasa BLUD TA 2024 dan 2023

No.	Beban Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Persediaan dan Jasa BLUD	25.796.169.893,00	0,00
	Jumlah	**25.796.169.893,00**	**0,00**

Terdapat perbedaan antara Belanja Barang dan Jasa BLUD – LRA dan Beban Persediaan dan Jasa BLUD – LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan antara Belanja Barang dan Jasa BLUD – LRA dan Beban Persediaan dan Jasa BLUD – LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.136 Rincian perbedaan Belanja Barang dan Jasa BLUD – LRA dan Beban Persediaan dan Jasa BLUD – LO TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Belanja Barang dan Jasa– LRA	Beban Persediaan dan Jasa – LO	Selisih
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.665.923.132,00	25.796.169.893,00	(2.130.246.761,00)
	Jumlah	**23.665.923.132,00**	**25.796.169.893,00**	**(2.130.246.761,00)**

Selisih Belanja Barang dan Jasa BLUD – LRA dan Beban Persediaan dan Jasa BLUD – LO timbul akibat adanya hutang baru belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp2.555.535.332,00. Selain itu, terdapat juga mutasi berkurang dari belanja barang dan jasa BLUD karena adanya kapitalisasi dari belanja barang dan jasa BLUD ke Aset Tetap senilai Rp425.288.571,00.

5.4.2.3. Beban Jasa

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
81.119.296.663,00	88.905.390.966,00

Saldo Beban Jasa – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp81.119.296.663,00 dan Rp88.905.390.966,00, yang merupakan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selama TA 2024. Rincian lebih lanjut atas Beban Jasa TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.137 Rincian Beban Jasa TA 2024 dan 2023

No	Beban Jasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.019.476.400,00	1.042.845.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.612.882.000,00	10.801.346.619,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	94.200.000,00	68.000.000,00
4	Honorarium Penyuluh/Pendamping	33.550.000,00	-
5	Honorarium Rohaniwan	6.650.000,00	6.950.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.250.000,00	2.784.705.563,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	9.400.000,00	-
8	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan pelatihan	96.210.000,00	-
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	383.600.000,00	403.070.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.441.283.200,00	6.113.340.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.803.400.000,00	13.689.762.371,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.972.309,00	40.825.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	508.125.300,00	463.163.970,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	768.200.000,00	512.000.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	349.679.000,00	124.900.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	-	25.000.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	566.750.000,00	1.118.845.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	278.454.000,00	72.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.431.215.000,00	5.356.200.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	170.058.720,00	278.400.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.987.700.000,00	426.850.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.436.445.500,00	1.146.820.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.594.466.200,00	3.920.600.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	971.350.000,00	613.500.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Caraka	17.250.000,00	-
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	312.250.000,00	172.000.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	54.652.859,00	18.000.000,00
28	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	47.975.000,00	13.850.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	30.650.000,00

No	Beban Jasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
30	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	29.730.600,00	23.830.500,00
31	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	-	5.000.000,00
32	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	341.880.000,00
33	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	23.034.000,00	16.515.000,00
34	Belanja Jasa Kalibrasi	79.076.000,00	224.174.400,00
35	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	66.500.000,00	9.002.500,00
36	Belanja Tagihan Telepon	125.153.490,00	74.045.940,00
37	Belanja Tagihan Air	528.240.750,00	419.003.477,00
38	Belanja Tagihan Listrik	2.145.035.124,00	2.649.334.188,00
39	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	35.947.840,00	52.597.015,00
40	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.568.650.957,00	1.893.209.338,00
41	Belanja Paket/Pengiriman	36.961.850,00	28.353.250,00
42	Belanja Penambahan Daya	1.860.000,00	-
43	Belanja Registrasi keanggotaan	8.075.000,00	-
44	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	242.589.637,00	209.496.026,00
45	Belanja Lembur	5.563.490.689,00	4.872.314.660,00
46	Belanja Medical Check Up	29.147.552,00	10.350.000,00
47	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	-	392.500.075,00
48	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.715.190.941,00	1.968.198.098,00
49	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-
50	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.587.165.664,00	2.362.097.728,00
51	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	16.835.112.400,00	8.602.589.200,00
52	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	223.476.400,00	151.296.200,00
53	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
54	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	134.326.860,00	-
55	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	167.908.575,00	-
56	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	22.500.000,00	-
57	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00
58	Belanja Sewa Excavator	80.600.000,00	-
59	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	-	58.006.500,00
60	Belanja Sewa Electric Generating Set	-	21.000.000,00
61	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	4.000.000,00	400.000,00
62	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	1.444.620.000,00
63	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.201.410.500,00	192.025.000,00
64	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	86.900.000,00	28.949.028,00
65	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	4.800.000,00	-
66	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	10.095.000,00	15.000.000,00
67	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	62.800.000,00	16.000.000,00
68	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	208.758.000,00	266.880.000,00
69	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10.749.000,00	-
70	Belanja sewa alat peraga pelatihan	32.335.000,00	-
71	Belanja Sewa Alat kantor Lainnya	33.206.000,00	-
72	Belanja Sewa Mebel	52.850.000,00	35.058.000,00
73	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	17.400.000,00

No	Beban Jasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
74	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	44.450.000,00	6.300.000,00
75	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	6.300.000,00	-
76	Belanja Sewa Alat Peraga Praktek sekolah Bidang Studi Keterampilan	760.000,00	-
77	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	9.890.739,00
78	Belanja Sewa Komputer Jaringan	24.240.000,00	-
79	Belanja Sewa Alat SAR Lainnya	3.000.000,00	-
80	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	4.250.000,00	15.000.000,00
81	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.108.355.847,00	-
82	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.900.000,00	1.508.006.000,00
83	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	-	-
84	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	46.000.000,00	30.000.000,00
85	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	18.000.000,00
86	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	-	100.000.000,00
87	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	598.067.999,00	99.111.999,00
88	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	-	-
89	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	-	518.075.570,00
90	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	628.496.000,00	380.515.000,00
91	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	500.000.000,00	-
92	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	586.470.500,00	694.771.212,00
93	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	48.300.000,00	7.036.099.800,00
94	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	407.335.000,00	769.691.000,00
95	Belanja Sosialisasi	-	1.546.050.000,00
96	Belanja Bimbingan Teknis	94.248.000,00	493.130.000,00
97	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-	-
	Jumlah	**81.119.296.663,00**	**88.905.390.966,00**

Terdapat perbedaan antara Belanja Jasa – LRA dan Beban Jasa – LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan Belanja Jasa – LRA dan Beban Jasa – LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.138 Perbandingan Belanja Jasa – LRA dan Beban Jasa – LO TA 2024

No	Beban Jasa	Belanja Jasa - LRA	Beban Jasa - LO	Selisih
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	852.845.400,00	1.019.476.400,00	(166.631.000,00)
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.800.986.000,00	7.612.882.000,00	188.104.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	94.200.000,00	94.200.000,00	-
4	Honorarium Penyuluh/Pendamping	-	33.550.000,00	(33.550.000,00)
5	Honorarium Rohaniwan	3.200.000,00	6.650.000,00	(3.450.000,00)
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.000.000,00	3.250.000,00	(250.000,00)

No	Beban Jasa	Belanja Jasa - LRA	Beban Jasa - LO	Selisih
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	-	9.400.000,00	(9.400.000,00)
8	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan pelatihan	-	96.210.000,00	(96.210.000,00)
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	383.600.000,00	383.600.000,00	-
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.384.430.000,00	12.441.283.200,00	(6.056.853.200,00)
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.803.400.000,00	5.803.400.000,00	-
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	-	5.972.309,00	(5.972.309,00)
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	431.700.000,00	508.125.300,00	(76.425.300,00)
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	768.200.000,00	768.200.000,00	-
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	349.679.000,00	349.679.000,00	-
17	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	566.750.000,00	566.750.000,00	-
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	271.304.000,00	278.454.000,00	(7.150.000,00)
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.971.650.000,00	2.431.215.000,00	(459.565.000,00)
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	17.250.000,00	170.058.720,00	(152.808.720,00)
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.987.700.000,00	2.987.700.000,00	-
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.423.675.300,00	1.436.445.500,00	(12.770.200,00)
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.536.500.000,00	4.594.466.200,00	(57.966.200,00)
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	876.000.000,00	971.350.000,00	(95.350.000,00)
25	Belanja Jasa Tenaga Caraka	17.250.000,00	17.250.000,00	-
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	312.250.000,00	312.250.000,00	-
27	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	33.831.359,00	54.652.859,00	(20.821.500,00)
28	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	32.750.000,00	47.975.000,00	(15.225.000,00)
30	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.994.000,00	29.730.600,00	(19.736.600,00)
33	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.039.000,00	23.034.000,00	(4.995.000,00)
34	Belanja Jasa Kalibrasi	79.076.000,00	79.076.000,00	-
35	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	66.500.000,00	66.500.000,00	-
36	Belanja Tagihan Telepon	124.493.490,00	125.153.490,00	(660.000,00)
37	Belanja Tagihan Air	414.672.350,00	528.240.750,00	(113.568.400,00)
38	Belanja Tagihan Listrik	1.904.039.824,00	2.145.035.124,00	(240.995.300,00)
39	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	27.897.840,00	35.947.840,00	(8.050.000,00)
40	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	989.202.193,00	1.568.650.957,00	(579.448.764,00)
41	Belanja Paket/Pengiriman	36.961.850,00	36.961.850,00	-
42	Belanja Penambahan Daya	-	1.860.000,00	(1.860.000,00)
43	Belanja Registrasi keanggotaan	-	8.075.000,00	(8.075.000,00)
44	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	242.589.637,00	242.589.637,00	-
45	Belanja Lembur	5.722.923.510,00	5.563.490.689,00	159.432.821,00
46	Belanja Medical Check Up	29.147.552,00	29.147.552,00	-
48	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.037.358.316,00	1.715.190.941,00	322.167.375,00

No	Beban Jasa	Belanja Jasa - LRA	Beban Jasa - LO	Selisih
50	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.587.165.664,00	2.587.165.664,00	-
51	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	16.835.112.400,00	16.835.112.400,00	-
52	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	223.476.400,00	223.476.400,00	-
54	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	134.326.860,00	134.326.860,00	-
55	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	167.908.575,00	167.908.575,00	-
56	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	22.500.000,00	22.500.000,00	-
57	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	-
58	Belanja Sewa Excavator	80.600.000,00	80.600.000,00	-
61	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-
63	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.171.500.000,00	1.201.410.500,00	(29.910.500,00)
64	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	86.500.000,00	86.900.000,00	(400.000,00)
65	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	4.800.000,00	4.800.000,00	-
66	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	9.300.000,00	10.095.000,00	(795.000,00)
67	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	43.000.000,00	62.800.000,00	(19.800.000,00)
68	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	196.750.000,00	208.758.000,00	(12.008.000,00)
69	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10.749.000,00	10.749.000,00	-
70	Belanja sewa alat peraga pelatihan	-	32.335.000,00	(32.335.000,00)
71	Belanja Sewa Alat kantor Lainnya	-	33.206.000,00	(33.206.000,00)
72	Belanja Sewa Mebel	52.850.000,00	52.850.000,00	-
73	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	-
74	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	44.450.000,00	44.450.000,00	-
75	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	-
76	Belanja Sewa Alat Peraga Praktek sekolah Bidang Studi Keterampilan	-	760.000,00	(760.000,00)
78	Belanja Sewa Komputer Jaringan	24.240.000,00	24.240.000,00	-
79	Belanja Sewa Alat SAR Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-
80	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	4.250.000,00	4.250.000,00	-
81	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.108.355.847,00	1.108.355.847,00	-
82	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.900.000,00	20.900.000,00	-
84	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	46.000.000,00	46.000.000,00	-
87	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	598.067.999,00	598.067.999,00	-
90	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	628.496.000,00	628.496.000,00	-
91	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	500.000.000,00	500.000.000,00	-
92	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	586.470.500,00	586.470.500,00	-
93	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	48.300.000,00	48.300.000,00	-
94	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	407.335.000,00	407.335.000,00	-
95	Belanja Sosialisasi	-	-	-

No	Beban Jasa	Belanja Jasa - LRA	Beban Jasa - LO	Selisih
96	Belanja Bimbingan Teknis	94.248.000,00	94.248.000,00	-
	Jumlah	**73.411.998.866,00**	**81.119.296.663,00**	**(7.707.297.797,00)**

Selisih Belanja Jasa – LRA dan Beban Jasa – LO terdiri dari:

a. Mutasi bertambah senilai Rp8.422.781.993,00 yang terdiri dari:
   1) Reklas antar akun Dana BOS senilai Rp8.248.394.385,00;
   2) Reklas antar akun Dana BOP Reguler senilai Rp74.717.800,00;
   3) Reklas antar akun Dana BOP Kesetaraan senilai Rp62.961.808,00;
   4) Reklas antar akun Dana BOP Kesetaraan Kinerja senilai Rp15.200.000,00; dan
   5) Reklas antar akun dari Belanja Tidak Terduga ke Belanja Jasa senilai Rp21.508.000,00.

b. Mutasi berkurang senilai Rp715.484.196,00 yang terdiri dari:
   1) Kapitalisasi yang menambah nilai perolehan Aset Tetap tahun 2024 senilai Rp39.230.000,00;
   2) Timbulnya Aset Baru yang bersumber dari Belanja Jasa senilai Rp5.000.000,00.
   3) Berkurangnya beban jasa akibat temuan kelebihan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp189.654.000,00;
   4) Berkurangnya beban jasa akibat temuan kelebihan pembayaran belanja lembur tahun 2024 senilai Rp159.432.821,00; dan
   5) Berkurangnya beban jasa karena temuan kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Non ASN tahun 2024 senilai Rp72.587.016,00.

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.811.707.856,00	2.348.743.125,46

Saldo Beban Pemeliharaan – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.811.707.856,00 dan Rp2.348.743.125,46, yang merupakan konsekuensi atas upaya mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal selama TA 2024. Rincian lebih lanjut atas Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.139 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

No	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	29.926.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	2.907.500,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	402.547.340,00	465.615.017,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	39.929.333,00

No	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	59.412.500,00	166.525.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.545.000,00	368.497.139,46
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	6.337.500,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	27.589.551,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	9.813.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	45.412.000,00	13.075.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	375.000,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	168.058.000,00	167.288.000,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	1.430.000,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.000.000,00	0,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	55.000,00	9.970.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	0,00	160.916.633,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	332.981.980,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga-Praktek Seolah-Alat Peraga PAUD/TK	3.090.000,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	231.348.776,00	157.604.883,00
20	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	51.640.000,00	39.407.029,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi	7.445.000,00	0,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Peralatan Olahraga	383.315.340,00	0,00
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	70.426.000,00	229.273.360,00
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	25.000.000,00	121.652.700,00
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	198.940.300,00	27.210.000,00
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Instalasi air Bersih	29.564.000,00	0,00
27	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	1.692.500,00	(5.700.000,00)
28	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0,00	22.570.000,00
29	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-musik musik Lainnya	39.335.400,00	0,00
30	Beban Pemeliharaan Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olarahaga Raga-Barang bercorak kesenian -Alat Musik	34.429.200,00	0,00
	Jumlah	**1.811.707.856,00**	**2.348.743.125,46**

Terdapat perbedaan antara Belanja Pemeliharaan – LRA dan Beban Pemeliharaan – LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan antara Belanja Pemeliharaan – LRA dan Beban Pemeliharaan – LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.140 Rincian Perbedaan Belanja Pemeliharaan – LRA dan Beban Pemeliharaan – LO TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Belanja Pemeliharaan – LRA	Beban Pemeliharaan – LO	Selisih
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	29.926.000,00	29.926.000,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	462.732.340,00	402.547.340,00	60.185.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	59.412.500,00	59.412.500,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	9.545.000,00	9.545.000,00	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	6.337.500,00	6.337.500,00	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	49.972.000,00	0,00	49.972.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	9.813.000,00	9.813.000,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	50.412.000,00	45.412.000,00	5.000.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	375.000,00	(375.000,00)
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	172.858.000,00	168.058.000,00	4.800.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	55.000,00	55.000,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga-Praktek Seolah-Alat Peraga PAUD/TK	0,00	3.090.000,00	(3.090.000,00)
17	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	175.957.776,00	231.348.776,00	(55.391.000,00)

No	Uraian	Belanja Pemeliharaan – LRA	Beban Pemeliharaan – LO	Selisih
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	49.640.000,00	51.640.000,00	(2.000.000,00)
19	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi	7.445.000,00	7.445.000,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Peralatan Olahraga	0,00	383.315.340,00	(383.315.340,00)
21	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	843.199.686,00	70.426.000,00	772.773.686,00
22	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	420.463.000,00	25.000.000,00	395.463.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	198.940.300,00	(198.940.300,00)
25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	196.496.800,00	0,00	196.496.800,00
27	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	74.790.000,00	0,00	74.790.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Instalasi air Bersih	0,00	29.564.000,00	(29.564.000,00)
30	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	27.000.000,00	1.692.500,00	25.307.500,00
31	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-musik musik Lainnya	0,00	39.335.400,00	(39.335.400,00)
32	Belanja Pemeliharaan Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olarahaga Raga-Barang bercorak kesenian -Alat Musik	0,00	34.429.200,00	(34.429.200,00)
	Jumlah	**2.887.955.602,00**	**1.811.707.856,00**	**1.076.247.746,00**

Selisih Belanja Pemeliharaan – LRA dan Beban Pemeliharaan – LO terdiri dari:

a. Mutasi bertambah senilai Rp748.832.740,00 yang terdiri dari:
   1) Reklas antar akun Dana BOS senilai Rp738.552.840,00;
   2) Reklas antar akun Dana BOP Reguler senilai Rp3.465.000,00;
   3) Reklas antar akun Dana BOP Kesetaraan senilai Rp6.404.500,00;
   4) Reklas antar akun Dana BOP Kesetaraan Kinerja senilai Rp410.400,00.

b. Mutasi berkurang senilai Rp1.825.080.486,00 yang terdiri dari:

1) Kapitalisasi yang menambah nilai perolehan Aset Tetap tahun 2024 senilai Rp1.723.703.486,00;
2) Timbulnya Aset Baru yang bersumber dari Belanja Jasa senilai Rp101.377.000,00.

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
46.825.798.831,00	48.589.932.105,00

Saldo Beban Perjalanan Dinas – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp46.825.798.831,00 dan Rp48.589.932.105,00, yang merupakan konsekuensi atas pelaksanaan perjalanan dinas selama TA 2024, umumnya terdiri atas Beban Perjalanan Dinas Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota, namun pada TA 2024 Beban Perjalanan Dinas yang timbul hanya merupakan Beban atas Perjalanan Dinas Biasa. Rincian lebih lanjut atas Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.141 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

No.	Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	43.975.339.831,00	47.261.391.073,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	731.570.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.850.000,00	24.850.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	2.784.399.000,00	176.976.032,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	27.210.000,00	395.145.000,00
	Jumlah	**46.825.798.831,00**	**48.589.932.105,00**

Terdapat perbedaan antara Belanja Perjalanan Dinas – LRA dan Beban Perjalanan Dinas – LO, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.142 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas – LRA dan Beban Perjalanan Dinas – LO TA 2024

No.	Uraian	Belanja Perjalanan Dinas – LRA	Beban Perjalanan Dinas – LO	Selisih
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.419.671.470,00	43.975.339.831,00	(2.555.668.361,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	38.850.000,00	(38.850.000,00)
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota	2.784.399.000,00	2.784.399.000,00	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	27.210.000,00	27.210.000,00	0,00
	Jumlah	**44.231.280.470,00**	**46.825.798.831,00**	**(2.594.518.361,00)**

Selisih Belanja Perjalanan Dinas – LRA dan Beban Perjalanan Dinas – LO terdiri dari:

a. Mutasi bertambah senilai Rp3.755.913.100,00 yang terdiri dari:
   1) Reklas antar akun Dana BOS senilai Rp3.651.063.100,00;

2) Reklas antar akun Dana BOP Reguler senilai Rp32.950.000,00;

3) Reklas antar akun Dana BOP Kesetaraan senilai Rp4.900.000,00;

4) Reklas antar akun Dana BOP Kesetaraan Kinerja senilai Rp1.000.000,00;

5) Reklas antar akun dari Belanja Tidak Terduga tahun 2024 senilai Rp66.000.000,00.

b. Mutasi berkurang senilai Rp1.161.394.739,00 merupakan Kapitalisasi yang menambah nilai perolehan Aset Tetap tahun 2024, dan temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp117.345.395,00.

5.4.2.6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
5.331.368.726,00	2.106.466.928,00

Saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp5.331.368.726,00 dan Rp2.106.466.928,00. Rincian lebih lanjut atas Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.143 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 dan 2023

No.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	172.510.000,00	119.820.000,00
2	Beban Beasiswa	656.580.000,00	746.580.000,00
3	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	72.404.000,00	26.051.000,00
4	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	0,00	55.800.000,00
5	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	0,00	38.500.000,00
6	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	54.375.000,00
7	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	40.850.000,00
8	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	166.098.126,00	58.920.000,00
9	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.263.776.600,00	965.570.928,00
	Jumlah	**5.331.368.726,00**	**2.106.466.928,00**

Terdapat perbedaan antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO yang merupakan reklas antar akun dari Beban Tidak Terduga ke Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO senilai Rp29.944.365,00. Rincian lebih lanjut atas perbedaan antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.144 Rincian perbedaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	Selisih
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	172.510.000,00	172.510.000,00	0,00
2	Belanja Beasiswa	656.580.000,00	656.580.000,00	0,00
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	56.704.000,00	72.404.000,00	(15.700.000,00)
4	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	211.742.491,00	166.098.126,00	45.644.365,00
9	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.263.776.600,00	4.263.776.600,00	0,00
	Jumlah	**5.361.313.091,00**	**5.331.368.726,00**	**29.944.365,00**

5.4.2.7. Beban Hibah

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
51.044.922.123,00	42.583.809.667,00

Saldo Beban Hibah – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp51.044.922.123,00 dan Rp42.583.809.667,00, yang merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Rincian lebih lanjut atas Beban Hibah TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.145 Rincian Beban Hibah TA 2024 dan 2023

No	Beban Hibah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	25.646.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	29.133.194.226,00	24.015.320.500,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	793.500.000,00
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130.000.000,00	768.640.900,00
5	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	16.688.363.968,00	16.523.385.738,00
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	457.316.529,00	457.316.529,00

No	Beban Hibah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.902.267.400,00	0,00
8	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	633.780.000,00	0,00
	Jumlah	**51.044.922.123,00**	**42.583.809.667,00**

Terdapat perbedaan antara Belanja Hibah – LRA dan Beban Hibah – LO, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.146 Perbandingan Belanja Hibah – LRA dan Beban Hibah – LO TA 2024

No	Uraian	Belanja Hibah – LRA	Beban Hibah – LO	Selisih
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	37.209.198.200,00	29.133.194.226,00	8.076.003.974,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	16.688.363.968,00	16.688.363.968,00	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	457.316.529,00	457.316.529,00	0,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.902.267.400,00	3.902.267.400,00	0,00
7	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	678.780.000,00	633.780.000,00	45.000.000,00
	Jumlah	**59.165.926.097,00**	**51.044.922.123,00**	**8.121.003.974,00**

Selisih antara Belanja Hibah – LRA dan Beban Hibah – LO senilai Rp8.121.003.974,00 dirincikan sebagai berikut:

a. Berkurangnya beban hibah senilai Rp45.000.000,00 dikarenakan terdapat Reklas antar akun BOP Kesetaraan Kinerja di UPTD SPNF SKB Larantuka.

b. Berkurangnya beban hibah senilai Rp8.076.003.974,00 merupakan pengembalian dana hibah Pemilihan Umum Daerah, dengan rincian:

   1) Pengembalian dana hibah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur senilai Rp7.655.161.177,00; dan

   2) Pengembalian dana hibah dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur senilai Rp420.842.797,00.

5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
214.362.291,00	207.542.820,00

Saldo Beban Bantuan Sosial – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp214.362.291,00 dan Rp207.542.820,00, yang merupakan beban dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya risiko sosial. Rincian lebih lanjut atas Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.147 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

No	Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	40.000.000,00	50.920.350,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	139.390.500,00	113.515.095,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	43.107.375,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	34.971.791,00	0,00
	Jumlah	**214.362.291,00**	**207.542.820,00**

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Hibah – LRA dan Beban Hibah – LO, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.148 Perbandingan Belanja Bantuan Sosial – LRA dan Beban Bantuan Sosial – LO

No	Uraian	Belanja Bantuan Sosial – LRA	Beban Bantuan Sosial – LO	Selisih
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	139.390.500,00	139.390.500,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	34.971.791,00	34.971.791,00	0,00
	Jumlah	**214.362.291,00**	**214.362.291,00**	**0,00**

5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
111.787.926.062,12	87.478.838.446,20

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp111.787.926.062,12 dan Rp87.478.838.446,20, yang merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Rincian lebih lanjut atas Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.149 Rincian Beban Penyisihan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.329.730.687,59	37.246.977.571,79
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.012.861.130,89	11.530.735.043,27
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.127.684.683,64	38.701.125.831,14
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	49.939.560,00	0,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	267.710.000,00	0,00
	Jumlah	**111.787.926.062,12**	**87.478.838.446,20**

5.4.2.10. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.163.892.594,61	804.514.129,00

Saldo Beban Penyisihan Piutang – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.163.892.594,61 dan Rp804.514.129,00, merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Rincian lebih lanjut atas Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.150 Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2024 dan 2023

No	Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	779.058.194,92	738.773.565,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	371.937.661,00	20.495.564,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.896.738,69	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	45.245.000,00
	Jumlah	**1.163.892.594,61**	**804.514.129,00**

5.4.2.11. Beban Transfer

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
79.891.279.912,00	79.372.289.874,00

Saldo Beban Transfer – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp79.891.279.912,00 dan Rp79.372.289.874,00, merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, mencakup Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Beban Transfer Bantuan Keuangan. Rincian lebih lanjut atas Beban Transfer TA 2024 disajikan sebagai berikut.

1. Beban Bagi Hasil

Saldo Beban Bagi Hasil – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.397.184.152,00 dan Rp1.478.781.514,00, yang terdiri atas Beban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah. Rincian lebih lanjut atas Beban Bagi Hasil TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.151 Rincian Beban Bagi Hasil TA 2024

No	Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa – LO	1.397.184.152,00	1.478.781.514,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa – LO	0,00	0,00
	Jumlah	**1.397.184.152,00**	**1.478.781.514,00**

Tidak terdapat perbedaan antara Belanja Bagi Hasil – LRA dan Beban Bagi Hasil – LO, sebagaimana disajikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.152 Perbandingan Belanja Bagi Hasil – LRA dan Beban Bagi Hasil – LO TA 2024

No	Uraian	Belanja Bagi Hasil – LRA	Beban Bagi Hasil – LO	Selisih
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.397.184.152,00	1.397.184.152,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.397.184.152,00**	**1.397.184.152,00**	**0,00**

2. Beban Bantuan Keuangan

Saldo Beban Bantuan Keuangan – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp78.494.095.760,00 dan Rp77.893.508.360,00, yang merupakan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi. Rincian lebih lanjut atas Beban Bantuan Keuangan TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.153 Rincian Beban Bagi Hasil TA 2024 dan 2023

No	Beban Bantuan Keuangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa – LO	78.494.095.760,00	77.893.508.360,00
	Jumlah	**78.494.095.760,00**	**77.893.508.360,00**

Terdapat perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan – LRA dan Beban Bantuan Keuangan – LO. Rincian lebih lanjut atas perbedaan antara Belanja Bantuan Keuangan – LRA dan Beban Bantuan Keuangan – LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.154 Perbandingan Belanja Bantuan Keuangan – LRA

No	Uraian	Belanja Bantuan Keuangan– LRA	Beban Bantuan Keuangan– LO	Selisih
1	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa – LO	262.262.777.760,00	78.494.095.760,00	183.768.682.000,00
	Jumlah	**262.262.777.760,00**	**78.494.095.760,00**	**183.768.682.000,00**

5.4.2.12. Beban Lain-lain

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.997.000,00	0,00

Saldo Beban Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp7.997.000,00 dan Rp0,00, merupakan beban penurunan nilai investasi dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(1.189.640.795,89)	792.868.500,32

Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.189.640.795,89 dan Rp792.868.500,32.

5.4.3.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
10.000.000,00	1.339.805.101,00

Saldo Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp10.000.000,00 dan Rp1.339.805.101,00.

5.4.3.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.199.640.795,89	546.936.600,68

Saldo Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp1.199.640.795,89 dan Rp546.936.600,68.

5.4.4. Pos Luar Biasa

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(2.485.870.735,40)	0,00

Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp2.485.870.735,40 dan Rp0,00 merupakan Beban Bencana Alam, dan Beban Tidak Terduga.

Tabel 5.155 Rincian Beban Luar Biasa-LO TA 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Beban Bencana Alam	2.485.870.735,40	0,00
2	Beban Tidak Terduga	0	0,00
	Jumlah	**2.485.870.735,40**	**0,00**

Terdapat perbedaan antara Belanja Tidak Terduga – LRA dan Beban Tidak Terduga – LO karena adanya reklas antar akun dari Beban Tidak Terduga – LO.

5.4.5. Surplus/Defisit – LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
61.122.591.138,52	86.827.391.942,25

Saldo Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp61.122.591.138,52 dan Rp86.827.391.942,25, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.156 Rincian Surplus/Defisit – LO TA 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan – LO	1.126.268.670.861,41	972.666.891.898,65
2	Beban – LO	1.061.470.568.191,60	886.632.368.456,72
3	Surplus/Defisit Non-Operasional	(1.189.640.795,89)	792.868.500,32
4	Surplus/Defisit Luar Biasa	(2.485.870.735,40)	0,00
	Jumlah	**61.122.591.138,52**	**86.827.391.942,25**

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Informasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, serta aktivitas transitoris. Saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran merupakan hasil penjumlahan antara saldo awal kas pada BUD dan Bendahara Pengeluaran dengan arus kas bersih (kenaikan atau penurunan kas) selama tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terdiri atas:

Tabel 5.157 Rincian Arus Kas TA 2024

No	Arus Kas dari:	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	173.753.826.466,10	140.809.508.260,67
2	Aktivitas Investasi	(191.395.700.799,00)	(105.419.879.754,00)
3	Aktivitas Pendanaan	7.997.000,00	14.070.000,00
4	Aktivitas Transitoris	(267.493.328,00)	277.927.606,91
	Arus Kas Bersih	**(17.901.370.660,90)**	**35.681.626.113,58**

Rincian lebih lanjut atas Arus Kas Bersih disajikan sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
173.753.826.466,10	140.809.508.260,67

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.158 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	1.290.264.472.751,10	1.149.041.276.391,12
2	Arus Keluar Kas	1.116.510.646.285,00	1.008.231.768.130,45
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**173.753.826.466,10**	**140.809.508.260,67**

Adapun rincian lebih lanjut atas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.159 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	16.314.902.964,41	15.068.129.862,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.629.820.420,00	24.458.316.606,00
3	Pendapatan Hasil Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.013.815.603,00	3.845.122.715,00
4	Lain – lain PAD yang sah	33.839.224.934,10	6.833.251.089,12
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	3.740.328.264,00	5.316.436.646,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.917.873.000,00	3.276.028.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	680.488.339.610,00	616.204.723.700,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	310.035.980.784,00	252.478.859.039,00

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00
10	Insentif Fiskal	5.633.738.000,00	0,00
11	Dana Desa	183.768.682.000,00	180.183.689.349,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	31.429.584.909,00	29.238.171.069,00
13	Bantuan Keuangan	3.615.250.000,00	0,00
14	Pendapatan Hibah	10.862.851,59	50.000.000,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	12.826.069.411,00	12.088.548.316,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		**1.290.264.472.751,10**	**1.149.041.276.391,12**

Sedangkan rincian lebih lanjut atas Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.160 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	511.746.215.171,00	446.582.102.987,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	279.301.125.411,00	258.213.655.046,45
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	59.165.926.097,00	43.137.517.667,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	214.362.291,00	224.278.770,00
6	Pembayaran Tak Terduga	2.423.055.403,00	518.234.437,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Desa	1.397.184.152,00	1.478.781.514,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	262.262.777.760,00	258.077.197.709,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		**1.116.510.646.285,00**	**1.008.231.768.130,45**

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(191.395.700.799,00)	(105.419.879.754,00)

Aliran kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas investasi yang terdiri dari:

Tabel 5.161 Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	136.059.166,00
2	Arus Keluar Kas	191.395.700.799,00	105.555.938.920,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**(191.395.700.799,00)**	**(105.419.879.754,00)**

Adapun rincian lebih lanjut atas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.162 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	136.059.166,00
2	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
3	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		**0,00**	**136.059.166,00**

Sedangkan rincian lebih lanjut atas Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi disajikan pada

tabel berikut.

Tabel 5.163 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi TA 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Perolehan Tanah	90.000.000,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	48.525.952.256,00	29.293.431.301,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	102.571.655.870,00	38.537.628.682,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.585.207.223,00	33.172.488.493,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.122.885.450,00	2.552.390.444,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		**191.395.700.799,00**	**105.555.938.920,00**

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
7.997.000,00	14.070.000,00

Aliran kas bersih aktivitas pendanaan merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas pendanaan yang terdiri dari:

Tabel 5.164 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

No	Arus Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	7.997.000,00	14.070.000,00
2	Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**7.997.000,00**	**14.070.000,00**

Adapun rincian lebih lanjut atas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.165 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pinjaman Pemberian Pinjaman Daerah	7.997.000,00	14.070.000,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		**7.997.000,00**	**14.070.000,00**

Sedangkan rincian lebih lanjut atas Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.166 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		**0,00**	**0,00**

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(267.493.328,00)	277.927.606,91

Aliran kas bersih aktivitas transitoris merupakan selisih dari aliran kas masuk dengan aliran kas keluar atas aktivitas transitoris yang terdiri dari:

Tabel 5.167 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

No	Arus Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	40.241.421.316,30	17.338.445.377,91
2	Arus Keluar Kas	40.508.914.644,30	17.060.517.771,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(267.493.328,00)**	**277.927.606,91**

Adapun rincian lebih lanjut atas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.168 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.429.554.802,00	17.052.340.002,91
2	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	11.791.873.967,30	0,00
3	Utang PFK Lainnya	19.992.547,00	286.105.375,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		**40.241.421.316,30**	**17.338.445.377,91**

Sedangkan rincian lebih lanjut atas Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.169 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	40.508.914.644,30	17.051.719.882,00
2	Pembayaran Dana Talangan BOP	0,00	4.750.000,00
3	Pembayaran Utang Bendahara BOS	0,00	109.051,00
4	Utang PFK TA 2022 Dana BOS	0,00	3.938.838,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		**40.508.914.644,30**	**17.060.517.771,00**

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(17.901.370.660,90)	35.681.626.113,58

Terdapat Penurunan Kas per 31 Desember 2024 dan Kenaikan kas per 31 Desember 2023 masing-masing senilai Rp17.901.370.660,90 dan Rp35.681.626.113,58, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.170 Rincian Kenaikan Kas TA 2024 dan 2023

No	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal Kas	91.865.331.453,61	56.180.673.282,03
	Koreksi Silpa	(149.777,00)	3.032.058,00
2	Saldo Akhir Kas	73.963.811.015,71	91.865.331.453,61
Kenaikan Kas		**(17.901.370.660,90)**	**35.681.626.113,58**

5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun Anggaran 2024.

5.6.1. Ekuitas Awal

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.294.037.709.576,95	1.277.144.833.681,69

Ekuitas Awal Tahun 2024 senilai Rp1.294.037.709.576,95 yang merupakan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 pada Neraca *Audited.*

5.6.2. Surplus dan Defisit – LO

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
61.122.591.138,52	86.827.391.942,25

Surplus/Defisit – LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp61.122.591.138,52 berasal dari Pendapatan – LO senilai Rp1.126.268.670.861,41 dikurangi Beban senilai Rp1.061.470.568.191,61 ditambah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional senilai Rp1.189.640.795,89 ditambah Beban Pos Luar Biasa senilai Rp2.485.870.735,00.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(519.410.612,45)	(69.934.516.046,99)

Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024 senilai Rp519.410.612,45 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.171 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2024 dan 2023

No	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Koreksi Ekuitas Lainnya – Aset Lancar	1.864.733.043,11	186.381.355,07
2	Koreksi Ekuitas Lainnya - Investasi	0,00	(1.242.769,68)
3	Koreksi Ekuitas Lainnya – Aset Tetap	(1.734.592.105,15)	(10.713.568.066,74)
4	Koreksi Ekuitas Lainnya – Koreksi Aset Lainnya	(1.070.840.000,00)	0,00
5	Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	1.444.062.853,44	0,00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	(1.022.774.403,85)	(59.406.086.565,64)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		**(519.410.612,45)**	**(69.934.516.046,99)**

5.6.4. Ekuitas Akhir

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.354.640.890.103,02	1.294.037.709.576,95

Saldo Ekuitas Akhir konsolidasi Tahun 2024 sebesar Rp1.354.640.890.103,02.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timura Tahun Anggaran 2024 terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif. Hal-hal tersebut adalah:

a. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai sejak tahun 2015, dimana dana kapitasi JKN dikelola secara langsung oleh entitas tanpa melalui mekanisme APBD, maka untuk meningkatkan kualitas dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi data yang intensif antara FKTP sebagai penyelenggara dan Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi.

b. Tahun 2024 Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tidak disalurkan melalui RKUD. Selama ini penyaluran BOK dilakukan dari RKUN ke RKUD, untuk 2023 penyaluran dana BOK atas 21 Puskesmas di Kabupaten Flores Timur dilakukan dari RKUN langsung ke rekening puskesmas, hal ini bertujuan untuk akselerasi penyaluran dan pemanfaatan BOK utk pelayanan masyarakat.

c. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan penggunaan langsung oleh sekolah memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus oleh pihak penanggung jawab dan SDM yang terlibat baik dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan keuangan Dana BOS sehingga diharapkan pengelolaan dana dapat dilakukan dengan baik sesuai target dan rencana yang diharapkan serta dapat menyajikan pelaporan keuangan dana BOS secara tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan. Untuk Tahun Anggaran 2024 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) mencakup Sekolah Dasar swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, PAUD dan TK.

d. Bahwa untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun kedua menggunakan Aplikasi SIPD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih jauh dari sempurna dan atas kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Flores Timur untuk periode yang akan datang.

Bupati Flores Timur

Ir. Antonius Doni Dihen

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RINCIAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DAN DANA BAGI HASIL PAJAK
PER 31 DESEMBER 2024

No	Nama Desa	Dana Desa	Tambahan Dana Desa	Dana ADD	BPJS 1%	SILTAP Desa Persiapan	Dan BHPR	Total Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**KECAMATAN WULANGGITANG**	**9.218.015.000,00**	**-**	**3.872.861.840,00**	**33.066.264,00**	**128.800.000,00**	**91.540.609,00**	**13.311.217.449,00**
1	Desa Boru	1.154.028.000		417.289.840	3.284.712		10.434.984	**1.581.752.824,00**
2	Desa Boru Kedang	809.182.000		382.223.440	3.483.504		8.476.402	**1.199.881.842,00**
3	Desa Pulurera	867.894.000		344.490.640	2.958.672		8.363.182	**1.220.747.822,00**
4	Desa Nileknoheng	769.338.000		322.890.640	2.958.672		7.443.140	**1.099.671.780,00**
5	Desa Nawakote	818.088.000		393.023.440	3.330.428	60.900.000	8.332.515	**1.280.343.955,00**
6	Desa Waiula	1.026.111.000		368.757.040	2.891.088		8.244.305	**1.403.112.345,00**
7	Desa Hewa	806.295.000		344.490.640	2.805.596		9.680.449	**1.160.466.089,00**
8	Desa Pantai Oa	707.337.000		322.890.640	2.958.672		6.512.850	**1.036.740.490,00**
9	Desa Ojandetun	806.115.000		322.890.640	2.958.672		9.241.512	**1.138.247.152,00**
10	Desa Hokeng Jaya	781.457.000		320.224.240	2.696.256	67.900.000	7.742.581	**1.177.323.821,00**
11	Desa Klatanlo	672.170.000		333.690.640	2.739.992		7.068.689	**1.012.929.329,00**
2	**KECAMATAN ILEBURA**	**5.535.321.000,00**	**-**	**2.263.035.280,00**	**17.966.952,00**	**74.900.000,00**	**46.230.049,00**	**7.919.486.329,00**
12	Desa Lewotobi / Birawan	754.708.000		344.490.640	2.936.804	74.900.000	6.719.053	**1.180.817.693,00**
13	Desa Nurabelen/Nurri	964.028.000		309.424.240	2.696.256		6.884.057	**1.280.336.297,00**
14	Desa Nobokonga	844.929.000		344.490.640	2.421.916		5.789.553	**1.195.209.193,00**
15	Desa Riangbaring/ Riang Bura	746.944.000		322.890.640	2.521.312		7.261.315	**1.077.095.955,00**
16	Desa Lewoawang	761.671.000		344.490.640	2.958.672		7.459.672	**1.113.621.312,00**
17	Desa Duli Pali	709.278.000		298.624.240	2.169.444		5.531.320	**1.013.433.560,00**
18	Desa Riang Rita	753.763.000		298.624.240	2.262.548		6.585.079	**1.058.972.319,00**
3	**KECAMATAN TITEHENA**	**10.415.477.000,00**	**-**	**4.927.799.360,00**	**39.983.596,00**	**81.900.000,00**	**91.487.215,00**	**15.516.663.575,00**
19	Desa Lewolaga	675.469.000		368.757.040	2.825.484		7.361.908	**1.051.587.948,00**
20	Desa Tuakepa	737.122.000		357.957.040	3.166.088	81.900.000	7.180.583	**1.184.159.623,00**
21	Desa Ile Gerong	707.560.000		322.890.640	2.958.672		6.457.222	**1.036.907.862,00**
22	Desa Tenawahang	768.424.000		382.223.440	3.483.504		6.147.018	**1.156.794.458,00**
23	Desa Kobasoma	1.037.764.000		333.690.640	2.481.228		8.753.906	**1.380.208.546,00**
24	Desa Konga	703.060.000		333.690.640	2.258.896		-	**1.036.750.640,00**
25	Desa Watowara	800.480.000		441.556.240	3.565.612		8.323.759	**1.250.359.999,00**
26	Desa Leraboleng	794.071.000		393.023.440	3.352.296		7.340.362	**1.194.434.802,00**
27	Desa Adabang	788.787.000		382.223.440	3.373.036		5.092.056	**1.176.102.496,00**
28	Desa Lewoingu	709.751.000		357.957.040	2.541.200		6.804.762	**1.074.512.802,00**
29	Desa Serinuho	700.026.000		333.690.640	2.739.992		7.160.090	**1.040.876.730,00**
30	Desa DunTana Lewoingu	706.156.000		322.890.640	2.958.672		7.449.844	**1.036.496.484,00**
31	Desa Duli Jaya	656.884.000		298.624.240	2.196.944		6.611.661	**962.119.901,00**
32	Desa Bokang Wolomatang	629.923.000		298.624.240	2.081.972		6.804.044	**935.351.284,00**
4	**KECAMATAN TANJUNG BUNGA**	**12.549.602.000,00**	**289.032.000,00**	**5.565.447.040,00**	**42.445.244,00**	**60.900.000,00**	**115.374.124,00**	**18.580.355.164,00**
33	Desa Ratulodong	839.114.000	144.516.000	393.023.440	2.783.728		7.961.607	**1.384.615.047,00**
34	Desa Kolaka	751.378.000		357.957.040	2.696.256		7.878.906	**1.117.213.946,00**
35	Desa Bandona	745.805.000		347.157.040	2.346.368		7.652.877	**1.100.614.917,00**
36	Desa Bahinga	815.301.000		357.957.040	2.954.160		7.760.609	**1.181.018.649,00**
37	Desa Sina Malaka	746.921.000		382.223.440	2.958.672		7.642.356	**1.136.786.796,00**
38	Desa Sinar Hadigala	708.168.000		347.157.040	2.757.348		7.430.821	**1.062.755.861,00**

No	Nama Desa	Dana Desa	Tambahan Dana Desa	Dana ADD	BPJS 1%	SILTAP Desa Persiapan	Dan BHPR	Total Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Desa Waibao	913.754.000	144.516.000	393.023.440	3.374.164		9.637.851	**1.460.931.291,00**
40	Desa Nusa Nipa	763.537.000		322.890.640	2.936.804		7.151.163	**1.093.578.803,00**
41	Desa Lewobunga	658.353.000		322.890.640	1.634.008		-	**981.243.640,00**
42	Desa Lamatutu	1.048.980.000		357.957.040	2.486.860		8.528.704	**1.415.465.744,00**
43	Desa Latonliwo	695.243.000		298.624.240	2.433.840		6.546.945	**1.000.414.185,00**
44	Desa Patisirawalang	877.480.000		393.023.440	2.997.896	60.900.000	8.911.371	**1.340.314.811,00**
45	Desa Gekeng Deran	677.543.000		322.890.640	2.255.136		7.052.631	**1.007.486.271,00**
46	Desa Aransina	818.644.000		322.890.640	2.696.256		7.334.021	**1.148.868.661,00**
47	Desa Latonliwo Dua	772.923.000		322.890.640	2.477.576		6.643.901	**1.102.457.541,00**
48	Desa Lamanabi	716.458.000		322.890.640	2.656.172		7.240.361	**1.046.589.001,00**
5	**KECAMATAN LEWOLEMA**	**6.170.160.000,00**	**433.548.000,00**	**2.610.898.480,00**	**21.758.388,00**	**60.900.000,00**	**54.635.572,00**	**9.330.142.052,00**
49	Desa Sinar Hading	837.979.000	144.516.000	393.023.440	3.068.012		7.553.649	**1.383.072.089,00**
50	Desa Riangkotek	937.056.000		333.690.640	2.958.672		7.390.279	**1.278.136.919,00**
51	Desa Ile Padung	979.291.000		357.957.040	3.177.352		8.073.102	**1.345.321.142,00**
52	Desa Lewobelen	667.122.000	144.516.000	322.890.640	2.215.160		7.553.898	**1.142.082.538,00**
53	Desa Bantala	812.210.000	144.516.000	417.289.840	3.415.920	60.900.000	7.978.819	**1.442.894.659,00**
54	Desa Balukhering	895.443.000		417.289.840	3.745.920		8.087.260	**1.320.820.100,00**
55	Desa Painapang	1.041.059.000		368.757.040	3.177.352		7.998.565	**1.417.814.605,00**
6	**KECAMATAN LARANTUKA**	**1.997.800.000,00**	**-**	**702.447.680,00**	**5.849.760,00**	**-**	**13.951.937,00**	**2.714.199.617,00**
56	Desa Lamawalang	912.578.000		333.690.640	2.650.540		6.433.881	**1.252.702.521,00**
57	Desa Mokantarak	1.085.222.000		368.757.040	3.199.220		7.518.056	**1.461.497.096,00**
7	**KECAMATAN DEMON PAGONG**	**4.826.647.000,00**	**289.032.000,00**	**2.343.833.680,00**	**20.889.300,00**	**-**	**52.483.030,00**	**7.511.995.710,00**
58	Desa Lewokluok	776.875.000	144.516.000	382.223.440	3.483.504		8.044.462	**1.311.658.902,00**
59	Desa Watotika Ile	648.831.000	144.516.000	322.890.640	2.696.256		7.090.245	**1.123.327.885,00**
60	Desa Lamika	708.217.000		371.423.440	3.483.504		6.834.807	**1.086.475.247,00**
61	Desa Blepanawa	629.621.000		322.890.640	2.914.936		7.610.899	**960.122.539,00**
62	Desa Bama	672.103.000		322.890.640	2.958.672		7.460.312	**1.002.453.952,00**
63	Desa Kawalelo	747.471.000		322.890.640	2.958.672		8.983.572	**1.079.345.212,00**
64	Desa Lewo Muda	643.529.000		298.624.240	2.393.756		6.458.733	**948.611.973,00**
8	**KECAMATAN ILE MANDIRI**	**7.128.096.000,00**	**722.580.000,00**	**2.820.590.720,00**	**23.682.120,00**	**-**	**47.786.043,00**	**10.719.052.763,00**
65	Desa Lewohala	776.947.000	144.516.000	368.757.040	2.956.792		6.448.714	**1.296.668.754,00**
66	Desa Riangkemie	817.732.000	144.516.000	368.757.040	3.041.632		8.133.925	**1.339.138.965,00**
67	Desa Wailolong	809.928.000		344.490.640	2.958.672		6.345.534	**1.160.764.174,00**
68	Desa Lewoloba	917.785.000	144.516.000	368.757.040	3.221.088		7.492.447	**1.438.550.487,00**
69	Desa Tiwatobi	991.008.000		368.757.040	3.221.088		2.942.960	**1.362.708.000,00**
70	Desa Watotutu	944.601.000	144.516.000	344.490.640	2.739.992		8.055.983	**1.441.663.623,00**
71	Desa Halakodanuan	922.058.000		322.890.640	2.584.184		1.373.957	**1.246.322.597,00**
72	Desa Muda Keputu	948.037.000	144.516.000	333.690.640	2.958.672		6.992.523	**1.433.236.163,00**
9	**KECAMATAN SOLOR BARAT**	**10.781.985.000,00**	**578.064.000,00**	**4.482.736.160,00**	**37.027.196,00**	**-**	**88.146.691,00**	**15.930.931.851,00**
73	Desa Tanah Lein	785.133.000		347.157.040	2.581.176		7.623.138	**1.139.913.178,00**
74	Desa Lamaole	721.660.000		298.624.240	2.565.048		-	**1.020.284.240,00**
75	Desa Kalelu	716.671.000		298.624.240	1.909.008		6.494.536	**1.021.789.776,00**
76	Desa Lewotanaole	725.792.000	144.516.000	298.624.240	2.696.256		7.370.042	**1.176.302.282,00**
77	Desa Karawatung	727.537.000	144.516.000	322.890.640	2.475.596		6.941.305	**1.201.884.945,00**
78	Desa Pamakayo	717.180.000		322.890.640	2.739.992		5.667.850	**1.045.738.490,00**
79	Desa Balaweling I	679.236.000		322.890.640	2.958.672		6.692.733	**1.008.819.373,00**

No	Nama Desa	Dana Desa	Tambahan Dana Desa	Dana ADD	BPJS 1%	SILTAP Desa Persiapan	Dan BHPR	Total Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	Desa Balaweling II	1.014.293.000		347.157.040	3.024.276		6.943.615	**1.368.393.655,00**
81	Desa Nuhalolon	714.315.000		298.624.240	2.630.652		6.538.342	**1.019.477.582,00**
82	Desa Daniwato	758.430.000	144.516.000	298.624.240	2.696.256		6.814.815	**1.208.385.055,00**
83	Desa Ongalereng	809.028.000		357.957.040	2.918.588		6.939.986	**1.173.925.026,00**
84	Desa Lamawohong	698.861.000		322.890.640	2.519.332		6.610.376	**1.028.362.016,00**
85	Desa Titehena	748.296.000		322.890.640	2.656.172		6.596.656	**1.077.783.296,00**
86	Desa Lewonama	965.553.000	144.516.000	322.890.640	2.656.172		6.913.297	**1.439.872.937,00**
10	**KECAMATAN SOLOR TIMUR**	**13.693.678.000,00**	**578.064.000,00**	**5.769.672.080,00**	**50.167.772,00**	**-**	**107.019.221,00**	**20.148.433.301,00**
87	Desa Menanga	1.020.816.000	144.516.000	333.690.640	2.958.672		6.115.348	**1.505.137.988,00**
88	Desa Lohayong I	1.033.109.000		347.157.040	2.868.468		6.505.338	**1.386.771.378,00**
89	Desa Lohayong II	1.138.492.000		368.757.040	2.699.908		7.149.832	**1.514.398.872,00**
90	Desa Lewogeka	706.851.000	144.516.000	322.890.640	2.958.672		6.676.512	**1.180.934.152,00**
91	Desa Wulublolong	725.685.000		357.957.040	3.072.984		6.914.511	**1.090.556.551,00**
92	Desa Lewohedo	658.149.000	144.516.000	347.157.040	3.221.088		6.648.163	**1.156.470.203,00**
93	Desa Watanhura I	638.600.000		322.890.640	2.892.692		6.241.594	**967.732.234,00**
94	Desa Watanhura II	752.857.000		347.157.040	3.221.088		6.664.046	**1.106.678.086,00**
95	Desa Lebao	739.369.000		347.157.040	3.002.408		6.804.274	**1.093.330.314,00**
96	Desa Liwo	741.436.000		322.890.640	2.958.672		6.963.565	**1.071.290.205,00**
97	Desa Lamawai	709.830.000		322.890.640	2.628.672		6.559.675	**1.039.280.315,00**
98	Desa Watohari	778.029.000		357.957.040	3.177.352		7.328.554	**1.143.314.594,00**
99	Desa Tanahwerang	762.751.000		322.890.640	2.871.200		6.501.425	**1.092.143.065,00**
100	Desa Moton Wutun	779.851.000		333.690.640	2.958.672		4.809.117	**1.118.350.757,00**
101	Desa Watobuku	762.019.000		368.757.040	2.891.088		3.499.959	**1.134.275.999,00**
102	Desa Labelen	999.052.000	144.516.000	322.890.640	2.827.464		5.273.240	**1.471.731.880,00**
103	Desa Kewuta	746.782.000		322.890.640	2.958.672		6.364.068	**1.076.036.708,00**
11	**KECAMATAN SOLOR SELATAN**	**5.223.256.000,00**	**433.548.000,00**	**2.473.299.280,00**	**21.741.400,00**	**-**	**46.905.254,00**	**8.177.008.534,00**
104	Desa Kalike	788.978.000	144.516.000	357.957.040	3.155.484		7.035.035	**1.298.486.075,00**
105	Desa Kalike Aimatan	730.666.000		357.957.040	3.221.088		6.903.918	**1.095.526.958,00**
106	Desa Bubuatagamu	714.676.000	144.516.000	357.957.040	3.221.088		6.997.196	**1.224.146.236,00**
107	Desa Lemanu	764.620.000		357.957.040	2.918.588		7.046.387	**1.129.623.427,00**
108	Desa Lewograran	724.538.000		347.157.040	3.220.336		5.591.420	**1.077.286.460,00**
109	Desa Sulengwaseng	770.489.000		347.157.040	2.783.728		6.867.461	**1.124.513.501,00**
110	Desa Kenere	729.289.000	144.516.000	347.157.040	3.221.088		6.463.837	**1.227.425.877,00**
12	**KECAMATAN ADONARA BARAT**	**12.820.329.000,00**	**722.580.000,00**	**5.841.765.120,00**	**47.569.616,00**	**-**	**101.533.645,00**	**19.486.207.765,00**
111	Desa Waiwadan	723.498.000		344.490.640	2.936.804		3.355.777	**1.071.344.417,00**
112	Desa Homa	691.943.000		322.890.640	2.869.696		1.415.266	**1.016.248.906,00**
113	Desa Hurung	689.606.000		322.890.640	2.584.936		7.292.660	**1.019.789.300,00**
114	Desa Kimakama	620.454.000		322.890.640	2.477.576		6.843.984	**950.188.624,00**
115	Desa Wureh	647.611.000		322.890.640	2.657.492		6.758.240	**977.259.880,00**
116	Desa Bugalima	680.063.000	144.516.000	322.890.640	2.739.992		7.360.677	**1.154.830.317,00**
117	Desa Pajinian	708.414.000	144.516.000	298.624.240	2.696.256		6.958.355	**1.158.512.595,00**
118	Desa Waitukan	704.631.000		298.624.240	2.696.256		2.660.206	**1.005.915.446,00**
119	Desa Duanur	736.471.000		333.690.640	2.388.124		2.865.956	**1.073.027.596,00**
120	Desa Danibao	988.372.000	144.516.000	357.957.040	2.759.880		7.780.800	**1.498.625.840,00**
121	Desa Nimun Danibao	730.426.000		322.890.640	2.586.916		3.813.974	**1.057.130.614,00**
122	Desa Ile Pati	743.322.000		322.890.640	2.346.368		6.918.039	**1.073.130.679,00**

No	Nama Desa	Dana Desa	Tambahan Dana Desa	Dana ADD	BPJS 1%	SILTAP Desa Persiapan	Dan BHPR	Total Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	Desa Bukit Seburi I	690.654.000		322.890.640	2.696.256		6.916.521	**1.020.461.161,00**
124	Desa Bukit Seburi II	676.643.000		357.957.040	2.914.936		6.829.100	**1.041.429.140,00**
125	Desa Tonuwotan	713.130.000	144.516.000	322.890.640	2.958.672		3.439.597	**1.183.976.237,00**
126	Desa Woloklibang	658.846.000		298.624.240	1.885.160		6.389.358	**963.859.598,00**
127	Desa Watobaya	757.651.000	144.516.000	347.157.040	3.221.088		7.508.265	**1.256.832.305,00**
128	Desa Riang Padu	658.594.000		298.624.240	2.153.208		6.426.870	**963.645.110,00**
13	**KECAMATAN ADONARA TENGAH**	**9.282.889.000,00**	**144.516.000,00**	**4.467.309.520,00**	**36.345.192,00**	**-**	**65.435.630,00**	**13.960.150.150,00**
129	Desa Horowura	660.743.000		333.690.640	2.958.672		6.803.043	**1.001.236.683,00**
130	Desa Hokohorowura	683.705.000		322.890.640	2.215.160		5.278.528	**1.011.874.168,00**
131	Desa Lite	739.727.000		357.957.040	3.221.088		3.161.250	**1.100.845.290,00**
132	Desa Kenotan	812.360.000		368.757.040	2.980.540		3.077.029	**1.184.194.069,00**
133	Desa Kokotobo	709.796.000		333.690.640	2.958.672		3.122.904	**1.046.609.544,00**
134	Desa Lewobele	712.117.000	144.516.000	347.157.040	1.580.988		5.620.032	**1.209.410.072,00**
135	Desa Lewopao	722.354.000		322.890.640	2.543.180		1.320.556	**1.046.565.196,00**
136	Desa Baya	691.745.000		347.157.040	3.133.616		7.517.892	**1.046.419.932,00**
137	Desa Nubalema	709.750.000		322.890.640	2.958.672		6.762.728	**1.039.403.368,00**
138	Desa Oesayang	735.191.000		347.157.040	3.199.220		7.086.745	**1.089.434.785,00**
139	Desa Wewit	674.143.000		357.957.040	3.155.484		6.387.629	**1.038.487.669,00**
140	Desa Bidara	720.001.000		347.157.040	3.002.408		3.599.969	**1.070.758.009,00**
141	Desa Nubalema II	711.257.000		357.957.040	2.437.492		5.697.325	**1.074.911.365,00**
14	**KECAMATAN WOTAN ULUMADO**	**8.883.321.000,00**	**144.516.000,00**	**4.157.885.280,00**	**35.579.856,00**	**-**	**81.760.969,00**	**13.267.483.249,00**
142	Desa Klukengnuking	853.051.000		368.757.040	2.847.352		7.801.396	**1.229.609.436,00**
143	Desa Pandai	739.684.000		357.957.040	2.998.648		7.547.868	**1.105.188.908,00**
144	Desa Demondei	706.394.000		322.890.640	2.739.992		2.667.795	**1.031.952.435,00**
145	Desa Kawela	889.147.000		393.023.440	3.483.504		7.230.730	**1.289.401.170,00**
146	Desa Oyangbarang	778.368.000		382.223.440	3.155.484		8.271.330	**1.168.862.770,00**
147	Desa Nayubaya	748.614.000		322.890.640	2.628.672		6.762.139	**1.078.266.779,00**
148	Desa Samasoge	659.186.000		322.890.640	2.871.200		6.636.204	**988.712.844,00**
149	Desa Wotan Ulumado	742.734.000		347.157.040	3.221.088		7.075.164	**1.096.966.204,00**
150	Desa Tanatukan	713.724.000		347.157.040	3.221.088		6.878.491	**1.067.759.531,00**
151	Desa Wailebe	628.670.000	144.516.000	322.890.640	2.628.672		6.777.763	**1.102.854.403,00**
152	Desa Tobilota	752.361.000		347.157.040	2.891.088		7.245.512	**1.106.763.552,00**
153	Desa Bliko	671.388.000		322.890.640	2.893.068		6.866.577	**1.001.145.217,00**
15	**KECAMATAN ADONARA TIMUR**	**15.642.032.000,00**	**722.580.000,00**	**6.485.586.160,00**	**54.289.768,00**	**-**	**101.422.756,00**	**22.951.620.916,00**
154	Desa Lamahala Jaya	1.653.614.000		417.289.840	3.443.420	-	2.567.343	**2.073.471.183,00**
155	Desa Terong	859.455.000		344.490.640	2.958.672	-	7.847.319	**1.211.792.959,00**
156	Desa Bilal	683.088.000	144.516.000	322.890.640	2.739.992	-	6.663.354	**1.157.157.994,00**
157	Desa Dawataa	855.035.000		322.890.640	2.958.672	-	5.051.985	**1.182.977.625,00**
158	Desa Ipiebang	688.958.000	144.516.000	347.157.040	3.221.088	-	6.602.111	**1.187.233.151,00**
159	Desa Bloto	721.330.000		322.890.640	2.696.256	-	3.778.231	**1.047.998.871,00**
160	Desa Waiburak	1.394.950.000	144.516.000	368.757.040	3.221.088	-	6.864.323	**1.915.087.363,00**
161	Desa Tuawolo	971.489.000		322.890.640	2.958.672	-	5.240.946	**1.299.620.586,00**
162	Desa Kiwangona	686.816.000		368.757.040	2.628.672	-	3.831.793	**1.059.404.833,00**
163	Desa Lewobunga	726.144.000	144.516.000	382.223.440	2.934.824	-	4.556.970	**1.257.440.410,00**
164	Desa Karinglamalouk	670.243.000		382.223.440	2.781.748	-	2.567.484	**1.055.033.924,00**
165	Desa Tapobali	703.004.000		322.890.640	2.827.464	-	6.603.947	**1.032.498.587,00**

No	Nama Desa	Dana Desa	Tambahan Dana Desa	Dana ADD	BPJS 1%	SILTAP Desa Persiapan	Dan BHPR	Total Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	Desa Gelong	712.035.000	144.516.000	322.890.640	2.805.596	-	6.430.359	**1.185.871.999,00**
167	Desa Puhu	691.388.000		322.890.640	2.739.992	-	6.869.453	**1.021.148.093,00**
168	Desa Kwaelaga Lamawato	624.193.000		322.890.640	2.958.672	-	6.321.340	**953.404.980,00**
169	Desa Lamalota	713.279.000		322.890.640	2.958.672	-	6.496.657	**1.042.666.297,00**
170	Desa Narasaosina	712.510.000		298.624.240	2.433.840	-	5.490.707	**1.016.624.947,00**
171	Desa Lelen Bala	878.786.000		322.890.640	2.628.672	-	5.097.300	**1.206.773.940,00**
172	Desa Saosina	695.715.000		347.157.040	2.393.756	-	2.541.134	**1.045.413.174,00**
16	**KECAMATAN ILE BOLENG**	**15.014.155.000,00**	**289.032.000,00**	**6.953.369.040,00**	**56.241.084,00**	**-**	**134.975.311,00**	**22.391.531.351,00**
173	Desa Lewokeleng	696.487.000		322.890.640	2.628.672		6.340.054	**1.025.717.694,00**
174	Desa Bedalewun	690.696.000		322.890.640	2.958.672		6.396.785	**1.019.983.425,00**
175	Desa Nihaone	700.815.000		322.890.640	2.783.728		6.506.382	**1.030.212.022,00**
176	Desa Bungalawan	695.523.000	144.516.000	322.890.640	2.893.068		6.315.065	**1.169.244.705,00**
177	Desa Dokeng	622.203.000		322.890.640	2.656.172		6.196.817	**951.290.457,00**
178	Desa Lewoblolong	612.216.000	144.516.000	322.890.640	2.849.332		6.563.725	**1.086.186.365,00**
179	Desa Bajuntaa	631.067.000		322.890.640	2.390.104		6.235.167	**960.192.807,00**
180	Desa Lamawolo	944.310.000		357.957.040	2.716.144		6.879.297	**1.309.146.337,00**
181	Desa Helanlangowuyo	854.956.000		368.757.040	2.934.824		7.645.413	**1.231.358.453,00**
182	Desa Lewat	706.826.000		322.890.640	2.147.576		6.401.753	**1.036.118.393,00**
183	Desa Lewopao	806.387.000		393.023.440	2.453.728		3.746.657	**1.203.157.097,00**
184	Desa Harubala	928.671.000		322.890.640	2.958.672		6.502.799	**1.258.064.439,00**
185	Desa Nobo	688.934.000		322.890.640	2.739.992		6.453.544	**1.018.278.184,00**
186	Desa Gayak/Nelereren	602.724.000		322.890.640	2.805.596		6.494.982	**932.109.622,00**
187	Desa Boleng	704.456.000		333.690.640	2.517.552		7.102.012	**1.045.248.652,00**
188	Desa Nelelamawangi	648.619.000		322.890.640	2.783.728		6.538.402	**978.048.042,00**
189	Desa Duablolong	757.123.000		322.890.640	2.477.576		6.583.738	**1.086.597.378,00**

No	Nama Desa	Dana Desa	Tambahan Dana Desa	Dana ADD	BPJS 1%	SILTAP Desa Persiapan	Dan BHPR	Total Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	Desa Nelelamadike	711.439.000		333.690.640	2.738.672		6.582.789	**1.051.712.429,00**
191	Desa Lamabayung	774.685.000		322.890.640	2.696.256		6.698.214	**1.104.273.854,00**
192	Desa Neleblolong	598.763.000		322.890.640	2.476.716		6.192.655	**927.846.295,00**
193	Desa Nelelamawangi II	637.255.000		322.890.640	2.634.304		6.599.061	**966.744.701,00**
17	**KECAMATAN WITIHAMA**	**12.738.858.000,00**	**722.580.000,00**	**5.382.115.840,00**	**43.891.224,00**	**46.900.000,00**	**86.267.869,00**	**18.976.721.709,00**
194	Desa Sandosi	766.017.000	144.516.000	368.757.040	2.891.088	46.900.000	7.283.567	**1.333.473.607,00**
195	Desa Tobitika	688.971.000		322.890.640	2.958.672		6.382.992	**1.018.244.632,00**
196	Desa Lewopulo	983.261.000	144.516.000	322.890.640	2.739.992		3.321.591	**1.453.989.231,00**
197	Desa Balaweling	724.156.000		322.890.640	2.300.652		6.641.574	**1.053.688.214,00**
198	Desa Lamabelawa	680.193.000	144.516.000	333.690.640	2.958.672		3.414.500	**1.161.814.140,00**
199	Desa Oringbele	820.322.000	144.516.000	368.757.040	3.221.088		4.973.583	**1.338.568.623,00**
200	Desa Weranggere	968.358.000	144.516.000	322.890.640	2.980.540		3.347.635	**1.439.112.275,00**
201	Desa Pledo	882.210.000		344.490.640	2.656.172		3.656.232	**1.230.356.872,00**
202	Desa Watoone	794.223.000		368.757.040	2.169.444		5.914.879	**1.168.894.919,00**
203	Desa Watololong	717.967.000		322.890.640	2.955.664		6.539.915	**1.047.397.555,00**
204	Desa Tuagoetobi	793.553.000		368.757.040	2.672.408		3.803.423	**1.166.113.463,00**
205	Desa Riangduli	956.648.000		322.890.640	2.628.672		6.653.430	**1.286.192.070,00**
206	Desa Waiwuring	629.727.000		322.890.640	2.954.536		6.262.206	**958.879.846,00**
207	Desa Bao Bage	710.347.000		322.890.640	2.936.804		5.190.938	**1.038.428.578,00**
208	Desa Lamaleka	924.941.000		322.890.640	2.175.076		6.572.288	**1.254.403.928,00**
209	Desa Balaweling Notan	697.964.000		322.890.640	2.691.744		6.309.116	**1.027.163.756,00**
18	**KECAMATAN KLUBAGOLIT**	**8.684.599.000,00**	**289.032.000,00**	**4.093.219.680,00**	**34.140.972,00**	**-**	**27.570.883,00**	**13.094.421.563,00**
210	Desa Nisakarang	678.683.000		347.157.040	3.221.088		3.798.180	**1.029.638.220,00**
211	Desa Muda	679.328.000		322.890.640	2.936.804		3.116.710	**1.005.335.350,00**
212	Desa Lamapaha	643.954.000		322.890.640	2.780.720		1.344.032	**968.188.672,00**
213	Desa Hinga	928.644.000		357.957.040	3.221.088		1.327.262	**1.287.928.302,00**
214	Desa Redontena	668.740.000		333.690.640	2.628.672		1.316.639	**1.003.747.279,00**
215	Desa Suku Tokan	682.511.000	144.516.000	333.690.640	2.628.672		3.420.458	**1.164.138.098,00**
216	Desa Pepakkelu	694.042.000		357.957.040	3.221.088		2.924.100	**1.054.923.140,00**
217	Desa Keluwain	678.543.000		322.890.640	2.958.672		3.126.405	**1.004.560.045,00**
218	Desa Lamabunga	789.013.000	144.516.000	368.757.040	3.221.088		1.546.394	**1.303.832.434,00**
219	Desa Mangaaleng	748.519.000		333.690.640	2.350.020		2.834.570	**1.085.044.210,00**
220	Desa Horinara	793.378.000		368.757.040	2.891.088		2.816.133	**1.164.951.173,00**
221	Desa Adobala	699.244.000		322.890.640	2.081.972		-	**1.022.134.640,00**

No	Nama Desa	Dana Desa	Tambahan Dana Desa	Dana ADD	BPJS 1%	SILTAP Desa Persiapan	Dan BHPR	Total Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**KECAMATAN ADONARA**	**6.514.726.000,00**	**289.032.000,00**	**2.825.923.520,00**	**24.155.712,00**	**-**	**42.657.344,00**	**9.672.338.864,00**
222	Desa Sagu	990.963.000		393.023.440	3.483.504		4.535.654	**1.388.522.094,00**
223	Desa Adonara	766.476.000		357.957.040	3.122.352		1.911.396	**1.126.344.436,00**
224	Desa Nisanulan	712.434.000	144.516.000	347.157.040	2.735.380		6.997.365	**1.211.104.405,00**
225	Desa Kolimasang	825.714.000		368.757.040	3.221.088		7.653.445	**1.202.124.485,00**
226	Desa Lamahoda	747.593.000		357.957.040	3.221.088		7.632.160	**1.113.182.200,00**
227	Desa Tikatukang	759.155.000		333.690.640	2.936.804		6.799.335	**1.099.644.975,00**
228	Desa Kolilanang	1.003.918.000	144.516.000	368.757.040	2.957.920		7.127.989	**1.524.319.029,00**
229	Desa Kolipetung	708.473.000		298.624.240	2.477.576		-	**1.007.097.240,00**
JUMLAH		**177.120.946.000,00**	**6.647.736.000,00**	**78.039.795.760,00**	**646.791.416,00**	**454.300.000,00**	**1.397.184.152,00**	**263.659.961.912,00**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KAS DI BENDAHARA BOS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Saldo per 31/12/2024	Saldo per 31/12/2023	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Persentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**JENJANG PENDIDIKAN SD NEGERI :**				
1	SDN POSTOH			-	
2	SDN KAMPUNG BARU	18.005.000,00	9.105.000,00	8.900.000,00	
3	SDI WAIBALUN	24.800,00	24.800,00	-	-
4	SDI WERI	24.064.328,00	172.328,00	23.892.000,00	13.864,26
5	SDI POHON BAO	283.220,00	275.712,00	7.508,00	2,72
6	SDI BALELA		-	-	
7	SDI EKASAPTA		-	-	
8	SDI SUPERSEMAR		-	-	
9	SDI LEWOLERE		-	-	
10	SDN WAIMANA		22.500.000,00	(22.500.000,00)	
11	SDI LEWONEDA		-	-	
12	SDI WAIMANA		5.912.200,00	(5.912.200,00)	(100,00)
13	SDI BADU	509.500,00	9.500,00	500.000,00	5.263,16
14	SDI RIANGKEMIE		-	-	
15	SDI WATOWITI	350.000,00	1.150.000,00	(800.000,00)	
16	SDN EBAK TANJUNG	844,00	1.151.844,00	(1.151.000,00)	(99,93)
17	SDN RIANGKOLI	12.313.260,00	23.093.260,00	(10.780.000,00)	(46,68)
18	SDN LEBAO TANJUNG	21.372,00	221.372,00	(200.000,00)	(90,35)
19	SDI RATULODONG		8.307.039,00	(8.307.039,00)	(100,00)
20	SDI LEWOKOLI		22.500.000,00	(22.500.000,00)	
21	SDI RIANGPUHO	2.865.000,00	165.000,00	2.700.000,00	1.636,36
22	SDI LATONLIWO	126.837.813,00	85.440.313,00	41.397.500,00	48,45
23	SDI BELOAJA		2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
24	SDI LAMAOJAN	1.882.366,00	1.170.823,00	711.543,00	60,77
25	SDI RIANGKROKO		-	-	
26	SDI TONE	2.741,00	22.502.841,00	(22.500.100,00)	(99,99)
27	SDI LAKA	616,00	616,00	-	-

28	SDI BOU	5,69	8.600.005,69	(8.600.000,00)	(100,00)
29	SDI MULENG	130.000,00	5.000,00	125.000,00	2.500,00
30	SDN LAMATOU	1.101.806,00	959.656,00	142.150,00	14,81
31	SDN WAITIU	329.417,00	-	329.417,00	
32	SDN WELO		-	-	
33	SDI BALUKHERING	1.960.361,07	3.670.161,07	(1.709.800,00)	(46,59)
34	SDI WOLORONA	2.665.000,00	-	2.665.000,00	
35	SDI BORU	16.543.000,00	1.080.000,00	15.463.000,00	
36	SDI PANTAI OA	975,00	975,00	-	-
37	SDI NILEKNOHING		3.257.000,00	(3.257.000,00)	
38	SDI JONGWOLOR	12.000.000,00	-	12.000.000,00	
39	SDI TABANA		39.200,00	(39.200,00)	
40	SDI KLATANLO	9.867.000,00	22.500.000,00	(12.633.000,00)	
41	SDI NOBO		3.035.000,00	(3.035.000,00)	
42	SDI BURANILAN		18.532,00	(18.532,00)	(100,00)
43	SDI WAIDANG		22.500.000,00	(22.500.000,00)	
44	SDI MENANGA		-	-	
45	SDI RIANGDULI (TITEHENA)	1.100.834,00	4.669.134,00	(3.568.300,00)	(76,42)
46	SDI BOKANG		-	-	
47	SDI DULI	2.154.000,00	22.500.000,00	(20.346.000,00)	(90,43)
48	SDI ADABANG		22.881.116,00	(22.881.116,00)	(100,00)
49	SDN TANAH WERANG	19.484,82	19.484,82	-	-
50	SDN LAMAKERA		-	-	
51	SDN LOHAYONG		145.625,00	(145.625,00)	(100,00)
52	SDN LAMAWAI		-	-	
53	SDN WATANHURA	25.000,00	-	25.000,00	
54	SDI WULUBLOLONG		-	-	
55	SDI GORANG	4.320.000,00	-	4.320.000,00	
56	SDI WATOBUKU		-	-	
57	SDI LOHAYONG		-	-	
58	SDI LIWO	5.550.000,00	22.500.000,00	(16.950.000,00)	(75,33)
59	SDI WATANHURA		-	-	
60	SDN ONGALERENG	550.000,00	-	550.000,00	
61	SDN LAMAOLE	80.000,00	-	80.000,00	
62	SDI RITAEBANG		-	-	

63	SDI NUSADANI	433,00	433,00	-	-
64	SDI TANAH EDANG		-	-	
65	SDI PAMAKAYO	9.000.000,00	22.500.000,00	(13.500.000,00)	(60,00)
66	SDN TAPOWOLO		-	-	
67	SDI KALIKE	2.391.650,00	1.656.650,00	735.000,00	
68	SDI LEWOGRARAN	0,20	108.000,20	(108.000,00)	(100,00)
69	SDI WAIWADAN	1.005.791,00	1.005.791,00	-	-
70	SDI WAITENEPANG		-	-	
71	SDI KENARIBLOLONG		4.212.000,00	(4.212.000,00)	(100,00)
72	SDI BUGALIMA		-	-	
73	SDI PAJINIAN		4.528.843,00	(4.528.843,00)	(100,00)
74	SDI DANIBAO	105.806,00	3.495.556,00	(3.389.750,00)	(96,97)
75	SDI RIANGPETUNG	0,67	698.000,67	(698.000,00)	(100,00)
76	SDI LAMAWOLO		-	-	
77	SDI KENOTAN		1.320.000,00	(1.320.000,00)	
78	SDI LEWOPAO		1.650.000,00	(1.650.000,00)	(100,00)
79	SDI EPUBELE		-	-	
80	SDI LEWOBELE		1.664.400,38	(1.664.400,38)	(100,00)
81	SDI NUBALEMA		-	-	
82	SDN DEMONDEI		-	-	
83	SDI BASARANI		-	-	
84	SDI MEWET	0,51	2.196.100,51	(2.196.100,00)	(100,00)
85	SDI BELIKO		-	-	
86	SDI BANIONA	180.000,00	-	180.000,00	
87	SDN WAIWERANG		221.000,00	(221.000,00)	(100,00)
88	SDN WAIBURAK		-	-	
89	SDN I LAMAHALA		12.821,00	(12.821,00)	(100,00)
90	SDN II LAMAHALA		-	-	
91	SDN III LAMAHALA		-	-	
92	SDN TERONG		4.054.000,00	(4.054.000,00)	
93	SDI KIWANGONA		-	-	
94	SDI BILAL	39.865,00	39.865,00	-	-
95	SDI LAMAHALA	2.639.000,00	-	2.639.000,00	
96	SDI LAMATEWELU		-	-	
97	SDI WAIWERANG		-	-	

98	SDI LAMAGEWOK		-	-	
99	SDI TAPOBALI	412.500,00	530,00	411.970,00	77.730,19
100	SDI WATOWAENG		2.100,00	(2.100,00)	(100,00)
101	SDI RIANGRINDU			-	
102	SDI LIBU		-	-	
103	SDI RIANG BUNGA	1.340.000,00		1.340.000,00	
104	SDN LAMBUNGA	1.964.000,61	26.248.958,61	(24.284.958,00)	(92,52)
105	SDN NISAKARANG		-	-	
106	SDI ADOBALA		2.421.400,00	(2.421.400,00)	
107	SDI PEPAKKELU	624.000,99	1.150.000,99	(526.000,00)	(45,74)
108	SDI SUKUTOKAN	0,46	3.218.456,46	(3.218.456,00)	(100,00)
109	SDI MUDA		5.000,00	(5.000,00)	
110	SDN SAGU		-	-	
111	SDN ADONARA		-	-	
112	SDN ARANG		2.504.300,00	(2.504.300,00)	
113	SDI SAGU		-	-	
114	SDI KELAPA TIGA		1.659.400,00	(1.659.400,00)	
115	SDI LOLOK		-	-	
116	SDI KOLIMASANG		22.500.000,00	(22.500.000,00)	
117	SDI TIKATUKANG		-	-	
118	SDI WERANGGERE		-	-	
119	SDI PLEDO		-	-	
120	SDI WATOONE		-	-	
121	SDI RIANGDULI (WITIHAMA)		552.000,00	(552.000,00)	(100,00)
122	SDI WAIWURING	0,26	2.481.800,26	(2.481.800,00)	(100,00)
123	SDI ORINGBELE	0,65	0,65	-	-
124	SDI LAMALEKA		-	-	
125	SDI WOKA		22.500.000,00	(22.500.000,00)	
126	SDI MEKKO		4.307.000,00	(4.307.000,00)	(100,00)
127	SDN ORINGBELE GUNUNG	0,80	37.000,80	(37.000,00)	(100,00)
128	SDN BOLENG	1.375.000,00	-	1.375.000,00	
129	SDN NELELAMADIKEN		0,71	(0,71)	(100,00)
130	SDN LEWOPAO	9.092.000,00	-	9.092.000,00	
131	SDI DUABLOLONG		5.639.000,00	(5.639.000,00)	(100,00)
132	SDI BUNGABALI		-	-	

133	SDI LEWOKELENG		-	-	
134	SDI LEBANUBA	1.600.000,00	2.403.000,00	(803.000,00)	(33,42)
135	SDI DOKENG	10.000,00	-	10.000,00	
136	SDI BUNGALAWAN	535.000,00	-	535.000,00	
137	SDI SENADAN		-	-	
138	SDI LEWOLEMA	5.109.000,00	-	5.109.000,00	
139	SDI LAMABAYUNG		-	-	
140	SDI LAMAWOLO ATAS		-	-	
141	SDI NELELAMAWANGI		-	-	
142	SDI LAMANABI		-	-	
143	SDI RIANGDULI (ADONARA BARAT)		1.294.000,00	(1.294.000,00)	
144	SDN POLUGEDANG		-	-	
145	SDN MOLONG	1.531.997,00	9.614.197,00	(8.082.200,00)	(84,07)
146	SD NEGERI LEWOMUDA		16.341.526,00	(16.341.526,00)	(100,00)
147	SD NEGERI LIKUTUDEN	56.526,00	950.000,00	(893.474,00)	(94,05)
148	SD NEGERI BAWALATANG	4.247.000,00		4.247.000,00	
149	SD NEGERI DANIWATO	150.000,00	150.000,00	-	
150	SDN KIMAKAMAK		3.528.000,00	(3.528.000,00)	(100,00)
151	SDN EBANG	0,46	1.025.913,46	(1.025.913,00)	(100,00)
152	SDN LETER	8.688.289,18	26.449.487,18	(17.761.198,00)	(67,15)
	JUMLAH JENJANG PENDIDIKAN SD NEGER	**297.655.606,37**	**550.930.070,46**	**(253.274.464,09)**	**(45,97)**
II	**JENJANG PENDIDIKAN SMP NEGERI :**				
1	SMP NEGERI 1 LARANTUKA		60.000.000,00	(60.000.000,00)	(100,00)
2	SMP NEGERI 2 LARANTUKA		-	-	
3	SMP NEGERI 1 ADONARA TIMUR		2.590.000,00	(2.590.000,00)	
4	SMP NEGERI 2 ADONARA TIMUR		-	-	
5	SMP NEGERI 1 ADONARA BARAT	1.740.000,00	2.152.000,00	(412.000,00)	(19,14)
6	SMP NEGERI 2 ADONARA BARAT	35.000,00	1.667.341,00	(1.632.341,00)	(97,90)
7	SMP NEGERI 1 SOLOR BARAT		-	-	
8	SMP NEGERI 2 SOLOR BARAT		-	-	
9	SMP NEGERI 1 SOLOR TIMUR	162.500,00	-	162.500,00	
10	SMP NEGERI 1 WULANGGITANG		9.879.191,00	(9.879.191,00)	
11	SMP NEGERI 1 TANJUNG BUNGA	14.000.000,60	15.200.000,60	(1.200.000,00)	(7,89)
12	SMP NEGERI 2 WULANGGITANG		-	-	
13	SMP NEGERI 2 TANJUNG BUNGA	29.367.800,00	8.126.000,00	21.241.800,00	261,41

14	SMP NEGERI 3 WULANGGITANG	7.008.643,04	7.008.643,04	-	-
15	SMP NEGERI PALU GODAM		-	-	
16	SMP NEGERI 1 TITEHENA		-	-	
17	SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG	33.297.000,00	28.342.000,00	4.955.000,00	17,48
18	SMP NEGERI 3 SOLOR BARAT	219,00	219,00	-	-
19	SMP NEGERI I ILE BOLENG		12.733.750,00	(12.733.750,00)	(100,00)
20	SMP NEGERI LAMATEWELU		1.100.000,00	(1.100.000,00)	(100,00)
21	SMP NEGERI PANCA MARGA	0,03	0,03	-	-
22	SMP NEGERI LEMBAH SEBURI		-	-	
23	SMP NEGERI SATAP TIKATUKANG	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-
24	SMP NEGERI SATAP RIANGPUHO	6.146.885,00	-	6.146.885,00	
25	SMP NEGERI 3 TANJUNG BUNGA		-	-	
26	SMP NEGERI SATAP NUSADANI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
27	SMP NEGERI SATAP BILAL		43.442.000,00	(43.442.000,00)	(100,00)
28	SMP NEGERI 1 ADONARA		-	-	
29	SMP SATU ATAP NEGERI WATANHURA	700.000,00	700.000,00	-	
30	SMP SATU ATAP NEGERI RIANGDULI		-	-	
31	SMP SATU ATAP NEGERI NOBO		-	-	
32	SMP SATU ATAP NEGERI BUGALIMA		-	-	
33	SMP NEGERI 1 ADONARA TENGAH		1.130.000,00	(1.130.000,00)	(100,00)
34	SMP NEGERI SATU ATAP TAPOBALI		35.000.000,00	(35.000.000,00)	(100,00)
35	SMP NEGERI SATAP WULUBLOLONG	0,14	10.872.000,14	(10.872.000,00)	(100,00)
36	SMP NEGERI 1 WOTAN ULUMADO	23.649.500,00	19.256.000,00	4.393.500,00	
37	SMPN 1 LEWOLEMA		-	-	
38	SMPN SATAP NELELAMADIKE	516.570,00	516.570,00	-	-
39	SMPN SATAP BASARANI	373,92	373,92	-	-
40	SMPN BALAWELING	64.621,00	64.621,00	-	-
41	SMPN SATU ATAP LAMAWOLO		3.180.000,00	(3.180.000,00)	(100,00)
42	SMPN BATUPAYUNG		3.300.353,25	(3.300.353,25)	(100,00)
	JUMLAH JENJANG PEDNDIDIKAN SMP NEGERI	**119.989.112,73**	**269.561.062,98**	**(149.571.950,25)**	**(55,49)**
JUMLAH		**417.644.719,10**	**820.491.133,44**	**(402.846.414,34)**	**(49,10)**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KAS DI BENDAHARA KAS DANA KAPITASI PADA FKTP
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No.	Jenis Penyimpanan, Bank Penempatan	Jenis Penyimpanan, Bank Penempatan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1.	Puskesmas Demon Pagong	011.01.05.000907-2	22.501.884,00	929,00	22.500.955,00	2.422.061,89
2.	Puskesmas Lato	011.01.05.000908-4	37.991.052,00	11.725.693,00	26.265.359,00	224,00
3.	Puskesmas Ile Bura	011.01.05.000914-1	34.030.858,00	3.852.192,00	30.178.666,00	783,42
4.	Puskesmas Lewolema	011.01.05.000906-1	33.898.551,00	309,00	33.898.242,00	10.970.304,85
5.	Puskesmas Lite	011.01.05.000901-0	38.751.159,00	5.424.186,00	33.326.973,00	614,41
6.	Puskesmas Kalike	011.01.05.000898-5	103.240.878,00	461.436,00	102.779.442,00	22.273,82
7.	Puskesmas Oka	011.01.05.000909-6	50.032.288,00	7.249,00	50.025.039,00	690.095,72
8.	Puskesmas Waimana	011.01.05.000897-3	37.413.220,00	11.524.495,00	25.888.725,00	224,64
9.	Puskesmas Waiwerang	011.01.05.000910-2	73.943.225,00	43.112.089,00	30.831.136,00	71,51
10.	Puskesmas Sagu	011.01.05.000896-0	73.396.209,00	2.076.002,00	71.320.207,00	3.435,46
11.	Puskesmas Witihama	011.01.05.000915-0	100.834.800,00	37.577,00	100.797.223,00	268.241,80
12.	Puskesmas Lambunga	011.01.05.000905-9	66.184.762,00	622,00	66.184.140,00	10.640.536,98
13.	Puskesmas Ile Boleng	011.01.05.000902-3	58.291.760,00	17.339.525,00	40.952.235,00	236,18
14.	Puskesmas Waiwadan	011.01.05.000912-6	27.755.798,00	12.969.145,00	14.786.653,00	114,01
15.	Puskesmas Baniona	011.01.05.000903-5	101.382.135,00	27.235.430,00	74.146.705,00	272,24
16.	Puskesmas Ritaebang	011.01.05.000900-1	61.859.116,00	29.044,00	61.830.072,00	212.884,15
17.	Puskesmas Menanga	011.01.05.000899-7	46.467.546,00	1,00	46.467.545,00	4.646.754.500,00

18.	Puskesmas Boru	011.01.05.000911-4	34.922.075,00	3.857.197,00	31.064.878,00	805,37
19.	Puskesmas Lewolaga	011.01.05.000913-8	46.060.949,00	30.520.690,00	15.540.259,00	50,92
20.	Puskesmas Waiklibang	011.01.05.000904-7	46.805.531,00	39.375.397,00	7.430.134,00	18,87
21.	Puskesmas Nagi	011.01.05.000977-0	157.648.300,00	28.490.047,00	129.158.253,00	453,35
22	RSP Adonara		3.866.122,00		3.866.122,00	-
JUMLAH			**1.257.278.218,00**	**238.039.255,00**	**1.019.238.963,00**	**428,18**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PIUTANG PAJAK :						
1	**Piutang Pajak Hotel**	**14.662.152,00**	**-**	**-**	**-**	**14.662.152,00**
1	Hotel Kartika	2.610.000,00	-	-	-	2.610.000,00
2	Hotel Tresna	2.650.952,00	-	-	-	2.650.952,00
3	Hotel Rullis	1.652.200,00	-	-	-	1.652.200,00
4	Kurnia Sederhana	2.188.450,00	-	-	-	2.188.450,00
5	Hotel Flores Cottage	505.000,00	-	-	-	505.000,00
6	Hotel Yonatha	800.000,00	-	-	-	800.000,00
7	Hotel Kusuma	550.000,00	-	-	-	550.000,00
8	Hotel Budi Luhur	600.000,00	-	-	-	600.000,00
9	Losmen Sahabat	461.550,00	-	-	-	461.550,00
10	Hotel Asri Lamanepa	1.007.500,00	-	-	-	1.007.500,00
11	Hotel Taufik	992.500,00	-	-	-	992.500,00
12	Hotel Pelangi	644.000,00	-	-	-	644.000,00
2	**Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan**	**83.486.600,00**	**-**	**-**	**-**	**83.486.600,00**
1	Minang Surya/Larantuka	5.650.000,00	-	-	-	5.650.000,00
2	Sri Solo	7.300.400,00	-	-	-	7.300.400,00
3	Sederhana II	10.000.400,00	-	-	-	10.000.400,00
4	Nirwana	1.600.000,00	-	-	-	1.600.000,00
5	Gempar	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
6	Singgalang	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
7	Lestari	1.313.500,00	-	-	-	1.313.500,00
8	Citra Sena	275.000,00	-	-	-	275.000,00
9	Arizona	6.960.000,00	-	-	-	6.960.000,00
10	Elsade	3.600.000,00	-	-	-	3.600.000,00
11	Siang Malam	3.620.000,00	-	-	-	3.620.000,00
12	Fortuna	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
13	Meting Doeng	584.000,00	-	-	-	584.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
14	Sate Solo	6.100.000,00	-	-	-	6.100.000,00
15	Sari Rasa	3.256.800,00	-	-	-	3.256.800,00
16	Maya Sari	4.644.000,00	-	-	-	4.644.000,00
17	Minang Surya Baru	1.750.000,00	-	-	-	1.750.000,00
18	Minang Salyo Waiwerang	500.000,00	-	-	-	500.000,00
19	Surya Pertiwi	3.615.300,00	-	-	-	3.615.300,00
20	Boru Indah	2.350.000,00	-	-	-	2.350.000,00
21	Ampera	3.920.000,00	-	-	-	3.920.000,00
22	Lumayan Sari	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00
23	Berkah	100.000,00	-	-	-	100.000,00
24	Pondok Baru I	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00
25	Pondok Baru II	200.000,00	-	-	-	200.000,00
26	Mie Ayam (Sumadi)	2.160.000,00	-	-	-	2.160.000,00
27	Bakso Bayuwangi	226.000,00	-	-	-	226.000,00
28	Zidal	1.516.000,00	-	-	-	1.516.000,00
29	Kantin Batuata	468.400,00	-	-	-	468.400,00
30	Soto Makasar	2.176.800,00	-	-	-	2.176.800,00
31	Telago Indah	100.000,00	-	-	-	100.000,00
32	Bakso Amor	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
3	**Pajak Galian Golongan C**	**121.356.414,00**	**-**	**-**	**-**	**121.356.414,00**
A	**DPPKAD**	**23.585.667,00**	**-**	**-**	**-**	**23.585.667,00**
1	PT. Guma Era	1.829.520,00	-	-	-	1.829.520,00
2	CV. Satu Putra	555.165,00	-	-	-	555.165,00
3	PT. Citra Mandiri Konstruksi	6.021.412,00	-	-	-	6.021.412,00
4	Santoso	591.535,00	-	-	-	591.535,00
5	CV. Elshadae Mulia Kupang	2.399.625,00	-	-	-	2.399.625,00
6	Liany Tanzil	3.603.320,00	-	-	-	3.603.320,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
7	Surya Nusa	50.045,00	-	-	-	50.045,00
8	Surya Nusa	50.045,00	-	-	-	50.045,00
9	DS. Kolaka, Tanjung Bunga	1.601.500,00	-	-	-	1.601.500,00
10	DS.Bloto	766.500,00	-	-	-	766.500,00
11	DS. Waiwadan, Adonara Barat	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00
12	DS. Tapobali Kec. Adonara Timur	1.647.000,00	-	-	-	1.647.000,00
13	DS. Kolaka, Haru Kec. Ile Boleng	1.647.000,00	-	-	-	1.647.000,00
14	DS. Waiwadan, Adonara Barat	1.647.000,00	-	-	-	1.647.000,00
B	**Dinas PU Kab. Flores Timur**	**42.490.841,00**	**-**	**-**	**-**	**42.490.841,00**
1	PT. Protelindo	1.250.279,00	-	-	-	1.250.279,00
2	CV. Govinda	353.850,00	-	-	-	353.850,00
3	CV. Govinda	353.850,00	-	-	-	353.850,00
4	CV. Yong Kudi Group	897.885,00	-	-	-	897.885,00
5	CV. Warni Bersaudara	5.317.785,00	-	-	-	5.317.785,00
6	PT. Maha Karia Tunggal	15.853.300,00	-	-	-	15.853.300,00
7	CV. Citra Bahari	464.400,00	-	-	-	464.400,00
8	CV. Kode Nore	1.989.555,00	-	-	-	1.989.555,00
9	CV. Yudistira Teknik	3.069.495,00	-	-	-	3.069.495,00
10	CV. Dwi Padma	1.136.255,00	-	-	-	1.136.255,00
11	CV. Yudistira Teknik	3.179.020,00	-	-	-	3.179.020,00
12	CV. Pesona Flotim	1.157.565,00	-	-	-	1.157.565,00
13	CV. Krembangan Jaya	2.552.440,00	-	-	-	2.552.440,00
14	CV. Putra Bunga Lawan	13.456,00	-	-	-	13.456,00
15	CV. Batara Indah	1.191.510,00	-	-	-	1.191.510,00
16	CV. Yudistira Tekhnik	3.347.580,00	-	-	-	3.347.580,00
17	CV. Angelica Lewoleba	312.738,00	-	-	-	312.738,00
18	CV. Antika	49.878,00	-	-	-	49.878,00
C	**Dinas Pekerjaan Umum Propinsi**	**11.048.974,00**	**-**	**-**	**-**	**11.048.974,00**
1	CV. Warni Bersaudara	2.414.820,00	-	-	-	2.414.820,00
2	CV. Halona	8.634.154,00	-	-	-	8.634.154,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
D	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	**8.821.875,00**	**-**	**-**	**-**	**8.821.875,00**
1	Kepsek SDK Wailolong	1.829.520,00	-	-	-	1.829.520,00
2	Kepsek SDK Kokang	999.755,00	-	-	-	999.755,00
3	Kepsek SDK Kenari Blolong	1.109.687,00	-	-	-	1.109.687,00
4	Kepsek SDK Watoone	1.275.912,00	-	-	-	1.275.912,00
5	Kepsek SDK Lewokung	136.650,00	-	-	-	136.650,00
6	Kepsek SDI Nubalema	1.016.480,00	-	-	-	1.016.480,00
7	Kepsek SMK Bunga Tanjung	1.182.455,00	-	-	-	1.182.455,00
8	Kepsek SMA Surya Mandala	132.720,00	-	-	-	132.720,00
9	Kepsek SMPS Lamatwelu Adonara Timur	607.255,00	-	-	-	607.255,00
10	CV. Tekno Krajaba	531.441,00	-	-	-	531.441,00
E	**Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka**	**6.932.553,00**	**-**	**-**	**-**	**6.932.553,00**
1	CV. Konindo	281.073,00	-	-	-	281.073,00
2	CV. Hasrat Bahagia	6.651.480,00	-	-	-	6.651.480,00
F	**Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Flores Timur**	**4.307.454,00**	**-**	**-**	**-**	**4.307.454,00**
1	CV. Andi Pratama	2.942.727,00	-	-	-	2.942.727,00
2	CV. Mustika Budi	1.364.727,00	-	-	-	1.364.727,00
G	**Dinas Sosial dan Nakertrans Kab. Flores Timur**	**644.003,00**	**-**	**-**	**-**	**644.003,00**
1	Desa Lewoawang	211.503,00	-	-	-	211.503,00
2	Desa Hokeng Jaya	432.500,00	-	-	-	432.500,00
H	**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur**	**512.110,00**	**-**	**-**	**-**	**512.110,00**
1	CV. Atflonsia	512.110,00	-	-	-	512.110,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	**Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur**	**11.982.000,00**	**-**	**-**	**-**	**11.982.000,00**
1	Kelompok Tani Titehena	582.000,00	-	-	-	582.000,00
2	Phoktan Pupu Gelekat	5.700.000,00	-	-	-	5.700.000,00
3	Poktan Sinar Harapan	5.700.000,00	-	-	-	5.700.000,00
J	**POLRES FLOTIM**	**5.452.295,00**	**-**	**-**	**-**	**5.452.295,00**
1	Polres Flotim	5.452.295,00	-	-	-	5.452.295,00
K	**BKPP**	**919.919,00**	**-**	**-**	**-**	**919.919,00**
1	CV. De Nasconselos	819.829,00	-	-	-	819.829,00
2	CV. Surya Nusa	50.045,00	-	-	-	50.045,00
3	CV. Surya Nusa	50.045,00	-	-	-	50.045,00
L	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**70.025,00**	**-**	**-**	**-**	**70.025,00**
	CV. Ile Boleng Sakti	70.025,00	-	-	-	70.025,00
N	**Rumah Tinggal**	**4.588.698,00**	**-**	**-**	**-**	**4.588.698,00**
1	Usman Ali/Terong Adonara Timur	484.745,00	-	-	-	484.745,00
2	Rahmat C. Bone/Weri Larantuka	1.357.095,00	-	-	-	1.357.095,00
3	Asri/Amagarapati Larantuka	39.018,00	-	-	-	39.018,00
4	Yanti Yupira/Sarotari Larantuka	818.480,00	-	-	-	818.480,00
5	Karolus Bande/Pohon Bao Larantuka	1.889.360,00	-	-	-	1.889.360,00
4	**Pajak Hiburan**	**2.770.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.770.000,00**
1	Baun Botin	120.000,00	-	-	-	120.000,00
2	Lastri	800.000,00	-	-	-	800.000,00
3	Meting Doeng	1.850.000,00	-	-	-	1.850.000,00
5	**Pajak Reklame**	**716.914.382,00**	**203.796.326,00**	**-**	**5.611.000,00**	**915.099.708,00**
1	Kecamatan Larantuka	316.371.132,00	103.748.003,00		4.104.000,00	416.015.135,00
2	Kecamatan Ile Bura	4.938.500,00	1.300.000,00			6.238.500,00
3	Kecamatan Titehena	18.204.000,00	3.811.000,00			22.015.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Kecamatan Demon Pagong	3.105.000,00	728.000,00			3.833.000,00
5	Kecamatan Lewolema	6.405.500,00	1.040.000,00		52.000,00	7.393.500,00
6	Kecamatan Ile Mandiri	21.069.500,00	4.992.000,00		52.000,00	26.009.500,00
7	Kecamatan Tanjung Bunga	10.172.500,00	2.912.000,00		52.000,00	13.032.500,00
8	Kecamatan Wulanggitang	13.091.500,00	5.200.000,00			18.291.500,00
9	Kecamatan Adonara Timur	82.343.500,00	10.106.500,00		52.000,00	92.398.000,00
10	Kecamatan Ile Boleng	11.323.500,00	3.655.000,00		156.000,00	14.822.500,00
11	Kecamatan Witihama	15.579.500,00	4.324.000,00			19.903.500,00
12	Kecamatan Klubagolit	14.899.500,00	4.680.000,00		208.000,00	19.371.500,00
13	Kecamatan Adonara	5.534.500,00	884.000,00		104.000,00	6.314.500,00
14	Kecamatan Adonara Tengah	8.191.000,00	1.731.000,00			9.922.000,00
15	Kecamatan Wotan Ulumado	15.021.500,00	3.224.000,00		104.000,00	18.141.500,00
16	Kecamatan Adonara Barat	26.564.500,00	7.674.000,00		156.000,00	34.082.500,00
17	Kecamatan Solor Timur	6.028.500,00	572.000,00			6.600.500,00
18	Kecamatan Solor Barat	24.810.500,00	5.780.000,00		156.000,00	30.434.500,00
19	Kecamatan Solor Selatan	2.475.000,00	364.000,00			2.839.000,00
20	Spanduk/umbul-umbul/Kain/Baliho/Shop Shine	52.055.750,00	10.449.100,00			62.504.850,00
21	Melekat/sticker	5.525.000,00				5.525.000,00
22	Mobil Box/Berjalan	11.905.000,00				11.905.000,00
23	Bilboard	30.724.500,00	16.267.000,00		415.000,00	46.576.500,00
24	Neon Light	10.575.000,00	10.354.723,00			20.929.723,00
6	**Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	**6.982.258.245,00**	**2.342.174.738,59**	**-**	**203.749.269,00**	**9.120.683.714,59**
1	Piutang PBB P2 (Pajak Pusat yang dialihkan ke Daerah Tahun 1996 - 2013)	1.253.797.998,00				1.253.797.998,00
2	Piutang PBB P2 Tahun 2014	309.250.158,00				309.250.158,00
3	Piutang PBB P2 Tahun 2015	375.488.126,00				375.488.126,00
4	Piutang PBB P2 Tahun 2016	292.659.697,00				292.659.697,00
5	Piutang PBB P2 Tahun 2017	290.220.969,00				290.220.969,00
6	Piutang PBB P2 Tahun 2018	421.426.196,00			108.722,00	421.317.474,00
7	Piutang PBB P2 Tahun 2019	458.238.473,00			1.067.967,00	457.170.506,00
8	Piutang PBB P2 Tahun 2020	471.163.451,00			1.884.072,00	469.279.379,00
9	Piutang PBB P2 Tahun 2021	926.688.685,00			20.908.909,00	905.779.776,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
10	Piutang PBB P2 Tahun 2022	699.741.063,00			17.382.227,00	682.358.836,00
11	Piutang PBB P2 Tahun 2023	1.483.583.429,00			162.397.372,00	1.321.186.057,00
12	Piutang PBB P2 Tahun 2024		2.342.174.738,59			2.342.174.738,59
7	**Piutang Air Bawa Tanah**	**34.727.600,00**	**15.572.600,00**	**-**	**-**	**50.300.200,00**
1	PT. Okishin Flores	2.800.000,00				2.800.000,00
2	Hotel Tresna	782.800,00	259.200,00			1.042.000,00
3	Aloysius Ritan	4.371.200,00	1.790.400,00			6.161.600,00
4	Nikolaus Djogo Dias Viera	2.662.400,00	665.600,00			3.328.000,00
5	Elias Lili Kleden	4.992.000,00	1.664.000,00			6.656.000,00
6	Petrus Bai Bego	998.400,00	499.200,00			1.497.600,00
7	Achmad Raihan	432.000,00	432.000,00			864.000,00
8	Fransiskus Uja Kotan	9.116.000,00	2.704.000,00			11.820.000,00
9	Petrus Ojan	1.744.400,00				1.744.400,00
10	Aji Abdullah	320.000,00	768.000,00			1.088.000,00
11	PT. Tigate Tress Indonesia	1.170.000,00	1.170.000,00			2.340.000,00
12	Imaculata Lili Sunur	1.031.200,00	665.000			1.696.200,00
13	Hotel Rulis	172.800,00				172.800,00
14	Aditya Putra Poernomo (Hotel Sunrise)	432.000,00	216.000			648.000,00
15	HENDRIKUS NAREK USEN	332.800,00	332.800			665.600,00
16	AMIR SARIFUDIN (ORING BELE)	1.705.600,00	1.705.600			3.411.200,00
17	ROFINUS DONI BOLI	1.664.000,00	1.664.000			3.328.000,00
18	LA ZUARDIN		1.036.800			1.036.800,00
JUMLAH PIUTANG PAJAK		**7.956.175.393,00**	**2.561.543.664,59**	**-**	**209.360.269,00**	**10.308.358.788,59**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PIUTANG RETRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
PIUTANG RETRIBUSI :						
A	**PIUTANG SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN**	**621.051.788,00**	**113.744.000,00**	**-**	**15.448.000,00**	**719.347.788,00**
1	**Ruko Kompleks Pertokoan Sebelah Barat Lantai Bawah (Blok A)**	**56.616.000,00**	**10.984.000,00**	**-**	**-**	**67.600.000,00**
1	HASAN BAZRI (RMH TINGGAL)	900.000,00				900.000,00
2	HASAN BASRI (KIOS)	2.000.000,00	3.000.000,00			5.000.000,00
3	WIN CHANDRA	2.260.000,00				2.260.000,00
4	WARSONO KUNCONO	-				-
5	NURMAN JUMADI / YULIANA S.	5.854.000,00				5.854.000,00
6	HIDAYAT M. AMIN	4.342.000,00				4.342.000,00
7	SYAFRI. S	7.400.000,00				7.400.000,00
8	MANSYUR ROHIM	6.992.000,00	4.992.000,00			11.984.000,00
9	SESILIA ROSALINDA M.	7.492.000,00				7.492.000,00
10	FRANSISKUS PAJI LETOR	14.384.000,00	2.992.000,00			17.376.000,00
11	HENDRIKUS GEGE TUKAN	1.664.000,00				1.664.000,00
12	EVA ROSA	3.328.000,00				3.328.000,00
2	**Ruko Kompleks Pertokoan Sebelah Barat Lantai Atas (Blok B)**	**213.684.000,00**	**48.916.000,00**	**-**	**-**	**262.600.000,00**
1	YOSEP SANI BETHAN	17.616.000,00				17.616.000,00
2	ADOLFUS BETHAN	6.192.000,00				6.192.000,00
3	LAURENTIANA M. DVG	840.000,00				840.000,00
4	HAMATUN	1.000.000,00				1.000.000,00
5	MULFI ABDUL AJIZ	6.760.000,00				6.760.000,00
6	NURDIN BIN ACONG	1.000.000,00				1.000.000,00
7	ALI NURDIANSAH	12.492.000,00	2.500.000,00			14.992.000,00
8	GREGORIUS B. KOTEN	7.680.000,00				7.680.000,00
9	SAID ALI ALATAS	940.000,00				940.000,00
10	HENDRI BIN HASAN BASRI	25.468.000,00				25.468.000,00
11	RINA SALFIA	27.480.000,00	4.000.000,00			31.480.000,00
12	WIR CHANDRA	8.488.000,00	2.488.000,00			10.976.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
13	HAMATUN	10.536.000,00	7.488.000,00			18.024.000,00
14	AJI ABDULLAH	16.976.000,00	14.976.000,00			31.952.000,00
15	MULFI ABDUL AJIZ	16.000.000,00	7.488.000,00			23.488.000,00
16	ZUKARDI	12.076.000,00	3.492.000,00			15.568.000,00
17	BAKRI SANI TANJUNG	6.952.000,00				6.952.000,00
18	BUYUNG BOI	5.400.000,00				5.400.000,00
19	NURHAYATI	3.844.000,00				3.844.000,00
20	RAHMAT NAUFAL AGUS	10.476.000,00	3.492.000,00			13.968.000,00
21	SYAFARDI TANJUNG	4.992.000,00				4.992.000,00
22	ASMAN	10.476.000,00	2.992.000,00			13.468.000,00
3	**Ruko Pasar Daerah Larantuka (Blok C)**	**80.514.000,00**	**14.722.000,00**	**-**	**-**	**95.236.000,00**
1	YOH. K. PAYONG	2.520.000,00				2.520.000,00
2	YOH. VIANEY N. WATUN	13.352.000,00				13.352.000,00
3	YOSEPH SADIPUN	2.560.000,00				2.560.000,00
4	PATAHUDIN	3.940.000,00				3.940.000,00
5	MAPI	740.000,00				740.000,00
6	AL HAFID KOTA	11.956.000,00	3.368.000,00			15.324.000,00
7	IBNU HARISTA SYARIFUDIN	14.156.000,00	3.618.000,00			17.774.000,00
8	YULIDAR	940.000,00	1.000.000,00			1.940.000,00
9	SURIANTI	-				-
10	NILAWATI	3.930.000,00				3.930.000,00
11	OYA DOMINIKA PUARA	3.864.000,00				3.864.000,00
12	ANDREAS ADI HEKIN	5.444.000,00				5.444.000,00
13	USMAN ABDUL MALIK	9.456.000,00	2.368.000,00			11.824.000,00
14	AMINU	-				-
15	KARBOLA	1.864.000,00				1.864.000,00
16	KOPERASI USAHA JAYA	1.864.000,00				1.864.000,00
17	MUNIRA	2.564.000,00				2.564.000,00
18	JOSEPH PIUS DIAS ALFI	1.364.000,00	4.368.000,00			5.732.000,00
4	**Ruko Pasar Daerah Larantuka (Blok D)**	**46.248.428,00**	**2.744.000,00**	**-**	**-**	**48.992.428,00**
1	NOVIANDRI	7.956.000,00				7.956.000,00
2	AL AMIN ACHMAD	13.496.428,00				13.496.428,00
3	GUNAWAN LEWAR	2.020.000,00				2.020.000,00
4	OKTAVIANUS F. LAMATWELU	1.440.000,00				1.440.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	SUSMIATIN	2.000.000,00				2.000.000,00
6	KRISTOFORUS PARA PESSA	1.680.000,00				1.680.000,00
7	SITI KALSUM MASRIKI	11.386.000,00	2.744.000,00			14.130.000,00
8	UJANG	2.000.000,00				2.000.000,00
9	SYARIFUDIN K BETHAN	2.200.000,00				2.200.000,00
10	KRISTOFORUS YAKOBUS BAO	2.070.000,00				2.070.000,00
5	**Ruko Pasar Daerah Larantuka (Blok E)**	**52.664.000,00**	**4.368.000,00**	**-**	**-**	**57.032.000,00**
1	JUNAIDI	5.244.000,00				5.244.000,00
2	HELEN C. P. BETHAN	2.940.000,00				2.940.000,00
3	STEFANUS BALA BAON	4.880.000,00				4.880.000,00
4	KAMARUDIN	6.058.000,00				6.058.000,00
5	H.SALLY DOMAKING	6.968.000,00				6.968.000,00
6	WILHELMUS WAJO KELEN	11.456.000,00	4.368.000,00			15.824.000,00
7	H.HUSEN MUKIN	6.832.000,00				6.832.000,00
8	HORONATUS A NIMU	2.422.000,00				2.422.000,00
9	ZUKRI SYAHDUN	3.864.000,00				3.864.000,00
10	ARDIANTO	2.000.000,00				2.000.000,00
6	**Ruko Pasar Daerah Larantuka (Blok F)**	**78.192.000,00**	**13.290.000,00**	**-**	**-**	**91.482.000,00**
1	CRISTINA FLORYANA TUKAN	1.000.000,00				1.000.000,00
2	SULASTRI N. AHMAD	11.456.000,00	3.368.000,00			14.824.000,00
3	H. SYARIFUDIN S. BETHAN	15.796.000,00	3.868.000,00			19.664.000,00
4	RIDWAN ACHMAD	14.490.000,00	868.000,00			15.358.000,00
5	KALIKTUS S. HELAN	13.796.000,00				13.796.000,00
6	JEFRI MAROMON	7.834.000,00				7.834.000,00
7	H. LOBA AT	500.000,00				500.000,00
8	SAYID ALI ALATAS	4.728.000,00				4.728.000,00
9	SRI SATIA ASLAN	1.000.000,00				1.000.000,00
10	SRI MURYANI	1.864.000,00	2.368.000,00			4.232.000,00
11	AFIAN BERTHA NAGE	5.728.000,00				5.728.000,00
12	USMAN MUHAMMAD		2.818.000,00			2.818.000,00
7	**Taman Kota Larantuka**	**93.133.360,00**	**18.720.000,00**	**-**	**15.448.000,00**	**96.405.360,00**
1	REBON MUDA	360.000,00				360.000,00
2	DEDE SABU	240.000,00				240.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	MAT ATIM	600.000,00				600.000,00
4	BUDIONO/MUDIONO	400.000,00				400.000,00
5	DEDEK	600.000,00				600.000,00
6	ENDANG S. BILI	300.000,00				300.000,00
7	MISWANTO	488.520,00				488.520,00
8	AGUS NOMO	530.840,00				530.840,00
9	SUJOKO	600.000,00				600.000,00
10	GIMAN/SUGIMAN	300.000,00				300.000,00
11	VERONIKA PERTIWI / KANTIN BATU ATA	9.186.000,00	3.744.000,00			12.930.000,00
12	NOVIANUS LOLI DULI	6.124.000,00				6.124.000,00
13	FRANSISKUS LEIN	8.936.000,00			500.000,00	8.436.000,00
14	MARIANA SURA	12.436.000,00			200.000,00	12.236.000,00
15	EMANUEL V. EMBU R. DEROZARIO	8.436.000,00				8.436.000,00
16	LORENSO ENSO FERNANDEZ	5.748.000,00			1.500.000,00	4.248.000,00
17	NGATINI	3.624.000,00				3.624.000,00
18	DOMINIKUS MINI TEMALURU	7.728.000,00				7.728.000,00
19	MARIA VERONIKA E.T LAMOREN	26.496.000,00			13.248.000,00	13.248.000,00
20	HENDRIK DEMON DATON (WWR)		14.976.000,00			14.976.000,00
B	**PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR :**	**329.865.500,00**	**158.328.000,00**	**-**	**42.316.000,00**	**445.877.500,00**
1	**KIOS PERMANEN**	**226.184.500,00**	**105.986.000,00**	**-**	**28.850.000,00**	**303.320.500,00**
a	**KIOS PERMANEN PASAR LARANTUKA**	**134.210.000,00**	**67.280.000,00**	**-**	**22.340.000,00**	**179.150.000,00**
1	MUHAMAD SALEH	860.000,00				860.000,00
2	H.BOLENG METAK	3.240.000,00	1.080.000,00		1.000.000,00	3.320.000,00
3	BEDDU NAHARI/SAINUDDIN	580.000,00				580.000,00
4	HERMANSYAH ASHAR	1.080.000,00				1.080.000,00
5	THEODORA KOE	-				-
6	DARWIS	-				-
7	MUHAMMAD ABDULLAH	480.000,00				480.000,00
8	SITI ACHMAD	680.000,00				680.000,00
9	SUARDI THALIB	380.000,00				380.000,00
10	BANONG	1.180.000,00				1.180.000,00
11	HUSEN MUKIN/SRI MUKIN	2.240.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	2.240.000,00
12	AGUSTAN	1.080.000,00				1.080.000,00
13	JUSNY	2.060.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	2.060.000,00
14	AGNES KOLIN	2.160.000,00	1.080.000,00			3.240.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
15	H.MUCHTAR YANGSA	480.000,00				480.000,00
16	SURYA URAN	-				-
17	ALI UMAR	-				-
18	PATCHUL MUNIF	660.000,00	580.000,00			1.240.000,00
19	AMINAH ARPAN	-				-
20	SITI SOPIANA ARIAN T.C	-				-
21	SUBAIDAH UMAR	3.240.000,00	1.080.000,00			4.320.000,00
22	SANTOSO	1.310.000,00	1.080.000,00			2.390.000,00
23	FAHROR ROZI	1.410.000,00				1.410.000,00
24	HIDAYAT AWALUDIN	3.240.000,00	1.080.000,00			4.320.000,00
25	IMAM GONZALI	3.240.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	3.240.000,00
26	WARDI	580.000,00				580.000,00
27	HERLINA LOBA	2.340.000,00	1.080.000,00			3.420.000,00
28	EDI MAHARDI	580.000,00				580.000,00
29	SITI CHODIDJAH	1.580.000,00			1.080.000,00	500.000,00
30	MANSUR	780.000,00				780.000,00
31	MUHRIS	1.740.000,00	1.080.000,00			2.820.000,00
32	YUSDAR WARDI	1.760.000,00				1.760.000,00
33	ANIS	880.000,00				880.000,00
34	SIKA BIN MUSTAFA	2.890.000,00			1.080.000,00	1.810.000,00
35	DURIZAL/ANTONIUS ALEKSANDER	2.160.000,00	1.080.000,00			3.240.000,00
36	HERMAN LOBA	3.240.000,00	1.080.000,00			4.320.000,00
37	DEWI RATNASARI	2.160.000,00	1.080.000,00			3.240.000,00
38	SYARIFUDDIN	3.240.000,00	1.080.000,00			4.320.000,00
39	NONA MUNISA	3.190.000,00	1.080.000,00			4.270.000,00
40	THERESIA KWAE SODE	1.760.000,00	1.080.000,00			2.840.000,00
41	H.MARTOYO	2.160.000,00			1.080.000,00	1.080.000,00
42	GINO RAHARJO	2.160.000,00			1.080.000,00	1.080.000,00
43	BUDI ROHANI	-				-
44	SAFERIUS POMPILU	3.240.000,00	1.080.000,00			4.320.000,00
45	DONI SOGE IRAWAN	1.860.000,00	1.080.000,00			2.940.000,00
46	ANI FIDIALIKNA	2.160.000,00	1.080.000,00			3.240.000,00
47	H.MAHMUD	1.620.000,00	1.080.000,00			2.700.000,00
48	AHMAD MASRURON	2.940.000,00	1.080.000,00			4.020.000,00
49	TAUFIQ	2.740.000,00	1.080.000,00			3.820.000,00
50	EMI MARDIANA WATI	3.240.000,00	1.080.000,00			4.320.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
51	MUKSIN HENTINU	190.000,00				190.000,00
52	SITI DAIYAH	-				-
53	NUR CAHYA	-				-
54	HUSNA	-				-
55	SAMATANG / AHMAD	840.000,00				840.000,00
56	LEOALDI	1.380.000,00	840.000,00			2.220.000,00
57	Hj.MURNIATI	2.520.000,00	840.000,00			3.360.000,00
58	SAERA URAN	1.820.000,00	840.000,00		840.000,00	1.820.000,00
59	BAKRI BEDDU	1.720.000,00	840.000,00			2.560.000,00
60	H.BASRI	640.000,00				640.000,00
61	H.RABANAI D.GASSING	580.000,00				580.000,00
62	ALI	340.000,00				340.000,00
63	H.ZAINUDDIN	-				-
64	H.SIRAJUDDIN	840.000,00				840.000,00
65	SITISUWARNI	-				-
66	SITI NURLAILA	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
67	SUSANA SUENG	-				-
68	SITI AMINAH	1.080.000,00				1.080.000,00
69	NUR HUSANAH	480.000,00				480.000,00
70	H. ALWI	1.080.000,00				1.080.000,00
71	NUR LAILA FAIQOH	80.000,00				80.000,00
72	MUHAMAD PUJIONO	480.000,00				480.000,00
73	SETIA CAHYA UTAMI	1.080.000,00	730.000,00			1.810.000,00
74	AZMAN	480.000,00				480.000,00
75	ADE SETIAWAN	-	1.080.000,00			1.080.000,00
76	AJIDIN	-				-
77	ROZIKAN	580.000,00				580.000,00
78	SURIANI	280.000,00				280.000,00
79	AHMAD MAMANG	1.260.000,00	580.000,00		1.080.000,00	760.000,00
80	BAHRUDIN	1.080.000,00	1.080.000,00		300.000,00	1.860.000,00
81	SYAHRIAL	-	880.000,00			880.000,00
82	USMAN PATIRAJA	580.000,00	1.080.000,00			1.660.000,00
83	ELFIAWATI	2.160.000,00	1.080.000,00			3.240.000,00
84	JIMIN YASER P.S.	1.080.000,00	1.080.000,00		400.000,00	1.760.000,00
85	ABDURAHMAN SIDO	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
86	MIROTUL KHAFIDIAH	-	1.080.000,00			1.080.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
87	ASEPTA GUNAWAN AMRILLAH	2.160.000,00	1.080.000,00			3.240.000,00
88	KOSIATUN	1.080.000,00				1.080.000,00
89	BAKRI ASRIANI	840.000,00				840.000,00
90	RIDWAN S.	-				-
91	YUNUS WIHE TUHI	-				-
92	AHMAD FAUZI	340.000,00				340.000,00
93	FATIMA ATAPUKAN	840.000,00	640.000,00		840.000,00	640.000,00
94	SUKARMU	300.000,00				300.000,00
95	H. RISMAN	-				-
96	RISNAWATI	200.000,00				200.000,00
97	FATHIA KHOIRAH PUTRI BASO	840.000,00				840.000,00
98	LUKMAN	1.080.000,00				1.080.000,00
99	SITI UDAYAH KAMPOH	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
100	MUHAMAD HUSEN YUNUS	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
101	BUYA ASHARI	1.080.000,00			1.080.000,00	-
102	FAISAL AZHARI ABDULLAH	1.080.000,00			1.080.000,00	-
103	ZAKY AZIS	1.080.000,00			1.080.000,00	-
104	MONICA ANGGELINA	1.080.000,00	580.000,00		1.080.000,00	580.000,00
105	NURSIA/MARDIANA	1.080.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00
106	FENDI GUCI	1.080.000,00			1.080.000,00	-
107	SITI HAWA JALIL	1.080.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00
108	SONI PRANATA PUTRA	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
109	MARIANI	1.080.000,00			1.080.000,00	-
110	IRZAL	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
111	ZUKARDI	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
112	ALIMUDIN USMAN	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
113	ASARI	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
114	SUMARNO BIN MASRUN	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
115	NURKOLIS	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
116	CHOIB BIN MASRUN	1.080.000,00	1.080.000,00			2.160.000,00
117	HJ. NURBAYAH/AL BASIR	840.000,00			840.000,00	-
118	M. IKHSAN	840.000,00			840.000,00	-
119	RUSMAN		480.000,00			480.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
120	HERI PURWOTO B SUKARMAN		730.000,00			730.000,00
121	SRIYATI		580.000,00			580.000,00
122	DANIEL SAM		580.000,00			580.000,00
123	ARYANTO		1.080.000,00			1.080.000,00
124	HATIKA		1.080.000,00			1.080.000,00
125	ILHAM JIHADI MUSTASAWIFIN		1.080.000,00			1.080.000,00
126	SAKINAH TUL AFIFAH		1.080.000,00			1.080.000,00
127	NURHANA		580.000,00			580.000,00
128	AMINUDIN		580.000,00			580.000,00
129	ITA PURNAMASARI		480.000,00			480.000,00
130	MAFAZAH		1.080.000,00			1.080.000,00
131	YASMIN SHARAH YUNIATI		1.080.000,00			1.080.000,00
132	NUR SHOLIQ		1.080.000,00			1.080.000,00
133	SITI RAMLAH		840.000,00			840.000,00
						-
b	**KIOS PERMANEN PASAR LAMAWALANG**	**53.060.000,00**	**15.000.000,00**	**-**	**740.000,00**	**67.320.000,00**
1	PETRUS POLE HAYON	2.400.000,00				2.400.000,00
2	MARIA IRENE TENAU	1.200.000,00				1.200.000,00
3	IWAN GOZALI	1.200.000,00				1.200.000,00
4	BANK BINA USAHA DANA	3.600.000,00	1.200.000,00			4.800.000,00
5	SESILIA MARSELINA FERNADES	3.300.000,00	1.200.000,00			4.500.000,00
6	DAMIANUS DONI WUWUR/YULIANA PUKA	1.370.000,00	960.000,00			2.330.000,00
7	YULIUS PAMAN/LAGADONI SAHIDON	1.420.000,00	960.000,00			2.380.000,00
8	BERNADUS LEKI Y. MARANG	510.000,00				510.000,00
9	THOMAS L. TELUMA	2.880.000,00				2.880.000,00
10	MAGDALENA EDA DAWAN	2.880.000,00	960.000,00			3.840.000,00
11	FATMAWATI RATULOLI	2.200.000,00	900.000,00			3.100.000,00
12	AGNES KOLIN	1.800.000,00	900.000,00			2.700.000,00
13	ANA MARGOTA LEIN	1.000.000,00				1.000.000,00
14	YOSEP SIHU HURINT	1.600.000,00	900.000,00			2.500.000,00
15	YULIANA PELONI KERANS/ANTONIUS YASMIN	1.260.000,00			420.000,00	840.000,00
16	SIMON K. KEDANG	420.000,00				420.000,00
17	MELKIOR KOLI BARAN	420.000,00				420.000,00
18	YAKOBUS P. DA CUNHA	420.000,00				420.000,00
19	STEFANUS L. ARIYANTO	420.000,00	200.000,00			620.000,00
20	FRANSISKA ANJELINA HALA	420.000,00				420.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
21	ALOYSIUS AWE KOLIN	420.000,00				420.000,00
22	YULIANUS MASAN KERANS	420.000,00				420.000,00
23	PAULINA DJEBE KEDANG	420.000,00				420.000,00
24	CHRISSOSTOMUS A.W PAROPESA	1.260.000,00				1.260.000,00
25	IRENE MEGARIA	420.000,00				420.000,00
26	THERESIA RENSA DOREN	420.000,00				420.000,00
27	YOHANES ROMA TANI	420.000,00				420.000,00
28	VALIANTO REGIALDUS DJAWA	420.000,00				420.000,00
29	MARIA NONA MINCE	840.000,00	420.000,00			1.260.000,00
30	YOHANA BOTA WERUING	420.000,00				420.000,00
31	MARIA TELUMA	420.000,00				420.000,00
32	IMAM GOSALI	420.000,00				420.000,00
33	YOHANA DE ORNAY	420.000,00				420.000,00
34	MARIA GORETI GUNU KOTEN	840.000,00				840.000,00
35	KLOWER	840.000,00				840.000,00
36	KHOLIUDIN	420.000,00				420.000,00
37	SUPRIYADI	840.000,00				840.000,00
38	PETRUS LEKI KEDANG	1.200.000,00				1.200.000,00
39	THERESIA WALEN KOTEN/NURHAYATI	1.920.000,00				1.920.000,00
40	STEFANUS DAMIANUS BAUR	900.000,00				900.000,00
41	NORWAYU RONADI	630.000,00	420.000,00			1.050.000,00
42	MARIUS BLIKO LEREK	840.000,00	420.000,00			1.260.000,00
43	SABINUS NIRON	480.000,00	420.000,00			900.000,00
44	SAHARUL	210.000,00	420.000,00			630.000,00
45	KAIMUDIN	210.000,00				210.000,00
46	HIDAYATULAH JALIL	210.000,00				210.000,00
47	KARTIN BEOANG	1.200.000,00				1.200.000,00
48	MONIKA LEDO PAPANG	960.000,00	560.000,00			1.520.000,00
49	YULIANA PUKA	960.000,00				960.000,00
50	MARIA BAREK MARANG	960.000,00	960.000,00			1.920.000,00
51	THERESIA YUNARTI	320.000,00	200.000,00		320.000,00	200.000,00
52	YUNUS WIWE TUHI	420.000,00	420.000,00			840.000,00
53	DARIUS MAU HIDJA	420.000,00				420.000,00
54	MARSELINA AGNES T. KERAF	420.000,00	420.000,00			840.000,00
55	JAFAR	420.000,00	420.000,00			840.000,00
56	SUMARTINI/DEWI SANTI BEDU		900.000,00			900.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
57	DONATUS JAGONG		420.000,00			420.000,00
58	YUNIA RAJA LEDE		420.000,00			420.000,00
c	**KIOS PERMANEN PASAR BORU**	**13.420.000,00**	**6.740.000,00**	**-**	**2.280.000,00**	**17.880.000,00**
1	SLAMET HAYADI	720.000,00				720.000,00
2	NURASIT	720.000,00				720.000,00
3	MARKUS JAWA SOGE	720.000,00				720.000,00
4	PITERSON RAJA TUKA	200.000,00	150.000,00			350.000,00
5	SUWARDI	360.000,00				360.000,00
6	KARBOLA	720.000,00				720.000,00
7	LASARUS LAKA BULIN	270.000,00	320.000,00		70.000,00	520.000,00
8	ELISABETH GORAN	680.000,00	570.000,00			1.250.000,00
9	AHMAD FAUZI	360.000,00	360.000,00			720.000,00
10	IDA YANI MAU	1.440.000,00	720.000,00		200.000,00	1.960.000,00
11	PETRONELA LIWU	720.000,00				720.000,00
12	SARVULUS SAMANG LEWAR	720.000,00				720.000,00
13	KANISIUS JEKO	1.180.000,00	720.000,00		420.000,00	1.480.000,00
14	NUR KOLIS	720.000,00				720.000,00
15	MARIA ESTER MAU	1.080.000,00	490.000,00		720.000,00	850.000,00
16	SON RIWU	200.000,00	360.000,00			560.000,00
17	MARKUS MEKO	320.000,00	420.000,00			740.000,00
18	RAFAEL REDE RADJA	320.000,00				320.000,00
19	ALFONSIUS ALEXANDER	240.000,00				240.000,00
20	ALFONSIUS ALEXANDER	240.000,00	360.000,00			600.000,00
21	GABRIEL LADO JO	200.000,00				200.000,00
22	LISMA	720.000,00			720.000,00	-
23	YOHANES BOSCO YAN	50.000,00	470.000,00		50.000,00	470.000,00
24	ISAK DJARA DJAMI	520.000,00	720.000,00		100.000,00	1.140.000,00
25	JAMAN		360.000,00			360.000,00
26	KANISIUS JEKO		570.000,00			570.000,00
27	LEONAD NAWA		150.000,00			150.000,00
d	**KIOS PERMANEN PASAR WAIWERANG**	**21.134.500,00**	**14.986.000,00**	**-**	**2.990.000,00**	**33.130.500,00**
1	STEFANUS PAJI WARA	108.000,00				108.000,00
2	SITI SIBA	-				-
3	SUMIATI IMRAN	30.000,00				30.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	SYAIFUL BAHRI, SE	186.000,00				186.000,00
5	ADNAN UMAR	888.000,00	390.000,00			1.278.000,00
6	A. HARIS ABDULLAH	228.000,00	390.000,00			618.000,00
7	AHMAD SIMAT	90.000,00				90.000,00
8	MARYUTI	565.500,00	390.000,00			955.500,00
9	HJ. SRI MUNAFIROH	498.000,00	390.000,00			888.000,00
10	H. SAPAR	498.000,00	390.000,00			888.000,00
11	NUR AG. SYARIF	108.000,00				108.000,00
12	NUR WAHID	558.000,00	390.000,00			948.000,00
13	MUSA LAMEN/ZAINAB KADIR	288.000,00				288.000,00
14	SALEHA KASIM	498.000,00	390.000,00			888.000,00
15	AGUSTINA K. INA	498.000,00	390.000,00			888.000,00
16	YULIANA BANA TOKAN	558.000,00	390.000,00			948.000,00
17	RAJI DARMAJI	858.000,00	390.000,00			1.248.000,00
18	SAID AHMAD	798.000,00	390.000,00			1.188.000,00
19	H. SAPARI	240.500,00				240.500,00
20	SOLOR WATAN LEMA	1.123.000,00	390.000,00			1.513.000,00
21	GAFAR ISMAIL	408.000,00				408.000,00
22	NIKOLAUS NOKE LIWU	108.000,00				108.000,00
23	MUHAMAD BUNGA	335.500,00				335.500,00
24	SUNOTO/BAHRUL ALBAK	102.000,00				102.000,00
25	PINA	119.000,00				119.000,00
26	ISMAIL ARSYAD	1.284.000,00				1.284.000,00
27	SOFIA SAMIUN	213.000,00				213.000,00
28	MUHAMAD LUKMAN	268.000,00				268.000,00
29	INTAN BAHARUDIN	1.323.500,00	702.000,00		504.000,00	1.521.500,00
30	H. SYARIFUDIN	994.500,00				994.500,00
31	SITI HASWATI	1.386.000,00	702.000,00		702.000,00	1.386.000,00
32	ARBININGSIH	811.000,00	702.000,00			1.513.000,00
33	MUHAMAD RAMADAN	1.386.000,00	702.000,00		702.000,00	1.386.000,00
34	MALANG BAJO	78.000,00				78.000,00
35	SYAIFUL	-				-
36	M.IKSAN RATULOLY	78.000,00				78.000,00
37	MAS MUIN	468.000,00	390.000,00			858.000,00
38	THALIB H. SALEH	78.000,00				78.000,00
39	M.KASIM ABDRAHMAN/SYAIFUL BAHRI	138.000,00			60.000,00	78.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
40	MUHAMAD YUNUS	663.000,00	390.000,00			1.053.000,00
41	ISMAIL ARSYAD	702.000,00	702.000,00			1.404.000,00
42	H. JUARIAH K	390.000,00	390.000,00		370.000,00	410.000,00
43	H. JUARIAH K	390.000,00	390.000,00			780.000,00
44	SITI SANIA	190.000,00	390.000,00		50.000,00	530.000,00
45	NUR IDA	602.000,00	702.000,00		602.000,00	702.000,00
46	ASMAWATI FARADILAH		500.000,00			500.000,00
47	SAMSIA BINTI MUHHAMAD		936.000,00			936.000,00
48	ZAINAB AHMAD		936.000,00			936.000,00
49	IBRAHIM AHMAD/MALIA		436.000,00			436.000,00
50	NURJANA RAMLI		936.000,00			936.000,00
51	FATIMA AMU/ ZAKARIA		400.000,00			400.000,00
e	**KIOS PERMANEN PASAR WAIWADAN**	**4.360.000,00**	**1.980.000,00**	**-**	**500.000,00**	**5.840.000,00**
1	AMINAH MAMANG	1.300.000,00	900.000,00		400.000,00	1.800.000,00
2	BAUTIKNO	900.000,00				900.000,00
3	SITI HAWA BETHAN	360.000,00				360.000,00
4	HASANUDIN UMAR	360.000,00	360.000,00			720.000,00
5	SITI HABIBA ISMAIL	720.000,00	360.000,00		100.000,00	980.000,00
6	MUHAMAD KADIR	360.000,00				360.000,00
7	DONATUS KOPONG LEYN	360.000,00	360.000,00			720.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	**KIOS DARURAT**	**67.531.000,00**	**32.062.000,00**	**-**	**7.126.000,00**	**92.467.000,00**
a	**KIOS DARURAT PASAR BORU**	**4.169.000,00**	**1.944.000,00**	**-**	**200.000,00**	**5.913.000,00**
1	SUMIYATI KALSUM	1.000.000,00	486.000,00		100.000,00	1.386.000,00
2	SABINA MUDA	864.000,00				864.000,00
3	FRENI LIWU	1.177.000,00	486.000,00		100.000,00	1.563.000,00
4	MONIKA LIWU	842.000,00	486.000,00			1.328.000,00
5	ELISABETH KOTEN	286.000,00	486.000,00			772.000,00
b	**KIOS DARURAT PASAR WAIWADAN**	**41.956.000,00**	**17.038.000,00**	**-**	**2.240.000,00**	**56.754.000,00**
1	ASHARI JAWA	648.000,00				648.000,00
2	LUKMAN JAWA	1.296.000,00	648.000,00			1.944.000,00
3	SUMARNO	1.296.000,00	648.000,00			1.944.000,00
4	MAMA HAR	1.944.000,00	648.000,00			2.592.000,00
5	SITI HAWA BETHAN	1.296.000,00	648.000,00			1.944.000,00
6	FATIMA ATAPUKEN	648.000,00	298.000,00			946.000,00
7	ALI PADANG	648.000,00				648.000,00
8	HANS YAFALA/YOHANES FAFALI	648.000,00				648.000,00
9	MAKSIMUS BEREK	1.446.000,00	648.000,00		150.000,00	1.944.000,00
10	IKRAM BETHAN	1.296.000,00				1.296.000,00
11	SITI MARIAM TUPENG	972.000,00			324.000,00	648.000,00
12	FADLY	324.000,00				324.000,00
13	WAIDA HIJRAD	1.296.000,00				1.296.000,00
14	RAUF SENGAJI	2.376.000,00	1.080.000,00			3.456.000,00
15	SALEM RATULOLY	648.000,00				648.000,00
16	MERI WADAN	1.944.000,00	648.000,00			2.592.000,00
17	SITI NURBAYA	1.944.000,00	648.000,00			2.592.000,00
18	NAIMA M. SUKSIN	2.160.000,00	648.000,00			2.808.000,00
19	EMA DETE	1.944.000,00	648.000,00			2.592.000,00
20	H. SAMSUDIN BIMA	648.000,00	648.000,00			1.296.000,00
21	MARYAM SAID	1.512.000,00				1.512.000,00
22	LAZARUS LUJI	864.000,00				864.000,00
23	FATIMA SAHAR	1.512.000,00	1.080.000,00			2.592.000,00
24	HALUS 2	1.728.000,00	864.000,00			2.592.000,00
25	MUHAMAD KAHIDIR	324.000,00				324.000,00
26	ERNI IBRAHIM	324.000,00	324.000,00			648.000,00
27	MUHAMAD SADIKIN	810.000,00				810.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
28	MAIMUNA	2.430.000,00				2.430.000,00
29	JAINUN	324.000,00				324.000,00
30	AHMAD UMAR	-				-
31	RATNAWATI KALIMBUANG	324.000,00				324.000,00
32	SAMSU ALA	648.000,00	324.000,00			972.000,00
33	RUSTAM RAFAA	2.160.000,00	972.000,00		1.080.000,00	2.052.000,00
34	ERNI BANGUHARI/EMILIA O BANGUHARI	-	324.000,00			324.000,00
35	SYUAIBAN	324.000,00	324.000,00			648.000,00
36	YOHANES FAVALLI L.	448.000,00	432.000,00		100.000,00	780.000,00
37	HABSA BETHAN	448.000,00	486.000,00			934.000,00
38	ARJUNI	324.000,00	324.000,00			648.000,00
39	ARJUNI	324.000,00	324.000,00		200.000,00	448.000,00
40	NURDIANA	548.000,00	432.000,00			980.000,00
41	ROBINSON	324.000,00	324.000,00			648.000,00
42	MARYAM BETHAN	548.000,00	648.000,00		100.000,00	1.096.000,00
43	BUNADI	286.000,00	486.000,00		286.000,00	486.000,00
44	MUHHAMAD WADAN		324.000,00			324.000,00
45	ZAILANI		324.000,00			324.000,00
46	NUKRAN		324.000,00			324.000,00
47	HIRONIMUS KOPONG		540.000,00			540.000,00
c	**KIOS DARURAT PASAR WAIWERANG**	**21.406.000,00**	**13.080.000,00**	**-**	**4.686.000,00**	**29.800.000,00**
1	HALIMA THUSADIA	216.000,00				216.000,00
2	WATI	814.000,00	648.000,00			1.462.000,00
3	HALIMA SAMIUN	514.000,00	300.000,00		348.000,00	466.000,00
4	FATMAWATI AWAL	868.000,00				868.000,00
5	SITI SARAH	1.138.000,00	648.000,00		50.000,00	1.736.000,00
6	UTARI YUNUS	1.300.000,00	648.000,00		400.000,00	1.548.000,00
7	AMIR HAMZAH	548.000,00	648.000,00		400.000,00	796.000,00
8	NAIMAH DARWIS	348.000,00	636.000,00		348.000,00	636.000,00
9	SURADI	-				-
10	AGUSTINI	864.000,00				864.000,00
11	SUKARDI BAHI	864.000,00				864.000,00
12	KHADIJAH C.B	648.000,00	648.000,00			1.296.000,00
13	M. NAJARUDIN	810.000,00	648.000,00		648.000,00	810.000,00
14	MUHAMMAD SIDIK RL	162.000,00				162.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
15	ABUBAKAR SIDIK	378.000,00				378.000,00
16	H. AMRAN	-				-
17	H. MASTURA	-				-
18	USMAN TENA	664.000,00	648.000,00		448.000,00	864.000,00
19	IA MUHAMMAD/MARIANA	-	648.000,00			648.000,00
20	AHMAD KHOTIB	740.000,00	648.000,00		100.000,00	1.288.000,00
21	SLAMET WARTONO	1.458.000,00	648.000,00			2.106.000,00
22	NETI	1.458.000,00	648.000,00			2.106.000,00
23	MANSYUR SAMSUDIN	1.728.000,00	648.000,00			2.376.000,00
24	MANSYUR SAMSUDIN	1.728.000,00	648.000,00			2.376.000,00
25	MASTURA SAMIUN	918.000,00	548.000,00		648.000,00	818.000,00
26	EMILIA ASRA	648.000,00	648.000,00			1.296.000,00
27	H. SITI HASNA ZAINAL	648.000,00	648.000,00			1.296.000,00
28	SYARIFUDIN	648.000,00	648.000,00		648.000,00	648.000,00
29	SITI JAILANI	648.000,00	648.000,00			1.296.000,00
30	HALIMAH MUHAMMAD	648.000,00	580.000,00		648.000,00	580.000,00
3	**LOS BERSEKAT**	**36.150.000,00**	**20.280.000,00**	**-**	**6.340.000,00**	**50.090.000,00**
a	**LOS BERSEKAT PASAR LARANTUKA**	**36.150.000,00**	**20.280.000,00**	**-**	**6.340.000,00**	**50.090.000,00**
1	BASRI	420.000,00				420.000,00
2	JAFAR	1.290.000,00				1.290.000,00
3	YANI SABAN	1.120.000,00	720.000,00		500.000,00	1.340.000,00
4	MUNIPA	720.000,00				720.000,00
5	MASTURA PARAN TERON	2.060.000,00	720.000,00			2.780.000,00
6	RATNA ATANGGAE	720.000,00				720.000,00
7	HAMDI	120.000,00				120.000,00
8	WAODE SAINUR	940.000,00				940.000,00
9	DEWI SANTI BEDDU	1.460.000,00				1.460.000,00
10	BAHRUL	220.000,00				220.000,00
11	MARIAM RATULOLI	2.160.000,00	720.000,00			2.880.000,00
12	AHMAD URIP/ABDUN NAFI	2.160.000,00	720.000,00			2.880.000,00
13	H. ROLA	640.000,00				640.000,00
14	SITI HAWA BELANG	2.160.000,00				2.160.000,00
15	GRAHA ADI SAPUTRA	720.000,00	720.000,00			1.440.000,00
16	REGIL HERI FITRIAN	720.000,00				720.000,00
17	ERNAWATI	1.040.000,00	720.000,00		720.000,00	1.040.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
18	SUYATMI	940.000,00	720.000,00			1.660.000,00
19	LAODE UZU	1.440.000,00	720.000,00			2.160.000,00
20	SITI ROHANI	840.000,00	720.000,00			1.560.000,00
21	ALFONS RAWI	720.000,00			720.000,00	-
22	NONA DAHLIA NIRA	-	720.000,00			720.000,00
23	FAHROL ROZI	1.440.000,00				1.440.000,00
24	IN TOKAN	-				-
25	NASIK	-	720.000,00			720.000,00
26	HJ.KISMATUN	-	720.000,00			720.000,00
27	H. MANRAPI	-				-
28	H. CAWANG SANABIA	940.000,00	720.000,00		500.000,00	1.160.000,00
29	YANI ROHAYANI	1.140.000,00	720.000,00			1.860.000,00
30	SUPRIADI	1.240.000,00	720.000,00			1.960.000,00
31	KHOLIUDIN	720.000,00				720.000,00
32	MARWA	720.000,00				720.000,00
33	HASRIYANI	720.000,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00
34	HERLINA JUFRI	1.040.000,00	720.000,00		720.000,00	1.040.000,00
35	RAHMAT HIDAYAT	-				-
36	SUMANTI BETHAN	1.040.000,00	720.000,00		300.000,00	1.460.000,00
37	BERNADUS N. LEO	420.000,00				420.000,00
38	DOROTUN NAIN	720.000,00			720.000,00	-
39	MINAH	-	720.000,00			720.000,00
40	MUHAMAD AFIFUDIN/MUSRIPAN	1.240.000,00	720.000,00			1.960.000,00
41	NUR WAKIDAH	-	720.000,00			720.000,00
42	NOVRISAL	720.000,00	720.000,00			1.440.000,00
43	RAMLIY MARAJALI	720.000,00			720.000,00	-
44	LUGARDIS SARWATI	720.000,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00
45	ABDULAH		720.000,00			720.000,00
46	SITI NORAHMA		720.000,00			720.000,00
47	KANDIDA THERESIA K LEWAR		120.000,00			120.000,00
48	LALLO		720.000,00			720.000,00
49	DESI		720.000,00			720.000,00
50	MUSRIPAN		720.000,00			720.000,00
C	**SEWAH TANAH**	**263.580.690,00**	**53.699.500,00**	**-**	**9.661.570,00**	**307.618.620,00**
1	**SEWA TANA WAIWERANG**	**104.983.530,00**	**24.079.000,00**	**-**	**6.008.890,00**	**123.053.640,00**

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	H. USMAN ZAIN	80.000,00				80.000,00
2	H. USMAN ZAIN	1.638.000,00	605.000,00			2.243.000,00
3	H. USMAN ZAIN	375.000,00				375.000,00
4	HASAN ABU ZAMAN	800.000,00				800.000,00
5	ABUBAKAR SIDIQ	3.861.000,00	1.650.000,00			5.511.000,00
6	ISMAIL KASIM	10.190.000,00	3.500.000,00			13.690.000,00
7	MUHAMMAD HUSEN	1.540.000,00				1.540.000,00
8	MUHAMMAD SARIF L. R.	1.500.000,00				1.500.000,00
9	UJANG REGA	3.851.000,00				3.851.000,00
10	SITI AMINA MAHMUD	3.300.000,00				3.300.000,00
11	FIRDAUS	3.962.000,00	1.450.000,00			5.412.000,00
12	ENDO BUDIARI, S. SOS	3.520.000,00				3.520.000,00
13	H. HASYIM PUA	500.000,00				500.000,00
14	STEFANUS PAJI WARA	680.000,00				680.000,00
15	MUHAMMAD YUNUS SAHIDE	1.400.000,00				1.400.000,00
16	ARISAL TANJUNG	1.904.000,00	1.150.000,00		687.000,00	2.367.000,00
17	MUHAMMAD HUSNI/ROHAYA HUSNI	936.000,00				936.000,00
18	MUHAMMAD SAMLAN	4.842.500,00				4.842.500,00
19	MALEK REDZUAN M. SIDIK	5.445.000,00			1.645.000,00	3.800.000,00
20	UJANG REGA	5.602.000,00				5.602.000,00
21	AHMAR	90.000,00				90.000,00
22	FITALIS RIANG HEPAT	2.691.000,00				2.691.000,00
23	HANDOYO	-				-
24	HJ. RAUF HUSNI	975.000,00				975.000,00
25	MAHMUD KASIM ROFSANJANI	2.260.000,00	1.750.000,00			4.010.000,00
26	H. SITI JAOHARA / HASAN ABUSAMAN	1.287.000,00				1.287.000,00
27	RAHMAT A. K.	2.574.000,00				2.574.000,00
28	MUHAMAD HASAN BUNGA	8.350.000,00			2.175.000,00	6.175.000,00
29	KUD WAIWERANG	16.385.250,00				16.385.250,00
30	ERDIANTO	-				-
31	MUHAMAD SOFIAN	-				-
32	RAHIMA NUHUR	-	512.500,00			512.500,00
33	MASYUD ABDURAHMAN	3.368.000,00	2.800.000,00			6.168.000,00
34	MARIA VERONIKA E. T LAMOREN	3.003.780,00			1.501.890,00	1.501.890,00
35	MAHMUD SYARIF LAMAROBAK	2.145.000,00				2.145.000,00
36	BUJANG	2.301.000,00	950.000,00			3.251.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
37	DAHLIA GAZALI	3.627.000,00	2.836.500,00			6.463.500,00
38	HENDRIK DEMON DATON		1.925.000,00			1.925.000,00
39	ALI ROSIDI		2.950.000,00			2.950.000,00
40	ENDO GADAFI		2.000.000,00			2.000.000,00
2	**SEWA TANAH (LARANTUKA)**	**14.430.000,00**	**1.350.000,00**	**-**	**-**	**15.780.000,00**
1	YOHANES GANU MARAN S.Pi / DIREKTUR UTAMA PT. MUTIARA TIMUR	14.430.000,00	-			14.430.000,00
2	YOHANA DESYFINA MARANG (PASAR INSPRES -LTK)		500.000,00			500.000,00
3	PATAHUDIN (PASAR INPRES -LTK)		400.000,00			400.000,00
4	MUSTAFA SABAN (PASAR INPRES -LTK)		450.000,00			450.000,00
	-	-	-			-
3	**SEWA TANAH (WAIWADAN)**	**8.547.500,00**	**1.245.000,00**	**-**	**242.200,00**	**9.550.300,00**
1	FIDELIS RABU	279.500,00	670.000,00			949.500,00
2	MUHAMMAD HUSNI	189.000,00				189.000,00
3	DAMIANUS DOSI RESI	800,00				800,00
4	MARTINUS IKE	6.375.000,00				6.375.000,00
5	YOHANES JUANG BOLI	650.000,00				650.000,00
6	MUHAMAD YAMIN MUKHTAR	650.000,00				650.000,00
7	RAIMUNDUS BOLI PEHAN I	141.000,00			141.000,00	-
8	RAIMUNDUS BOLI PEHAN II	31.200,00			31.200,00	-
9	AGUSTINUS BUGA	70.000,00	175.000,00		70.000,00	175.000,00
10	HENDRIKUS DOA KOTEN	161.000,00	400.000,00			561.000,00
	-					
4	**SEWA TANAH (POSTOH)**	**1.788.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.788.000,00**
1	KRISTINA DIAZ	600.000,00				600.000,00
2	SILVESTER DULI TAPOBALI	396.000,00				396.000,00
3	MARSELINUS OLA LOLY	792.000,00				792.000,00
5	**SEWA TANAH (KOTA BARU/LOKEA)**	**29.267.000,00**	**7.455.000,00**	**-**	**-**	**36.722.000,00**
1	A. BERTI LEIMENA	5.823.000,00				5.823.000,00
2	P.G.LAMABAHI,BA	2.760.000,00	1.150.000,00			3.910.000,00
3	MARIA DASION KERAF	1.143.000,00				1.143.000,00
4	P.NAMA TUKAN	-				-
5	PITER PARON	2.304.000,00	960.000,00			3.264.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
6	IRMINA BENGA OLA	2.160.000,00				2.160.000,00
7	YOSEPHAT AMALEGA TOKAN	1.328.000,00	720.000,00			2.048.000,00
8	KOPONG GEWALI KAROLUS	520.000,00				520.000,00
9	YAKOBUS DEWA R. LAMABLAWA	2.280.000,00				2.280.000,00
10	YOSEPH BORO LAMABLAWA	2.700.000,00	1.500.000,00			4.200.000,00
11	SIPRIANUS RONI APOLONARIUS KAPITAN	7.533.000,00	1.185.000,00			8.718.000,00
12	THERESIA MARIA OJAN	124.000,00	1.040.000,00			1.164.000,00
13	ALWAN LESU TOKAN	460.000,00				460.000,00
14	KHAIDIR KOPONG NOTAN	132.000,00				132.000,00
15	ANTONIA BARBARA NELLCHIE		100.000,00			100.000,00
16	ANTONIA BARBARA NELLCHIE		200.000,00			200.000,00
17	M. IKHSAN ABDULLAH		600.000,00			600.000,00
6	**SEWA TANAH (PTW BAO)**	**66.015.350,00**	**6.398.000,00**	**-**	**1.000.000,00**	**71.413.350,00**
1	SUSMIATIN/ TOKO ASKOMTEK	11.801.400,00				11.801.400,00
2	CHRISTOFORUS A.W.PAROPESSA/KANTIN CILLENTUM	5.940.000,00				5.940.000,00
3	OKTAFIANUS KIA RUMA/ KIRANA FOTOCOPY	3.180.000,00				3.180.000,00
4	EMERENTIANA SURAT BALA/ RUMAH MAKAN ORIZT	5.511.000,00				5.511.000,00
5	KOPERASI DEKOPINDA	22.972.950,00				22.972.950,00
6	WAHYU ARTININGSIH/ KANTIN ATANARA	5.200.000,00				5.200.000,00
7	FABIANUS ADI, S. HUT/KOPERASI SILVAN	11.410.000,00			1.000.000,00	10.410.000,00
8	MULIADIN		5.498.000,00			5.498.000,00
9	PETRUS PAI GEO		900.000,00			900.000,00
7	**SEWA TANAH (TAMAN KOTA)**	**29.461.810,00**	**4.650.000,00**	**-**	**1.004.000,00**	**33.107.810,00**
1	NURSIA PUGEL	870.000,00				870.000,00
2	AHMAD ATIM	670.000,00	500.000,00		504.000,00	666.000,00
3	ABDUL AZIZ	1.343.000,00				1.343.000,00
4	FRANSISKUS B.L, ST	2.964.000,00			500.000,00	2.464.000,00
5	ARIA SUPARDI	1.104.000,00	1.200.000,00			2.304.000,00
6	SUPARJO	-				-
7	MUJIONO	-				-
8	ENDANG S. BILI	285.000,00				285.000,00
9	MARIANA SURA	4.056.000,00				4.056.000,00
10	AGUS WIDYANTO	1.840.000,00				1.840.000,00
11	M KASIM	3.095.000,00				3.095.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
12	SOIMAH	904.000,00				904.000,00
13	APRIYANTO	436.000,00				436.000,00
14	DOMINIKUS MINI TEMALURU	8.142.810,00				8.142.810,00
15	MOHAMAD ROCKY SHIDDIQ	1.755.000,00				1.755.000,00
16	SARJONO	104.000,00				104.000,00
17	DESTIAN HARYANI	312.000,00				312.000,00
18	AGUS NOMO	404.000,00	700.000,00			1.104.000,00
19	SUJOKO	553.000,00				553.000,00
20	LAURENSIUS ENZO FERNANDEZ	624.000,00				624.000,00
21	ANITA PARERA		400.000,00			400.000,00
22	SARTONO		500.000,00			500.000,00
23	KRISTINA NATALIA DACOSTA		1.350.000,00			1.350.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
8	**SEWA TANAH (WULANGGITANG)**	**1.562.100,00**	**275.000,00**	**-**	**294.280,00**	**1.542.820,00**
1	DOMINIKUS DEMON BOLENG	208.000,00			126.280,00	81.720,00
2	WILFRIDUS PEKA LOLI	336.000,00			168.000,00	168.000,00
3	FLORENTINA TAPO ASAN	99.000,00				99.000,00
4	ELISABET BATAONA	70.000,00				70.000,00
5	MAGDALENA JADO URAN	532.000,00				532.000,00
6	ANTONIUS HOKENG KELORE	209.100,00				209.100,00
7	MARIA MUDA TOBI	108.000,00				108.000,00
8	BERNADUS BENEDIKTUS		275.000,00			275.000,00
9	**SEWA TANAH (WERI)**	**7.525.400,00**	**8.247.500,00**	**-**	**1.112.200,00**	**14.660.700,00**
1	ALOYSIUS TAMA KOTEN	270.000,00	450.000,00			720.000,00
2	YEREMIAS LATUAN	126.000,00	210.000,00		126.000,00	210.000,00
3	AGNES WERANG	647.000,00	522.500,00			1.169.500,00
4	ROSARIUS BL DEROSARI	336.000,00	280.000,00			616.000,00
5	HENDRIKUS ANTONIUS EMAN TUKAN	225.000,00	375.000,00			600.000,00
6	SYAWALUDIN WERANG	718.200,00	598.500,00		100.000,00	1.216.700,00
7	YOHANES TERONG BATAONA	144.000,00	240.000,00		144.000,00	240.000,00
8	YOHANES NDUN	312.000,00				312.000,00
9	YOSEFINA ROGA	-				-
10	YOHANES B WODA	336.000,00	280.000,00			616.000,00
11	YOSEP DEROSARI	432.000,00	360.000,00			792.000,00
12	ISODORUS KERAF	468.000,00	390.000,00			858.000,00
13	ALOYSIUS DEROSARI	-	6.000,00			6.000,00
14	MARIA HELENA FERNANDES	358.800,00	199.000,00			557.800,00
15	THOMAS DEMON	144.000,00			144.000,00	-
16	YOHANES ALWAN MUKIN	252.000,00	210.000,00			462.000,00
17	MARSELINUS AUR	81.000,00	129.000,00			210.000,00
18	MARSELINUS LIAT HAYON	210.000,00	350.000,00			560.000,00
19	FRANSISKUS BL DEROSARI	273.000,00	455.000,00			728.000,00
20	YAKOBUS LADO KOTEN	144.000,00	240.000,00			384.000,00
21	PAULUS PEHAN ALI	277.200,00	462.000,00			739.200,00
22	YUSTINA DJAWA DA SILVA	273.000,00	455.000,00			728.000,00
23	PAULUS SUGO AMA	241.200,00			241.200,00	-
24	ELISABET LERA KOLIN	105.000,00	175.000,00		105.000,00	175.000,00
25	KATARINA MA FERNANDEZ	180.000,00	300.000,00			480.000,00

No	Uraian	Saldo Piutang 31-12-2023 (Audited)	Mutasi Tahun 2024			Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
			Tambah	Kurang	Pelunasan	
1	*2*	*7*	*4*	*5*	*6*	*7*
26	MARIA MEME DA SILVA	264.000,00	440.000,00			704.000,00
27	ANTONIUS AFAN JAWAN	81.000,00	135.000,00			216.000,00
28	YOSEFINA BENEDIKTUS	144.000,00	240.000,00			384.000,00
29	ANDREAS BEDA SAKE	252.000,00			252.000,00	-
30	KRSITOFORUS KEBAN	231.000,00	385.000,00			616.000,00
31	MARIA URE ATAPUHO		240.000,00			240.000,00
32	F.X DEROSARI		120.000,00			120.000,00
33	ANDREAS KEHI		500,00			500,00
D	**PIUTANG MENARA TELEKOMUNIKASI**	**61.090.700,00**	**-**	**-**	**38.480.000,00**	**22.610.700,00**
1	TELKOMSEL					-
2	PROTELINDO	38.485.800,00			38.480.000,00	5.800,00
3	INDOSAT	-				-
4	DAYA MITRA	22.604.900,00				22.604.900,00
5	TOWER BERSAMA					-
6	PT SOLUSINDO KREASI PRATAMA					
JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI		**1.275.588.678,00**	**325.771.500,00**	**-**	**105.905.570,00**	**1.495.454.608,00**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Umur Piutang Pajak Tahun 2024				Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PIUTANG PAJAK :						
1	**Piutang Pajak Hotel**	**14.662.152,00**	**-**	**-**	**-**	**14.662.152,00**
1	Hotel Kartika	2.610.000,00	-	-	-	2.610.000,00
2	Hotel Tresna	2.650.952,00	-	-	-	2.650.952,00
3	Hotel Rullis	1.652.200,00	-	-	-	1.652.200,00
4	Kurnia Sederhana	2.188.450,00	-	-	-	2.188.450,00
5	Hotel Flores Cottage	505.000,00	-	-	-	505.000,00
6	Hotel Yonatha	800.000,00	-	-	-	800.000,00
7	Hotel Kusuma	550.000,00	-	-	-	550.000,00
8	Hotel Budi Luhur	600.000,00	-	-	-	600.000,00
9	Losmen Sahabat	461.550,00	-	-	-	461.550,00
10	Hotel Asri Lamanepa	1.007.500,00	-	-	-	1.007.500,00
11	Hotel Taufik	992.500,00	-	-	-	992.500,00
12	Hotel Pelangi	644.000,00	-	-	-	644.000,00
2	**Piutang Pajak Restoran/Rumah Makan**	**83.486.600,00**	**-**	**-**	**-**	**83.486.600,00**
1	Minang Surya/Larantuka	5.650.000,00	-	-	-	5.650.000,00
2	Sri Solo	7.300.400,00	-	-	-	7.300.400,00
3	Sederhana II	10.000.400,00	-	-	-	10.000.400,00
4	Nirwana	1.600.000,00	-	-	-	1.600.000,00
5	Gempar	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
6	Singgalang	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
7	Lestari	1.313.500,00	-	-	-	1.313.500,00
8	Citra Sena	275.000,00	-	-	-	275.000,00
9	Arizona	6.960.000,00	-	-	-	6.960.000,00
10	Elsade	3.600.000,00	-	-	-	3.600.000,00
11	Siang Malam	3.620.000,00	-	-	-	3.620.000,00
12	Fortuna	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
13	Meting Doeng	584.000,00	-	-	-	584.000,00
14	Sate Solo	6.100.000,00	-	-	-	6.100.000,00

No	Uraian	Umur Piutang Pajak Tahun 2024				Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
15	Sari Rasa	3.256.800,00	-	-	-	3.256.800,00
16	Maya Sari	4.644.000,00	-	-	-	4.644.000,00
17	Minang Surya Baru	1.750.000,00	-	-	-	1.750.000,00
18	Minang Salyo Waiwerang	500.000,00	-	-	-	500.000,00
19	Surya Pertiwi	3.615.300,00	-	-	-	3.615.300,00
20	Boru Indah	2.350.000,00	-	-	-	2.350.000,00
21	Ampera	3.920.000,00	-	-	-	3.920.000,00
22	Lumayan Sari	2.100.000,00	-	-	-	2.100.000,00
23	Berkah	100.000,00	-	-	-	100.000,00
24	Pondok Baru I	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00
25	Pondok Baru II	200.000,00	-	-	-	200.000,00
26	Mie Ayam (Sumadi)	2.160.000,00	-	-	-	2.160.000,00
27	Bakso Bayuwangi	226.000,00	-	-	-	226.000,00
28	Zidal	1.516.000,00	-	-	-	1.516.000,00
29	Kantin Batuata	468.400,00	-	-	-	468.400,00
30	Soto Makasar	2.176.800,00	-	-	-	2.176.800,00
31	Telago Indah	100.000,00	-	-	-	100.000,00
32	Bakso Amor	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
3	**Pajak Galian Golongan C**	**121.356.414,00**	**-**	**-**	**-**	**121.356.414,00**
A	**DPPKAD**	**23.585.667,00**	**-**	**-**	**-**	**23.585.667,00**
1	PT. Guma Era	1.829.520,00	-	-	-	1.829.520,00
2	CV. Satu Putra	555.165,00	-	-	-	555.165,00
3	PT. Citra Mandiri Konstruksi	6.021.412,00	-	-	-	6.021.412,00
4	Santoso	591.535,00	-	-	-	591.535,00
5	CV. Elshadae Mulia Kupang	2.399.625,00	-	-	-	2.399.625,00
6	Liany Tanzil	3.603.320,00	-	-	-	3.603.320,00
7	Surya Nusa	50.045,00	-	-	-	50.045,00
8	Surya Nusa	50.045,00	-	-	-	50.045,00
9	DS. Kolaka, Tanjung Bunga	1.601.500,00	-	-	-	1.601.500,00
10	DS.Bloto	766.500,00	-	-	-	766.500,00
11	DS. Waiwadan, Adonara Barat	1.176.000,00	-	-	-	1.176.000,00
12	DS. Tapobali Kec. Adonara Timur	1.647.000,00	-	-	-	1.647.000,00
13	DS. Kolaka, Haru Kec. Ile Boleng	1.647.000,00	-	-	-	1.647.000,00

No	Uraian	Umur Piutang Pajak Tahun 2024				Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
14	DS. Waiwadan, Adonara Barat	1.647.000,00	-	-	-	1.647.000,00
B	**Dinas PU Kab. Flores Timur**	**42.490.841,00**	**-**	**-**	**-**	**42.490.841,00**
1	PT. Protelindo	1.250.279,00	-	-	-	1.250.279,00
2	CV. Govinda	353.850,00	-	-	-	353.850,00
3	CV. Govinda	353.850,00	-	-	-	353.850,00
4	CV. Yong Kudi Group	897.885,00	-	-	-	897.885,00
5	CV. Warni Bersaudara	5.317.785,00	-	-	-	5.317.785,00
6	PT. Maha Karia Tunggal	15.853.300,00	-	-	-	15.853.300,00
7	CV. Citra Bahari	464.400,00	-	-	-	464.400,00
8	CV. Kode Nore	1.989.555,00	-	-	-	1.989.555,00
9	CV. Yudistira Teknik	3.069.495,00	-	-	-	3.069.495,00
10	CV. Dwi Padma	1.136.255,00	-	-	-	1.136.255,00
11	CV. Yudistira Teknik	3.179.020,00	-	-	-	3.179.020,00
12	CV. Pesona Flotim	1.157.565,00	-	-	-	1.157.565,00
13	CV. Krembangan Jaya	2.552.440,00	-	-	-	2.552.440,00
14	CV. Putra Bunga Lawan	13.456,00	-	-	-	13.456,00
15	CV. Batara Indah	1.191.510,00	-	-	-	1.191.510,00
16	CV. Yudistira Tekhnik	3.347.580,00	-	-	-	3.347.580,00
17	CV. Angelica Lewoleba	312.738,00	-	-	-	312.738,00
18	CV. Antika	49.878,00	-	-	-	49.878,00
C	**Dinas Pekerjaan Umum Propinsi**	**11.048.974,00**	**-**	**-**	**-**	**11.048.974,00**
1	CV. Warni Bersaudara	2.414.820,00	-	-	-	2.414.820,00
2	CV. Halona	8.634.154,00	-	-	-	8.634.154,00
D	**Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**	**8.821.875,00**	**-**	**-**	**-**	**8.821.875,00**
1	Kepsek SDK Wailolong	1.829.520,00	-	-	-	1.829.520,00
2	Kepsek SDK Kokang	999.755,00	-	-	-	999.755,00
3	Kepsek SDK Kenari Blolong	1.109.687,00	-	-	-	1.109.687,00
4	Kepsek SDK Watoone	1.275.912,00	-	-	-	1.275.912,00
5	Kepsek SDK Lewokung	136.650,00	-	-	-	136.650,00
6	Kepsek SDI Nubalema	1.016.480,00	-	-	-	1.016.480,00
7	Kepsek SMK Bunga Tanjung	1.182.455,00	-	-	-	1.182.455,00

No	Uraian	Umur Piutang Pajak Tahun 2024				Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
8	Kepsek SMA Surya Mandala	132.720,00	-	-	-	132.720,00
9	Kepsek SMPS Lamatwelu Adonara Timur	607.255,00	-	-	-	607.255,00
10	CV. Tekno Krajaba	531.441,00	-	-	-	531.441,00
E	**Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka**	**6.932.553,00**	**-**	**-**	**-**	**6.932.553,00**
1	CV. Konindo	281.073,00	-	-	-	281.073,00
2	CV. Hasrat Bahagia	6.651.480,00	-	-	-	6.651.480,00
F	**Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Flores Timur**	**4.307.454,00**	**-**	**-**	**-**	**4.307.454,00**
1	CV. Andi Pratama	2.942.727,00	-	-	-	2.942.727,00
2	CV. Mustika Budi	1.364.727,00	-	-	-	1.364.727,00
G	**Dinas Sosial dan Nakertrans Kab. Flores Timur**	**644.003,00**	**-**	**-**	**-**	**644.003,00**
1	Desa Lewoawang	211.503,00	-	-	-	211.503,00
2	Desa Hokeng Jaya	432.500,00	-	-	-	432.500,00
H	**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Flores Timur**	**512.110,00**	**-**	**-**	**-**	**512.110,00**
1	CV. Atflonsia	512.110,00	-	-	-	512.110,00
I	**Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Flores Timur**	**11.982.000,00**	**-**	**-**	**-**	**11.982.000,00**
1	Kelompok Tani Titehena	582.000,00	-	-	-	582.000,00
2	Phoktan Pupu Gelekat	5.700.000,00	-	-	-	5.700.000,00
3	Poktan Sinar Harapan	5.700.000,00	-	-	-	5.700.000,00
J	**POLRES FLOTIM**	**5.452.295,00**	**-**	**-**	**-**	**5.452.295,00**
1	Polres Flotim	5.452.295,00	-	-	-	5.452.295,00
K	**BKPP**	**919.919,00**	**-**	**-**	**-**	**919.919,00**
1	CV. De Nasconselos	819.829,00	-	-	-	819.829,00
2	CV. Surya Nusa	50.045,00	-	-	-	50.045,00
3	CV. Surya Nusa	50.045,00	-	-	-	50.045,00

No	Uraian	Umur Piutang Pajak Tahun 2024				Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
L	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	**70.025,00**	**-**	**-**	**-**	**70.025,00**
	CV. Ile Boleng Sakti	70.025,00	-	-	-	70.025,00
N	**Rumah Tinggal**	**4.588.698,00**	**-**	**-**	**-**	**4.588.698,00**
1	Usman Ali/Terong Adonara Timur	484.745,00	-	-	-	484.745,00
2	Rahmat C. Bone/Weri Larantuka	1.357.095,00	-	-	-	1.357.095,00
3	Asri/Amagarapati Larantuka	39.018,00	-	-	-	39.018,00
4	Yanti Yupira/Sarotari Larantuka	818.480,00	-	-	-	818.480,00
5	Karolus Bande/Pohon Bao Larantuka	1.889.360,00	-	-	-	1.889.360,00
4	**Pajak Hiburan**	**2.770.000,00**	**-**	**-**	**-**	**2.770.000,00**
1	Baun Botin	120.000,00	-	-	-	120.000,00
2	Lastri	800.000,00	-	-	-	800.000,00
3	Meting Doeng	1.850.000,00	-	-	-	1.850.000,00
5	**Pajak Reklame**	**214.884.665,00**	**291.049.250,00**	**205.369.467,00**	**203.796.326,00**	**915.099.708,00**
1	Kecamatan Larantuka	90.613.665,00	141.794.500,00	79.858.967,00	103.748.003,00	416.015.135,00
2	Kecamatan Ile Bura	674.500,00	2.132.000,00	2.132.000,00	1.300.000,00	6.238.500,00
3	Kecamatan Titehena	5.611.000,00	9.525.000,00	3.068.000,00	3.811.000,00	22.015.000,00
4	Kecamatan Demon Pagong	921.000,00	1.560.000,00	624.000,00	728.000,00	3.833.000,00
5	Kecamatan Lewolema	2.401.500,00	260.000,00	3.692.000,00	1.040.000,00	7.393.500,00
6	Kecamatan Ile Mandiri	8.693.500,00	7.436.000,00	4.888.000,00	4.992.000,00	26.009.500,00
7	Kecamatan Tanjung Bunga	3.206.500,00	3.952.000,00	2.962.000,00	2.912.000,00	13.032.500,00
8	Kecamatan Wulanggitang	1.405.500,00	5.706.000,00	5.980.000,00	5.200.000,00	18.291.500,00
9	Kecamatan Adonara Timur	34.283.500,00	29.827.000,00	18.181.000,00	10.106.500,00	92.398.000,00
10	Kecamatan Ile Boleng	1.242.500,00	5.802.000,00	4.123.000,00	3.655.000,00	14.822.500,00
11	Kecamatan Witihama	5.341.500,00	5.758.000,00	4.480.000,00	4.324.000,00	19.903.500,00
12	Kecamatan Klubagolit	4.031.500,00	6.032.000,00	4.628.000,00	4.680.000,00	19.371.500,00
13	Kecamatan Adonara	2.570.500,00	1.976.000,00	884.000,00	884.000,00	6.314.500,00
14	Kecamatan Adonara Tengah	3.449.000,00	2.974.000,00	1.768.000,00	1.731.000,00	9.922.000,00
15	Kecamatan Wotan Ulumado	6.077.500,00	5.720.000,00	3.120.000,00	3.224.000,00	18.141.500,00
16	Kecamatan Adonara Barat	6.870.500,00	11.812.000,00	7.726.000,00	7.674.000,00	34.082.500,00
17	Kecamatan Solor Timur	3.376.500,00	1.612.000,00	1.040.000,00	572.000,00	6.600.500,00

No	Uraian	Umur Piutang Pajak Tahun 2024				Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
18	Kecamatan Solor Barat	5.308.500,00	12.942.000,00	6.404.000,00	5.780.000,00	30.434.500,00
19	Kecamatan Solor Selatan	1.019.000,00	572.000,00	884.000,00	364.000,00	2.839.000,00
20	Spanduk/umbul-umbul/Kain/Baliho/Shop Shine	21.014.500,00	7.673.000,00	23.368.250,00	10.449.100,00	62.504.850,00
21	Melekat/sticker	4.562.500,00	481.250,00	481.250,00	-	5.525.000,00
22	Mobil Box/Berjalan	2.210.000,00	5.190.000,00	4.505.000,00	-	11.905.000,00
23	Bilboard	-	16.317.500,00	13.992.000,00	16.267.000,00	46.576.500,00
24	Neon Light	-	3.995.000,00	6.580.000,00	10.354.723,00	20.929.723,00
6	**Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	**3.869.184.307,00**	**1.588.138.612,00**	**1.321.186.057,00**	**2.342.174.738,59**	**9.120.683.714,59**
1	Piutang PBB P2 (Pajak Pusat yang dialihkan ke Daerah Tahun 1996 - 2013)	1.253.797.998,00	-	-	-	1.253.797.998,00
2	Piutang PBB P2 Tahun 2014	309.250.158,00	-	-	-	309.250.158,00
3	Piutang PBB P2 Tahun 2015	375.488.126,00	-	-	-	375.488.126,00
4	Piutang PBB P2 Tahun 2016	292.659.697,00	-	-	-	292.659.697,00
5	Piutang PBB P2 Tahun 2017	290.220.969,00	-	-	-	290.220.969,00
6	Piutang PBB P2 Tahun 2018	421.317.474,00	-	-	-	421.317.474,00
7	Piutang PBB P2 Tahun 2019	457.170.506,00	-	-	-	457.170.506,00
8	Piutang PBB P2 Tahun 2020	469.279.379,00	-	-	-	469.279.379,00
9	Piutang PBB P2 Tahun 2021	-	905.779.776,00	-	-	905.779.776,00
10	Piutang PBB P2 Tahun 2022	-	682.358.836,00	-	-	682.358.836,00
11	Piutang PBB P2 Tahun 2023	-	-	1.321.186.057,00	-	1.321.186.057,00
12	Piutang PBB P2 Tahun 2024	-	-	-	2.342.174.738,59	2.342.174.738,59
7	**Piutang Air Bawa Tanah**	**3.945.400,00**	**18.529.400,00**	**12.252.800,00**	**15.572.600,00**	**50.300.200,00**
1	PT. Okishin Flores	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	2.800.000,00
2	Hotel Tresna	5.200,00	518.400,00	259.200,00	259.200,00	1.042.000,00
3	Aloysius Ritan	790.400,00	1.790.400,00	1.790.400,00	1.790.400,00	6.161.600,00
4	Nikolaus Djogo Dias Viera	665.600,00	1.331.200,00	665.600,00	665.600,00	3.328.000,00
5	Elias Lili Kleden	-	3.328.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00	6.656.000,00
6	Petrus Bai Bego	-	499.200,00	499.200,00	499.200,00	1.497.600,00
7	Achmad Raihan	-	432.000,00	-	432.000,00	864.000,00
8	Fransiskus Uja Kotan	1.004.000,00	5.408.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00	11.820.000,00
9	Petrus Ojan	80.200,00	1.664.200,00	-	-	1.744.400,00
10	Aji Abdullah	-	320.000,00	-	768.000,00	1.088.000,00

No	Uraian	Umur Piutang Pajak Tahun 2024				Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
11	PT. Tigate Tress Indonesia	-	1.170.000,00	-	1.170.000,00	2.340.000,00
12	Imaculata Lili Sunur	-	365.600,00	665.600,00	665.000,00	1.696.200,00
13	Hotel Rulis	-	86.400,00	86.400,00	-	172.800,00
14	Aditya Putra Poernomo (Hotel Sunrise)	-	216.000,00	216.000,00	216.000,00	648.000,00
15	HENDRIKUS NAREK USEN	-	-	332.800,00	332.800,00	665.600,00
16	AMIR SARIFUDIN (ORING BELE)	-	-	1.705.600,00	1.705.600,00	3.411.200,00
17	ROFINUS DONI BOLI	-	-	1.664.000,00	1.664.000,00	3.328.000,00
18	LA ZUARDIN	-	-	-	1.036.800,00	1.036.800,00
	JUMLAH PIUTANG PAJAK	**4.310.289.538,00**	**1.897.717.262,00**	**1.538.808.324,00**	**2.561.543.664,59**	**10.308.358.788,59**
	Prosentase (%)	100%	50%	10%	0,5%	
	Penyisihan	**4.310.289.538,00**	**948.858.631,00**	**153.880.832,40**	**12.807.718,32**	**5.425.836.719,72**
	Piutang Neto	**-**	**948.858.631,00**	**1.384.927.491,60**	**2.548.735.946,27**	**4.882.522.068,87**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Uraian	Umur Piutang Retribusi Tahun 2024				Saldo Piutang 31-12-2024 (Audited)
		Macet	Diragukan	Kurang Lancar	Lancar	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PIUTANG RETRIBUSI :						
A	**PIUTANG SEWA GEDUNG DAN BANGUNAN**	**605.603.788,00**	**113.744.000,00**	**-**	**-**	**719.347.788,00**
1	**Ruko Kompleks Pertokoan Sebelah Barat Lantai Bawah (Blok A)**	**56.616.000,00**	**10.984.000,00**	**-**	**-**	**67.600.000,00**
1	Hasan Bazri (Rmh Tinggal)	900.000,00	-	-	-	900.000,00
2	Hasan Basri (Kios)	2.000.000,00	3.000.000,00	-	-	5.000.000,00
3	Win Chandra	2.260.000,00	-	-	-	2.260.000,00
4	NURMAN JUMADI / YULIANA S.	5.854.000,00	-	-	-	5.854.000,00
5	HIDAYAT M. AMIN	4.342.000,00	-	-	-	4.342.000,00
6	SYAFRI. S	7.400.000,00	-	-	-	7.400.000,00
7	MANSYUR ROHIM	6.992.000,00	4.992.000,00	-	-	11.984.000,00
8	SESILIA ROSALINDA M.	7.492.000,00	-	-	-	7.492.000,00
9	FRANSISKUS PAJI LETOR	14.384.000,00	2.992.000,00	-	-	17.376.000,00
10	HENDRIKUS GEGE TUKAN	1.664.000,00	-	-	-	1.664.000,00
11	EVA ROSA	3.328.000,00	-	-	-	3.328.000,00
2	**Ruko Kompleks Pertokoan Sebelah Barat Lantai Atas (Blok B)**	**213.684.000,00**	**48.916.000,00**	**-**	**-**	**262.600.000,00**
1	YOSEP SANI BETHAN	17.616.000,00	-	-	-	17.616.000,00
2	Adolfus Bethan	6.192.000,00	-	-	-	6.192.000,00
3	Laurentiana M. DVG	840.000,00	-	-	-	840.000,00
4	Hamatun	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
5	Mulfi Abdul Ajiz	6.760.000,00	-	-	-	6.760.000,00
6	Nurdin Bin Acong	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
7	Ali Nurdiansah	12.492.000,00	2.500.000,00	-	-	14.992.000,00
8	Gregorius B. Koten	7.680.000,00	-	-	-	7.680.000,00
9	Said Ali Alatas	940.000,00	-	-	-	940.000,00
10	HENDRI BIN HASAN BASRI	25.468.000,00	-	-	-	25.468.000,00
11	RINA SALFIA	27.480.000,00	4.000.000,00	-	-	31.480.000,00

12	WIR CHANDRA	8.488.000,00	2.488.000,00	-	-	10.976.000,00
13	HAMATUN	10.536.000,00	7.488.000,00	-	-	18.024.000,00
14	AJI ABDULLAH	16.976.000,00	14.976.000,00	-	-	31.952.000,00
15	MULFI ABDUL AJIZ	16.000.000,00	7.488.000,00	-	-	23.488.000,00
16	ZUKARDI	12.076.000,00	3.492.000,00	-	-	15.568.000,00
17	Bakri Sani Tanjung	6.952.000,00	-	-	-	6.952.000,00
18	Buyung Boi	5.400.000,00	-	-	-	5.400.000,00
19	Nurhayati	3.844.000,00	-	-	-	3.844.000,00
20	Rahmat Naufal Agus	10.476.000,00	3.492.000,00	-	-	13.968.000,00
21	Syafardi Tanjung	4.992.000,00	-	-	-	4.992.000,00
22	Asman	10.476.000,00	2.992.000,00	-	-	13.468.000,00
3	**Ruko Pasar Daerah Larantuka (Blok C)**	**80.514.000,00**	**14.722.000,00**	**-**	**-**	**95.236.000,00**
1	Yoh. K. Payong	2.520.000,00	-	-	-	2.520.000,00
2	Yoh. Vianey N. Watun	13.352.000,00	-	-	-	13.352.000,00
3	Yoseph Sadipun	2.560.000,00	-	-	-	2.560.000,00
4	Patahudin	3.940.000,00	-	-	-	3.940.000,00
5	Mapi	740.000,00	-	-	-	740.000,00
6	Al Hafid Kota	11.956.000,00	3.368.000,00	-	-	15.324.000,00
7	Ibnu Harista Syarifudin	14.156.000,00	3.618.000,00	-	-	17.774.000,00
8	Yulidar	940.000,00	1.000.000,00	-	-	1.940.000,00
9	NILAWATI	3.930.000,00	-	-	-	3.930.000,00
10	OYA DOMINIKA PUARA	3.864.000,00	-	-	-	3.864.000,00
11	ANDREAS ADI HEKIN	5.444.000,00	-	-	-	5.444.000,00
12	USMAN ABDUL MALIK	9.456.000,00	2.368.000,00	-	-	11.824.000,00
13	Karbola	1.864.000,00	-	-	-	1.864.000,00
14	Koperasi Usaha Jaya	1.864.000,00	-	-	-	1.864.000,00
15	MUNIRA	2.564.000,00	-	-	-	2.564.000,00
16	JOSEPH PIUS DIAS ALFI	1.364.000,00	4.368.000,00	-	-	5.732.000,00
4	**Ruko Pasar Daerah Larantuka (Blok D)**	**46.248.428,00**	**2.744.000,00**	**-**	**-**	**48.992.428,00**
1	Noviandri	9.268.000,00	-	-	-	9.268.000,00
2	Ali Amin Achmad	12.184.428,00	-	-	-	12.184.428,00
3	Gunawan Lewar	2.020.000,00	-	-	-	2.020.000,00
4	Oktavianus F. Lamatwelu	1.440.000,00	-	-	-	1.440.000,00
5	Susmiatin	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
6	Kristoforus Para Pessa	1.680.000,00	-	-	-	1.680.000,00
7	Siti Kalsum Masriki	11.386.000,00	2.744.000,00	-	-	14.130.000,00

8	Ujang	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
9	Syafrudin K. Bethan	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00
10	Kristoforus Yakobus Bao	2.070.000,00	-	-	-	2.070.000,00
5	**Ruko Pasar Daerah Larantuka (Blok E)**	**52.664.000,00**	**4.368.000,00**	**-**	**-**	**57.032.000,00**
1	Junaidi	5.244.000,00	-	-	-	5.244.000,00
2	Helen C. P. Bethan	2.940.000,00	-	-	-	2.940.000,00
3	Stefanus Bala Baon	4.880.000,00	-	-	-	4.880.000,00
4	Kamarudin	6.058.000,00	-	-	-	6.058.000,00
5	H.SALLY DOMAKING	6.968.000,00	-	-	-	6.968.000,00
6	WILHELMUS WAJO KELEN	11.456.000,00	4.368.000,00	-	-	15.824.000,00
7	H.HUSEN MUKIN	6.832.000,00	-	-	-	6.832.000,00
8	Horonatus A. Nimu	2.422.000,00	-	-	-	2.422.000,00
9	Zukri Syahdun	3.864.000,00	-	-	-	3.864.000,00
10	ARDIANTO	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
6	**Ruko Pasar Daerah Larantuka (Blok F)**	**78.192.000,00**	**13.290.000,00**	**-**	**-**	**91.482.000,00**
1	Cristina Floryana Tukan	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
2	Sulastri N. Ahmad	11.456.000,00	3.368.000,00	-	-	14.824.000,00
3	H. Syarifudin S. Bethan	15.796.000,00	3.868.000,00	-	-	19.664.000,00
4	Ridwan Achmad	14.490.000,00	868.000,00	-	-	15.358.000,00
5	Kaliktus S. Helan	13.796.000,00	-	-	-	13.796.000,00
6	Jefri Maromon	7.834.000,00	-	-	-	7.834.000,00
7	H. Loba AT	500.000,00	-	-	-	500.000,00
8	SAYID ALI ALATAS	4.728.000,00	-	-	-	4.728.000,00
9	Sri Satia Aslan	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
10	Sri Muryani	1.864.000,00	2.368.000,00	-	-	4.232.000,00
11	Afian Bertha Nage	5.728.000,00	-	-	-	5.728.000,00
12	USMAN MUHAMMAD	-	2.818.000,00	-	-	2.818.000,00
7	**Taman Kota Larantuka**	**77.685.360,00**	**18.720.000,00**	**-**	**-**	**96.405.360,00**
1	Rebon Muda	360.000,00	-	-	-	360.000,00
2	Dede Sabu	240.000,00	-	-	-	240.000,00
3	Mat Atim	600.000,00	-	-	-	600.000,00
4	Budiono/Mudiono	400.000,00	-	-	-	400.000,00
5	Dedek	600.000,00	-	-	-	600.000,00
6	Endang S. Bili	300.000,00	-	-	-	300.000,00
7	Miswanto	488.520,00	-	-	-	488.520,00

8	Agus Nomo	530.840,00	-	-	-	530.840,00
9	Sujoko	600.000,00	-	-	-	600.000,00
10	Giman/Sugiman	300.000,00	-	-	-	300.000,00
11	VERONIKA PERTIWI / KANTIN BATU ATA	9.186.000,00	3.744.000,00	-	-	12.930.000,00
12	NOVIANUS LOLI DULI	6.124.000,00	-	-	-	6.124.000,00
13	FRANSISKUS LEIN	8.436.000,00	-	-	-	8.436.000,00
14	MARIANA SURA	12.236.000,00	-	-	-	12.236.000,00
15	EMANUEL V. EMBU R. DEROZARIO	8.436.000,00	-	-	-	8.436.000,00
16	Lorenso Enso Fernandez	4.248.000,00	-	-	-	4.248.000,00
17	Ngatini	3.624.000,00	-	-	-	3.624.000,00
18	Dominikus Mini Temaluru	7.728.000,00	-	-	-	7.728.000,00
19	Maria Veronika E.T Lamoren	13.248.000,00	-	-	-	13.248.000,00
20	HENDRIK DEMON DATON (WWR)	-	14.976.000,00	-	-	14.976.000,00
B	**PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR :**	**287.549.500,00**	**158.328.000,00**	**-**	**-**	**445.877.500,00**
1	**KIOS PERMANEN**	**197.334.500,00**	**105.986.000,00**	**-**	**-**	**303.320.500,00**
a	**KIOS PERMANEN PASAR LARANTUKA**	**111.870.000,00**	**67.280.000,00**	**-**	**-**	**179.150.000,00**
1	MUHAMAD SALEH	860.000,00	-	-	-	860.000,00
2	H.BOLENG METAK	2.240.000,00	1.080.000,00	-	-	3.320.000,00
3	BEDDU NAHARI/SAINUDDIN	580.000,00	-	-	-	580.000,00
4	HERMANSYAH ASHAR	1.080.000,00	-	-	-	1.080.000,00
5	MUHAMMAD ABDULLAH	480.000,00	-	-	-	480.000,00
6	SITI ACHMAD	680.000,00	-	-	-	680.000,00
7	SUARDI THALIB	380.000,00	-	-	-	380.000,00
8	BANONG	1.180.000,00	-	-	-	1.180.000,00
9	HUSEN MUKIN/SRI MUKIN	1.160.000,00	1.080.000,00	-	-	2.240.000,00
10	AGUSTAN	1.080.000,00	-	-	-	1.080.000,00
11	JUSNY	980.000,00	1.080.000,00	-	-	2.060.000,00
12	AGNES KOLIN	2.160.000,00	1.080.000,00	-	-	3.240.000,00
13	H.MUCHTAR YANGSA	480.000,00	-	-	-	480.000,00
14	PATCHUL MUNIF	660.000,00	580.000,00	-	-	1.240.000,00
15	SUBAIDAH UMAR	3.240.000,00	1.080.000,00	-	-	4.320.000,00
16	SANTOSO	1.310.000,00	1.080.000,00	-	-	2.390.000,00
17	FAHROR ROZI	1.410.000,00	-	-	-	1.410.000,00
18	HIDAYAT AWALUDIN	3.240.000,00	1.080.000,00	-	-	4.320.000,00
19	IMAM GONZALI	2.160.000,00	1.080.000,00	-	-	3.240.000,00
20	WARDI	580.000,00	-	-	-	580.000,00

21	HERLINA LOBA	2.340.000,00	1.080.000,00	-	-	3.420.000,00
22	EDI MAHARDI	580.000,00	-	-	-	580.000,00
23	SITI CHODIDJAH	500.000,00	-	-	-	500.000,00
24	MANSUR	780.000,00	-	-	-	780.000,00
25	MUHRIS	1.740.000,00	1.080.000,00	-	-	2.820.000,00
26	YUSDAR WARDI	1.760.000,00	-	-	-	1.760.000,00
27	ANIS	880.000,00	-	-	-	880.000,00
28	SIKA BIN MUSTAFA	1.810.000,00	-	-	-	1.810.000,00
29	DURIZAL/ANTONIUS ALEKSANDER	2.160.000,00	1.080.000,00	-	-	3.240.000,00
30	HERMAN LOBA	3.240.000,00	1.080.000,00	-	-	4.320.000,00
31	DEWI RATNASARI	2.160.000,00	1.080.000,00	-	-	3.240.000,00
32	SYARIFUDDIN	3.240.000,00	1.080.000,00	-	-	4.320.000,00
33	NONA MUNISA	3.190.000,00	1.080.000,00	-	-	4.270.000,00
34	THERESIA KWAE SODE	1.760.000,00	1.080.000,00	-	-	2.840.000,00
35	H.MARTOYO	1.080.000,00	-	-	-	1.080.000,00
36	GINO RAHARJO	1.080.000,00	-	-	-	1.080.000,00
37	SAFERIUS POMPILU	3.240.000,00	1.080.000,00	-	-	4.320.000,00
38	DONI SOGE IRAWAN	1.860.000,00	1.080.000,00	-	-	2.940.000,00
39	ANI FIDIALIKNA	2.160.000,00	1.080.000,00	-	-	3.240.000,00
40	H.MAHMUD	1.620.000,00	1.080.000,00	-	-	2.700.000,00
41	AHMAD MASRURON	2.940.000,00	1.080.000,00	-	-	4.020.000,00
42	TAUFIQ	2.740.000,00	1.080.000,00	-	-	3.820.000,00
43	EMI MARDIANA WATI	3.240.000,00	1.080.000,00	-	-	4.320.000,00
44	MUKSIN HENTINU	190.000,00	-	-	-	190.000,00
45	SAMATANG / AHMAD	840.000,00	-	-	-	840.000,00
46	LEOALDI	1.380.000,00	840.000,00	-	-	2.220.000,00
47	Hj.MURNIATI	2.520.000,00	840.000,00	-	-	3.360.000,00
48	SAERA URAN	980.000,00	840.000,00	-	-	1.820.000,00
49	BAKRI BEDDU	1.720.000,00	840.000,00	-	-	2.560.000,00
50	H.BASRI	640.000,00	-	-	-	640.000,00
51	H.RABANAI D.GASSING	580.000,00	-	-	-	580.000,00
52	ALI	340.000,00	-	-	-	340.000,00
53	H.SIRAJUDDIN	840.000,00	-	-	-	840.000,00
54	SITI NURLAILA	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
55	SITI AMINAH	1.080.000,00	-	-	-	1.080.000,00
56	NUR HUSANAH	480.000,00	-	-	-	480.000,00
57	H. ALWI	1.080.000,00	-	-	-	1.080.000,00

58	NUR LAILA FAIQOH	80.000,00	-	-	-	80.000,00
59	MUHAMAD PUJIONO	480.000,00	-	-	-	480.000,00
60	SETIA CAHYA UTAMI	1.080.000,00	730.000,00	-	-	1.810.000,00
61	AZMAN	480.000,00	-	-	-	480.000,00
62	ADE SETIAWAN	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
63	ROZIKAN	580.000,00	-	-	-	580.000,00
64	SURIANI	280.000,00	-	-	-	280.000,00
65	AHMAD MAMANG	180.000,00	580.000,00	-	-	760.000,00
66	BAHRUDIN	780.000,00	1.080.000,00	-	-	1.860.000,00
67	SYAHRIAL	-	880.000,00	-	-	880.000,00
68	USMAN PATIRAJA	580.000,00	1.080.000,00	-	-	1.660.000,00
69	ELFIAWATI	2.160.000,00	1.080.000,00	-	-	3.240.000,00
70	JIMIN YASER P.S.	680.000,00	1.080.000,00	-	-	1.760.000,00
71	ABDURAHMAN SIDO	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
72	MIROTUL KHAFIDIAH	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
73	ASEPTA GUNAWAN AMRILLAH	2.160.000,00	1.080.000,00	-	-	3.240.000,00
74	KOSIATUN	1.080.000,00	-	-	-	1.080.000,00
75	BAKRI ASRIANI	840.000,00	-	-	-	840.000,00
76	AHMAD FAUZI	340.000,00	-	-	-	340.000,00
77	FATIMA ATAPUKAN	-	640.000,00	-	-	640.000,00
78	SUKARMU	300.000,00	-	-	-	300.000,00
79	RISNAWATI	200.000,00	-	-	-	200.000,00
80	FATHIA KHOIRAH PUTRI BASO	840.000,00	-	-	-	840.000,00
81	LUKMAN	1.080.000,00	-	-	-	1.080.000,00
82	SITI UDAYAH KAMPOH	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
83	MUHAMAD HUSEN YUNUS	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
84	MONICA ANGGELINA	-	580.000,00	-	-	580.000,00
85	NURSIA/MARDIANA	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
86	SITI HAWA JALIL	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
87	SONI PRANATA PUTRA	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
88	IRZAL	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
89	ZUKARDI	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
90	ALIMUDIN USMAN	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
91	ASARI	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
92	SUMARNO BIN MASRUN	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
93	NURKOLIS	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00
94	CHOIB BIN MASRUN	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	2.160.000,00

95	RUSMAN	-	480.000,00	-	-	480.000,00
96	HERI PURWOTO B SUKARMAN	-	730.000,00	-	-	730.000,00
97	SRIYATI	-	580.000,00	-	-	580.000,00
98	DANIEL SAM	-	580.000,00	-	-	580.000,00
99	ARYANTO	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
##	HATIKA	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
##	ILHAM JIHADI MUSTASAWIFIN	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
##	SAKINAH TUL AFIFAH	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
##	NURHANA	-	580.000,00	-	-	580.000,00
##	AMINUDIN	-	580.000,00	-	-	580.000,00
##	ITA PURNAMASARI	-	480.000,00	-	-	480.000,00
##	MAFAZAH	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
##	YASMIN SHARAH YUNIATI	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
##	NUR SHOLIQ	-	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00
##	SITI RAMLAH	-	840.000,00	-	-	840.000,00
b	**KIOS PERMANEN PASAR LAMAWALANG**	**52.320.000,00**	**15.000.000,00**	**-**	**-**	**67.320.000,00**
1	PETRUS POLE HAYON	2.400.000,00	-	-	-	2.400.000,00
2	MARIA IRENE TENAU	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
3	IWAN GOZALI	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
4	BANK BINA USAHA DANA	3.600.000,00	1.200.000,00	-	-	4.800.000,00
5	SESILIA MARSELINA FERNADES	3.300.000,00	1.200.000,00	-	-	4.500.000,00
6	DAMIANUS DONI WUWUR/YULIANA PUKA	1.370.000,00	960.000,00	-	-	2.330.000,00
7	YULIUS PAMAN/LAGADONI SAHIDON	970.000,00	960.000,00	-	-	1.930.000,00
8	BERNADUS LEKI Y. MARANG	960.000,00	-	-	-	960.000,00
9	THOMAS L. TELUMA	2.880.000,00	-	-	-	2.880.000,00
10	MAGDALENA EDA DAWAN	2.880.000,00	960.000,00	-	-	3.840.000,00
11	FATMAWATI RATULOLI	2.200.000,00	900.000,00	-	-	3.100.000,00
12	AGNES KOLIN	1.800.000,00	900.000,00	-	-	2.700.000,00
13	ANA MARGOTA LEIN	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
14	YOSEP SIHU HURINT	1.600.000,00	900.000,00	-	-	2.500.000,00
15	YULIANA PELONI KERANS/ANTONIUS YASMIN	840.000,00	-	-	-	840.000,00
16	SIMON K. KEDANG	420.000,00	-	-	-	420.000,00
17	MELKIOR KOLI BARAN	420.000,00	-	-	-	420.000,00
18	YAKOBUS P. DA CUNHA	420.000,00	-	-	-	420.000,00
19	STEFANUS L. ARIYANTO	420.000,00	200.000,00	-	-	620.000,00
20	FRANSISKA ANJELINA HALA	420.000,00	-	-	-	420.000,00
21	ALOYSIUS AWE KOLIN	420.000,00	-	-	-	420.000,00

22	YULIANUS MASAN KERANS	420.000,00	-	-	-	420.000,00
23	PAULINA DJEBE KEDANG	420.000,00	-	-	-	420.000,00
24	CHRISSOSTOMUS A.W PAROPESA	1.260.000,00	-	-	-	1.260.000,00
25	IRENE MEGARIA	420.000,00	-	-	-	420.000,00
26	THERESIA RENSA DOREN	420.000,00	-	-	-	420.000,00
27	YOHANES ROMA TANI	420.000,00	-	-	-	420.000,00
28	VALIANTO REGIALDUS DJAWA	420.000,00	-	-	-	420.000,00
29	MARIA NONA MINCE	840.000,00	420.000,00	-	-	1.260.000,00
30	YOHANA BOTA WERUING	420.000,00	-	-	-	420.000,00
31	MARIA TELUMA	420.000,00	-	-	-	420.000,00
32	IMAM GOSALI	420.000,00	-	-	-	420.000,00
33	YOHANA DE ORNAY	420.000,00	-	-	-	420.000,00
34	MARIA GORETI GUNU KOTEN	840.000,00	-	-	-	840.000,00
35	KLOWER	840.000,00	-	-	-	840.000,00
36	KHOLIUDIN	420.000,00	-	-	-	420.000,00
37	SUPRIYADI	840.000,00	-	-	-	840.000,00
38	PETRUS LEKI KEDANG	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
39	THERESIA WALEN KOTEN/NURHAYATI	1.920.000,00	-	-	-	1.920.000,00
40	STEFANUS DAMIANUS BAUR	900.000,00	-	-	-	900.000,00
41	NORWAYU RONADI	630.000,00	420.000,00	-	-	1.050.000,00
42	MARIUS BLIKO LEREK	840.000,00	420.000,00	-	-	1.260.000,00
43	SABINUS NIRON	480.000,00	420.000,00	-	-	900.000,00
44	SAHARUL	210.000,00	420.000,00	-	-	630.000,00
45	KAIMUDIN	210.000,00	-	-	-	210.000,00
46	HIDAYATULAH JALIL	210.000,00	-	-	-	210.000,00
47	KARTIN BEOANG	1.200.000,00	-	-	-	1.200.000,00
48	MONIKA LEDO PAPANG	960.000,00	560.000,00	-	-	1.520.000,00
49	YULIANA PUKA	960.000,00	-	-	-	960.000,00
50	MARIA BAREK MARANG	960.000,00	960.000,00	-	-	1.920.000,00
51	THERESIA YUNARTI	-	200.000,00	-	-	200.000,00
52	YUNUS WIWE TUHI	420.000,00	420.000,00	-	-	840.000,00
53	DARIUS MAU HIDJA	420.000,00	-	-	-	420.000,00
54	MARSELINA AGNES T. KERAF	420.000,00	420.000,00	-	-	840.000,00
55	JAFAR	420.000,00	420.000,00	-	-	840.000,00
55	SUMARTINI/DEWI SANTI BEDU	-	900.000,00	-	-	900.000,00
55	DONATUS JAGONG	-	420.000,00	-	-	420.000,00
55	YUNIA RAJA LEDE	-	420.000,00	-	-	420.000,00

c	**KIOS PERMANEN PASAR BORU**	**11.140.000,00**	**6.740.000,00**	**-**	**-**	**17.880.000,00**
1	SLAMET HAYADI	720.000,00	-	-	-	720.000,00
2	NURASIT	720.000,00	-	-	-	720.000,00
3	MARKUS JAWA SOGE	720.000,00	-	-	-	720.000,00
4	PITERSON RAJA TUKA	200.000,00	150.000,00	-	-	350.000,00
5	SUWARDI	360.000,00	-	-	-	360.000,00
6	KARBOLA	720.000,00	-	-	-	720.000,00
7	LASARUS LAKA BULIN	200.000,00	320.000,00	-	-	520.000,00
8	ELISABETH GORAN	680.000,00	570.000,00	-	-	1.250.000,00
9	AHMAD FAUZI	360.000,00	360.000,00	-	-	720.000,00
10	IDA YANI MAU	1.240.000,00	720.000,00	-	-	1.960.000,00
11	PETRONELA LIWU	720.000,00	-	-	-	720.000,00
12	SARVULUS SAMANG LEWAR	720.000,00	-	-	-	720.000,00
13	KANISIUS JEKO	760.000,00	720.000,00	-	-	1.480.000,00
14	NUR KOLIS	720.000,00	-	-	-	720.000,00
15	MARIA ESTER MAU	360.000,00	490.000,00	-	-	850.000,00
16	SON RIWU	200.000,00	360.000,00	-	-	560.000,00
17	MARKUS MEKO	320.000,00	420.000,00	-	-	740.000,00
18	RAFAEL REDE RADJA	320.000,00	-	-	-	320.000,00
19	ALFONSIUS ALEXANDER	240.000,00	-	-	-	240.000,00
20	ALFONSIUS ALEXANDER	240.000,00	360.000,00	-	-	600.000,00
21	GABRIEL LADO JO	200.000,00	-	-	-	200.000,00
22	YOHANES BOSCO YAN	-	470.000,00	-	-	470.000,00
23	ISAK DJARA DJAMI	420.000,00	720.000,00	-	-	1.140.000,00
24	JAMAN	-	360.000,00	-	-	360.000,00
25	KANISIUS JEKO	-	570.000,00	-	-	570.000,00
26	LEONAD NAWA	-	150.000,00	-	-	150.000,00
d	**KIOS PERMANEN PASAR WAIWERANG**	**18.144.500,00**	**14.986.000,00**	**-**	**-**	**33.130.500,00**
1	STEFANUS PAJI WARA	108.000,00	-	-	-	108.000,00
2	SUMIATI IMRAN	30.000,00	-	-	-	30.000,00
3	SYAIFUL BAHRI, SE	186.000,00	-	-	-	186.000,00
4	ADNAN UMAR	888.000,00	390.000,00	-	-	1.278.000,00
5	A. HARIS ABDULLAH	228.000,00	390.000,00	-	-	618.000,00
6	AHMAD SIMAT	90.000,00	-	-	-	90.000,00
7	MARYUTI	565.500,00	390.000,00	-	-	955.500,00
8	HJ. SRI MUNAFIROH	498.000,00	390.000,00	-	-	888.000,00
9	H. SAPAR	498.000,00	390.000,00	-	-	888.000,00

10	NUR AG. SYARIF	108.000,00	-	-	-	108.000,00
11	NUR WAHID	558.000,00	390.000,00	-	-	948.000,00
12	MUSA LAMEN/ZAINAB KADIR	288.000,00	-	-	-	288.000,00
13	SALEHA KASIM	498.000,00	390.000,00	-	-	888.000,00
14	AGUSTINA K. INA	498.000,00	390.000,00	-	-	888.000,00
15	YULIANA BANA TOKAN	558.000,00	390.000,00	-	-	948.000,00
16	RAJI DARMAJI	858.000,00	390.000,00	-	-	1.248.000,00
17	SAID AHMAD	798.000,00	390.000,00	-	-	1.188.000,00
18	H. SAPARI	240.500,00	-	-	-	240.500,00
19	SOLOR WATAN LEMA	1.123.000,00	390.000,00	-	-	1.513.000,00
20	GAFAR ISMAIL	408.000,00	-	-	-	408.000,00
21	NIKOLAUS NOKE LIWU	108.000,00	-	-	-	108.000,00
22	MUHAMAD BUNGA	335.500,00	-	-	-	335.500,00
23	SUNOTO/BAHRUL ALBAK	102.000,00	-	-	-	102.000,00
24	PINA	119.000,00	-	-	-	119.000,00
25	ISMAIL ARSYAD	1.284.000,00	-	-	-	1.284.000,00
26	SOFIA SAMIUN	213.000,00	-	-	-	213.000,00
27	MUHAMAD LUKMAN	268.000,00	-	-	-	268.000,00
28	INTAN BAHARUDIN	819.500,00	702.000,00	-	-	1.521.500,00
29	H. SYARIFUDIN	994.500,00	-	-	-	994.500,00
30	SITI HASWATI	684.000,00	702.000,00	-	-	1.386.000,00
31	ARBININGSIH	811.000,00	702.000,00	-	-	1.513.000,00
32	MUHAMAD RAMADAN	684.000,00	702.000,00	-	-	1.386.000,00
33	MALANG BAJO	78.000,00	-	-	-	78.000,00
34	M.IKSAN RATULOLY	78.000,00	-	-	-	78.000,00
35	MAS MUIN	468.000,00	390.000,00	-	-	858.000,00
36	THALIB H. SALEH	78.000,00	-	-	-	78.000,00
37	M.KASIM ABDRAHMAN/SYAIFUL BAHRI	78.000,00	-	-	-	78.000,00
38	MUHAMAD YUNUS	663.000,00	390.000,00	-	-	1.053.000,00
39	ISMAIL ARSYAD	702.000,00	702.000,00	-	-	1.404.000,00
40	H. JUARIAH K	20.000,00	390.000,00	-	-	410.000,00
41	H. JUARIAH K	390.000,00	390.000,00	-	-	780.000,00
42	SITI SANIA	140.000,00	390.000,00	-	-	530.000,00
43	NUR IDA	-	702.000,00	-	-	702.000,00
44	ASMAWATI FARADILAH	-	500.000,00	-	-	500.000,00
45	SAMSIA BINTI MUHHAMAD	-	936.000,00	-	-	936.000,00
46	ZAINAB AHMAD	-	936.000,00	-	-	936.000,00

47	IBRAHIM AHMAD/MALIA	-	436.000,00	-	-	436.000,00
48	NURJANA RAMLI	-	936.000,00	-	-	936.000,00
49	FATIMA AMU/ ZAKARIA	-	400.000,00	-	-	400.000,00
e	**KIOS PERMANEN PASAR WAIWADAN**	**3.860.000,00**	**1.980.000,00**	**-**	**-**	**5.840.000,00**
1	AMINAH MAMANG	900.000,00	900.000,00	-	-	1.800.000,00
2	BAUTIKNO	900.000,00	-	-	-	900.000,00
3	SITI HAWA BETHAN	360.000,00	-	-	-	360.000,00
4	HASANUDIN UMAR	360.000,00	360.000,00	-	-	720.000,00
5	SITI HABIBA ISMAIL	620.000,00	360.000,00	-	-	980.000,00
6	MUHAMAD KADIR	360.000,00	-	-	-	360.000,00
7	DONATUS KOPONG LEYN	360.000,00	360.000,00	-	-	720.000,00
2	**KIOS DARURAT**	**60.405.000,00**	**32.062.000,00**	**-**	**-**	**92.467.000,00**
a	**KIOS DARURAT PASAR BORU**	**3.969.000,00**	**1.944.000,00**	**-**	**-**	**5.913.000,00**
1	SUMIYATI KALSUM	900.000,00	486.000,00	-	-	1.386.000,00
2	SABINA MUDA	864.000,00	-	-	-	864.000,00
3	FRENI LIWU	1.077.000,00	486.000,00	-	-	1.563.000,00
4	MONIKA LIWU	842.000,00	486.000,00	-	-	1.328.000,00
5	ELISABETH KOTEN	286.000,00	486.000,00	-	-	772.000,00
b	**KIOS DARURAT PASAR WAIWADAN**	**39.716.000,00**	**17.038.000,00**	**-**	**-**	**56.754.000,00**
1	ASHARI JAWA	648.000,00	-	-	-	648.000,00
2	LUKMAN JAWA	1.296.000,00	648.000,00	-	-	1.944.000,00
3	SUMARNO	1.296.000,00	648.000,00	-	-	1.944.000,00
4	MAMA HAR	1.944.000,00	648.000,00	-	-	2.592.000,00
5	SITI HAWA BETHAN	1.296.000,00	648.000,00	-	-	1.944.000,00
6	FATIMA ATAPUKEN	648.000,00	298.000,00	-	-	946.000,00
7	ALI PADANG	648.000,00	-	-	-	648.000,00
8	HANS YAFALA/YOHANES FAFALI	648.000,00	-	-	-	648.000,00
9	MAKSIMUS BEREK	1.296.000,00	648.000,00	-	-	1.944.000,00
10	IKRAM BETHAN	1.296.000,00	-	-	-	1.296.000,00
11	SITI MARIAM TUPENG	648.000,00	-	-	-	648.000,00
12	FADLY	324.000,00	-	-	-	324.000,00
13	WAIDA HIJRAD	1.296.000,00	-	-	-	1.296.000,00
14	RAUF SENGAJI	2.376.000,00	1.080.000,00	-	-	3.456.000,00
15	SALEM RATULOLY	648.000,00	-	-	-	648.000,00

16	MERI WADAN	1.944.000,00	648.000,00	-	-	2.592.000,00
17	SITI NURBAYA	1.944.000,00	648.000,00	-	-	2.592.000,00
18	NAIMA M. SUKSIN	2.160.000,00	648.000,00	-	-	2.808.000,00
19	EMA DETE	1.944.000,00	648.000,00	-	-	2.592.000,00
20	H. SAMSUDIN BIMA	648.000,00	648.000,00	-	-	1.296.000,00
21	MARYAM SAID	1.512.000,00	-	-	-	1.512.000,00
22	LAZARUS LUJI	864.000,00	-	-	-	864.000,00
23	FATIMA SAHAR	1.512.000,00	1.080.000,00	-	-	2.592.000,00
24	HALUS 2	1.728.000,00	864.000,00	-	-	2.592.000,00
25	MUHAMAD KAHIDIR	324.000,00	-	-	-	324.000,00
26	ERNI IBRAHIM	324.000,00	324.000,00	-	-	648.000,00
27	MUHAMAD SADIKIN	810.000,00	-	-	-	810.000,00
28	MAIMUNA	2.430.000,00	-	-	-	2.430.000,00
29	JAINUN	324.000,00	-	-	-	324.000,00
30	RATNAWATI KALIMBUANG	324.000,00	-	-	-	324.000,00
31	SAMSU ALA	648.000,00	324.000,00	-	-	972.000,00
32	RUSTAM RAFAA	1.080.000,00	972.000,00	-	-	2.052.000,00
33	ERNI BANGUHARI/EMILIA O BANGUHARI	-	324.000,00	-	-	324.000,00
34	SYUAIBAN	324.000,00	324.000,00	-	-	648.000,00
35	YOHANES FAVALLI L.	348.000,00	432.000,00	-	-	780.000,00
36	HABSA BETHAN	448.000,00	486.000,00	-	-	934.000,00
37	ARJUNI	324.000,00	324.000,00	-	-	648.000,00
38	ARJUNI	124.000,00	324.000,00	-	-	448.000,00
39	NURDIANA	548.000,00	432.000,00	-	-	980.000,00
40	ROBINSON	324.000,00	324.000,00	-	-	648.000,00
41	MARYAM BETHAN	448.000,00	648.000,00	-	-	1.096.000,00
42	BUNADI	-	486.000,00	-	-	486.000,00
43	MUHHAMAD WADAN	-	324.000,00	-	-	324.000,00
44	ZAILANI	-	324.000,00	-	-	324.000,00
45	NUKRAN	-	324.000,00	-	-	324.000,00
46	HIRONIMUS KOPONG	-	540.000,00	-	-	540.000,00
c	**KIOS DARURAT PASAR WAIWERANG**	**16.720.000,00**	**13.080.000,00**	**-**	**-**	**29.800.000,00**
1	HALIMA THUSADIA	216.000,00	-	-	-	216.000,00
2	WATI	814.000,00	648.000,00	-	-	1.462.000,00
3	HALIMA SAMIUN	166.000,00	300.000,00	-	-	466.000,00
4	FATMAWATI AWAL	868.000,00	-	-	-	868.000,00

5	SITI SARAH	1.088.000,00	648.000,00	-	-	1.736.000,00
6	UTARI YUNUS	900.000,00	648.000,00	-	-	1.548.000,00
7	AMIR HAMZAH	148.000,00	648.000,00	-	-	796.000,00
8	NAIMAH DARWIS	-	636.000,00	-	-	636.000,00
9	AGUSTINI	864.000,00	-	-	-	864.000,00
10	SUKARDI BAHI	864.000,00	-	-	-	864.000,00
11	KHADIJAH C.B	648.000,00	648.000,00	-	-	1.296.000,00
12	M. NAJARUDIN	162.000,00	648.000,00	-	-	810.000,00
13	MUHAMMAD SIDIK RL	162.000,00	-	-	-	162.000,00
14	ABUBAKAR SIDIK	378.000,00	-	-	-	378.000,00
15	USMAN TENA	216.000,00	648.000,00	-	-	864.000,00
16	IA MUHAMMAD/MARIANA	-	648.000,00	-	-	648.000,00
17	AHMAD KHOTIB	640.000,00	648.000,00	-	-	1.288.000,00
18	SLAMET WARTONO	1.458.000,00	648.000,00	-	-	2.106.000,00
19	NETI	1.458.000,00	648.000,00	-	-	2.106.000,00
20	MANSYUR SAMSUDIN	1.728.000,00	648.000,00	-	-	2.376.000,00
21	MANSYUR SAMSUDIN	1.728.000,00	648.000,00	-	-	2.376.000,00
22	MASTURA SAMIUN	270.000,00	548.000,00	-	-	818.000,00
23	EMILIA ASRA	648.000,00	648.000,00	-	-	1.296.000,00
24	H. SITI HASNA ZAINAL	648.000,00	648.000,00	-	-	1.296.000,00
25	SYARIFUDIN	-	648.000,00	-	-	648.000,00
26	SITI JAILANI	648.000,00	648.000,00	-	-	1.296.000,00
27	HALIMAH MUHAMMAD	-	580.000,00	-	-	580.000,00
3	**LOS BERSEKAT**	**29.810.000,00**	**20.280.000,00**	**-**	**-**	**50.090.000,00**
a	**LOS BERSEKAT PASAR LARANTUKA**	**29.810.000,00**	**20.280.000,00**	**-**	**-**	**50.090.000,00**
1	BASRI	420.000,00	-	-	-	420.000,00
2	JAFAR	1.290.000,00	-	-	-	1.290.000,00
3	YANI SABAN	620.000,00	720.000,00	-	-	1.340.000,00
4	MUNIPA	720.000,00	-	-	-	720.000,00
5	MASTURA PARAN TERON	2.060.000,00	720.000,00	-	-	2.780.000,00
6	RATNA ATANGGAE	720.000,00	-	-	-	720.000,00
7	HAMDI	120.000,00	-	-	-	120.000,00
8	WAODE SAINUR	940.000,00	-	-	-	940.000,00
9	DEWI SANTI BEDDU	1.460.000,00	-	-	-	1.460.000,00
10	BAHRUL	220.000,00	-	-	-	220.000,00
11	MARIAM RATULOLI	2.160.000,00	720.000,00	-	-	2.880.000,00

12	AHMAD URIP/ABDUN NAFI	2.160.000,00	720.000,00	-	-	2.880.000,00
13	H. ROLA	640.000,00	-	-	-	640.000,00
14	SITI HAWA BELANG	2.160.000,00	-	-	-	2.160.000,00
15	GRAHA ADI SAPUTRA	720.000,00	720.000,00	-	-	1.440.000,00
16	REGIL HERI FITRIAN	720.000,00	-	-	-	720.000,00
17	ERNAWATI	320.000,00	720.000,00	-	-	1.040.000,00
18	SUYATMI	940.000,00	720.000,00	-	-	1.660.000,00
19	LAODE UZU	1.440.000,00	720.000,00	-	-	2.160.000,00
20	SITI ROHANI	840.000,00	720.000,00	-	-	1.560.000,00
21	NONA DAHLIA NIRA	-	720.000,00	-	-	720.000,00
22	FAHROL ROZI	1.440.000,00	-	-	-	1.440.000,00
23	NASIK	-	720.000,00	-	-	720.000,00
24	HJ.KISMATUN	-	720.000,00	-	-	720.000,00
25	H. CAWANG SANABIA	440.000,00	720.000,00	-	-	1.160.000,00
26	YANI ROHAYANI	1.140.000,00	720.000,00	-	-	1.860.000,00
27	SUPRIADI	1.240.000,00	720.000,00	-	-	1.960.000,00
28	KHOLIUDIN	720.000,00	-	-	-	720.000,00
29	MARWA	720.000,00	-	-	-	720.000,00
30	HASRIYANI	-	720.000,00	-	-	720.000,00
31	HERLINA JUFRI	320.000,00	720.000,00	-	-	1.040.000,00
32	SUMANTI BETHAN	740.000,00	720.000,00	-	-	1.460.000,00
33	BERNADUS N. LEO	420.000,00	-	-	-	420.000,00
34	MINAH	-	720.000,00	-	-	720.000,00
35	MUHAMAD AFIFUDIN/MUSRIPAN	1.240.000,00	720.000,00	-	-	1.960.000,00
36	NUR WAKIDAH	-	720.000,00	-	-	720.000,00
37	NOVRISAL	720.000,00	720.000,00	-	-	1.440.000,00
38	LUGARDIS SARWATI	-	720.000,00	-	-	720.000,00
39	ABDULAH	-	720.000,00	-	-	720.000,00
40	SITI NORAHMA	-	720.000,00	-	-	720.000,00
41	KANDIDA THERESIA K LEWAR	-	120.000,00	-	-	120.000,00
42	LALLO	-	720.000,00	-	-	720.000,00
43	DESI	-	720.000,00	-	-	720.000,00
44	MUSRIPAN	-	720.000,00	-	-	720.000,00
8	**SEWAH TANAH**	**253.919.120,00**	**53.699.500,00**	**-**	**-**	**307.618.620,00**
1	**SEWA TANA WAIWERANG**	**98.974.640,00**	**24.079.000,00**	**-**	**-**	**123.053.640,00**
1	H. Usman Zain	80.000,00	-	-	-	80.000,00

2	H. Usman Zain	1.638.000,00	605.000,00	-	-	2.243.000,00
3	H. Usman Zain	375.000,00	-	-	-	375.000,00
4	Hasan Abu Zaman	800.000,00	-	-	-	800.000,00
5	Abubakar Sidiq	3.861.000,00	1.650.000,00	-	-	5.511.000,00
6	Ismail Kasim	10.190.000,00	3.500.000,00	-	-	13.690.000,00
7	Muhammad Husen	1.540.000,00	-	-	-	1.540.000,00
8	Muhammad Sarif L. R.	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
9	Ujang Rega	3.851.000,00	-	-	-	3.851.000,00
10	Siti Amina Mahmud	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
11	Firdaus	3.962.000,00	1.450.000,00	-	-	5.412.000,00
12	Endo Budiari, S. Sos	3.520.000,00	-	-	-	3.520.000,00
13	H. Hasyim Pua	500.000,00	-	-	-	500.000,00
14	Stefanus Paji Wara	680.000,00	-	-	-	680.000,00
15	Muhammad Yunus Sahide	1.400.000,00	-	-	-	1.400.000,00
16	Arisal Tanjung	1.217.000,00	1.150.000,00	-	-	2.367.000,00
17	Muhammad Husni/Rohaya Husni	936.000,00	-	-	-	936.000,00
18	Muhammad Samlan	4.842.500,00	-	-	-	4.842.500,00
19	Malek Redzuan M. Sidik	3.800.000,00	-	-	-	3.800.000,00
20	Ujang Rega	5.602.000,00	-	-	-	5.602.000,00
21	Ahmar	90.000,00	-	-	-	90.000,00
22	Fitalis Riang Hepat	2.691.000,00	-	-	-	2.691.000,00
23	HJ. RAUF HUSNI	975.000,00	-	-	-	975.000,00
24	MAHMUD KASIM ROFSANJANI	2.260.000,00	1.750.000,00	-	-	4.010.000,00
25	H. SITI JAOHARA / HASAN ABUSAMAN	1.287.000,00	-	-	-	1.287.000,00
26	RAHMAT A. K.	2.574.000,00	-	-	-	2.574.000,00
27	MUHAMAD HASAN BUNGA	6.175.000,00	-	-	-	6.175.000,00
28	KUD WAIWERANG	16.385.250,00	-	-	-	16.385.250,00
29	Rahima Nuhur	-	512.500,00	-	-	512.500,00
30	Masyud Abdurahman	3.368.000,00	2.800.000,00	-	-	6.168.000,00
31	Maria Veronika E. T Lamoren	1.501.890,00	-	-	-	1.501.890,00
32	MAHMUD SYARIF LAMAROBAK	2.145.000,00	-	-	-	2.145.000,00
33	BUJANG	2.301.000,00	950.000,00	-	-	3.251.000,00
34	DAHLIA GAZALI	3.627.000,00	2.836.500,00	-	-	6.463.500,00
35	HENDRIK DEMON DATON	-	1.925.000,00	-	-	1.925.000,00
36	ALI ROSIDI	-	2.950.000,00	-	-	2.950.000,00
37	ENDO GADAFI	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00

2	**SEWA TANAH (LARANTUKA)**	**14.430.000,00**	**1.350.000,00**	**-**	**-**	**15.780.000,00**
1	YOHANES GANU MARAN S.Pi / DIREKTUR UTAMA PT. MUTIARA TIMUR	14.430.000,00	-	-	-	14.430.000,00
2	YOHANA DESYFINA MARANG (PASAR INSPRES -LTK)	-	500.000,00	-	-	500.000,00
3	PATAHUDIN (PASAR INPRES -LTK)	-	400.000,00	-	-	400.000,00
4	MUSTAFA SABAN (PASAR INPRES -LTK)	-	450.000,00	-	-	450.000,00
3	**SEWA TANAH (WAIWADAN)**	**8.305.300,00**	**1.245.000,00**	**-**	**-**	**9.550.300,00**
1	FIDELIS RABU	279.500,00	670.000,00	-	-	949.500,00
2	Muhammad Husni	189.000,00	-	-	-	189.000,00
3	Damianus Dosi Resi	800,00	-	-	-	800,00
4	Martinus Ike	6.375.000,00	-	-	-	6.375.000,00
5	YOHANES JUANG BOLI	650.000,00	-	-	-	650.000,00
6	MUHAMAD YAMIN MUKHTAR	650.000,00	-	-	-	650.000,00
7	AGUSTINUS BUGA	-	175.000,00	-	-	175.000,00
8	HENDRIKUS DOA KOTEN	161.000,00	400.000,00	-	-	561.000,00
	-					
4	**SEWA TANAH (POSTOH)**	**1.788.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.788.000,00**
1	KRISTINA DIAZ	600.000,00	-	-	-	600.000,00
2	SILVESTER DULI TAPOBALI	396.000,00	-	-	-	396.000,00
3	MARSELINUS OLA LOLY	792.000,00	-	-	-	792.000,00
5	**SEWA TANAH (KOTA BARU/LOKEA)**	**29.267.000,00**	**7.455.000,00**	**-**	**-**	**36.722.000,00**
1	A. BERTI LEIMENA	5.823.000,00	-	-	-	5.823.000,00
2	P.G.LAMABAHI,BA	2.760.000,00	1.150.000,00	-	-	3.910.000,00
3	MARIA DASION KERAF	1.143.000,00	-	-	-	1.143.000,00
4	PITER PARON	2.304.000,00	960.000,00	-	-	3.264.000,00
5	IRMINA BENGA OLA	2.160.000,00	-	-	-	2.160.000,00
6	YOSEPHAT AMALEGA TOKAN	1.328.000,00	720.000,00	-	-	2.048.000,00
7	KOPONG GEWALI KAROLUS	520.000,00	-	-	-	520.000,00
8	YAKOBUS DEWA R. LAMABLAWA	2.280.000,00	-	-	-	2.280.000,00
9	YOSEPH BORO LAMABLAWA	2.700.000,00	1.500.000,00	-	-	4.200.000,00
10	SIPRIANUS RONI APOLONARIS KAPITAN	7.533.000,00	1.185.000,00	-	-	8.718.000,00
11	THERESIA MARIA OJAN	124.000,00	1.040.000,00	-	-	1.164.000,00
12	ALWAN LESU TOKAN	460.000,00	-	-	-	460.000,00
13	KHAIDIR KOPONG NOTAN	132.000,00	-	-	-	132.000,00

14	ANTONIA BARBARA NELLCHIE	-	100.000,00	-	-	100.000,00
15	ANTONIA BARBARA NELLCHIE	-	200.000,00	-	-	200.000,00
16	M. IKHSAN ABDULLAH	-	600.000,00	-	-	600.000,00
6	**SEWA TANAH (PTW BAO)**	**65.015.350,00**	**6.398.000,00**	**-**	**-**	**71.413.350,00**
1	SUSMIATIN/ TOKO ASKOMTEK	11.801.400,00	-	-	-	11.801.400,00
2	CHRISTOFORUS A.W.PAROPESSA/KANTIN CILLENTUM	5.940.000,00	-	-	-	5.940.000,00
3	OKTAFIANUS KIA RUMA/ KIRANA FOTOCOPY	3.180.000,00	-	-	-	3.180.000,00
4	EMERENTIANA SURAT BALA/ RUMAH MAKAN ORIZT	5.511.000,00	-	-	-	5.511.000,00
5	KOPERASI DEKOPINDA	22.972.950,00	-	-	-	22.972.950,00
6	WAHYU ARTININGSIH/ KANTIN ATANARA	5.200.000,00	-	-	-	5.200.000,00
7	FABIANUS ADI, S. HUT/KOPERASI SILVAN	10.410.000,00	-	-	-	10.410.000,00
8	MULIADIN	-	5.498.000,00	-	-	5.498.000,00
9	PETRUS PAI GEO	-	900.000,00	-	-	900.000,00
7	**SEWA TANAH (TAMAN KOTA)**	**28.457.810,00**	**4.650.000,00**	**-**	**-**	**33.107.810,00**
1	NURSIA PUGEL	870.000,00	-	-	-	870.000,00
2	AHMAD ATIM	166.000,00	500.000,00	-	-	666.000,00
3	ABDUL AZIZ	1.343.000,00	-	-	-	1.343.000,00
4	FRANSISKUS B.L, ST	2.464.000,00	-	-	-	2.464.000,00
5	ARIA SUPARDI	1.104.000,00	1.200.000,00	-	-	2.304.000,00
6	ENDANG S. BILI	285.000,00	-	-	-	285.000,00
7	MARIANA SURA	4.056.000,00	-	-	-	4.056.000,00
8	AGUS WIDYANTO	1.840.000,00	-	-	-	1.840.000,00
9	M KASIM	3.095.000,00	-	-	-	3.095.000,00
10	SOIMAH	904.000,00	-	-	-	904.000,00
11	APRIYANTO	436.000,00	-	-	-	436.000,00
12	DOMINIKUS MINI TEMALURU	8.142.810,00	-	-	-	8.142.810,00
13	MOHAMAD ROCKY SHIDDIQ	1.755.000,00	-	-	-	1.755.000,00
14	SARJONO	104.000,00	-	-	-	104.000,00
15	DESTIAN HARYANI	312.000,00	-	-	-	312.000,00
16	AGUS NOMO	404.000,00	700.000,00	-	-	1.104.000,00
17	SUJOKO	553.000,00	-	-	-	553.000,00
18	LAURENSIUS ENZO FERNANDEZ	624.000,00	-	-	-	624.000,00
19	ANITA PARERA	-	400.000,00	-	-	400.000,00
20	SARTONO	-	500.000,00	-	-	500.000,00
21	KRISTINA NATALIA DACOSTA	-	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00

8	**SEWA TANAH (WULANGGITANG)**	**1.267.820,00**	**275.000,00**	**-**	**-**	**1.542.820,00**
1	DOMINIKUS DEMON BOLENG	81.720,00	-	-	-	81.720,00
2	WILFRIDUS PEKA LOLI	168.000,00	-	-	-	168.000,00
3	FLORENTINA TAPO ASAN	99.000,00	-	-	-	99.000,00
4	ELISABET BATAONA	70.000,00	-	-	-	70.000,00
5	MAGDALENA JADO URAN	532.000,00	-	-	-	532.000,00
6	ANTONIUS HOKENG KELORE	209.100,00	-	-	-	209.100,00
7	MARIA MUDA TOBI	108.000,00	-	-	-	108.000,00
8	BERNADUS BENEDIKTUS	-	275.000,00	-	-	275.000,00
9	**SEWA TANAH (WERI)**	**6.413.200,00**	**8.247.500,00**	**-**	**-**	**14.660.700,00**
1	ALOYSIUS TAMA KOTEN	270.000,00	450.000,00	-	-	720.000,00
2	YEREMIAS LATUAN	-	210.000,00	-	-	210.000,00
3	AGNES WERANG	647.000,00	522.500,00	-	-	1.169.500,00
4	ROSARIUS BL DEROSARI	336.000,00	280.000,00	-	-	616.000,00
5	HENDRIKUS ANTONIUS EMAN TUKAN	225.000,00	375.000,00	-	-	600.000,00
6	SYAWALUDIN WERANG	618.200,00	598.500,00	-	-	1.216.700,00
7	YOHANES TERONG BATAONA	-	240.000,00	-	-	240.000,00
8	YOHANES NDUN	312.000,00	-	-	-	312.000,00
9	YOHANES B WODA	336.000,00	280.000,00	-	-	616.000,00
10	YOSEP DEROSARI	432.000,00	360.000,00	-	-	792.000,00
11	ISODORUS KERAF	468.000,00	390.000,00	-	-	858.000,00
12	ALOYSIUS DEROSARI	-	6.000,00	-	-	6.000,00
13	MARIA HELENA FERNANDES	358.800,00	199.000,00	-	-	557.800,00
14	YOHANES ALWAN MUKIN	252.000,00	210.000,00	-	-	462.000,00
15	MARSELINUS AUR	81.000,00	129.000,00	-	-	210.000,00
16	MARSELINUS LIAT HAYON	210.000,00	350.000,00	-	-	560.000,00
17	FRANSISKUS BL DEROSARI	273.000,00	455.000,00	-	-	728.000,00
18	YAKOBUS LADO KOTEN	144.000,00	240.000,00	-	-	384.000,00
19	PAULUS PEHAN ALI	277.200,00	462.000,00	-	-	739.200,00
20	YUSTINA DJAWA DA SILVA	273.000,00	455.000,00	-	-	728.000,00
21	ELISABET LERA KOLIN	-	175.000,00	-	-	175.000,00
22	KATARINA MA FERNANDEZ	180.000,00	300.000,00	-	-	480.000,00
23	MARIA MEME DA SILVA	264.000,00	440.000,00	-	-	704.000,00
24	ANTONIUS AFAN JAWAN	81.000,00	135.000,00	-	-	216.000,00
25	YOSEFINA BENEDIKTUS	144.000,00	240.000,00	-	-	384.000,00

26	KRSITOFORUS KEBAN	231.000,00	385.000,00	-	-	616.000,00
27	MARIA URE ATAPUHO	-	240.000,00	-	-	240.000,00
28	F.X DEROSARI	-	120.000,00	-	-	120.000,00
29	ANDREAS KEHI	-	500,00	-	-	500,00
9	**PIUTANG MENARA TELEKOMUNIKASI:**	**22.610.700,00**	**-**	**-**	**-**	**22.610.700,00**
2	Protelindo	5.800,00				5.800,00
4	Daya Mitra	22.604.900,00				22.604.900,00
5	Tower Bersama	-	-			-
JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI 2023		**1.169.683.108,00**	**325.771.500,00**	**-**	**-**	**1.495.454.608,00**
	Prosentase (%)	100%	50%	10%	0,5%	
	Penyisihan	1.169.683.108,00	162.885.750,00	-	-	1.332.571.758,00
	Piutang Neto	**-**	**162.885.750,00**	**-**	**-**	**162.882.850,00**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH
PER 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Penyisihan Piutang				Saldo Piutang per 31-12-2024 (Audited)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A.	**PIUTANG SEWA ALAT BERAT**	**-**	**-**	**-**	**122.948.098,00**	**122.948.098,00**
	1. DINAS PU TAMBEN KABUPATEN FLORES TIMUR	-	-	-	122.948.098,00	122.948.098,00
						-
B.	**PIUTANG ATAS DENDA DENDA KETERLAMBATAN**	**-**	**-**	**-**	**300.955.903,00**	**300.955.903,00**
	1. DINAS PU TAMBEN KABUPATEN FLORES TIMUR	-	-	-	300.955.903,00	300.955.903,00
	2. DINAS PPO KABUPATEN FLORES TIMUR		-	-	-	-
C	**PIUTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN KEPADA REKANAN**	**2.579.347.739,66**	**-**	**-**	**278.657.127,00**	**2.858.004.866,66**
	1. DINAS PU TAMBEN KABUPATEN FLORES TIMUR	520.006.710,86	-	-	278.657.127,00	798.663.837,86
	2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN FLORES TIMUR	1.892.202.317,34				1.892.202.317,34
	3. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	167.138.711,46				167.138.711,46
D	**PIUTANG SEWA KIOS**	**-**	**-**	**-**	**21.300.000,00**	**21.300.000,00**
	1. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN FLORES TIMUR	-	-	-	21.300.000,00	21.300.000,00
E	**PIUTANG SERAH KAPAL**	**-**	**-**	**-**	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**
	1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN FLORES TIMUR	-	-	-	21.500.000,00	21.500.000,00
F	**PIUTANG BELANJA PEGAWAI :**	**-**	**-**	**-**	**308.360.070,00**	**308.360.070,00**
	1. BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. FLORES TIMUR	-	-	-	282.093.500,00	282.093.500,00
	2. DINAS PPO KABUPATEN FLORES TIMUR	-	-	-	26.266.570,00	26.266.570,00
	TOTAL	**2.579.347.739,66**	**-**	**-**	**1.053.721.198,00**	**3.633.068.937,66**
Prosentase (%)		**0,5%**	**10%**	**50%**	**100%**	
Penyisihan		**12.896.738,70**	**-**	**-**	**1.053.721.198,00**	**1.066.617.936,70**
Piutang Netto		**2.566.451.000,96**	**-**	**-**	**-**	**2.566.451.000,96**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DAFTAR RINCIAN PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2024

No.	UNIT	Alat Tulis Kantor	Kertas dan Cover	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Belanja Bahan dan Kelengkapan Komputer (Tinta,Catridge)	Cetak	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih/Bahan Lainnya	BBM	Belanja Bahan Kimia	Belanja Bahan Isi Tabung Gas	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Suku Cadang Alat Angkutan	Belanja Bahan obat-obatan	Pakan dan Natura	Barang Yang Di jual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Barang Yang Di jual/Diserahkan Kepada Ketiga/Pihak Lain	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dinas Kesehatan	2.111.500,00			740.000,00		3.112.217.576,07						3.393.188.497,62				6.508.257.573,69
2	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka						1.827.063.074,79						1.095.634.961,80				2.922.698.036,59
3	RSUD Adonara	1.543.800,00	105.000,00				799.983.197,43						352.307.089,14				1.153.939.086,57
4	Puskesmas Boru						396.719.994,00						104.030.659,00				500.750.653,00
5	Puskesmas Ile Bura						74.749.846,46						76.007.076,21				150.756.922,67
6	Puskesmas Lato						122.982.739,06						77.824.827,00				200.807.566,06
7	Puskesmas Lewolaga						55.794.565,18						74.981.855,79				130.776.420,97
8	Puskesmas Demon Pagong						88.345.753,56						75.250.339,20				163.596.092,76
9	Puskesmas Oka						78.397.380,02						85.882.570,80				164.279.950,82
10	Puskesmas Lewolema						89.145.936,79						107.649.496,35				196.795.433,14
11	Puskesmas Waiklibang						67.966.329,52						93.950.906,83				161.917.236,35
12	Puskesmas Waimana						39.984.080,82						44.112.713,10				84.096.793,92
13	Puskesmas Waiwadan						52.077.513,12						65.375.632,19				117.453.145,31
14	Puskesmas Lite						40.375.689,24						78.309.238,73				118.684.927,97
15	Puskesmas Sagu						43.145.067,42						67.832.546,60				110.977.614,02
16	Puskesmas Lambunga						55.814.322,63						100.128.427,09				155.942.749,72
17	Puskesmas Witihama						39.135.515,72						51.011.158,66				90.146.674,38
18	Puskesmas Ile Boleng						63.400.331,08						109.463.516,10				172.863.847,18
19	Puskesmas Waiwerang						71.762.054,68						130.837.510,37				202.599.565,05
20	Puskesmas Baniona						52.254.581,69						67.880.566,61				120.135.148,30
21	Puskesmas Menanga						58.495.260,08						78.308.326,67				136.803.586,75
22	Puskesmas Kalike						59.715.932,94						51.398.223,56				111.114.156,50
23	Puskesmas Ritaebang						64.318.754,60						59.863.960,71				124.182.715,31
24	Puskesmas Nagi						116.680.409,42						111.299.883,56				227.980.292,98
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														16.138.982.756,00		16.138.982.756,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja			200.000,00													200.000,00
27	Dinas Sosial	900.000,00			850.000,00									58.644.300,00	12.091.800,00		72.486.100,00
28	Dinas Lingkungan Hidup	225.000,00			205.000,00			2.995.000,00				3.300.000,00					6.725.000,00
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	355.000,00			94.828.700,00		32.448.000,00										127.631.700,00
30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						114.409.856,00						948.770.050,00				1.063.179.906,00
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	152.250,00															152.250,00
32	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan															276.147.600,00	276.147.600,00
33	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								28.800.000,00								28.800.000,00
34	Dinas Perkebunan dan Peternakan														48.784.000,00		48.784.000,00
35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				1.785.000,00												1.785.000,00
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.266.657,00			3.895.000,00												13.161.657,00
37	Badan Pendapatan Daerah	1.278.000,00	3.300.000,00	394.000,00	5.295.000,00	113.104.764,00											123.371.764,00
38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.000,00	252.000,00														294.000,00
39	Sekretariat DPRD	1.050.000,00		50.000,00	1.525.000,00			90.000,00									2.715.000,00
40	Kantor Camat Ile Mandiri	30.000,00	122.500,00		105.000,00												257.500,00
41	Kantor Camat Adonara Barat	1.185.500,00			131.250,00												1.316.750,00
42	Kantor Camat Tanjung Bunga	180.000,00	635.000,00		370.000,00												1.185.000,00
43	Kantor Camat Adonara	380.000,00															380.000,00
44	Kantor Camat Adonara Tengah	300.000,00															300.000,00
	JUMLAH	**18.999.707,00**	**4.414.500,00**	**644.000,00**	**109.729.950,00**	**113.104.764,00**	**7.617.383.762,32**	**3.085.000,00**	**28.800.000,00**	**-**	**-**	**3.300.000,00**	**7.501.300.033,69**	**58.644.300,00**	**16.199.858.556,00**	**276.147.600,00**	**31.935.412.173,01**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DAFTAR ASET TETAP - TANAH PER ENTITTAS AKUNTANSI

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	27.428.585.470,00				27.428.585.470,00
2	Dinas Kesehatan	428.080.000,00	90.000.000,00			518.080.000,00
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	4.065.400.000,00				4.065.400.000,00
4	RSUD Adonara					-
5	Puskesmas Boru	90.052.000,00				90.052.000,00
6	Puskesmas Ile Bura	124.583.000,00				124.583.000,00
7	Puskesmas Lato	38.000.000,00				38.000.000,00
8	Puskesmas Lewolaga	70.000.000,00				70.000.000,00
9	Puskesmas Demon Pagong	17.600.000,00				17.600.000,00
10	Puskesmas Oka	203.600.000,00				203.600.000,00
11	Puskesmas Lewolema	36.120.000,00				36.120.000,00
12	Puskesmas Waiklibang	41.598.000,00				41.598.000,00
13	Puskesmas Waimana	191.450.000,00				191.450.000,00
14	Puskesmas Waiwadan	115.385.000,00				115.385.000,00
15	Puskesmas Lite	17.640.000,00				17.640.000,00
16	Puskesmas Sagu	19.238.000,00				19.238.000,00
17	Puskesmas Lambunga	38.975.000,00				38.975.000,00
18	Puskesmas Witihama	10.800.000,00				10.800.000,00
19	Puskesmas Waiwerang	650.753.000,00				650.753.000,00
20	Puskesmas Ile Boleng	33.210.000,00				33.210.000,00
21	Puskesmas Baniona	16.625.000,00				16.625.000,00
22	Puskesmas Menanga	45.370.000,00				45.370.000,00
23	Puskesmas Kalike	10.163.000,00				10.163.000,00
24	Puskesmas Ritaebang	84.248.000,00				84.248.000,00
25	Puskesmas Nagi	32.580.000,00				32.580.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.208.821.757,00				48.208.821.757,00
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.584.641.115,00				12.584.641.115,00
28	Satuan Polisi Pamong Praja	18.848.000,00				18.848.000,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-				-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
30	Dinas Sosial	230.720.000,00				230.720.000,00
31	Dinas Tenaga Kerja	-				-
32	Dinas Lingkungan Hidup	511.300.000,00				511.300.000,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.600.000,00				3.600.000,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-				-
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-				-
36	Dinas Perhubungan	1.139.340.000,00				1.139.340.000,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	-				-
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	11.500.000,00				11.500.000,00
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-				-
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-				-
41	Dinas Perikanan	895.000.200,00				895.000.200,00
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	823.015.100,00				823.015.100,00
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.642.532.000,00				1.642.532.000,00
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	4.000.000,00				4.000.000,00
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.357.145.000,00				1.357.145.000,00
46	Bagian Umum	230.719.000,00				230.719.000,00
47	Kepala Daerah	-				-
48	Wakil Kepala Daerah	-				-
49	Inspektorat Daerah	-				-
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	494.700.000,00				494.700.000,00
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.545.985.050,00				13.545.985.050,00
52	Badan Pendapatan Daerah	822.400.000,00				822.400.000,00
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64.800.000,00				64.800.000,00
54	Sekretariat DPRD	-				-
55	Kantor Camat Wulanggitang	361.273.000,00				361.273.000,00
56	Kantor Camat Titehena	130.086.000,00				130.086.000,00
57	Kantor Camat Larantuka	51.021.000,00				51.021.000,00
58	Kantor Lurah Lewolere	50.000.000,00				50.000.000,00
59	Kantor Lurah Waibalun	39.920.000,00				39.920.000,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
60	Kantor Lurah Larantuka	-				-
61	Kantor Lurah Pantai Besar	100.000.000,00				100.000.000,00
62	Kantor Lurah Balela	43.980.000,00				43.980.000,00
63	Kantor Lurah Pohon Sirih	34.560.000,00				34.560.000,00
64	Kantor Lurah Lohayong	34.470.000,00				34.470.000,00
65	Kantor Lurah Lokea	58.050.000,00				58.050.000,00
66	Kantor Lurah Postoh	14.400.000,00				14.400.000,00
67	Kantor Lurah Ekasapta	48.800.000,00				48.800.000,00
68	Kantor Lurah Amagarapati	28.000.000,00				28.000.000,00
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	49.000.000,00				49.000.000,00
70	Kantor Lurah Sarotari	47.660.000,00				47.660.000,00
71	Kantor Lurah Weri	49.280.000,00				49.280.000,00
72	Kantor Lurah Pohon Bao	-				-
73	Kantor Lurah Waihali	-				-
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah	90.530.000,00				90.530.000,00
75	Kantor Lurah Sarotari Timur	-				-
76	Kantor Camat Ile Mandiri	115.720.000,00				115.720.000,00
77	Kantor Camat Tanjung Bunga	329.590.500,00				329.590.500,00
78	Kantor Camat Solor Barat	83.005.000,00				83.005.000,00
79	Kantor Lurah Ritaebang	1.250.000,00				1.250.000,00
80	Kantor Camat Solor Timur	159.092.000,00				159.092.000,00
81	Kantor Camat Adonara Barat	138.625.000,00				138.625.000,00
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado	72.840.000,00				72.840.000,00
83	Kantor Camat Adonara Timur	459.620.000,00				459.620.000,00
84	Kantor Lurah Waiwerang	-				-
85	Kantor Lurah Lamatewelu	24.930.000,00				24.930.000,00
86	Kantor Camat Kelubagolit	51.396.000,00				51.396.000,00
87	Kantor Camat Witihama	38.760.000,00				38.760.000,00
88	Kantor Camat Ile Boleng	42.390.000,00				42.390.000,00
89	Kantor Camat Demon Pagong	100.000.000,00				100.000.000,00
90	Kantor Camat Lewolema	105.000.000,00				105.000.000,00
91	Kantor Camat Ile Bura	47.827.750,00				47.827.750,00
92	Kantor Camat Adonara	49.747.000,00				49.747.000,00
93	Kantor Camat Adonara Tengah	39.000.000,00				39.000.000,00
94	Kantor Camat Solor Selatan	40.000.000,00				40.000.000,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-				-
JUMLAH		**119.528.945.942,00**	**90.000.000,00**	**-**	**-**	**119.618.945.942,00**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN PER ENTITTAS AKUNTANSI
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	71.344.597.976,67	5.975.235.245,00	5.945.596.150,00	2.794.995.250,00	80.470.434.121,67
2	Dinas Kesehatan	38.871.326.444,00	22.047.859.199,00	17.616.734.688,00	19.405.727.304,00	59.130.193.027,00
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	110.594.313.126,00	4.334.612.293,00	4.672.066.553,00	4.297.112.893,00	115.303.879.079,00
4	RSUD Adonara		7.533.567.405,00	6.037.456.020,00	2.431.001.010,00	11.140.022.415,00
5	Puskesmas Boru	2.205.616.469,00	19.964.500,00	16.729.000,00	15.579.000,00	2.226.730.969,00
6	Puskesmas Ile Bura	1.311.411.237,00	36.473.000,00	11.660.000,00	13.658.000,00	1.345.886.237,00
7	Puskesmas Lato	864.920.692,00	16.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	881.520.692,00
8	Puskesmas Lewolaga	1.049.489.439,00	17.009.850,00	1.601.100,00	1.601.100,00	1.066.499.289,00
9	Puskesmas Demon Pagong	1.139.812.067,00	13.000.000,00		-	1.152.812.067,00
10	Puskesmas Oka	1.726.926.535,00	7.042.000,00		-	1.733.968.535,00
11	Puskesmas Lewolema	586.463.525,00	41.698.000,00	23.778.000,00	25.396.000,00	626.543.525,00
12	Puskesmas Waiklibang	2.341.768.553,00	27.540.000,00	25.250.000,00	1.250.000,00	2.393.308.553,00
13	Puskesmas Waimana	1.339.190.696,00	29.127.500,00		180.000,00	1.368.138.196,00
14	Puskesmas Waiwadan	1.685.011.436,00	61.859.906,00	11.160.000,00	11.160.000,00	1.746.871.342,00
15	Puskesmas Lite	1.527.424.391,00	54.420.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	1.581.844.391,00
16	Puskesmas Sagu	1.341.070.943,00	43.587.956,00	23.642.000,00	23.642.000,00	1.384.658.899,00
17	Puskesmas Lambunga	2.056.167.099,61	21.980.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	2.083.147.099,61
18	Puskesmas Witihama	1.199.877.259,00	45.800.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.245.677.259,00
19	Puskesmas Waiwerang	2.456.566.517,00	54.166.687,00	20.569.188,00	23.669.187,00	2.507.633.205,00
20	Puskesmas Ile Boleng	1.978.937.851,00	72.850.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.051.787.851,00
21	Puskesmas Baniona	1.164.368.749,00	44.700.000,00		-	1.209.068.749,00
22	Puskesmas Menanga	1.411.517.883,00	58.072.000,00	13.187.000,00	12.687.000,00	1.470.089.883,00
23	Puskesmas Kalike	1.138.467.025,00	9.085.000,00	1.800.000,00	2.250.000,00	1.147.102.025,00
24	Puskesmas Ritaebang	2.244.665.961,00	7.798.000,00	2.210.000,00	6.408.000,00	2.248.265.961,00
25	Puskesmas Nagi	1.058.267.400,00	101.174.964,00	12.009.564,00	12.009.564,00	1.159.442.364,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.050.768.788,00	306.074.000,00	12.000.000,00	-	7.368.842.788,00
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	568.936.834,00	41.513.500,00		-	610.450.334,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
28	Satuan Polisi Pamong Praja	3.571.475.626,00	18.388.000,00	5.208.000,00	19.689.000,00	3.575.382.626,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.917.241.500,00	68.871.033,00	257.972.236,00	22.193.089,00	3.221.891.680,00
30	Dinas Sosial	892.941.998,00	39.111.500,00	2.000.000,00	21.430.666,00	912.622.832,00
31	Dinas Tenaga Kerja	734.808.615,00	141.366.050,00	112.976.750,00	117.307.910,00	871.843.505,00
32	Dinas Lingkungan Hidup	5.087.931.346,00	9.248.000,00	500.000,00	-	5.097.679.346,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.600.287.824,00	25.994.500,00	4.000.000,00	-	1.630.282.324,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	767.829.500,00	39.244.000,00		10.570.000,00	796.503.500,00
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.514.961.384,00	334.700.000,00	1.000.000,00	307.100.000,00	8.543.561.384,00
36	Dinas Perhubungan	12.299.229.707,00	22.985.340,00	49.972.000,00	3.575.340,00	12.368.611.707,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	965.671.132,00	41.725.000,00	364.774.500,00	12.510.000,00	1.359.660.632,00
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	913.253.647,00	56.633.320,00	45.413.320,00	45.663.320,00	969.636.967,00
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.033.557.071,00	11.200.000,00	4.685.000,00	-	1.049.442.071,00
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.039.522.134,00	784.665.350,00	623.989.939,00	407.464.850,00	3.040.712.573,00
41	Dinas Perikanan	8.833.981.391,00	441.353.000,00	7.400.000,00	6.064.000,00	9.276.670.391,00
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.050.406.413,96	28.000.000,00		-	2.078.406.413,96
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.102.884.932,00	125.434.500,00	22.500.000,00	25.900.000,00	4.224.919.432,00
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	2.275.022.888,00	100.370.000,00	25.210.000,00	24.925.000,00	2.375.677.888,00
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.099.578.150,00	74.953.500,00	43.893.500,00	44.349.500,00	2.174.075.650,00
46	Bagian Umum	6.090.437.922,00	1.553.193.380,00	157.302.200,00	48.494.130,00	7.752.439.372,00
47	Kepala Daerah	2.171.728.936,00		3.500.000,00	-	2.175.228.936,00
48	Wakil Kepala Daerah	1.445.798.500,00			-	1.445.798.500,00
49	Inspektorat Daerah	901.127.319,00	10.667.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	911.794.819,00
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.696.915.433,00	350.768.000,00	93.600.000,00	247.873.000,00	1.893.410.433,00
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.215.857.788,00	51.813.400,00	1.000.000,00	-	5.268.671.188,00
52	Badan Pendapatan Daerah	1.176.475.542,00	137.584.170,00	6.660.000,00	36.288.916,00	1.284.430.796,00
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.149.771.816,00	88.027.000,00	2.000.000,00	3.347.000,00	1.236.451.816,00
54	Sekretariat DPRD	6.877.936.718,00	1.948.754.550,00	12.930.000,00	-	8.839.621.268,00
55	Kantor Camat Wulanggitang	415.769.000,00	23.020.000,00	9.900.000,00	96.314.000,00	352.375.000,00
56	Kantor Camat Titehena	319.994.000,00	43.662.000,00	1.319.500,00	6.703.700,00	358.271.800,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
57	Kantor Camat Larantuka	557.211.000,00	102.620.500,00	1.000.000,00	-	660.831.500,00
58	Kantor Lurah Lewolere	74.267.500,00	15.770.000,00	15.000.000,00	-	105.037.500,00
59	Kantor Lurah Waibalun	94.587.500,00	15.770.000,00		-	110.357.500,00
60	Kantor Lurah Larantuka	103.873.000,00	15.770.000,00		-	119.643.000,00
61	Kantor Lurah Pantai Besar	47.820.000,00	15.770.000,00		-	63.590.000,00
62	Kantor Lurah Balela	119.973.533,00	15.770.000,00		-	135.743.533,00
63	Kantor Lurah Pohon Sirih	196.404.000,00	15.770.000,00		-	212.174.000,00
64	Kantor Lurah Lohayong	111.180.000,00	15.770.000,00		-	126.950.000,00
65	Kantor Lurah Lokea	129.615.000,00	15.770.000,00		-	145.385.000,00
66	Kantor Lurah Postoh	75.650.000,00	15.770.000,00		-	91.420.000,00
67	Kantor Lurah Ekasapta	88.047.000,00	15.770.000,00		-	103.817.000,00
68	Kantor Lurah Amagarapati	107.988.000,00	15.770.000,00		-	123.758.000,00
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	120.167.000,00	15.770.000,00		-	135.937.000,00
70	Kantor Lurah Sarotari	181.325.000,00	15.770.000,00		-	197.095.000,00
71	Kantor Lurah Weri	80.869.999,00	15.770.000,00		-	96.639.999,00
72	Kantor Lurah Pohon Bao	295.212.210,00	15.770.000,00		-	310.982.210,00
73	Kantor Lurah Waihali	173.844.260,00	15.770.000,00	15.000.000,00	-	204.614.260,00
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah	154.594.210,00	15.770.000,00		-	170.364.210,00
75	Kantor Lurah Sarotari Timur	79.839.710,00	15.770.000,00		-	95.609.710,00
76	Kantor Camat Ile Mandiri	259.640.597,00	16.642.500,00		-	276.283.097,00
77	Kantor Camat Tanjung Bunga	268.347.500,00	37.540.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	305.887.500,00
78	Kantor Camat Solor Barat	323.335.000,00	22.890.000,00		-	346.225.000,00
79	Kantor Lurah Ritaebang	140.715.000,00	15.770.000,00		-	156.485.000,00
80	Kantor Camat Solor Timur	926.422.500,00	25.020.000,00		-	951.442.500,00
81	Kantor Camat Adonara Barat	718.394.250,00	48.239.250,00	475.000,00	24.660.000,00	742.448.500,00
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado	378.742.183,00	22.068.500,00	7.725.000,00	-	408.535.683,00
83	Kantor Camat Adonara Timur	641.082.250,00	55.794.862,00	10.573.752,00	16.790.752,00	690.660.112,00
84	Kantor Lurah Waiwerang	141.337.636,00	18.795.000,00		-	160.132.636,00
85	Kantor Lurah Lamatewelu	90.360.000,00	15.770.000,00		-	106.130.000,00
86	Kantor Camat Kelubagolit	449.400.045,00	20.205.500,00	16.073.750,00	16.073.750,00	469.605.545,00
87	Kantor Camat Witihama	549.032.900,00	13.000.000,00		-	562.032.900,00
88	Kantor Camat Ile Boleng	609.314.500,00	22.045.000,00		-	631.359.500,00
89	Kantor Camat Demon Pagong	802.071.500,00	25.613.500,00		-	827.685.000,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
90	Kantor Camat Lewolema	300.725.000,00	22.890.000,00		-	323.615.000,00
91	Kantor Camat Ile Bura	247.319.650,00	21.034.250,00		-	268.353.900,00
92	Kantor Camat Adonara	330.429.000,00	8.861.796,00	8.861.796,00	8.861.796,00	339.290.796,00
93	Kantor Camat Adonara Tengah	270.093.000,00	46.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	316.593.000,00
94	Kantor Camat Solor Selatan	298.487.063,00	46.795.000,00		-	345.282.063,00
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	843.667.500,00	39.452.500,00	1.500.000,00	-	884.620.000,00
JUMLAH		**359.801.669.125,24**	**48.525.952.256,00**	**36.436.985.506,00**	**30.701.096.027,00**	**414.063.510.860,24**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DAFTAR ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN PER ENTITTAS AKUNTANSI

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	268.003.243.016,10	38.549.049.228,00	13.141.130.901,64	23.153.243.035,00	296.540.180.110,74
2	Dinas Kesehatan	47.858.471.947,00	52.787.643.257,00	4.900.968.670,90	37.612.009.847,24	67.935.074.027,66
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	32.427.975.916,00	107.252.580,00	2.534.377.659,33	857.922.580,00	34.211.683.575,33
4	RSUD Adonara		288.690.000,00	34.638.312.485,90	147.095.000,00	34.779.907.485,90
5	Puskesmas Boru	4.339.264.000,00		-	192.000.000,00	4.147.264.000,00
6	Puskesmas Ile Bura	3.593.103.881,00		-	-	3.593.103.881,00
7	Puskesmas Lato	1.630.588.168,00		-	-	1.630.588.168,00
8	Puskesmas Lewolaga	1.923.017.000,00		-	-	1.923.017.000,00
9	Puskesmas Demon Pagong	1.707.831.261,00		-	-	1.707.831.261,00
10	Puskesmas Oka	3.638.518.013,16		330.575.150,00	286.377.650,00	3.682.715.513,16
11	Puskesmas Lewolema	3.419.327.500,00		-	-	3.419.327.500,00
12	Puskesmas Waiklibang	4.333.841.130,00		-	-	4.333.841.130,00
13	Puskesmas Waimana	1.767.569.999,00		-	-	1.767.569.999,00
14	Puskesmas Waiwadan	3.218.346.790,00		-	-	3.218.346.790,00
15	Puskesmas Lite	3.112.070.087,00		-	-	3.112.070.087,00
16	Puskesmas Sagu	1.455.702.472,00		-	-	1.455.702.472,00
17	Puskesmas Lambunga	1.192.939.000,00		20.000.000,00	-	1.212.939.000,00
18	Puskesmas Witihama	4.234.489.900,00		-	-	4.234.489.900,00
19	Puskesmas Waiwerang	3.174.009.935,11		-	-	3.174.009.935,11
20	Puskesmas Ile Boleng	2.223.420.063,00		10.000.000,00	-	2.233.420.063,00
21	Puskesmas Baniona	2.934.234.696,00		-	-	2.934.234.696,00
22	Puskesmas Menanga	2.367.289.200,00		15.513.000,00	-	2.382.802.200,00
23	Puskesmas Kalike	2.138.004.166,00		-	-	2.138.004.166,00
24	Puskesmas Ritaebang	1.489.038.010,00		-	-	1.489.038.010,00
25	Puskesmas Nagi	1.459.027.000,00		-	-	1.459.027.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.331.818.360,00		12.322.581,00	-	13.344.140.941,00
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	202.500.000,00		-	-	202.500.000,00
28	Satuan Polisi Pamong Praja	985.696.000,00		26.699.000,00	-	1.012.395.000,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.982.234.000,00		-	-	1.982.234.000,00
30	Dinas Sosial	1.561.368.900,00		37.765.000,00	-	1.599.133.900,00
31	Dinas Tenaga Kerja	100.617.599,00		37.323.225,00	-	137.940.824,00
32	Dinas Lingkungan Hidup	1.638.546.500,00		12.258.100,00	-	1.650.804.600,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.694.401.900,00		10.972.000,00	-	1.705.373.900,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	374.963.250,00		9.967.000,00	-	384.930.250,00
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.293.252.941,00		12.189.625,00	-	8.305.442.566,00
36	Dinas Perhubungan	6.298.082.212,00		29.999.000,00	-	6.328.081.212,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	681.573.644,00		-	-	681.573.644,00
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.554.843.000,00		-	-	2.554.843.000,00
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.341.840.000,00	220.028.000,00	-	220.028.000,00	1.341.840.000,00
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	237.600.000,00	10.150.770.000,00	9.447.113.315,69	10.327.908.711,46	9.507.574.604,22
41	Dinas Perikanan	18.453.364.831,00	85.605.905,00	31.805.905,00	40.247.905,00	18.530.528.736,00
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.451.188.169,24		216.760.550,00	-	9.667.948.719,24
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.579.680.699,00		159.845.950,00	-	12.739.526.649,00
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	3.184.539.045,00	197.782.000,00	600.186.000,00	83.791.000,00	3.898.716.045,00
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.665.435.584,00	90.834.900,00	106.624.900,00	90.834.900,00	25.772.060.484,00
46	Bagian Umum	6.875.056.050,00		-	-	6.875.056.050,00
47	Kepala Daerah	2.071.028.428,00		48.984.000,00	14.000.000,00	2.106.012.428,00
48	Wakil Kepala Daerah	1.887.339.601,00		-	-	1.887.339.601,00
49	Inspektorat Daerah	334.613.000,00		-	-	334.613.000,00
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.543.575.868,00		28.332.000,00	-	4.571.907.868,00
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3.382.482.988,00		76.393.328,00	-	3.458.876.316,00
52	Badan Pendapatan Daerah	2.494.015.000,00		-	-	2.494.015.000,00
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	485.934.000,00		-	-	485.934.000,00
54	Sekretariat DPRD	2.446.166.500,00		43.415.125,00	-	2.489.581.625,00
55	Kantor Camat Wulanggitang	1.444.503.500,00		-	1.091.399.500,00	353.104.000,00
56	Kantor Camat Titehena	399.600.000,00		32.642.750,00	-	432.242.750,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
57	Kantor Camat Larantuka	2.725.798.000,00	94.000.000,00	1.000.000,00	-	2.820.798.000,00
58	Kantor Lurah Lewolere	567.000.000,00		106.700.000,00	-	673.700.000,00
59	Kantor Lurah Waibalun	252.208.000,00		-	-	252.208.000,00
60	Kantor Lurah Larantuka	1.033.253.858,00		66.005.753,00	91.734.000,00	1.007.525.611,00
61	Kantor Lurah Pantai Besar	432.250.000,00		125.000.000,00	-	557.250.000,00
62	Kantor Lurah Balela	477.450.000,00		-	-	477.450.000,00
63	Kantor Lurah Pohon Sirih	401.204.100,00		15.415.000,00	-	416.619.100,00
64	Kantor Lurah Lohayong	1.303.809.907,00		125.000.000,00	-	1.428.809.907,00
65	Kantor Lurah Lokea	359.781.000,00		-	-	359.781.000,00
66	Kantor Lurah Postoh	334.529.198,00		35.000.000,00	-	369.529.198,00
67	Kantor Lurah Ekasapta	331.765.334,00		-	-	331.765.334,00
68	Kantor Lurah Amagarapati	422.843.000,00		-	-	422.843.000,00
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	275.365.000,00		-	-	275.365.000,00
70	Kantor Lurah Sarotari	-		-	-	-
71	Kantor Lurah Weri	296.606.130,00		-	-	296.606.130,00
72	Kantor Lurah Pohon Bao	334.012.333,00		-	-	334.012.333,00
73	Kantor Lurah Waihali	700.061.333,00		-	-	700.061.333,00
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah	876.928.600,00		-	-	876.928.600,00
75	Kantor Lurah Sarotari Timur	722.464.325,00		-	-	722.464.325,00
76	Kantor Camat Ile Mandiri	1.019.128.500,00		340.409.400,00	-	1.359.537.900,00
77	Kantor Camat Tanjung Bunga	448.698.000,00		3.922.500,00	-	452.620.500,00
78	Kantor Camat Solor Barat	633.000.000,00		-	-	633.000.000,00
79	Kantor Lurah Ritaebang	-		215.344.000,00	-	215.344.000,00
80	Kantor Camat Solor Timur	1.066.711.130,00		-	-	1.066.711.130,00
81	Kantor Camat Adonara Barat	910.500.000,00		20.005.250,00	-	930.505.250,00
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado	376.500.000,00		10.430.000,00	-	386.930.000,00
83	Kantor Camat Adonara Timur	2.209.474.000,00		19.971.563,00	-	2.229.445.563,00
84	Kantor Lurah Waiwerang	20.452.720,00		-	-	20.452.720,00
85	Kantor Lurah Lamatewelu	401.774.680,00		-	-	401.774.680,00
86	Kantor Camat Kelubagolit	491.750.000,00		-	-	491.750.000,00
87	Kantor Camat Witihama	497.700.000,00		-	-	497.700.000,00
88	Kantor Camat Ile Boleng	896.601.000,00		31.573.500,00	-	928.174.500,00
89	Kantor Camat Demon Pagong	613.005.000,00		38.965.500,00	-	651.970.500,00
90	Kantor Camat Lewolema	657.715.000,00		9.989.000,00	-	667.704.000,00
91	Kantor Camat Ile Bura	667.864.000,00		-	-	667.864.000,00
92	Kantor Camat Adonara	947.218.213,00		122.981.325,00	-	1.070.199.538,00
93	Kantor Camat Adonara Tengah	898.447.800,00		31.930.000,00	-	930.377.800,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
94	Kantor Camat Solor Selatan	865.316.000,00		-	-	865.316.000,00
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	459.000.000,00		-	-	459.000.000,00
JUMLAH		**566.547.370.880,61**	**102.571.655.870,00**	**67.892.120.013,46**	**74.208.592.128,70**	**662.802.554.635,37**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DAFTAR ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER ENTITTAS AKUNTANSI

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.976.415.415,70		3.999.892.985,00	193.827.300,00	11.782.481.100,70
2	Dinas Kesehatan	2.396.005.796,00	1.434.499.000,00	276.407.501,00	2.200.151.296,00	1.906.761.001,00
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	7.549.711.744,00		95.310.000,00	-	7.645.021.744,00
4	RSUD Adonara		511.287.000,00	1.993.105.296,00	177.197.000,00	2.327.195.296,00
5	Puskesmas Boru	1.079.565.385,00		-	-	1.079.565.385,00
6	Puskesmas Ile Bura	289.596.641,00		-	-	289.596.641,00
7	Puskesmas Lato	-		-	-	-
8	Puskesmas Lewolaga	-		-	-	-
9	Puskesmas Demon Pagong	-		-	-	-
10	Puskesmas Oka	606.053.000,00		-	-	606.053.000,00
11	Puskesmas Lewolema	-		-	-	-
12	Puskesmas Waiklibang	843.456.593,00		-	-	843.456.593,00
13	Puskesmas Waimana	-		-	-	-
14	Puskesmas Waiwadan	710.778.719,00		-	-	710.778.719,00
15	Puskesmas Lite	-		-	-	-
16	Puskesmas Sagu	-		-	-	-
17	Puskesmas Lambunga	896.207.894,61		-	290.157.894,61	606.050.000,00
18	Puskesmas Witihama	-		-	-	-
19	Puskesmas Waiwerang	604.670.590,00		-	-	604.670.590,00
20	Puskesmas Ile Boleng	-		-	-	-
21	Puskesmas Baniona	-		-	-	-
22	Puskesmas Menanga	856.335.088,00		-	-	856.335.088,00
23	Puskesmas Kalike	-		-	-	-
24	Puskesmas Ritaebang	702.172.938,00		-	-	702.172.938,00
25	Puskesmas Nagi	-		-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.223.155.075.801,71	33.278.610.670,00	19.541.379.601,26	4.943.497.913,86	1.271.031.568.159,11
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-		-	-	-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
28	Satuan Polisi Pamong Praja	100.572.489,00		-	-	100.572.489,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.631.227.599,93		-	-	35.631.227.599,93
30	Dinas Sosial	-	3.559.400,00	3.559.400,00	3.559.400,00	3.559.400,00
31	Dinas Tenaga Kerja	-		-	-	-
32	Dinas Lingkungan Hidup	192.529.299,00		-	-	192.529.299,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42.877.650,00		-	-	42.877.650,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-		-	-	-
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-		-	-	-
36	Dinas Perhubungan	50.321.360.701,00	972.406.278,00	1.030.406.278,00	972.406.278,00	51.351.766.979,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	-		-	-	-
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-		-	-	-
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-		228.278.000,00	-	228.278.000,00
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-		583.870.195,31	-	583.870.195,31
41	Dinas Perikanan	2.728.624.250,00	332.845.000,00	200.942.000,00	199.942.000,00	3.062.469.250,00
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.574.262.942,48		52.316.250,00	-	5.626.579.192,48
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.583.881.650,00	35.000.000,00	-	-	1.618.881.650,00
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	16.999.875,00	16.999.875,00	16.999.875,00	16.999.875,00
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.436.219.010,00		50.000.000,00	-	1.486.219.010,00
46	Bagian Umum	544.787.500,00		-	-	544.787.500,00
47	Kepala Daerah	-		-	-	-
48	Wakil Kepala Daerah	-		-	-	-
49	Inspektorat Daerah	-		-	-	-
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	242.250.000,00		-	-	242.250.000,00
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	773.954.000,00		-	-	773.954.000,00
52	Badan Pendapatan Daerah	-		-	-	-
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-		-	-	-
54	Sekretariat DPRD	-		-	-	-
55	Kantor Camat Wulanggitang	509.423.000,00		-	-	509.423.000,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
56	Kantor Camat Titehena	756.255.599,00		-	-	756.255.599,00
57	Kantor Camat Larantuka	831.127.300,00		-	-	831.127.300,00
58	Kantor Lurah Lewolere	1.198.692.583,00		-	-	1.198.692.583,00
59	Kantor Lurah Waibalun	1.352.000.595,00		-	-	1.352.000.595,00
60	Kantor Lurah Larantuka	617.724.140,00		58.994.247,00	-	676.718.387,00
61	Kantor Lurah Pantai Besar	763.184.000,00		-	-	763.184.000,00
62	Kantor Lurah Balela	734.353.400,00		-	-	734.353.400,00
63	Kantor Lurah Pohon Sirih	381.506.500,00		109.285.000,00	-	490.791.500,00
64	Kantor Lurah Lohayong	478.467.986,00		-	-	478.467.986,00
65	Kantor Lurah Lokea	1.201.756.427,00		114.750.000,00	-	1.316.506.427,00
66	Kantor Lurah Postoh	244.531.745,00		-	-	244.531.745,00
67	Kantor Lurah Ekasapta	387.473.520,00		-	-	387.473.520,00
68	Kantor Lurah Amagarapati	1.437.176.000,00		-	-	1.437.176.000,00
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	1.908.082.924,00		100.000.000,00	-	2.008.082.924,00
70	Kantor Lurah Sarotari	1.559.390.962,00		109.500.000,00	-	1.668.890.962,00
71	Kantor Lurah Weri	1.658.254.815,00		69.900.000,00	-	1.728.154.815,00
72	Kantor Lurah Pohon Bao	646.138.000,00		-	-	646.138.000,00
73	Kantor Lurah Waihali	603.064.200,00		114.750.000,00	-	717.814.200,00
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah	974.611.774,00		-	-	974.611.774,00
75	Kantor Lurah Sarotari Timur	52.700.000,00		115.500.000,00	-	168.200.000,00
76	Kantor Camat Ile Mandiri	1.038.095.000,00		-	-	1.038.095.000,00
77	Kantor Camat Tanjung Bunga	1.057.075.000,00		-	-	1.057.075.000,00
78	Kantor Camat Solor Barat	1.120.011.521,00		-	-	1.120.011.521,00
79	Kantor Lurah Ritaebang	668.800.524,00		116.000.000,00	-	784.800.524,00
80	Kantor Camat Solor Timur	956.802.906,00		-	-	956.802.906,00
81	Kantor Camat Adonara Barat	1.589.500.000,00		-	-	1.589.500.000,00
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado	605.650.000,00		-	-	605.650.000,00
83	Kantor Camat Adonara Timur	1.394.379.090,00		-	-	1.394.379.090,00
84	Kantor Lurah Waiwerang	753.045.560,00		124.250.000,00	-	877.295.560,00
85	Kantor Lurah Lamatewelu	373.724.000,00		-	-	373.724.000,00
86	Kantor Camat Kelubagolit	1.312.795.000,00		-	-	1.312.795.000,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
87	Kantor Camat Witihama	519.900.000,00		-	-	519.900.000,00
88	Kantor Camat Ile Boleng	1.605.488.038,00		-	-	1.605.488.038,00
89	Kantor Camat Demon Pagong	631.526.000,00		-	-	631.526.000,00
90	Kantor Camat Lewolema	908.748.000,00		-	-	908.748.000,00
91	Kantor Camat Ile Bura	739.687.050,00		-	-	739.687.050,00
92	Kantor Camat Adonara	247.500.000,00		-	-	247.500.000,00
93	Kantor Camat Adonara Tengah	193.300.000,00		-	-	193.300.000,00
94	Kantor Camat Solor Selatan	402.851.333,00		-	-	402.851.333,00
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-		-	-	-
JUMLAH		**1.381.253.387.189,43**	**36.585.207.223,00**	**29.105.396.628,57**	**8.997.738.957,47**	**1.437.946.252.083,53**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DAFTAR ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA PER ENTITTAS AKUNTANSI
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.417.000.398,99	2.089.014.250,00	268.377.740,00	64.169.050,00	10.710.223.338,99
2	Dinas Kesehatan	-				-
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	464.403.500,00				464.403.500,00
4	RSUD Adonara					-
5	Puskesmas Boru					
6	Puskesmas Ile Bura					
7	Puskesmas Lato					
8	Puskesmas Lewolaga					
9	Puskesmas Demon Pagong					
10	Puskesmas Oka					
11	Puskesmas Lewolema					
12	Puskesmas Waiklibang					
13	Puskesmas Waimana					
14	Puskesmas Waiwadan					
15	Puskesmas Lite					
16	Puskesmas Sagu					
17	Puskesmas Lambunga					
18	Puskesmas Witihama					
19	Puskesmas Waiwerang					
20	Puskesmas Ile Boleng					
21	Puskesmas Baniona					
22	Puskesmas Menanga					
23	Puskesmas Kalike					
24	Puskesmas Ritaebang					
25	Puskesmas Nagi					
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.179.208.400,00				1.179.208.400,00
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-				-
28	Satuan Polisi Pamong Praja	-				-
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-				-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
30	Dinas Sosial	-				-
31	Dinas Tenaga Kerja	-				-
32	Dinas Lingkungan Hidup	399.378.600,00	33.871.200,00	1.500.000,00	31.081.200,00	403.668.600,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-				-
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-				-
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-				-
36	Dinas Perhubungan	26.050.000,00				26.050.000,00
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	-				-
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-				-
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-				-
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	527.826.360,05				527.826.360,05
41	Dinas Perikanan	-				-
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	42.000.000,00				42.000.000,00
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-				-
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	30.462.800,00		10.000.000,00	27.308.533,34	13.154.266,66
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-				-
46	Bagian Umum	190.875.000,00				190.875.000,00
47	Kepala Daerah	-				-
48	Wakil Kepala Daerah	-				-
49	Inspektorat Daerah	-				-
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-				-
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-				-
52	Badan Pendapatan Daerah	-				-
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-				-
54	Sekretariat DPRD	-				-
55	Kantor Camat Wulanggitang	-				-
56	Kantor Camat Titehena	-				-
57	Kantor Camat Larantuka	-				-
58	Kantor Lurah Lewolere	-				-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
59	Kantor Lurah Waibalun	-				-
60	Kantor Lurah Larantuka					
61	Kantor Lurah Pantai Besar	-				-
62	Kantor Lurah Balela	-				-
63	Kantor Lurah Pohon Sirih	-				-
64	Kantor Lurah Lohayong	98.917.000,00				98.917.000,00
65	Kantor Lurah Lokea	-				-
66	Kantor Lurah Postoh	-				-
67	Kantor Lurah Ekasapta	-				-
68	Kantor Lurah Amagarapati	-				-
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	-				-
70	Kantor Lurah Sarotari	-				-
71	Kantor Lurah Weri	-				-
72	Kantor Lurah Pohon Bao	-				-
73	Kantor Lurah Waihali	-				-
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah	-				-
75	Kantor Lurah Sarotari Timur	-				-
76	Kantor Camat Ile Mandiri	-				-
77	Kantor Camat Tanjung Bunga	-				-
78	Kantor Camat Solor Barat	-				-
79	Kantor Lurah Ritaebang	-				-
80	Kantor Camat Solor Timur	-				-
81	Kantor Camat Adonara Barat	1.500.000,00				1.500.000,00
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado	-				-
83	Kantor Camat Adonara Timur	-				-
84	Kantor Lurah Waiwerang	-				-
85	Kantor Lurah Lamatewelu	-				-
86	Kantor Camat Kelubagolit	-				-
87	Kantor Camat Witihama	-				-
88	Kantor Camat Ile Boleng	-				-
89	Kantor Camat Demon Pagong	-				-
90	Kantor Camat Lewolema	-				-
91	Kantor Camat Ile Bura	-				-
92	Kantor Camat Adonara	-				-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Pembelian	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
93	Kantor Camat Adonara Tengah	-				-
94	Kantor Camat Solor Selatan	-				-
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-				-
Jumlah		**11.377.622.059,04**	**2.122.885.450,00**	**279.877.740,00**	**122.558.783,34**	**13.657.826.465,70**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DAFTAR ASET TETAP - KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER ENTITTAS AKUNTANSI
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12.502.328.110,64	9.962.176.228,00	12.519.198.110,64	9.945.306.228,00
2	Dinas Kesehatan	3.945.393.456,90	963.490.054,00	3.866.503.456,90	1.042.380.054,00
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1.778.052.918,33		1.778.052.918,33	-
4	RSUD Adonara				
5	Puskesmas Boru				
6	Puskesmas Ile Bura				
7	Puskesmas Lato				
8	Puskesmas Lewolaga				
9	Puskesmas Demon Pagong				
10	Puskesmas Oka				
11	Puskesmas Lewolema				
12	Puskesmas Waiklibang				
13	Puskesmas Waimana				
14	Puskesmas Waiwadan				
15	Puskesmas Lite				
16	Puskesmas Sagu				
17	Puskesmas Lambunga				
18	Puskesmas Witihama				
19	Puskesmas Waiwerang				
20	Puskesmas Ile Boleng				
21	Puskesmas Baniona				
22	Puskesmas Menanga				
23	Puskesmas Kalike				
24	Puskesmas Ritaebang				

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
25	Puskesmas Nagi				
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.859.430.952,26	1.966.912.573,00	16.669.450.952,26	2.156.892.573,00
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-			-
28	Satuan Polisi Pamong Praja	-			-
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-
30	Dinas Sosial	-			-
31	Dinas Tenaga Kerja	-			-
32	Dinas Lingkungan Hidup	-			-
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			-
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-			-
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-			-
36	Dinas Perhubungan	-			-
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			-
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-			-
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-			-
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-			-
41	Dinas Perikanan	474.396.080,00			474.396.080,00
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-			-
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-			-
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-			-
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-			-
46	Bagian Umum	-			-
47	Kepala Daerah	-			-
48	Wakil Kepala Daerah	-			-
49	Inspektorat Daerah	-			-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-			-
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-			-
52	Badan Pendapatan Daerah	-			-
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-			-
54	Sekretariat DPRD	696.211.000,00			696.211.000,00
55	Kantor Camat Wulanggitang	-			-
56	Kantor Camat Titehena	-			-
57	Kantor Camat Larantuka	-			-
58	Kantor Lurah Lewolere	-			-
59	Kantor Lurah Waibalun	-			-
60	Kantor Lurah Larantuka	-			-
61	Kantor Lurah Pantai Besar	-			-
62	Kantor Lurah Balela	-			-
63	Kantor Lurah Pohon Sirih	-			-
64	Kantor Lurah Lohayong	-			-
65	Kantor Lurah Lokea	-			-
66	Kantor Lurah Postoh	-			-
67	Kantor Lurah Ekasapta	-			-
68	Kantor Lurah Amagarapati	-			-
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	-			-
70	Kantor Lurah Sarotari	-			-
71	Kantor Lurah Weri	-			-
72	Kantor Lurah Pohon Bao	-			-
73	Kantor Lurah Waihali	-			-
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah	-			-
75	Kantor Lurah Sarotari Timur	-			-
76	Kantor Camat Ile Mandiri	-			-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
77	Kantor Camat Tanjung Bunga	-			-
78	Kantor Camat Solor Barat	-			-
79	Kantor Lurah Ritaebang	-			-
80	Kantor Camat Solor Timur	-			-
81	Kantor Camat Adonara Barat	-			-
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado	-			-
83	Kantor Camat Adonara Timur	-			-
84	Kantor Lurah Waiwerang	-			-
85	Kantor Lurah Lamatewelu	-			-
86	Kantor Camat Kelubagolit	-			-
87	Kantor Camat Witihama	-			-
88	Kantor Camat Ile Boleng	-			-
89	Kantor Camat Demon Pagong	-			-
90	Kantor Camat Lewolema	-			-
91	Kantor Camat Ile Bura	-			-
92	Kantor Camat Adonara	-			-
93	Kantor Camat Adonara Tengah	-			-
94	Kantor Camat Solor Selatan	-			-
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-
JUMLAH		**36.255.812.518,13**	**12.892.578.855,00**	**34.833.205.438,13**	**14.315.185.935,00**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	55.220.211.200,18	9.873.319.978,38	3.667.141.364,24	61.426.389.814,32
2	Dinas Kesehatan	22.789.461.114,47	7.250.775.404,28	600.934.778,00	29.439.301.740,74
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	85.081.397.705,67	12.156.046.309,51	9.176.590,39	97.228.267.424,79
4	RSUD Adonara	-	2.595.267.185,00	-	2.595.267.185,00
5	Puskesmas Boru	1.153.067.110,30	186.869.344,10	-	1.339.936.454,40
6	Puskesmas Ile Bura	980.958.616,92	80.504.612,60	-	1.061.463.229,52
7	Puskesmas Lato	792.262.043,67	39.944.411,30	-	832.206.454,97
8	Puskesmas Lewolaga	829.068.276,01	89.341.934,90	-	918.410.210,91
9	Puskesmas Demon Pagong	1.056.863.546,20	41.433.563,30	1.539.848,10	1.096.757.261,40
10	Puskesmas Oka	1.118.202.979,12	147.383.357,10	1.253.333,33	1.264.333.002,89
11	Puskesmas Lewolema	500.952.443,80	35.556.465,60	-	536.508.909,40
12	Puskesmas Waiklibang	1.452.544.838,72	183.853.229,27	-	1.636.398.067,99
13	Puskesmas Waimana	1.113.216.283,36	55.994.077,99	199.285,71	1.169.011.075,63
14	Puskesmas Waiwadan	1.118.139.310,16	198.992.695,10	-	1.317.132.005,26
15	Puskesmas Lite	1.291.499.370,87	94.068.029,80	-	1.385.567.400,67
16	Puskesmas Sagu	1.041.516.934,26	123.686.405,30	-	1.165.203.339,56
17	Puskesmas Lambunga	1.109.214.833,05	224.357.560,46	-	1.333.572.393,51
18	Puskesmas Witihama	970.342.901,60	112.471.176,60	-	1.082.814.078,20
19	Puskesmas Waiwerang	1.939.943.263,02	151.290.810,00	-	2.091.234.073,02
20	Puskesmas Ile Boleng	1.243.782.532,00	215.936.186,00	-	1.459.718.718,00
21	Puskesmas Baniona	913.457.766,07	92.756.043,90	-	1.006.213.809,97
22	Puskesmas Menanga	690.012.219,00	146.481.974,80	-	836.494.193,80
23	Puskesmas Kalike	866.808.562,99	68.663.899,10	75.000,00	935.397.462,09
24	Puskesmas Ritaebang	957.915.388,43	229.909.335,10	-	1.187.824.723,53
25	Puskesmas Nagi	880.521.810,88	112.616.258,20	-	993.138.069,08
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.001.738.394,00	260.563.319,00	-	6.262.301.713,00
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	540.243.546,50	20.016.337,50	-	560.259.884,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
28	Satuan Polisi Pamong Praja	2.796.134.892,60	254.117.552,40	16.881.000,00	3.033.371.445,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.885.227.025,00	233.216.371,00	-	3.118.443.396,00
30	Dinas Sosial	815.027.055,50	29.088.410,00	21.430.666,00	822.684.799,50
31	Dinas Tenaga Kerja	653.065.761,00	64.712.506,00	-	717.778.267,00
32	Dinas Lingkungan Hidup	3.016.405.228,68	295.667.606,89	4.477.188,21	3.307.595.647,35
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.494.697.859,00	41.349.030,00	-	1.536.046.889,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	735.551.350,00	18.452.200,00	10.570.000,00	743.433.550,00
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.137.664.194,00	682.939.130,00	87.834.640,00	6.732.768.684,00
36	Dinas Perhubungan	12.499.016.712,46	1.366.885.018,74	2.329.870.000,00	11.536.031.731,20
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	760.476.632,00	132.097.400,00	-	892.574.032,00
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	895.123.487,00	12.185.472,00	-	907.308.959,00
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	934.918.712,53	36.333.039,20	-	971.251.751,73
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.672.935.993,20	310.142.441,75	-	1.983.078.434,95
41	Dinas Perikanan	8.777.001.841,00	134.752.640,00	-	8.911.754.481,00
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.749.831.858,28	148.335.055,29	22.016.295,21	1.876.150.618,37
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.060.340.649,90	225.110.102,10	-	3.285.450.752,00
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.834.921.854,80	207.740.749,90	3.007.076,70	2.039.655.528,00
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.743.282.650,00	104.798.500,00	-	1.848.081.150,00
46	Bagian Umum	5.186.155.597,60	411.611.818,60	-	5.597.767.416,20
47	Kepala Daerah	2.007.149.627,20	44.644.827,20	-	2.051.794.454,40
48	Wakil Kepala Daerah	1.354.746.700,00	25.473.300,00	-	1.380.220.000,00
49	Inspektorat Daerah	810.208.053,00	30.293.875,20	4.759.274,80	835.742.653,40
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.558.868.500,93	115.534.771,80	-	1.674.403.272,73
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.848.492.831,63	184.892.505,50	37.534.000,00	4.995.851.337,13
52	Badan Pendapatan Daerah	1.094.900.712,33	65.881.497,00	26.628.916,00	1.134.153.293,33
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.112.902.416,00	29.813.600,00	-	1.142.716.016,00
54	Sekretariat DPRD	6.110.974.314,67	478.028.500,00	-	6.589.002.814,67

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
55	Kantor Camat Wulanggitang	392.433.000,00	18.467.000,00	91.689.000,00	319.211.000,00
56	Kantor Camat Titehena	268.577.000,00	27.619.360,00	-	296.196.360,00
57	Kantor Camat Larantuka	528.067.000,00	29.567.100,00	-	557.634.100,00
58	Kantor Lurah Lewolere	74.267.500,00	6.154.000,00	-	80.421.500,00
59	Kantor Lurah Waibalun	89.812.000,00	6.181.500,00	-	95.993.500,00
60	Kantor Lurah Larantuka	98.768.400,00	6.581.300,00	-	105.349.700,00
61	Kantor Lurah Pantai Besar	44.266.000,00	4.931.000,00	-	49.197.000,00
62	Kantor Lurah Balela	119.973.533,00	3.154.000,00	-	123.127.533,00
63	Kantor Lurah Pohon Sirih	190.535.800,00	9.022.200,00	-	199.558.000,00
64	Kantor Lurah Lohayong	107.024.000,00	5.332.000,00	-	112.356.000,00
65	Kantor Lurah Lokea	126.095.000,00	4.914.000,00	-	131.009.000,00
66	Kantor Lurah Postoh	75.650.000,00	3.154.000,00	-	78.804.000,00
67	Kantor Lurah Ekasapta	82.527.000,00	5.914.000,00	-	88.441.000,00
68	Kantor Lurah Amagarapati	101.016.400,00	7.595.600,00	-	108.612.000,00
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	120.167.000,00	3.154.000,00	-	123.321.000,00
70	Kantor Lurah Sarotari	181.325.000,00	3.154.000,00	-	184.479.000,00
71	Kantor Lurah Weri	77.329.999,00	4.924.000,00	-	82.253.999,00
72	Kantor Lurah Pohon Bao	267.934.674,29	22.235.900,00	416.250,00	289.754.324,29
73	Kantor Lurah Waihali	160.330.248,57	16.735.260,00	-	177.065.508,57
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah	143.198.210,00	12.790.000,00	-	155.988.210,00
75	Kantor Lurah Sarotari Timur	76.663.710,00	4.742.000,00	-	81.405.710,00
76	Kantor Camat Ile Mandiri	245.542.597,00	10.367.500,00	-	255.910.097,00
77	Kantor Camat Tanjung Bunga	231.522.500,00	22.468.500,00	-	253.991.000,00
78	Kantor Camat Solor Barat	297.273.000,00	19.670.000,00	-	316.943.000,00
79	Kantor Lurah Ritaebang	128.557.000,00	14.447.500,00	997.500,00	142.007.000,00
80	Kantor Camat Solor Timur	896.039.000,00	18.718.500,00	-	914.757.500,00
81	Kantor Camat Adonara Barat	664.642.150,00	20.164.200,00	-	684.806.350,00
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado	342.320.783,00	24.078.800,00	-	366.399.583,00
83	Kantor Camat Adonara Timur	607.560.250,00	25.550.572,40	-	633.110.822,40
84	Kantor Lurah Waiwerang	126.157.136,00	8.185.300,00	-	134.342.436,00
85	Kantor Lurah Lamatewelu	79.531.000,00	7.385.000,00	-	86.916.000,00
86	Kantor Camat Kelubagolit	390.525.709,00	26.893.209,00	-	417.418.918,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuaian Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
87	Kantor Camat Witihama	485.635.980,00	27.721.380,00	-	513.357.360,00
88	Kantor Camat Ile Boleng	585.342.500,00	15.794.500,00	-	601.137.000,00
89	Kantor Camat Demon Pagong	776.689.000,00	18.889.200,00	-	795.578.200,00
90	Kantor Camat Lewolema	274.042.000,00	18.015.000,00	-	292.057.000,00
91	Kantor Camat Ile Bura	210.740.520,00	13.989.480,00	-	224.730.000,00
92	Kantor Camat Adonara	282.312.200,00	18.739.159,20	-	301.051.359,20
93	Kantor Camat Adonara Tengah	236.790.375,00	21.417.625,00	-	258.208.000,00
94	Kantor Camat Solor Selatan	249.084.245,93	29.912.245,93	-	278.996.491,87
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	839.367.050,00	9.970.950,00	-	849.338.000,00
Jumlah		**279.475.001.972,32**	**41.050.898.666,29**	**6.938.432.006,70**	**313.587.468.631,91**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP BANGUNAN DAN GEDUNG
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuain Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	75.732.069.138,64	5.857.246.146,50	775.295.096,12	80.814.020.189,02
2	Dinas Kesehatan	9.279.390.090,05	1.358.701.480,55	7.083.480.017,51	3.554.611.553,09
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	10.251.608.075,58	663.369.817,96	663.181.200,00	10.251.796.693,54
4	RSUD Adonara	-	7.814.822.176,36	-	7.814.822.176,36
5	Puskesmas Boru	979.288.060,00	82.945.280,00	92.160.000,00	970.073.340,00
6	Puskesmas Ile Bura	739.418.826,90	71.862.077,62	-	811.280.904,52
7	Puskesmas Lato	456.423.570,24	32.611.763,36	-	489.035.333,60
8	Puskesmas Lewolaga	474.556.440,00	38.460.340,00	-	513.016.780,00
9	Puskesmas Demon Pagong	463.968.079,52	34.156.625,22	-	498.124.704,74
10	Puskesmas Oka	714.325.745,53	113.187.392,41	40.092.871,00	787.420.266,94
11	Puskesmas Lewolema	451.425.760,00	68.386.550,00	-	519.812.310,00
12	Puskesmas Waiklibang	713.614.063,00	86.676.822,60	-	800.290.885,60
13	Puskesmas Waimana	488.372.859,70	35.351.399,98	-	523.724.259,68
14	Puskesmas Waiwadan	704.385.967,40	64.366.935,80	-	768.752.903,20
15	Puskesmas Lite	773.426.458,70	62.241.401,74	-	835.667.860,44
16	Puskesmas Sagu	398.399.966,72	29.114.049,44	-	427.514.016,16
17	Puskesmas Lambunga	371.982.240,00	24.258.780,00	-	396.241.020,00
18	Puskesmas Witihama	858.407.560,00	84.689.798,00	-	943.097.358,00
19	Puskesmas Waiwerang	435.555.997,40	63.480.198,70	-	499.036.196,10
20	Puskesmas Ile Boleng	464.623.566,30	44.668.401,26	-	509.291.967,56
21	Puskesmas Baniona	830.539.209,60	58.684.693,92	-	889.223.903,52
22	Puskesmas Menanga	565.283.890,00	45.214.540,67	-	610.498.430,67
23	Puskesmas Kalike	530.296.859,88	42.760.083,32	-	573.056.943,20
24	Puskesmas Ritaebang	360.586.480,60	29.780.760,20	-	390.367.240,80
25	Puskesmas Nagi	257.824.860,00	29.180.540,00	-	287.005.400,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.201.068.485,26	261.247.996,73	-	2.462.316.481,99
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	162.000.000,00	4.050.000,00	-	166.050.000,00

28	Satuan Polisi Pamong Praja	230.878.590,00	20.247.900,00	-	251.126.490,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	340.944.760,00	39.644.680,00	-	380.589.440,00
30	Dinas Sosial	755.829.186,00	43.507.633,00	-	799.336.819,00
31	Dinas Tenaga Kerja	45.885.899,96	2.487.970,92	-	48.373.870,88
32	Dinas Lingkungan Hidup	342.896.790,00	33.016.092,00	-	375.912.882,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	465.870.586,00	31.498.106,42	-	497.368.692,42
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	173.099.265,00	6.659.490,81	-	179.758.755,81
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.074.668.774,24	163.058.574,45	-	1.237.727.348,69
36	Dinas Perhubungan	1.449.296.168,45	126.202.352,24	8.981.800,00	1.566.516.720,69
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	556.165.785,60	13.631.472,88	-	569.797.258,48
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	475.221.620,00	50.151.860,00	-	525.373.480,00
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	295.204.800,00	26.836.800,00	-	322.041.600,00
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	218.592.000,00	190.151.492,08	-	408.743.492,08
41	Dinas Perikanan	2.368.558.620,47	337.602.388,19	-	2.706.161.008,66
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.210.753.145,66	191.345.293,19	-	1.402.098.438,85
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.323.495.984,99	253.586.082,82	7.533.159,53	3.569.548.908,28
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	577.503.328,50	301.827.034,34	-	879.330.362,84
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.870.483.342,93	515.274.309,68	-	6.385.757.652,61
46	Bagian Umum	5.713.017.645,00	137.501.121,00	-	5.850.518.766,00
47	Kepala Daerah	439.210.274,24	39.785.484,14	4.480.000,00	474.515.758,38
48	Wakil Kepala Daerah	325.487.790,10	37.746.792,02	-	363.234.582,12
49	Inspektorat Daerah	113.768.420,00	6.692.260,00	-	120.460.680,00
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	545.229.104,16	82.617.780,89	-	627.846.885,05
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.153.912.653,58	60.424.853,72	3.933.895,98	1.210.403.611,31
52	Badan Pendapatan Daerah	607.122.700,00	49.880.300,00	-	657.003.000,00
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	101.303.880,00	9.718.680,00	-	111.022.560,00
54	Sekretariat DPRD	842.918.620,00	45.555.090,14	-	888.473.710,14
55	Kantor Camat Wulanggitang	405.744.480,00	7.062.080,00	349.247.840,00	63.558.720,00
56	Kantor Camat Titehena	165.699.000,00	8.406.940,79	-	174.105.940,79
57	Kantor Camat Larantuka	599.675.560,00	56.415.960,00	-	656.091.520,00

58	Kantor Lurah Lewolere	143.940.000,00	13.424.000,00	-	157.364.000,00
59	Kantor Lurah Waibalun	144.208.640,00	5.044.160,00	-	149.252.800,00
60	Kantor Lurah Larantuka	176.752.294,44	18.155.479,06	5.338.720,00	189.569.053,50
61	Kantor Lurah Pantai Besar	115.745.000,00	11.095.000,00	-	126.840.000,00
62	Kantor Lurah Balela	100.341.000,00	9.549.000,00	-	109.890.000,00
63	Kantor Lurah Pohon Sirih	71.944.410,00	8.332.382,00	-	80.276.792,00
64	Kantor Lurah Lohayong	361.191.783,26	28.576.198,14	-	389.767.981,40
65	Kantor Lurah Lokea	62.442.480,00	7.195.620,00	-	69.638.100,00
66	Kantor Lurah Postoh	64.689.027,01	21.598.790,62	-	86.287.817,63
67	Kantor Lurah Ekasapta	66.353.066,79	6.635.306,68	-	72.988.373,47
68	Kantor Lurah Amagarapati	95.324.300,00	8.456.860,00	-	103.781.160,00
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	58.595.560,00	5.507.300,00	-	64.102.860,00
70	Kantor Lurah Sarotari	-	-	-	-
71	Kantor Lurah Weri	93.765.839,00	5.932.122,60	-	99.697.961,60
72	Kantor Lurah Pohon Bao	60.122.219,94	6.680.246,66	-	66.802.466,60
73	Kantor Lurah Waihali	96.304.813,28	14.001.226,66	-	110.306.039,94
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah	158.465.044,00	17.538.572,00	-	176.003.616,00
75	Kantor Lurah Sarotari Timur	66.012.626,50	14.449.286,50	-	80.461.913,00
76	Kantor Camat Ile Mandiri	336.572.490,00	124.218.598,00	-	460.791.088,00
77	Kantor Camat Tanjung Bunga	107.827.520,00	8.979.210,00	-	116.806.730,00
78	Kantor Camat Solor Barat	301.830.000,00	12.660.000,00	-	314.490.000,00
79	Kantor Lurah Ritaebang	-	117.477.760,00	-	117.477.760,00
80	Kantor Camat Solor Timur	310.929.616,40	21.334.222,60	-	332.263.839,00
81	Kantor Camat Adonara Barat	343.230.000,00	18.291.199,73	-	361.521.199,73
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado	141.000.000,00	7.095.142,86	-	148.095.142,86
83	Kantor Camat Adonara Timur	494.762.360,00	44.588.911,26	-	539.351.271,26
84	Kantor Lurah Waiwerang	2.045.272,00	409.054,40	-	2.454.326,40
85	Kantor Lurah Lamatewelu	59.476.433,60	8.035.493,60	-	67.511.927,20
86	Kantor Camat Kelubagolit	177.030.000,00	9.835.000,00	-	186.865.000,00
87	Kantor Camat Witihama	214.948.000,00	9.954.000,00	-	224.902.000,00
88	Kantor Camat Ile Boleng	417.301.627,39	17.384.067,22	4.687.847,39	429.997.847,22
89	Kantor Camat Demon Pagong	203.213.460,00	12.357.631,58	-	215.571.091,58
90	Kantor Camat Lewolema	168.667.700,00	12.475.907,50	-	181.143.607,50
91	Kantor Camat Ile Bura	161.258.920,00	13.357.280,00	-	174.616.200,00
92	Kantor Camat Adonara	191.067.752,92	22.734.605,39	-	213.802.358,31

93	Kantor Camat Adonara Tengah	202.828.540,00	18.217.058,04	-	221.045.598,04
94	Kantor Camat Solor Selatan	171.455.340,00	17.306.320,00	-	188.761.660,00
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	229.500.000,00	9.180.000,00	-	238.680.000,00
Jumlah		**146.618.424.162,42**	**20.698.115.941,14**	**9.038.412.447,52**	**158.278.127.656,04**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuain Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.163.876.157,82	394.954.045,13	6.285.243,33	1.552.544.959,62
2	Dinas Kesehatan	268.055.419,73	63.558.700,03	68.411.753,07	263.202.366,70
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1.136.438.859,60	254.915.653,10	-	1.391.354.512,70
4	RSUD Adonara		145.821.429,60	-	145.821.429,60
5	Puskesmas Boru	148.367.380,23	39.371.362,83	-	187.738.743,07
6	Puskesmas Ile Bura	28.959.664,10	9.653.221,37	-	38.612.885,46
7	Puskesmas Lato	-	-	-	-
8	Puskesmas Lewolaga	-	-	-	-
9	Puskesmas Demon Pagong	-	-	-	-
10	Puskesmas Oka	60.605.300,00	20.201.766,67	-	80.807.066,67
11	Puskesmas Lewolema	-	-	-	-
12	Puskesmas Waiklibang	96.215.988,95	32.071.996,32	-	128.287.985,27
13	Puskesmas Waimana	-	-	-	-
14	Puskesmas Waiwadan	118.463.119,83	23.692.623,97	-	142.155.743,80
15	Puskesmas Lite	-	-	-	-
16	Puskesmas Sagu	-	-	-	-
17	Puskesmas Lambunga	89.620.789,46	20.201.666,67	29.015.789,46	80.806.666,67
18	Puskesmas Witihama	-	-	-	-
19	Puskesmas Waiwerang	100.778.431,67	20.155.686,33	-	120.934.118,00
20	Puskesmas Ile Boleng	-	-	-	-
21	Puskesmas Baniona	-	-	-	-
22	Puskesmas Menanga	138.528.106,42	32.738.911,18	-	171.267.017,60
23	Puskesmas Kalike	-	-	-	-
24	Puskesmas Ritaebang	46.811.529,20	23.405.764,60	-	70.217.293,80
25	Puskesmas Nagi	-	-	-	-
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.012.961.179.124,76	53.040.264.202,95	199.870.319,22	1.065.801.573.008,49
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuain Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
28	Satuan Polisi Pamong Praja	6.704.832,60	3.352.416,30	-	10.057.248,90
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.721.173.228,98	1.756.972.339,00	-	16.478.145.567,98
30	Dinas Sosial	-	118.646,67	-	118.646,67
31	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-
32	Dinas Lingkungan Hidup	34.782.303,15	5.454.916,65	-	40.237.219,80
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.863.295,00	1.429.255,00	-	14.292.550,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
36	Dinas Perhubungan	5.480.788.089,12	3.748.872.505,89	-	9.229.660.595,01
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	7.609.266,67	-	7.609.266,67
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	22.067.867,85	-	22.067.867,85
41	Dinas Perikanan	876.497.950,00	109.479.658,33	-	985.977.608,33
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	838.294.537,13	186.059.380,27	-	1.024.353.917,40
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	701.657.447,67	49.612.708,67	-	751.270.156,33
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	566.662,50	-	566.662,50
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	913.141.628,83	61.306.111,17	-	974.447.740,00
46	Bagian Umum	269.229.583,33	18.159.583,33	-	287.389.166,67
47	Kepala Daerah	-	-	-	-
48	Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-
49	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	55.191.666,67	8.075.000,00	-	63.266.666,67
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	627.519.900,00	48.687.700,00	-	676.207.600,00
52	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
54	Sekretariat DPRD	-	-	-	-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuain Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
55	Kantor Camat Wulanggitang	428.151.600,00	40.635.700,00	-	468.787.300,00
56	Kantor Camat Titehena	701.651.577,60	44.255.559,90	-	745.907.137,50
57	Kantor Camat Larantuka	767.527.300,00	53.600.000,00	-	821.127.300,00
58	Kantor Lurah Lewolere	786.232.383,00	92.192.800,00	-	878.425.183,00
59	Kantor Lurah Waibalun	1.098.242.285,50	49.615.009,50	-	1.147.857.295,00
60	Kantor Lurah Larantuka	335.948.334,80	48.404.430,67	-	384.352.765,47
61	Kantor Lurah Pantai Besar	406.072.000,00	65.748.400,00	-	471.820.400,00
62	Kantor Lurah Balela	590.461.400,00	23.982.000,00	-	614.443.400,00
63	Kantor Lurah Pohon Sirih	141.583.850,00	43.739.258,33	-	185.323.108,33
64	Kantor Lurah Lohayong	376.867.131,80	16.933.475,70	-	393.800.607,50
65	Kantor Lurah Lokea	684.811.783,50	121.080.642,70	-	805.892.426,20
66	Kantor Lurah Postoh	99.264.749,00	24.453.174,50	-	123.717.923,50
67	Kantor Lurah Ekasapta	209.087.808,00	23.480.952,00	-	232.568.760,00
68	Kantor Lurah Amagarapati	1.064.938.056,05	81.341.783,55	-	1.146.279.839,60
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao	1.482.579.224,00	79.299.200,00	-	1.561.878.424,00
70	Kantor Lurah Sarotari	1.063.400.824,50	92.558.292,50	-	1.155.959.117,00
71	Kantor Lurah Weri	974.113.990,63	112.230.061,97	-	1.086.344.052,60
72	Kantor Lurah Pohon Bao	247.719.000,00	64.613.800,00	-	312.332.800,00
73	Kantor Lurah Waihali	250.918.516,67	41.072.836,67	-	291.991.353,33
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah	712.461.974,00	44.108.300,00	-	756.570.274,00
75	Kantor Lurah Sarotari Timur	26.350.000,00	16.820.000,00	-	43.170.000,00
76	Kantor Camat Ile Mandiri	1.018.315.000,00	9.890.000,00	-	1.028.205.000,00
77	Kantor Camat Tanjung Bunga	1.012.150.000,00	44.925.000,00	-	1.057.075.000,00
78	Kantor Camat Solor Barat	1.081.853.410,10	23.768.286,20	-	1.105.621.696,30
79	Kantor Lurah Ritaebang	133.923.415,73	46.042.163,15	-	179.965.578,88
80	Kantor Camat Solor Timur	956.802.906,00	-	-	956.802.906,00
81	Kantor Camat Adonara Barat	1.519.730.000,00	60.770.000,00	-	1.580.500.000,00
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado	527.230.000,00	39.210.000,00	-	566.440.000,00
83	Kantor Camat Adonara Timur	1.228.241.181,00	129.167.909,00	-	1.357.409.090,00
84	Kantor Lurah Waiwerang	140.422.141,32	44.462.889,33	-	184.885.030,66
85	Kantor Lurah Lamatewelu	186.862.000,00	37.372.400,00	-	224.234.400,00
86	Kantor Camat Kelubagolit	1.262.745.000,00	25.025.000,00	-	1.287.770.000,00

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuain Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
87	Kantor Camat Witihama	489.820.000,00	30.080.000,00	-	519.900.000,00
88	Kantor Camat Ile Boleng	1.525.197.338,00	42.564.100,00	-	1.567.761.438,00
89	Kantor Camat Demon Pagong	315.763.000,00	63.152.600,00	-	378.915.600,00
90	Kantor Camat Lewolema	851.985.990,00	37.072.010,00	-	889.058.000,00
91	Kantor Camat Ile Bura	739.687.050,00	-	-	739.687.050,00
92	Kantor Camat Adonara	198.000.000,00	24.750.000,00	-	222.750.000,00
93	Kantor Camat Adonara Tengah	183.920.000,00	9.380.000,00	-	193.300.000,00
94	Kantor Camat Solor Selatan	402.851.333,00	-	-	402.851.333,00
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
JUMLAH		**1.067.119.627.888,46**	**61.996.629.084,70**	**303.583.105,08**	**1.128.812.673.868,08**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuain Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		178.696.800,00		178.696.800,00
2	Dinas Kesehatan				-
3	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka				-
4	RSUD Adonara				-
5	Puskesmas Boru				-
6	Puskesmas Ile Bura				-
7	Puskesmas Lato				-
8	Puskesmas Lewolaga				-
9	Puskesmas Demon Pagong				-
10	Puskesmas Oka				-
11	Puskesmas Lewolema				-
12	Puskesmas Waiklibang				-
13	Puskesmas Waimana				-
14	Puskesmas Waiwadan				-
15	Puskesmas Lite				-
16	Puskesmas Sagu				-
17	Puskesmas Lambunga				-
18	Puskesmas Witihama				-
19	Puskesmas Waiwerang				-
20	Puskesmas Ile Boleng				-
21	Puskesmas Baniona				-
22	Puskesmas Menanga				-
23	Puskesmas Kalike				-
24	Puskesmas Ritaebang				-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuain Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
25	Puskesmas Nagi				-
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				-
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				-
28	Satuan Polisi Pamong Praja				-
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				-
30	Dinas Sosial				-
31	Dinas Tenaga Kerja				-
32	Dinas Lingkungan Hidup		273.219.180,00		273.219.180,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				-
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				-
36	Dinas Perhubungan				-
37	Dinas Komunikasi dan Informatika				-
38	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				-
39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				-
40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				-
41	Dinas Perikanan				-
42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				-
43	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				-
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan				-
45	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				-
46	Bagian Umum				-
47	Kepala Daerah				-
48	Wakil Kepala Daerah				-
49	Inspektorat Daerah				-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuain Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
50	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				-
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah				-
52	Badan Pendapatan Daerah				-
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				-
54	Sekretariat DPRD				-
55	Kantor Camat Wulanggitang				-
56	Kantor Camat Titehena				-
57	Kantor Camat Larantuka				-
58	Kantor Lurah Lewolere				-
59	Kantor Lurah Waibalun				-
60	Kantor Lurah Larantuka				-
61	Kantor Lurah Pantai Besar				-
62	Kantor Lurah Balela				-
63	Kantor Lurah Pohon Sirih				-
64	Kantor Lurah Lohayong		59.350.200,00		59.350.200,00
65	Kantor Lurah Lokea				-
66	Kantor Lurah Postoh				-
67	Kantor Lurah Ekasapta				-
68	Kantor Lurah Amagarapati				-
69	Kantor Lurah Puken Tobi Wangi Bao				-
70	Kantor Lurah Sarotari				-
71	Kantor Lurah Weri				-
72	Kantor Lurah Pohon Bao				-
73	Kantor Lurah Waihali				-
74	Kantor Lurah Sarotari Tengah				-
75	Kantor Lurah Sarotari Timur				-
76	Kantor Camat Ile Mandiri				-

No	SKPD	Saldo Awal 2024	Penyesuaian Bertambah	Penyesuain Berkurang	Saldo Akhir 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
77	Kantor Camat Tanjung Bunga				-
78	Kantor Camat Solor Barat				-
79	Kantor Lurah Ritaebang				-
80	Kantor Camat Solor Timur				-
81	Kantor Camat Adonara Barat				-
82	Kantor Camat Wotan Ulu Mado				-
83	Kantor Camat Adonara Timur				-
84	Kantor Lurah Waiwerang				-
85	Kantor Lurah Lamatewelu				-
86	Kantor Camat Kelubagolit				-
87	Kantor Camat Witihama				-
88	Kantor Camat Ile Boleng				-
89	Kantor Camat Demon Pagong				-
90	Kantor Camat Lewolema				-
91	Kantor Camat Ile Bura				-
92	Kantor Camat Adonara				-
93	Kantor Camat Adonara Tengah				-
94	Kantor Camat Solor Selatan				-
95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-
Jumlah		**-**	**511.266.180,00**	**-**	**511.266.180,00**

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RINCIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No		Uraian Temuan	Saldo per 31/12/2023	Koreksi Tambah TA 2023	Koreksi Kurang TA 2023	Saldo Setelah Koreksi	Tambahan Kasus TA 2024	Setoran TA 2024	Saldo per 31/12/2024	Kenaikan / Penurunan	Persentase
1.		**Temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas :**									
	a	LHP LKPD TA 2005	96.000.000,00			96.000.000,00	-	-	96.000.000,00	-	-
	b	LHP LKPD TA 2006	139.130.500,00			139.130.500,00	-	-	139.130.500,00	-	-
	c	LHP LKPD TA 2007	504.001.147,83	-		504.001.147,83	-	-	504.001.147,83	-	-
	d	LHP LKPD TA 2008	14.400.000,00			14.400.000,00	-	-	14.400.000,00	-	-
	e	LHP LKPD TA 2009	196.231.531,00			196.231.531,00	-	-	196.231.531,00	-	-
	f	LHP LKPD TA 2011	144.496.597,89			144.496.597,89	-	-	144.496.597,89	-	-
	g	LHP LKPD TA 2012	1.560.886.000,00	-		1.560.886.000,00	-		1.560.886.000,00	-	-
	h	LHP LKPD TA 2013	1.186.600,00			1.186.600,00	-	-	1.186.600,00	-	-
	i	LHP LKPD TA 2014	245.888.904,52		6.000.000,00	239.888.904,52	-	-	239.888.904,52	6.000.000,00	2,50
	j	LHP LKPD TA 2015	-			-	-		-	-	-
	k	LHP LKPD TA 2016	200.957.050,00		25.000.000,00	175.957.050,00	-		175.957.050,00	25.000.000,00	14,21
	l	LHP LKPD TA.2017	64.667.723,76		2.499.393,00	62.168.330,76	-		62.168.330,76	2.499.393,00	4,02
	m	LHP LKPD TA.2018	41.979.950,00			41.979.950,00	-		41.979.950,00	-	-
	n	LHP LKPD TA.2019	54.985.652,54		1.000.000,00	53.985.652,54	-		53.985.652,54	1.000.000,00	1,85
	o	LHP LKPD TA.2020	-			-	-	-	-	-	-
	p	LHP LKPD TA.2021	8.293.400,15		8.293.400,15	-			-	8.293.400,15	
	q	LHP LKPD TA.2022		1.000.505.072,49	273.308.435,65	727.196.636,84		-	727.196.636,84	(727.196.636,84)	(100,00)
	r	LHP LKPD TA.2023					-	-	-	-	
	s	LHP Belanja Daerah TA. 2005 dan TA. 2006	38.260.453,18			38.260.453,18	-	-	38.260.453,18	-	-
	t	LHP Belanja Daerah TA 2008/2009	-		-	-			-	-	
	u	LHP Belanja Daerah TA 2009 dan TA 2010	65.802.221,02			65.802.221,02	-	-	65.802.221,02	-	-
	v	LHP Belanja Daerah TA 2014/2015	170.041.714,04		-	170.041.714,04	-		170.041.714,04	-	-
	w	LHP Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022/2023		1.876.215.320,42	425.202.211,00	1.451.013.109,42	-	-	1.451.013.109,42	(1.451.013.109,42)	(100,00)
		Jumlah 1 :	**3.547.209.445,93**	**2.876.720.392,91**	**741.303.439,80**	**5.682.626.399,04**	**-**	**-**	**5.682.626.399,04**	**(2.135.416.953,11)**	
2		**Temuan hasil pemeriksaan BPKP NTT**		-							
	a	LHP Belanja Daerah TA 1995 sampai dengan TA 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-
3		**Temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi**									
		LHP Belanja Daerah TA 1997 sampai dengan TA 2014	118.341.711,66	-		118.341.711,66			118.341.711,66	-	-
4		**Temuan hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah/Kabupaten**		-							
	a	Temuan TA 2000 s/d TA 2005	707.283.173,00	-	-	707.283.173,00	-	-	707.283.173,00	-	-
	b	Temuan Tahun 2006	313.688.941,80	-	-	313.688.941,80	-	-	313.688.941,80	-	-
	c	Temuan Tahun 2007	94.043.800,00	-	-	94.043.800,00	-	-	94.043.800,00	-	-
	d	Temuan Tahun 2008	130.080.786,40	-	-	130.080.786,40	-	-	130.080.786,40	-	-
	e	Temuan Tahun (2006-2008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f	Temuan Tahun 2009	91.740.607,88	-	-	91.740.607,88	-	-	91.740.607,88	-	-
	g	Temuan Tahun 2010	509.134.966,00	-	-	509.134.966,00	-	-	509.134.966,00	-	-
	h	Temuan TA 2011	9.072.000,00		-	9.072.000,00	-	-	9.072.000,00	-	-
	i	Temuan TA 2012	8.985.000,00	-	-	8.985.000,00	-	-	8.985.000,00	-	-
	j	Temuan TA 2013	34.189.701,97	-	-	34.189.701,97	-	-	34.189.701,97	-	-
	k	Temuan TA 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	l	Temuan TA 2015	64.560.597,44	-	-	64.560.597,44	-	-	64.560.597,44	-	-
	m	Temuan TA 2016	2.684.000,20	-	1.000.000,00	1.684.000,20	-	-	1.684.000,20	1.000.000,00	59,38
	n	Temuan TA 2017	6.606.193,00		-	6.606.193,00	-	-	6.606.193,00	-	-
	o	Temuan TA 2018	325.278.577,05		187.843.033,00	137.435.544,05	-	-	137.435.544,05	187.843.033,00	136,68
	p	Temuan TA 2019	91.020.185,82			91.020.185,82	-		91.020.185,82	-	-
										-	-
		Jumlah 4 :	**2.388.368.530,56**	**-**	**188.843.033,00**	**2.199.525.497,56**	**-**	**-**	**2.199.525.497,56**	**(188.843.033,00)**	**(8,59)**

No		Uraian Temuan	Saldo per 31/12/2023	Koreksi Tambah TA 2023	Koreksi Kurang TA 2023	Saldo Setelah Koreksi	Tambahan Kasus TA 2024	Setoran TA 2024	Saldo per 31/12/2024	Kenaikan / Penurunan	Persentase
5		**Kerugian Negara/Daerah yang melalui Proses Hukum ke Kejaksaan**			-						
	a	Temuan BPKP NTT	3.477.558.525,69	-	-	3.477.558.525,69	-	-	3.477.558.525,69	-	-
	b	Temuan Inspektorat Kabupaten	153.381.189,00	-	-	153.381.189,00	-	-	153.381.189,00	-	-
		Jumlah 5 :	**3.630.939.714,69**	**-**	**-**	**3.630.939.714,69**	**-**	**-**	**3.630.939.714,69**	**-**	**-**
		Jumlah : (1+2+3+4+5) :	**9.684.859.402,84**	**2.876.720.392,91**	**930.146.472,80**	**11.631.433.322,95**	**-**	**-**	**11.631.433.322,95**	**1.946.573.920,11**	**16,74**

Lampiran 21

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
Jl. Jend. Sudirman, Sarotari, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur,
Nusa Tenggara Timur
Telepon: (0383) 21287, Fax. (0383) 21836

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN BLUD	1
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	2
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. Laporan Realisasi Anggaran	5
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	6
3. Laporan Neraca	7
4. Laporan Operasional	8
5. Laporan Arus Kas	9
6. Laporan Perubahan Ekuitas	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. Umum	12
2. Pernyataan Kepatuhan terhadap PSAP BLU	22
3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	22
4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	58
5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	63
6. Penjelasan Pos-pos Neraca	65
7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	71
8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	74
9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	75
10. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan	76
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	77

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
Jln. Jend.Sudirman Nomor. -.- Telp. (0383)21287 – Fax (0383)21836

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN BLUD
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA

Memenuhi ketentuan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Gergorius Bato Koten, S.Si.Apt.
Alamat Kantor	: Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sarotari, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
Alamat Rumah Sesuai KTP	: Kel. Lamawalang, Kec.Larantuka, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
Jabatan	: Pemimpin BLUD/Plt. Direktur
NIP	: 19700711 199401 1 001

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Untuk dan atas nama BLUD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Larantuka, 27 Maret 2025
Plt. Direktur
RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka,

METERAI TEMPEL

Gergorius Bato Koten, S.Si.Apt.
NIP. 19700711 199401 1 001

Laporan No: 00032/2.1274/AU.5/11/0463-1/1/III/2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau,

jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memeroleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00032/ML/KAP.IGO/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

00032

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Registered Public Accountant
IGO
I GEDE OKA

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.
NRAP: AP.0463

Badung, 27 Maret 2025

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	**Pendapatan**	*4.*			
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	*4.1.a*	23.997.500.000,00	27.988.403.954,00	116,63%
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	*4.1.b*	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	*4.1.c*	-	21.779.880,00	-
5	Pendapatan Hibah	*4.1.d*	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	*4.1.e*	-	6.259.832,03	-
7	**Jumlah Pendapatan**		**23.997.500.000,00**	**28.016.443.666,03**	**116,75%**
8	**Belanja**				
9	**Belanja Operasi**	*4.2*			
10	Belanja Pegawai	*4.2.a*	9.349.420.834,00	9.341.936.578,00	99,92%
11	Belanja Barang dan Jasa	*4.2.b*	23.579.271.341,00	22.256.665.356,00	94,39%
12	Belanja Bunga	*4.2.c*	-	-	-
13	Belanja Lainnya	*4.2.d*			
14	**Jumlah Belanja Operasi**		**32.928.692.175,00**	**31.598.601.934,00**	**95,96%**
15	**Belanja Modal**	*4.3*			
16	Belanja Modal Tanah	*4.3.a*	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	*4.3.b*	4.545.007.719,00	4.538.889.293,00	99,87%
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*4.3.c*	113.319.218,00	107.252.580,00	94,65%
19	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	*4.3.d*	-	-	-
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	*4.3.e*	-	-	-
21	Belanja Modal Kontruksi Dalam Pengerjaan	*4.3.f*	-	-	-
22	Belanja Modal Aset Lainnya	*4.3.g*	-	-	-
23	**Jumlah Belanja Modal**		**4.658.326.937,00**	**4.646.141.873,00**	**99,74%**
24	**Jumlah Belanja**		**37.587.019.112,00**	**36.244.743.807,00**	**96,43%**
25	**Surplus (Defisit)**		**(13.589.519.112,00)**	**(8.228.300.140,97)**	**60,55%**
26	**Pembiayaan**				
27	Penerimaan SLPA Tahun Sebelumnya		-	-	-
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-
29	**Penerimaan Pembiayaan**		-	-	-
30	**Jumlah Penerimaan**		-	-	-
31	**Pengeluaran Pembiayaan**		-	-	-
32	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-
34	**Jumlah Pengeluaran**		-	-	-
35	**Pembiayaan Neto**		-	-	-
36	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran**		**(13.589.519.112,00)**	**(8.228.300.140,97)**	**60,55%**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Larantuka, 27 Maret 2025
Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Hendrikus Fernandez Larantuka,

Gergorius Bato Koten, S.Si.Apt.
NIP. 19700711 199401 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	*Catatan*	2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	*5.1*	-
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	*5.2*	-
3	**Sub Total**		-
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	*5.3*	(8.228.300.140,97)
5	**Sub Total**		**(8.228.300.140,97)**
6	Pendapatan APBD	*5.4*	12.578.826.633,00
7	Setoran ke Kas Daerah	*5.5*	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	*5.6*	**4.350.526.492,03**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Larantuka, 27 Maret 2025
Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Hendrikus Fernandez Larantuka,

Gergorius Bato Koten, S.Si.Apt.
NIP. 19700711 199401 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2024
1	**ASET**		
2	**Aset Lancar**		
3	*Kas di Bendahara Pengeluaran*	*6.1*	-
4	Kas pada BLUD	*6.2*	4.350.526.492,03
5	Piutang Operasional BLUD	*6.3*	4.425.142.389,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*6.3*	(277.118.004,95)
7	Persediaan BLUD	*6.4*	3.362.695.619,22
8	**Jumlah Aset Lancar**		**11.861.246.495,31**
9	**Aset Tetap**	*6.5*	
10	Tanah		4.065.400.000,00
11	Peralatan dan Mesin		115.303.879.079,00
12	Gedung dan Bangunan		34.211.683.575,33
13	Jalan, Jaringan dan Irigasi		7.645.021.744,00
14	Aset Tetap Lainnya		464.403.500,00
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-
16	**Jumlah Harga Perolehan**		**161.690.387.898,33**
17	*Akumulasi Penyusutan*		(108.924.264.335,98)
18	**Nilai Buku Aset Tetap**		**52.766.123.562,35**
19	**Aset Lainnya**	*6.6*	
20	Aset Tetap Tak Berwujud		-
21	Aset Lainnya		14.262.225.624,00
22	**Jumlah Harga Perolehan**		**14.262.225.624,00**
23	*Akumulasi/Amortisasi Aset Lainnya*		(13.964.904.920,00)
24	**Nilai Buku Aset Lainnya**		**297.320.704,00**
25	**JUMLAH ASET**		**64.924.690.761,66**
26	**KEWAJIBAN**		
27	**Kewajiban Jangka Pendek**	*6.7*	
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-
29	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		4.497.447.405,20
30	Pendapatan Diterima Dimuka		-
31	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**		**4.497.447.405,20**
32	**Kewajiban Jangka Panjang**		
33	Utang Jangka Panjang Lainnya		-
34	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**		-
32	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**4.497.447.405,20**
33	**EKUITAS**	*6.8*	
34	Ekuitas		60.427.243.356,46
35	**JUMLAH EKUITAS**		**60.427.243.356,46**
36	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**		**64.924.690.761,66**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Larantuka, 27 Maret 2025
Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Hendrikus Fernandez Larantuka,

Gergorius Bato Koten, S.Si.Apt.
NIP. 19700711 199401 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2024
1	***Kegiatan Operasional***		
2	**Pendapatan**	7.1	
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	7.1.a	25.410.066.318,00
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	7.1.b	-
5	Pendapatan hasil kerjasama	7.1.c	21.779.880,00
6	Pendapatan hibah	7.1.d	53.836.084,15
7	Pendapatan Usaha Lainnya	7.1.e	6.259.832,03
8	Pendapatan APBD	7.1.f	12.578.826.633,00
9	**Jumlah Pendapatan**		**38.070.768.747,18**
10	**Beban**	7.2	
11	Beban Pegawai	7.2.a	10.540.308.402,20
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	22.453.534.025,08
13	Beban Bunga		-
14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.2.c	277.118.004,95
15	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.d	13.161.677.696,52
16	Biaya Lain-lain	7.2.e	-
17	**Jumlah Beban**		**46.432.638.128,74**
18	**Surplus (Defisit) dari Operasi**		**(8.361.869.381,56)**
19	**Kegiatan Non Operasional**	7.3	
20	Kegiatan Non Operasional		-
21	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional**		-
22	**Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa**		**(8.361.869.381,56)**
23	**Pos Luar Biasa**	7.4	
24	Pendapatan (Beban) Pos Luar Biasa		-
25	**Jumlah Pos Luar Biasa**		-
26	**Surplus (Defisit)-LO**		**(8.361.869.381,56)**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Larantuka, 27 Maret 2025
Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Hendrikus Fernandez Larantuka,

Gergorius Bato Koten, S.Si.Apt.
NIP. 19700711 199401 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2024
1	**Arus kas dari Aktivitas Operasi**	*8.1*	
2	**Arus Masuk Kas**	*8.1.a*	
3	Pendapatan APBD		12.578.826.633,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		27.988.403.954,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan		-
6	Pendapatan Hasil Kerja Sama		21.779.880,00
7	Pendapatan Hibah		-
8	Pendapatan Usaha Lainnya		6.259.832,03
9	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**40.595.270.299,03**
10	**Arus Kas Keluar**	*8.1.b*	
11	Belanja Pegawai		9.341.936.578,00
12	Belanja Barang dan Jasa		22.256.665.356,00
13	Belanja Bunga Utang Pinjaman Melalui BLUD		-
14	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**31.598.601.934,00**
15	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**8.996.668.365,03**
16	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	*8.2*	
17	**Arus Masuk Kas**	*8.2.a*	
18	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-
19	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-
20	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-
21	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-
23	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-
24	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-
25	**Arus Keluar Kas**	*8.2.b*	
26	Belanja Modal Tanah		-
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4.538.889.293,00
28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		107.252.580,00
29	Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan		-
30	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		-
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-
32	Belanja Modal Aset Lainnya		-
33	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**4.646.141.873,00**
34	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(4.646.141.873,00)**
35	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	*8.3*	
36	**Arus Masuk Kas**	*8.3.a*	-
37	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-
38	**Arus Keluar Kas**	*8.3.b*	
39	Setoran Kas ke BUD		-
40	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-
41	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		-

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	*Catatan*	2024
42	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	***8.4***	
43	**Arus Kas Masuk**	***8.4.a***	
44	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.417.783.198,79
45	**Jumlah Arus Kas Masuk**		**2.417.783.198,79**
46	**Arus Kas Keluar**	***8.4.b***	
47	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		2.417.783.198,79
48	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**2.417.783.198,79**
49	**Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		-
50	**Kenaikan/Penurunan Kas BLUD**	***8.5.b***	**4.350.526.492,03**
51	**Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD**	***8.5.a***	-
52	**Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD**	***8.5.c***	**4.350.526.492,03**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Larantuka, 27 Maret 2025
Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Hendrikus Fernandez Larantuka,

Gergorius Bato Koten, S.Si.Apt.
NIP. 19700711 199401 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2024
1	**Ekuitas Awal**	*9.1*	**79.190.156.493,30**
2	**Surplus (Defisit) LO**	*9.2*	**(8.361.869.381,56)**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	*9.3*	**(10.401.043.755,28)**
	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Piutang		7.003.480.025,00
	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		9.176.590,39
	Koreksi Ekuitas - Harga Perolehan Aset Lain-lain		(2.593.584.324,67)
	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(12.021.135.846,00)
	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		(2.798.980.200,00)
4	**Ekuitas Akhir**	*9.4*	**60.427.243.356,46**

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Larantuka, 27 Maret 2025
Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Hendrikus Fernandez Larantuka,

Gergorius Bato Koten, S.Si.Apt.
NIP. 19700711 199401 1 001

RSUD DR. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA
Jl. Jend. Sudirman, Sarotari, Kec. Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
Telepon: (0383) 21287, Fax. (0383) 21836

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024

1. Umum

a. Sejarah, Perkembangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berdiri pada Tahun 1936 yang berlokasi di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Awalnya Rumah Sakit ini didirikan oleh orang Belanda dan Rumah Sakit ini diberi nama Rumah Sakit Larantuka, dan pada saat itu status kepemilikannya bukan milik pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu Rumah Sakit ini diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan berubah status kepemilikannya menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Flores Timur.

Pada Tahun 1982 Rumah Sakit Daerah Larantuka dipimpin oleh dr. Sumadi yang masih berlokasi di Kelurahan Lokea. Pada saat itu rumah sakit ini hanya memiliki tiga bangsal yaitu bangsal laki-laki, bangsal wanita, bangsal kebidanan, serta Balai Pengobatan Ibu dan Anak (BKIA). Pada Tahun 1984 pimpinan Rumah Sakit digantikan oleh dr. Steven Kristian yang memimpin hingga Tahun 1987. Pada akhir Tahun 1984 Rumah Sakit berpindah alamat ke Kelurahan Sarotari Tengah sampai sekarang. Dalam perjalanannya Rumah Sakit ini mulai berkembang tahap demi tahap, pemerintah daerah mendatangkan fasilitas dan peralatan yang memadai, juga mendapat bantuan peralatan dari negara luar seperti Portugal dan Jerman. Setelah masa kepemimpinan dr. Steven Kristian, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka telah mengalami beberapa kali pergantian Direktur yaitu dr. Kamilus Karangora, dr. Banurea, dr. Hironimus Fernandez, dr. Eduard Kleruk, dr. Dasliati, dr. Yosep Usen Aman, dr. Yosep Kopong Daten, Emanuel Ileatan Lewar, S.Kep,Ns,MM, tahun 2017 kembali dipimpin oleh dr. Yosep Kopong Daten dan pada awal Januari 2020 RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dipimpin oleh dr. Sanny sebagai direktur baru menggantikan direktur sebelumnya.

Pembentukan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur, selanjutnya telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur dan terakhir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit maka Bupati Flores Timur telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 148 Tahun 2017 untuk memberikan Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dan berlaku selama Lima Tahun (dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022). Kemudian berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.04.01/I/2963/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Rekomendasi Penyesuaian Kelas Rumah Sakit Hasil Reviu Kelas Rumah Sakit maka, Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka diperbaharui kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Nomor: PM & PTSP.503/01/PP/IOTRSUD/2020. Penetapan Kelas Rumah Sakit dari Tipe D ke Tipe C berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Nomor: PM&PTSP.503/01/PP/PKRSUD/2020 dan keduanya berlaku selama Lima Tahun (dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025).

Untuk menghargai ketokohan dan jasa almarhum dr. Hendrikus Fernandez sebagai putra daerah yang telah membawa manfaat di bidang kesehatan bagi daerah Kabupaten Flores Timur, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 159 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, tanggal 29 Mei 2023, RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang terhitung mulai pada tanggal ditetapkan.

b. Dasar Hukum

Untuk mendukung penerapan PPK BLUD, telah dikeluarkan peraturan pelaksanaan, yaitu:

1) *Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat* II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
11) Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
14) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur.
16) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
17) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
18) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
19) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
20) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah.
21) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
22) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

c. Kedudukan, Tanggung Jawab, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi RSUD

Berdasarkan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, maka kedudukan, tanggung jawab dan tata kerja RSUD, adalah:

1) Kedudukan RSUD (Pasal 5)
   a. RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka merupakan rumah sakit Kelas C.
   b. RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berkedudukan sebagai UPTD yang bersifat khusus yang berada pada Dinas.
   c. UPTD bersifat khusus memiliki otonomi dalam hal pengelolaan keuangan, pengelolaan BMD dan pengelolaan kepegawaian.
   d. RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitan.
   e. Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan BMD, serta laporan pengelolaan kepegawaian.
   f. *Penyampaian laporan dilaksanakan sekali dalam setahun sebagai* pertanggungjawaban penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan BMD serta bidang kepegawaian rumah sakit.
   g. Penyampaian laporan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Tanggung Jawab (Pasal 6)
   a. Direktur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara administratif, koordinatif dan integratif melalui penyampaian laporan yang merupakan bagian laporan kinerja Dinas dan disajikan sebagai lampiran laporan kinerja keuangan, laporan penggunaan BMD dan laporan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Direktur bertanggung jawab kepada Bupati secara substantif dan operasional.
   c. Direktur bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan rumah sakit.
3) *Tata Kerja (Pasal 7)*
   a. Sebagai UPTD yang bersifat khusus, hubungan antara RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan Dinas bersifat koordinatif.
   b. Koordinasi adalah dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah.
   c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Daerah merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah.

4) Tugas (Pasal 9)

a. RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

b. Dalam melaksanakan tugas RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka melaksanakan fungsi:

a) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

e) Uraian tugas jabatan yang ada pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 33, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Telp. (0383)21836, Fax. (0383) 21836.

d. Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai, dan Motto

1) Visi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Visi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yaitu "Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Berkualitas, Terjangkau dan Menjadi Pusat Rujukan".

Definisi operasional:

a. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh semua komponen yang berada dalam lingkungan Rumah Sakit yang ditujukan kepada semua pelanggan (internal dan eksternal).

b. Pelayanan yang berkualitas adalah setiap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan harus dilakukan secara profesional dan sesuai standar.

c. Terjangkau adalah semua produk pelayanan Rumah Sakit dapat dijangkau secara ekonomi oleh semua pelanggan.

d. Pusat rujukan adalah pilihan pertama semua pelanggan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

2) Misi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk mencapai Visi.

Adapun Misi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka adalah:

a) menyediakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara profesional sesuai standar;

b) memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau;
c) menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan yang akuntabel;
d) menyediakan perbekalan, sarana dan prasarana Rumah Sakit yang memadai;
e) mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya manusia Rumah Sakit secara tepat; dan
f) menciptakan jaringan rujukan yang konsisten.

3) Falsafah

Selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pasien adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi.

4) Motto

Motto RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yaitu "Melayani dengan kasih".

5) Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

1) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara profesional sesuai standar.
2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berjangkau dengan biaya yang terjangkau.
3) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan keuangan.
4) Meningkatkan penyediaan perbekalan, sarana dan prasarana Rumah Sakit.
5) Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM Rumah Sakit.
6) Meningkatkan konsistensi jaringan rujukan.

b) Sasaran

1) Meningkatkan kinerja pelayanan IGD, Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Kamar Operasi, ICU, Laboratorium, Instalasi Farmasi, Radiologi, Gizi, Unit Penunjang, Manajemen Rumah Sakit dan Pelayanan Mobil Ambulance.
2) Biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan Masyarakat
3) Meningkatkan kerjasama dengan asuransi bidang kesehatan.
4) Terbentuknya sistem akuntansi keuangan rumah sakit.
5) Meningkatnya kapasitas pengelolaan administrasi umum dan keuangan.
6) Pelaksanaan billing sistem.
7) Meningkatnya kualitas administrasi penyediaan perbekalan, sarana dan prasarana rumah sakit
8) Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
9) Meningkatnya kompetensi dan kinerja SDM Rumah Sakit
10) Meningkatnya pendayagunaan SDM Rumah Sakit.
11) Meningkatnya kualitas rujukan.

6) Nilai-Nilai RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Untuk mendukung budaya kerja, RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka mengedepankan nilai-nilai KASIH, yaitu:

a) Kemanusiaan

adalah perhatian dan empati terhadap pasien sebagai individu yang memiliki perasaan dan martabat dengan menekankan pentingnya kepedulian dan penghargaan terhadap setiap pasien sebagai individu yang unik.

b) Akuntabilitas

adalah komitmen Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar etika dan profesi dengan menekankan pentingnya kesesuaian dan konsistensi dalam menjalankan praktek medis yang bertanggung jawab.

c) Sinergi

adalah kekuatan tim dalam memberikan pelayanan perawatan kepada pasien dengan menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi antara tenaga medis dan non-medis dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

d) Integritas

adalah kejujuran dan kepercayaan yang tinggi dalam memberikan pelayanan perawatan kepada pasien dengan menekankan pentingnya etika dan integritas dalam setiap aspek pekerjaan di Rumah Sakit.

e) Hormat

adalah sikap menghargai dan menghormati hak dan martabat pasien dan semua pelanggan Rumah Sakit lainnya tanpa diskriminatif, saling menghargai di antara staf, pimpinan dan semua orang yang berada di Rumah Sakit.

7) Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 4 maka tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sebagai berikut:

a) Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

b) Fungsi

Untuk menjalankan tugas sebagaimana tertulis di atas maka Rumah Sakit mempunyai fungsi:

(1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

(2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

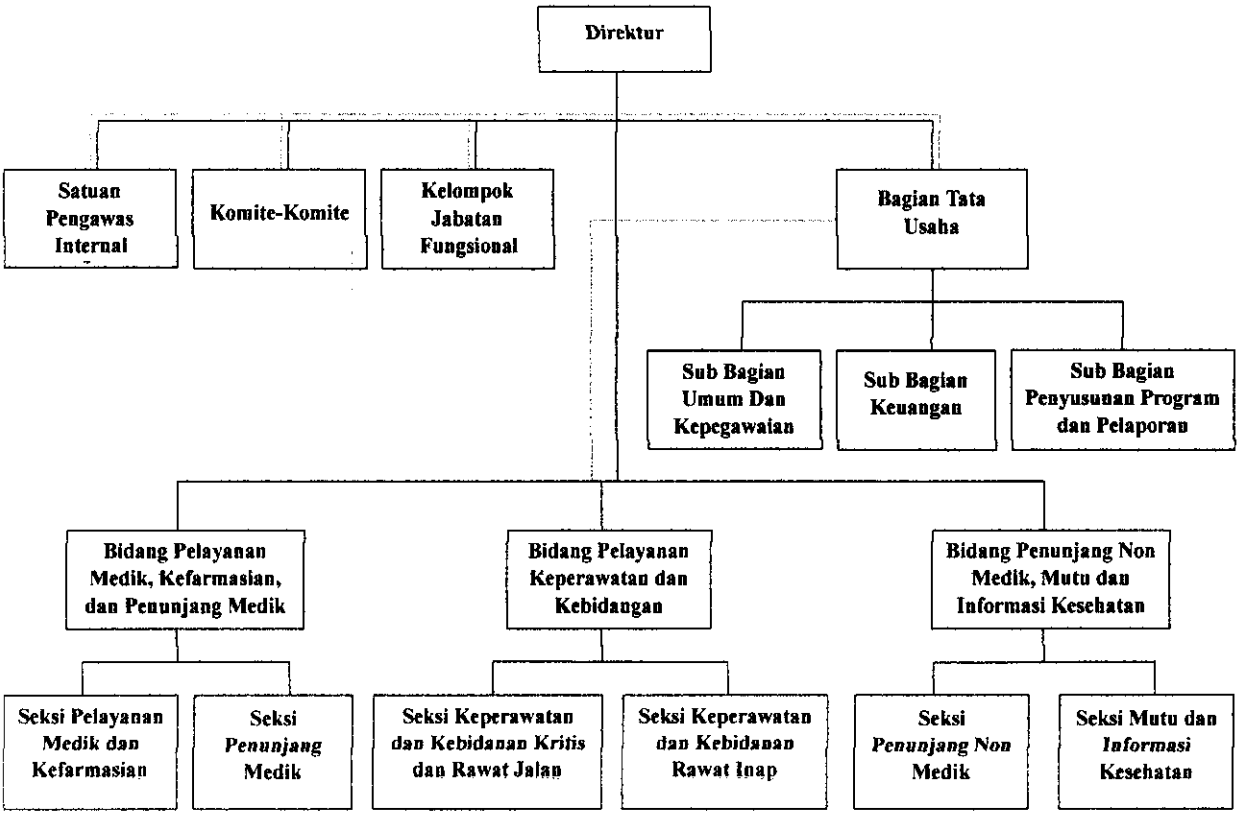
(4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan.

(5) Pengelolaan administrasi dan keuangan.

e. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Rumah Sakit

1) Struktur Organisasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Bersifat Khusus RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, susunan organisasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka terdiri dari:



2) Susunan Pejabat Pengelola BLUD

Susunan Pejabat Pengelola BLUD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, dengan susunan sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Peran dalam BLUD
Direktur	Pemimpin BLUD
Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan
Kepala Bidang Pelayanan Medik Kefarmasian dan Penunjang Medik	Pejabat Teknis
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	Pejabat Teknis
Kepala Bidang Penunjang Non Medik, Mutu dan Informasi Kesehatan	Pejabat Teknis

3) Statistik Pegawai

Distribusi pegawai RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

a) Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	
		2024	2023
1	Laki-laki	106	117
2	Perempuan	379	417
	Jumlah Pegawai	**485**	**534**

b) Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No	Pendidikan	2024					Jumlah
		PNS	PPPK	Kontrak Daerah	Kontrak BLUD	Dokter BLUD	
1	SD	2	-	1	-	-	3
2	SMP	3	-	5	-	-	8
3	SMA	16	-	51	-	-	67
4	SPK/SPRG	-	-	1	-	-	1
5	D1	4	-	70	-	-	74
6	D3	168	36	7	-	-	211
7	D4	7	4	5	-	-	16
8	S1	12	3	2	3	-	20
9	Apoteker	7	1	-	-	-	8
10	NERS	6	5	38	-	-	49
11	S1 Kedokteran	6	2	3	-	2	13
12	S2	3	-	-	-	-	3
13	Dokter Spesialis	9	-	1	-	-	10
14	Doktor	1	-	-	-	-	1
15	Residen	-	-	1	-	-	1
Jumlah		**244**	**51**	**185**	**3**	**2**	**485**

c) Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan bagi PNS

No.	Uraian	2024	2023
1	Dokter Struktural	2	2
2	*Dokter Fungsional*	13	14
3	Perawat Struktural	1	2
4	Perawat Fungsional	85	86
5	Tenaga Medis Fungsional Selain Dokter dan Perawat	113	113
6	Tenaga Non Medis	23	24
7	Pejabat Struktural Lainnya	6	6
8	Pegawai dalam Masa Tugas Belajar	1	-
	Jumlah Pegawai (PNS)	**244**	**247**

d) Jumlah pegawai berdasarkan Profesi dan Pendidikan bagi PNS

No.	Uraian	2024	2023
1	Dokter Spesialis	9	9
2	Dokter Umum	5	6
3	Dokter Gigi	1	1
4	Apoteker	7	7
5	Ners	6	6
6	Doktor	1	-
7	S2	3	4
8	S1	12	12
9	Diploma	179	180
11	SMA	16	17
12	SMP	3	3
13	SD	2	2
	Jumlah Pegawai	**244**	**247**

f. Jenis Pelayanan

1) Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
2) Poliklinik Spesialis Anak
3) Poliklinik Spesialis Bedah
4) Poliklinik spesialis kebidanan dan Kandungan
5) Poliklinik gigi
6) Poliklinik umum
7) Ruang administrasi
8) Ruang Rekam Medis
9) Ruang Tindakan Spesialis Penyakit Dalam
10) Ruang Tindakan Spesialis Bedah
11) Pelayanan gawat darurat (UGD)
12) Pelayanan Rawat Inap
13) Pelayanan Bedah Sentral
14) Pelayanan Rawat Intensif (ICU)
15) Pelayanan Perawatan Intensif Bayi (NICU)
16) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
17) Pelayanan Neonatus (Bayi)
18) Instalasi Radiodiagnostik
19) Instalasi Farmasi
20) Instalasi Laboratorium
21) Instalasi Rehabilitasi Medik
22) Instalasi Pemulasaran Jenazah
23) Instalasi CSSD

g. Capaian Kunjungan Pelayanan

Jumlah kunjungan yang dilayani di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka tahun 2024 dan 2023 tersaji dalam tabel berikut:

Layanan	2024	2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Rawat Inap	5.362	6.528	(1.166)	-18%
Rawat Jalan:	-	-		
Klinik Jiwa	-	-	-	-
Klinik Neurologi	-	-	-	-
Klinik Forensik	-	-	-	-
Klinik Anak dan Remaja	1.727	1.477	250	17%
Klinik Geriatri	-	-	-	-
Klinik Interna	8.392	9.783	(1.391)	-14%
Klinik Gigi dan Mulut	365	505	(140)	-28%
Klinik *Fisioterapi*	79	110	(31)	-28%
Klinik VCT	1.374	1.851	(477)	-26%
Instalasi Gawat Darurat	5.553	5.376	177	3%
Jumlah Kunjungan	**22.852**	**25.630**	**(2.778)**	**-11%**

h. Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan

Berikut disajikan capaian indikator pelayanan Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Indikator Pelayanan Kesehatan	2024	2023	Satuan
BOR	50,8	52,34	%
LOS	4	4	hari
TOI	4	6	hari
BTO	21	20	kali
NDR	29,92	31,78	‰
GDR	44,30	47,25	‰
Jml Kunj Rawat Jalan	17.416	21.659	Orang
Jml Kunj Rawat Inap	5.362	6.528	Orang
Jml Kunj IGD	5.553	5.376	Orang

2. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Laporan keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting Yang Diterapkan

Laporan keuangan disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1) Entitas yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.
2) Laporan keuangan yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
3) Laporan keuangan disajikan dalam rupiah penuh dan disusun berdasarkan biaya historis atau nilai wajar.
4) Laporan keuangan terdiri dari:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional;
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   g) Catatan atas Laporan Keuangan.
5) Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan, yaitu:
   a) Basis Akrual untuk Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
   b) Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas, serta Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung.
6) Periode akuntansi entitas adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan interim disusun untuk periode semesteran.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) *Surplus/defisit-LRA*;
   d) Pembiayaan; dan
   e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3) Melalui LRA, dapat diperoleh informasi mengenai penyerapan anggaran yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan terkait dengan optimalisasi penyerapan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja Entitas.

c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
   d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
   e) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

d. Neraca

1) Neraca menyediakan informasi tentang posisi keuangan Entitas meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
2) Entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancer dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih Entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Entitas.
3) Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Kas dan Setara Kas;
   b) Investasi Jangka Pendek;
   c) Piutang;
   d) Persediaan;
   e) *Investasi Jangka Panjang;*
   f) Aset Tetap;
   g) Aset Lainnya;
   h) Kewajiban Jangka Pendek;
   i) Kewajiban Jangka Panjang; dan
   j) Ekuitas.

e. Laporan Operasional

1) Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
2) Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
   b) Beban dari kegiatan operasional;
   c) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional;
   d) Kegiatan Non-Operasional;
   e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   f) Pos Luar Biasa; dan

g) Surplus/Defisit-LO.

3) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.

4) Entitas menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
   a) Pendapatan dari alokasi APBD;
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
   f) Pendapatan BLU lainnya.

5) Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

6) Entitas menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menggunakan ***metode langsung***, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris:

1) Aktivitas Operasi

   Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Entitas dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
   a) Pendapatan dari alokasi APBN / APBD
   b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
   c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
   d) Pendapatan hasil kerja sama;
   e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
   f) Pendapatan BLUD lainnya.

   Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
   a) Pembayaran pegawai;
   b) Pembayaran barang/jasa;
   c) Pembayaran bunga; dan
   d) Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa.

2) Aktivitas Investasi

   Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

   Arus masuk kas dari aktivitas investasi terutama diperoleh dari:

a) Penjualan aset tetap;
b) Penjualan aset lainnya;
c) Penerimaan dari divestasi; dan
d) Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

a) Perolehan aset tetap;
b) Perolehan aset lainnya;
c) Penyertaan modal;
d) Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas; dan
e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

3) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Penerimaan pinjaman; dan
b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari pemerintah pusat maupun daerah, BLUD dapat memeroleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLU dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan pajak.

a) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
b) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

g. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dikomparasikan dengan periode sebelumnya.
2) Laporan Perubahan Ekuitas sedikitnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:
   a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;

3) koreksi saldo awal yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Operasional.

d) Ekuitas akhir.

h. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada pada laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna laporan keuangan mendapatkan pemahaman yang sempurna atas laporan keuangan entitas. Informasi dalam CaLK mencakup antara lain:

a) Gambaran umum;

b) Kebijakan akuntansi;

c) Penjelasan atas akun-akun laporan keuangan;

d) Kejadian setelah tanggal periode pelaporan dan informasi penting lainnya.

i. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA

1) Pendapatan-LRA BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.

2) BLUD memiliki fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya, yang berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

3) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada saat pengesahan pendapatan-LRA BLUD oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

4) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD yang belum disetor ke Rekening BLUD pada akhir periode pelaporan sepanjang telah memeroleh pengesahan dari BUD diakui sebagai Pendapatan-LRA BLUD.

5) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

7) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
8) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada pemerintah pusat/daerah.
9) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
10) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
11) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
12) *Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:*
    a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
    b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
    c) Pendapatan hasil kerja sama;
    d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
    e) Pendapatan BLUD lainnya.
13) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
14) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.
15) Pendapatan hasil kerja sama adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
16) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
17) Pendapatan BLUD lainnya antara lain berupa:
    a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
    b) Jasa giro;
    c) Pendapatan bunga;
    d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
    e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
18) Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
19) Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah RSUD yang berstatus BLUD memeroleh pendapatan dari layanan masyarakat terlantar yang didanai dari anggaran Perangkat Daerah Lainnya.

Belanja

1) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja, organisasi, dan fungsi.

3) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
4) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
5) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
6) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
7) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
9) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
10) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
11) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
12) Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah OPD.

j. Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan keuangan yang menggunakan basis kas, yang menyajikan penggunaan kas sebagai suatu akumulasi keberlebihan anggaran periode-periode sebelumnya.
2) Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal merupakan nilai SAL pada tanggal 1 Januari, nilainya sebesar saldo kas awal periode.
3) Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran tahun berjalan merupakan nilai SILPA/SIKPA LRA, yaitu sebesar realisasi Pendapatan-LRA di luar pendapatan APBD dikurangi seluruh Belanja.
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi-koreksi atas kesalahan pembukuan periode sebelumnya yang memengaruhi kas.
5) Pendapatan APBN/APBD

   Merupakan jumlah seluruh realisasi Pendapatan APBN/APBD sampai dengan tanggal periode pelaporan.
6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir

   Merupakan nilai SAL pada tanggal periode pelaporan, nilainya sebesar saldo kas pada tanggal tersebut.

k. Pos-pos Neraca

1) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Kas dan setara kas meliputi saldo kas dan saldo rekening di bank.

2) Piutang

a) Piutang usaha diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu nilai setelah dikurangi dengan nilai estimasi penyisihan piutang tak tertagih.

b) Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan.

Umur Piutang	Kolektibilitas	% Penyisihan
s.d. Jatuh Tempo	Lancar	0,5%
1 bulan sejak Penagihan I	Kurang Lancar	10%
1 bulan sejak Penagihan II	Diragukan	50%
1 bulan sejak Penagihan III	Macet	100%

Dalam hal penagihan pertama, kedua dan ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
(2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang diatas 1 s/d 3 bulan;
(3) Kualitas diragukan, jika umur piutang diatas 3 s/d 12 bulan; dan
(4) Kualitas macet, jika umur piutang diatas 12 bulan.

3) Persediaan

a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Pengakuan Persediaan

(1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau ke penguasaannya berpindah.
(2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c) **Pengukuran Persediaan**

(1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
(2) Persediaan disajikan sebesar:
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada

perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).
- Penyajian dan Pengungkapan Persediaan:
  - Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
  - Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4) Aset Tetap dan Penyusutan

a) Definisi

(1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

(3) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

(4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

(5) Masa manfaat adalah:

- Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

(6) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

b) Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Berwujud;

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3) Tidak mudah rusak;

(4) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(5) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(6) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

(7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

c) Pengukuran Aset Tetap

(1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

(2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

(4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

(5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

(6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Bangunan	biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan! gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, Jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan, Irigasi dan Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultansi Jaringan perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

(7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).

(8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

(9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

(10) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

(a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu

aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

(b)Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
  - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
  - bertambah umur ekonomis; dan/atau
  - bertambah volume; dan/atau
  - bertambah kapasitas produksi.
- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*capitalization thresholds*).

(c)Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

(d)Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Aset Tetap	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	Tidak Dibatasi
2	Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Tidak Dibatasi
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Tidak Dibatasi
	- Irigasi	Tidak Dibatasi
	- Bangunan	Tidak Dibatasi
5	Aset Tetap Lainnya	Tidak Dibatasi
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Dibatasi

d) Penyusutan

(1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.

(2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun.

(3) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

(4) Perhitungan beban penyusutan dilakukan dengan memperhitungkan tarif beban penyusutan per tahun dalam periode perhitungan.

(5) Rumus Dasar Perhitungan Beban Penyusutan, Sisa Masa Manfaat dan Nilai Buku suatu Aset Tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{BP Perbulan} = \frac{\text{NP-NS}}{\text{MM}}$$

PB = Beban Penyusutan
NP = Nilai Perolehan
NS = Nilai Sisa yang diperhitungkan atas aset tersebut pada akhir masa manfaat
MM = Masa Manfaat aset tersebut dalam tahun

(6) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	8
1	3				Aset Tetap	
1	3				Peralatan Dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10
1	3	2	01	03	Alat-Alat Bantu	10
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	5
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bemotor	3
1	3	2	03		Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengelolaan	5
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi Telepon	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07		Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08		Alat Unit-Unit Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat-Alat Laboratorium	10
1	3	2	08	02	Unit Alat-Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	*Destructive Testing Laboratory*	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
1	3	2	08	08	Peralatan Hidrodinamika	10
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	10
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	8
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengelolaan, Pemurnian,	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengelolaan Pemurnian	10
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Eksplorasi-Eksplorasi	10
1	3	2	14	03	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat Sar	5

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	10
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Gedung Dan Bangunan Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Gedung Dan Bangunan Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	50
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	4	4			Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
1	4	4	01		Jalan Dan Jembatan	
1	4	4	01	01	Jalan	10
1	4	4	01	02	Jembatan	50
1	4	4	02		Bangunan Air	
1	4	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	4	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	4	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	20
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	20
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Haku	30
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	30
1	3	4	03		Instalasi	30
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	30
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan	30

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
					Bangunan	
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	30
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	30
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	30
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	30
1	3	4	04		Jaringan	30
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	30
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	30
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30
1	3	5	02		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	5
1	3	5	02	01	Alat Musik Modern/Band	5
1	3	5				
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	
1	3	5	07	01	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	10
1	3	5	07	01	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi	50
1	3	5	07	01	Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dalam Renovasi	50

(7) *Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:*
   (1) Aset Tetap Tanah;
   (2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
   (3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
   (4) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
   (5) Aset Tetap *yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah;* dan
   (6) Aset Tetap Lainnya kecuali Alat Musik Modern/Band dan Aset Tetap Dalam Renovasi.

(8) Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat *perolehan awal atas aset tetap tersebut.*

(9) Penambahan masa manfaat aset tetap baik berupa overhead dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	3			Aset Tetap			
1	3	2		Peralatan Dan Mesin			
1	3	2	01	Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
						65%	7
1	3	2	01	Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	2
						>45% s.d 65%	4
						65%	6
1	3	2	01	Alat-Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	2
						>45% s.d 65%	4
1	3	2	02	Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	02	Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	6
1	3	2	02	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	*Renovasi*	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	02	Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d 25%	3
						>25% s.d 50%	6

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						>50% s.d 75%	9
						>75% s.d 100%	12
1	3	2	03	Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	03	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	1
1	3	2	03	Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	04	Alat Pengolahan Pertanian	*Overhaul*	>0% s.d 20%	1
						>21% s.d 40%	2
						>51% s.d 75%	5
1	3	2	04	Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan Pertanian	*Overhaul*	>0% s.d 20%	1
						>21% s.d 40%	2
						>51% s.d 75%	5
1	3	2	05	Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	05	Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d 25%	0

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	05	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	06	Alat Studio	*Overhead*	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 100%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	06	Alat Komunikasi	*Overhead*	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 100%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	06	Peralatan Parameter	*Overhead*	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 100%	4
						>75% s.d 100%	5
1	3	2	07	Alat Kedokteran	*Overhead*	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 100%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	07	Alat Kesehatan	*Overhead*	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 100%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	08	Unit-Unit Laboratorium	*Overhead*	>0% s.d 25%	2

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 100%	4
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	08	Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhead*	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 100%	5
						>75% s.d 100%	5
1	3	2	08	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	*Overhead*	>0% s.d 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 100%	7
						>75% s.d 100%	8
1	3	2	08	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	*Overhead*	>0% s.d 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 100%	7
						>75% s.d 100%	8
1	3	2	08	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	*Overhead*	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 100%	5
						>75% s.d 100%	5
1	3	2	08	*Radiation Application And Destructive Testing Laboratory* (Batam)	*Overhead*	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 100%	5

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						>75% s.d 100%	5
1	3	2	08	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhead*	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 100%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	*Overhead*	>0% s.d 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 100%	7
						>75% s.d 100%	8
1	3	2	09	Senjata Api	*Overhead*	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 100%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	09	Persenjataan Non Senjata Api	*Overhead*	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 100%	1
						>75% s.d 100%	1
1	3	2	09	Alat Keamanan Dan Perlindungan	*Overhead*	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 100%	1
						>75% s.d 100%	1
1	3	2	10	Komputer	*Overhead*	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 100%	2
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	18	Rambu-Rambu	*Overhead*	>25% s.d 50%	4

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						>50% s.d 100%	4
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	18	Peralatan Olahraga	*Overhead*	>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 100%	4
						>75% s.d 100%	4
1	3	3		Gedung Dan Bangunan			
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	*Renovasi*	>0% s.d 25%	5
						>25% s.d 50%	10
						>50% s.d 100%	15
						>75% s.d 100%	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	3	Bangunan Menara	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	5	Tugu Peringatan	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	6	Candi	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	7	Tugu Peringatan Lain	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	7	Tugu Titik Kontrol/Pasti	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4		Jalan, Irigasi Dan Jaringan			
1	3	4	1	Jalan	*Renovasi*	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 60%	5
						>60 s.d 100%	10
1	3	4	2	Jembatan	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 60%	10
						>60 s.d 100%	15
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	>0% s.d 5%	2
						>5% s.d 10%	5
						>10% s.d 20%	10
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	*Renovasi*	>0% s.d 5%	2
						>5% s.d 10%	5
						>10% s.d 20%	10
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	*Renovasi*	>0% s.d 5%	1
						>5% s.d 10%	3
						>10% s.d 20%	5
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam	*Overhaul*	>0% s.d 5%	1
						>5% s.d 10%	2

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						>10% s.d 20%	3
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	*Overhaul*	>0% s.d 5%	1
						>5% s.d 10%	2
						>10% s.d 20%	3
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	*Renovasi*	>0% s.d 30%	3
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	10	Bangunan Air	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	*Renovasi*	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	12	Instalasi Air Minum/Air Kotor	*Renovasi*	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	*Renovasi*	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	3

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						>45% s.d 65%	5
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	*Renovasi*	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
1	3	4	18	Instalasi Gas	*Renovasi*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	*Renovasi*	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	1
						>45% s.d 65%	3
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	*Overhaul*	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	21	Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	22	Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	23	Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10

5) Aset Lainnya

a) Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

(1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

(2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

(3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

(4) Aset Tidak Berwujud;

(5) Aset Lain-lain.

b) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

(1) *Goodwill*;

(2) Lisensi dan *Franchise*;

(3) Hak Cipta;

(4) Hak Paten;

(5) *Software*;

(6) Kajian;

(7) Aset Tidak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;

(8) Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan;

(9) Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset ekonomi yang Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak manfaat mempunyai Berwujud tersebut diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

c) Aset Lain-lain

(1) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

(2) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti Kebijakan Akuntansi ini.

(3) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang undangan.

d) Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

(1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

(2) Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

(3) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Kodefikasi						Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	5					ASET LAINNYA	
1	5	3				Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01			Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	01		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	01	01	*Goodwill*	10
1	5	3	01	01	02	Lisensi dan *Franchise*	10
1	5	3	01	01	03	Hak Cipta	25
1	5	3	01	01	04	Hak Paten	10
1	5	3	01	01	05	*Software*	4
1	5	3	01	01	06	Kajian	5
1	5	3	01	01	07	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	Tidak terbatas
1	5	3	01	01	08	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Sesuai dokumen sumber
1	5	3	01	01	09	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-

e) Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

(1) Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

(2) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi".

6) Kewajiban

a) Definisi

(1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

(2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

(3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

b) Kewajiban Jangka Pendek

(1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). iuran Askes, Taspen, dan Tapera. Potongan PPK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT, Taspen, Tapera, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
- Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK oleh Bendahara diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara atas pengeluaran dari kas untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- *Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Nilai yang dicantumkan* dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
- Utang PPK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
- Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan

(2) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
- Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
- Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
- Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas

pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

(3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang: Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
- Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
- Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

(4) Pendapatan Diterima di Muka

- Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
- Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
- Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(5) Utang Beban

- Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal

pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

- Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena: 1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. 2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing- masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya. 3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Pengakuan Utang Beban Utang Beban diakui pada saat: 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Pengukuran Utang Beban Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- Penyajian dan pengungkapan Utang Beban Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(6) Utang Jangka Pendek Lainnya

- Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.
- Pengakuan Uang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.
- Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca
- Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7) Ekuitas

a) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

b) Saldo ekuitas di Neraca dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

c) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

d) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).

e) Ekuitas entitas meliputi:

- Ekuitas Awal

  Merupakan hak residual awal entitas yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali entitas ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

- Surplus & Defisit Tahun Berjalan-LO

  Berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Perlakuan Akuntansi

a) Pengakuan dan Pengukuran

- Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
- Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

b) Penyajian

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

l. *Pos-pos Laporan Operasional*

Pendapatan-LO

Pendapatan *(revenues)* adalah arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dan aktivitas normal Rumah Sakit selama suatu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas. Penghasilan *(income)* adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk/penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dan kontribusi penanam modal (penyumbang). Dalam definisi penghasilan ini mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam:

1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat pada entitas rumah sakit diantaranya pendapatan akrual dari pasien tanpa jaminan kesehatan dan pasien dengan jaminan kesehatan.

2) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Pendapatan jasa layanan dari entitas Akuntansi/entitas Pelaporan merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahinya.

3) Pendapatan Hibah

Merupakan pendapatan dalam bentuk kas/barang/jasa yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi penerima untuk menyerahkan barang/jasa.

4) Pendapatan Hasil Kerjasama

Pendapatan hasil kerjasama merupakan perolehan dari hasil kerja sama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

5) Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD dan tertuang dalam bentuk RBA/DPA BLUD rumah sakit untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi BLUD.

6) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD.

7) Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar (aset tetap yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional yang sudah dimasukkan ke dalam aset lain-lain).

Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan

a) Pendapatan usaha dan jasa layanan diakui ketika hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan path tingkat penyelesaian dan transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

(1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;

(2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;

(3) Tingkat penyelesaian dan suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan

(4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal;

b) Pendapatan usaha dan jasa layanan diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat;

c) Jika salah satu syarat yang di atas tidak terpenuhi, maka pendapatan jasa layanan tidak diakui tetapi diungkapkan sebagai aset kontinjensi;

d) Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D;

e) Pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah dan pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh rumah sakit;

f) Pendapatan yang berasal dan kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain:

(1) KSO, pendapatan bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk lain diakui pada saat menjadi hak rumah sakit;

(2) Pengendalian bersama operasi/aset, pendapatan diakui sebesar porsi yang menjadi hak rumah sakit. Porsi mitra yang diterima rumah sakit diakui sebagai kewajiban.

2) Pengukuran
   a) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima;
   b) Pendapatan dan APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D;
   c) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
   d) Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh rumah sakit; dan
   e) Pengukuran pendapatan diatas menggunakan asas bruto.
3) Penyajian

   Pendapatan disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.

a) Beban Pegawai
   Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Entitas yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
b) Beban Barang dan Jasa
   Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
c) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
d) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
e) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
f) Surplus/Defisit Penghentian Aset Non Lancar
   Merupakan selisih kurang antara harga jual/harga perolehan dengan nilai buku aset non lancar yang dijual/dihapus,
g) Kerugian Penurunan Nilai Aset
   Merupakan rugi atas penurunan nilai wajar aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan pengakuan dan pengukuran aset tetap.
h) Kerugian Lainnya
   Merupakan rugi yang terjadi di luar kegiatan operasional entitas.

Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan
   a) Beban dapat diakui pada saat: (1) Timbulnya kewajiban; (2) Terjadinya konsumsi aset; dan (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

c) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

d) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: (1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; (2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan (3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

e) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka *Kebijakan Akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit* dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun dilakukan pengeluaran kas.

f) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam *mekanisme GU.*

g) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

h) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

i) Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

j) Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.

k) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.

l) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara

Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

m) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

n) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/ periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

o) Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

2) Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

a) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

b) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

3) Penyajian

Penyajian dan Pengungkapan Beban Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

b) Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

c) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

d) Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

m. Perpajakan

Kewajiban perpajakan bagi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten adalah wajib pungut atau wajib potong terhadap PPN dan PPh untuk selanjutnya disetor ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan terhadap kewajiban pajak badan dikecualikan terhadap semua instansi pemerintah. RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP: 00.332.382.1-921.000 atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka di KPP Pratama Maumere, Jl. Jendral Sudirman Larantuka, Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur.

4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Penjelasan Pos-pos Pendapatan

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.016.443.666,03 atau 116,75% dari anggaran sebesar *Rp23.997.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:*

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	23.997.500.000,00	27.988.403.954,00	116,63%
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	-	-	-
c.	Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	21.779.880,00	-
d.	Pendapatan Hibah	-	-	-
e.	Pendapatan Usaha Lainnya	-	6.259.832,03	-
Jumlah Pendapatan		**23.997.500.000,00**	**28.016.443.666,03**	**116,75%**

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.988.403.954,00 atau 116.63% dari anggaran sebesar Rp23.997.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	Pendapatan Pasien Umum			
	- Rawat Inap	300.620.600,00	229.481.862,00	76,34%
	- Laboratorium	135.000.000,00	95.851.000,00	71,00%
	- Transfusi Darah	7.000.000,00	3.600.000,00	51,43%
	- Radiologi	178.208.500,00	63.920.000,00	35,87%
	- Fisioterapi	10.000.000,00	10.830.000,00	108,30%
	- ICU/HCU	35.000.000,00	-	-
	- Farmasi	175.808.000,00	67.098.428,00	38,17%
	- IGD	78.337.000,00	65.254.722,00	83,30%
	- *Ambulance*	*3.000.000,00*	*590.000,00*	19,67%
	- OK	35.000.000,00	25.875.000,00	73,93%
	- Gizi	275.000,00	-	-
	- Pelayanan Jenazah	1.000.000,00	4.698.000,00	469,80%
	- Tindakan Poliklinik	250.000.000,00	102.326.884,00	40,93%
	- Qris	-	6.063.263,00	-
2)	Pendapatan Pasien Jaminan			
	- Jasa Raharja / Taspen	20.000.000,00	58.685.163,00	293,43%
	- Tunggakan JKN Tahun 2023	3.500.000.000,00	7.003.480.025,00	200,10%
	- Pelayanan JKN 2024	18.918.250.900,00	20.250.649.607,00	107,04%
	- Jampersal	350.000.000,00	-	-
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		**23.997.500.000,00**	**27.988.403.954,00**	**116,63%**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan per 31 Desember 2024.

c. Pendapatan Hasil Kerja Sama

Jumlah realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.779.880,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	Sewa Gedung Kantor Kas Bank NTT	-	17.114.880,00	-
2)	Sewa Lahan Fotocopy	-	4.665.000,00	-
Jumlah Pendapatan Hasil Kerja Sama		**-**	**21.779.880,00**	-

d. Pendapatan Hibah

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Jumlah realisasi Pendapatan Usaha Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.259.832,03 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	Pendapatan Lain-lain			
	- Pendapatan PKL Mahasiswa	-	5.936.000,00	-
	- Pendapatan Penelitian Mahasiswa	-	250.000,00	-
2)	Pendapatan Jasa Lainya			
	- Jasa Giro	-	73.832,03	-
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya		**-**	**6.259.832,03**	-

4.2 Penjelasan Pos-pos Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.598.601.934,00 atau 95,96% dari anggaran sebesar Rp32.928.692.175,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
a.	Belanja Pegawai	9.349.420.834,00	9.341.936.578,00	99,92%
b.	Belanja Barang dan Jasa	23.579.271.341,00	22.256.665.356,00	94,39%
c.	Belanja Bunga	-	-	-
d.	Belanja Lainnya	-	-	-
	Jumlah	**32.928.692.175,00**	**31.598.601.934,00**	**95,96%**

a. Belanja Pegawai

Jumlah realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.341.936.578,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp9.349.420.834,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	**Sumber Dana APBD**	**115.300.000,00**	**108.700.000,00**	**94,28%**
	a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			
	- Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	106.800.000,00	100.200.000,00	93,82%
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00%
2)	**Sumber Dana BLUD**	**9.234.120.834,00**	**9.233.236.578,00**	**99,99%**
	a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.189.870.834,00	9.189.486.578,00	100,00%
	- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	44.250.000,00	43.750.000,00	98,87%
Jumlah Belanja Pegawai		**9.349.420.834,00**	**9.341.936.578,00**	**99,92%**

b. Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.256.665.356,00 atau 94,39% dari anggaran Rp23.579.271.341,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	**Sumber Dana APBD**	**9.025.892.175,00**	**8.028.261.760,00**	**88,95%**
	a) Belanja Barang	**359.909.345,00**	**352.434.131,00**	**97,92%**
	- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.497.300,00	28.273.500,00	99,21%
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	47.780.886,00	44.876.831,00	93,92%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	48.386.357,00	48.379.000,00	99,98%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	50.991.000,00	50.969.100,00	99,96%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	35.838.682,00	35.792.200,00	99,87%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	26.321.250,00	26.308.000,00	99,95%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	6.643.870,00	6.635.000,00	99,87%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	650.000,00	276.000,00	42,46%
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.300.000,00	22.519.500,00	85,63%
	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.500.000,00	4.405.000,00	97,89%
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00%
	b) Belanja Jasa	**7.481.355.000,00**	**6.594.045.787,00**	**88,14%**
	- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	7.250.000,00	72,50%
	- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.681.300.000,00	2.622.050.000,00	97,79%
	- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.353.240.000,00	1.154.120.000,00	85,29%
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	169.050.000,00	100.050.000,00	59,18%
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.290.800.000,00	1.779.050.000,00	77,66%
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	717.600.000,00	686.550.000,00	95,67%
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00%
	- Belanja Jasa Tenaga Supir	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00%
	- Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	324.600,00	81,15%
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22.500.000,00	16.341.187,00	72,63%
	- Belanja Lembur	66.065.000,00	65.410.000,00	99,01%
	- Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	30.000.000,00	22.500.000,00	75,00%
	c) Belanja Pemeliharaan	**802.517.830,00**	**700.437.250,00**	**87,28%**
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	***9.600.000,00***	***7.445.000,00***	***77,55%***
	- Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi	9.600.000,00	7.445.000,00	77,55%
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**709.917.830,00**	**609.992.250,00**	**85,92%**
	- Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	487.917.830,00	388.042.250,00	79,53%
	- Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00%

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
	- Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	130.000.000,00	129.950.000,00	99,96%
	- Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00%
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan	**83.000.000,00**	**83.000.000,00**	**100,00%**
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00%
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	-	-	-
	- Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00%
	d) Belanja Perjalanan Dinas	**372.110.000,00**	**371.344.592,00**	**99,79%**
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	372.110.000,00	371.344.592,00	99,79%
	e) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00%**
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
2)	**Sumber Dana BLUD**	**14.553.379.166,00**	**14.228.403.596,00**	**97,77%**
	a) Belanja Barang	**12.874.344.052,00**	**12.749.145.048,00**	**99,03%**
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Minyak Tanah)	124.000.000,00	114.388.067,00	92,25%
	- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.124.500.000,00	1.124.500.000,00	100,00%
	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.533.000.000,00	5.532.963.095,00	100,00%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.880.300,00	2.100.000,00	30,52%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.465.040,00	1.745.000,00	31,93%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	266.800.020,00	261.228.000,00	97,91%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	365.000,00	73,00%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.877.250,00	21.535.137,00	90,19%
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	56.000.000,00	55.141.000,00	98,47%
	- Belanja Obat-Obatan	4.260.000.000,00	4.166.015.516,00	97,79%
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.400.000,00	23.343.000,00	85,19%
	- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.445.921.442,00	1.445.821.233,00	99,99%
	b) Belanja Jasa	**852.817.650,00**	**688.790.884,00**	**80,77%**
	- Belanja Jasa Pengepakan dan Pengiriman	130.000.000,00	2.940.000,00	2,26%
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00%
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.600.000,00	24.150.000,00	87,50%
	- Belanja Jasa konversi Aplikasi SIstem Informasi	7.500.000,00	-	-
	- Belanja Tagihan Air	37.240.000,00	37.079.600,00	99,57%
	- Belanja Tagihan Listrik	521.360.000,00	521.323.700,00	99,99%
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.839.500,00	37.698.384,00	97,06%

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
	- Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	39.900.000,00	23.400.000,00	58,65%
	- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.128.150,00	30.949.200,00	79,10%
	c) Belanja Pemeliharaan	**745.717.464,00**	**723.147.664,00**	**96,97%**
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**672.300.753,00**	**669.292.753,00**	**99,55%**
	- Belanja Pemeliharaan Teknologi dan informasi	2.540.500,00	-	-
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.500.000,00	26.032.500,00	98,24%
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	643.260.253,00	643.260.253,00	100,00%
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**73.416.711,00**	**53.854.911,00**	**73,36%**
	- *Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan* Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	*13.500.000,00*	*12.520.000,00*	92,74%
	- Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	59.916.711,00	41.334.911,00	68,99%
	d) Belanja Perjalanan Dinas	**80.500.000,00**	**67.320.000,00**	83,63%
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.500.000,00	67.320.000,00	83,63%
	Total Belanja Barang dan Jasa	**23.579.271.341,00**	**22.256.665.356,00**	**94,39%**

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dilihat dari sumber dana adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	Sumber Dana APBD	9.025.892.175,00	8.028.261.760,00	88,95%
2)	Sumber Dana BLUD	14.553.379.166,00	14.228.403.596,00	97,77%
	Jumlah Sumber Dana	**23.579.271.341,00**	**22.256.665.356,00**	**94,39%**

c. Belanja Bunga

Tidak terdapat realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024.

d. Belanja Lainnya

Tidak terdapat realisasi Belanja Lainnya Tahun Anggaran 2024.

4.3 Penjelasan Pos-pos Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.646.141.873,00 atau 99,74% dari anggaran sebesar Rp4.658.326.937,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
a.	Belanja Modal Tanah	-	-	-
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.545.007.719,00	4.538.889.293,00	99,87%
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.319.218,00	107.252.580,00	94,65%
d.	*Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi*	-	-	-
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
f.	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
g.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah	**4.658.326.937,00**	**4.646.141.873,00**	**99,74%**

Rincian Belanja Modal Tahun 2024 dilihat dari sumber dana adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	Sumber Dana APBD	4.448.326.937,00	4.441.864.873,00	99,85%
2)	*Sumber Dana BLUD*	*210.000.000,00*	*204.277.000,00*	*97,27%*
	Jumlah Sumber Dana	**4.658.326.937,00**	**4.646.141.873,00**	**99,74%**

a. Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.538.889.293,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp4.545.007.719,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	**Sumber Dana APBD**	**4.335.007.719,00**	**4.334.612.293,00**	**99,99%**
	- Belanja Modal Pompa	*45.000.000,00*	*44.999.400,00*	*100,00%*
	- Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	4.290.007.719,00	4.289.612.893,00	99,99%
2)	**Sumber Dana BLUD**	**210.000.000,00**	**204.277.000,00**	**97,27%**
	- Belanja Modal Personal Komputer	160.000.000,00	156.000.000,00	97,50%
	- Belanja Modal Telepon	50.000.000,00	48.277.000,00	96,55%
	Jumlah	**4.545.007.719,00**	**4.538.889.293,00**	**99,87%**

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 sebesar Rp107.252.580,00 atau 94,65% dari anggaran sebesar Rp113.319.218,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	**Sumber Dana APBD**	**113.319.218,00**	**107.252.580,00**	**94,65%**
	- Belanja Modal Bangunan Kesehatan	113.319.218,00	107.252.580,00	94,65%
2)	**Sumber Dana BLUD**	-	-	-
	- Pengadaan Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Jumlah	**113.319.218,00**	**107.252.580,00**	**94,65%**

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2024.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024.

f. Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024.

g. Belanja Modal Aset Lainnya

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per 31 Desember 2024.

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp0,00.

5.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tidak terdapat Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2024.

5.3 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan

Jumlah Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) Tahun Berjalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.228.300.140,97, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024		%
		Anggaran	Realisasi	
1)	Realisasi Pendapatan-LRA	23.997.500.000,00	28.016.443.666,03	116,75%
2)	Realisasi Belanja-LRA	37.587.019.112,00	36.244.743.807,00	96,43%
	Jumlah	**(13.589.519.112,00)**	**(8.228.300.140,97)**	**60,55%**

5.4 Pendapatan APBD

Jumlah Pendapatan APBD per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.578.826.633,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	2024
1)	Pendapatan Operasional	
	- Belanja Pegawai	**108.700.000,00**
	- *Belanja Barang dan Jasa*	*8.028.261.760,00*
2)	Pendapatan Investasi	
	- Belanja Modal	4.441.864.873,00
	Jumlah	**12.578.826.633,00**

5.5 Setoran ke Kas Daerah

Tidak terdapat Setoran ke Kas Daerah per 31 Desember 2024.

5.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.350.526.492,03.

6. Penjelasan Pos-pos Neraca

6.1 Kas di Bendahara

Kas di Bendahara merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari pendapatan APBD. Saldo Kas di Bendahara per 31 Desember 2024, terdiri dari:

	2024
a. Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	-
b. Kas di Bank	-
- PT Bank NTT - Rek. 01101050007581 a.n Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	-
Jumlah Kas di Bendahara	**-**

6.2 Kas pada BLUD

Jumlah Kas pada BLUD per 31 Desember 2024 terdiri dari saldo Kas pada Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bank adalah sebesar Rp4.350.526.492,03, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
a. Kas Tunai Bendahara Penerimaan-BLUD	-
b. Kas Tunai Bendahara Pengeluaran-BLUD	-
c. Kas di Bank	
- PT Bank NTT - 2508529603 a.n RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	73.832,03
- PT Bank NTT - 01101050001230 a.n Pemegang Kas RSUD Larantuka	4.350.452.660,00
Jumlah Kas pada BLUD	**4.350.526.492,03**

6.3 Piutang Jasa Layanan

Piutang Jasa Layanan merupakan piutang yang terjadi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Jumlah Piutang Jasa Layanan Netto per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.148.024.384,06, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
a. Pasien Umum	3.582.689,00
b. BPJS - Kesehatan	4.421.559.700,00
Jumlah Piutang Jasa Layanan (Bruto)	**4.425.142.389,00**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(277.118.004,95)
Jumlah Piutang Netto	**4.148.024.384,06**

Berikut rincian Mutasi Piutang Tahun 2024:

Uraian	Saldo Awal 01-Jan-24	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31-Dec-24
		Tambah	Kurang	
a. Piutang Pasien Umum	-	3.582.689,00	-	3.582.689,00
b. Piutang BPJS - Kesehatan	7.003.480.025,00	24.672.209.307,00	27.254.129.632,00	4.421.559.700,00
Jumlah Piutang (bruto)	**7.003.480.025,00**	**24.675.791.996,00**	**27.254.129.632,00**	**4.425.142.389,00**

Berikut rincian mutasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024:

Keterangan	Kualitas Piutang			
	Lancar 0-1 bulan	Kurang Lancar >1 - 3 bulan	Diragukan >3 - 12 bulan	Macet >12 bulan
a. Piutang Pasien Umum	3.582.689,00	-	-	-
b. Piutang BPJS - Kesehatan	1.737.430.300,00	2.684.129.400,00	-	-
Jumlah Piutang (bruto)	1.741.012.989,00	2.684.129.400,00	-	-
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%
Jumlah Penyisihan	**8.705.064,95**	**268.412.940,00**	-	-
Jumlah Piutang (netto)	**1.732.307.924,06**	**2.415.716.460,00**	-	-

6.4 Persediaan BLUD

Jumlah Persediaan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.362.695.619,22, dengan rincian sebagai berikut:

		2024
a.	Persediaan Bahan	2.267.060.657,42
b.	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	-
c.	Obat-Obatan	1.095.634.961,80
	Jumlah	**3.362.695.619,22**

Rincian mutasi Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2024	Mutasi 2024		Saldo Akhir 31 Des 2024
			Penambahan	Pengurangan	
a.	**Persediaan Bahan**	**2.728.842.194,00**	**6.863.624.646,10**	**7.325.406.182,68**	**2.267.060.657,42**
	- Bahan Lainnya	2.687.592.194,00	5.615.959.646,10	6.036.491.182,68	2.267.060.657,42
	- Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-
	- Isi Tabung Gas	41.250.000,00	1.247.665.000,00	1.288.915.000,00	-
b.	**Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor**	-	**534.553.437,00**	**534.553.437,00**	-
	- Alat Tulis Kantor	-	50.479.000,00	50.479.000,00	-
	- Kertas dan Cover	-	52.714.100,00	52.714.100,00	-
	- Bahan Cetak	-	321.100.200,00	321.100.200,00	-
	- Benda Pos	-	365.000,00	365.000,00	-
	- Bahan Komputer	-	47.843.137,00	47.843.137,00	-
	- Perabot Kantor	-	6.635.000,00	6.635.000,00	-
	- Alat Listrik	-	55.141.000,00	55.141.000,00	-
	- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	-	276.000,00	276.000,00	-
c.	**Obat-Obatan**	**1.194.794.450,15**	**4.202.731.880,05**	**4.301.891.368,40**	**1.095.634.961,80**
	- Obat	1.194.794.450,15	4.202.731.880,05	4.301.891.368,40	1.095.634.961,80
	Total	**3.923.636.644,15**	**11.600.909.963,15**	**12.161.850.988,08**	**3.362.695.619,22**

6.5 Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap (Nilai Buku) RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.766.123.562,36, dengan rincian sebagai berikut:

		2024
a.	Tanah	4.065.400.000,00
b.	Peralatan dan Mesin	115.303.879.079,00
c.	Gedung dan Bangunan	34.211.683.575,33
d.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.645.021.744,00
e.	Aset Tetap Lainnya	464.403.500,00
f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
	Harga Perolehan Aset Tetap	**161.690.387.898,33**
g.	*Akumulasi Penyusutan*	*(108.924.264.335,97)*
	Nilai Buku Aset Tetap	**52.766.123.562,36**

Rincian mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 1 Jan 2024	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
a. Tanah	4.065.400.000,00	-	-	4.065.400.000,00
b. Peralatan dan Mesin	110.594.313.126,00	9.006.678.846,00	4.297.112.893,00	115.303.879.079,00
c. Gedung dan Bangunan	32.427.975.916,00	2.548.077.659,33	764.370.000,00	34.211.683.575,33
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.549.711.744,00	95.310.000,00	-	7.645.021.744,00
e. Aset Tetap Lainnya	464.403.500,00	-	-	464.403.500,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.778.052.918,33	-	1.778.052.918,33	-
Jumlah	**156.879.857.204,33**	**11.650.066.505,33**	**6.839.535.811,33**	**161.690.387.898,33**

Uraian	Saldo 1 Jan 2024	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan				
a. Tanah	-	-	-	-
b. Peralatan dan Mesin	85.081.397.705,67	12.180.123.749,51	9.176.590,39	97.252.344.864,78
c. Gedung dan Bangunan	10.251.608.075,58	670.871.623,54	670.683.005,58	10.251.796.693,54
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.136.438.859,60	283.683.918,05	-	1.420.122.777,65
e. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	**96.469.444.640,85**	**13.134.679.291,10**	**679.859.595,98**	**108.924.264.335,97**
Nilai Buku				
a. Tanah	4.065.400.000,00			4.065.400.000,00
b. Peralatan dan Mesin	25.512.915.420,33			18.051.534.214,22
c. Gedung dan Bangunan	22.176.367.840,42			23.959.886.881,79
d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.413.272.884,40			6.224.898.966,35
e. Aset Tetap Lainnya	464.403.500,00			464.403.500,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.778.052.918,33			-
Jumlah	**60.410.412.563,48**			**52.766.123.562,36**

Rincian Tanah lokasi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yakni sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas (M^2)	Lokasi	Bukti Penguasaan/ Hak Pakai	Nilai
1	RSUD Larantuka	40.654	Kelurahan Sarotari, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Hak Pakai No. 25	4.065.400.000,00

Selama periode berjalan Tahun 2024 terdapat Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp13.127.177.458,52 *(lihat catatan no. 7.2d)*.

Selama periode berjalan tahun 2024 terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan uraian sebagai berikut:

	2024
1) Peralatan dan Mesin	
Harga Perolehan	
Saldo Awal	**110.594.313.126,00**
Penambahan:	
- Belanja Barang dan Jasa	367.453.660,00
- Kapitalisasi Belanja Pegawai	7.500.000,00
- Belanja Modal BLUD	4.334.612.293,00
- Reklasifikasi antar AT	4.297.112.893,00
Jumlah Penambahan	**9.006.678.846,00**
Pengurangan:	
- Reklasifikasi antar AT	4.297.112.893,00
Jumlah Pengurangan	**4.297.112.893,00**
Saldo Akhir Nilai Perolehan	**115.303.879.079,00**
Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal	**85.081.397.705,67**
Penambahan:	
- Beban Penyusutan Murni	12.035.539.589,51
- Beban Penyusutan Kapitalisasi	144.584.160,00
Jumlah Penambahan	**12.180.123.749,51**

	2024
Pengurangan:	
- Koreksi Saldo Awal	9.176.590,39
Jumlah Pengurangan	**9.176.590,39**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**97.252.344.864,78**
Nilai Buku	**18.051.534.214,22**
2) Gedung dan Bangunan	
Harga Perolehan	
Saldo Awal	**32.427.975.916,00**
Penambahan:	
- Belanja Modal BLUD	107.252.580,00
- Belanja Barang dan Jasa	609.992.250,00
- Kapitalisasi Belanja Pegawai	11.000.000,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	34.524.911,00
- Reklasifikasi antar AT (dari KDP)	1.778.052.918,33
- Koreksi	7.255.000,00
Jumlah Penambahan	**2.548.077.659,33**
Pengurangan:	
- Koreksi	7.255.000,00
- Reklasifikasi antar AT ke aset lainnya	753.615.000,00
- Reklasifikasi ke persediaan	3.500.000,00
Jumlah Pengurangan	**764.370.000,00**
Saldo Akhir Nilai Perolehan	***34.211.683.575,33***
Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal	**10.251.608.075,58**
Penambahan:	
- Beban Penyusutan Murni	664.545.424,89
- *Beban Penyusutan Kapitalisasi*	*6.326.198,66*
Jumlah Penambahan	**670.871.623,54**
Pengurangan:	
- Koreksi Saldo Awal	663.181.200,00
- Beban Penyusutan Kapitalisasi	7.501.805,58
Jumlah Pengurangan	**670.683.005,58**
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**10.251.796.693,54**
Nilai Buku	**23.959.886.881,79**
3) Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
Harga Perolehan	
Saldo Awal	**7.549.711.744,00**
Penambahan:	
- Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00
- Kapitalisasi Belanja Pegawai	5.500.000,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00
Jumlah Penambahan	**95.310.000,00**
Pengurangan:	
- Pengurangan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
Jumlah Pengurangan	-
Saldo Akhir Harga Perolehan	**7.645.021.744,00**
Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal	**1.136.438.859,60**
Penambahan:	
- Beban Penyusutan Murni	244.844.758,13
- Beban Penyusutan Kapitalisasi	38.839.159,91
Jumlah Penambahan	**283.683.918,05**

	2024
Pengurangan:	
- Pengurangan	-
Jumlah Pengurangan	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	**1.420.122.777,65**
Nilai Buku	**6.224.898.966,35**

4) Aset Tetap Lainnya

Harga Perolehan	
Saldo Awal	**464.403.500,00**
Penambahan:	
- Belanja Modal	-
Jumlah Penambahan	-
Pengurangan:	
- Pengurangan	-
Jumlah Pengurangan	-
Saldo Akhir Harga Perolehan	**464.403.500,00**
Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal	-
Penambahan:	
- Beban Penyusutan	-
Jumlah Penambahan	-
Pengurangan:	
- Koreksi Akumulasi Penyusutan	-
Jumlah Pengurangan	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	**464.403.500,00**

5) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal	**1.778.052.918,33**
Penambahan:	
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	-
Jumlah Penambahan	-
Pengurangan:	
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	1.778.052.918,33
Jumlah Pengurangan	**1.778.052.918,33**
Saldo Akhir Harga Perolehan	-
Akumulasi Penyusutan	
Saldo Awal	-
Penambahan:	
- Beban Penyusutan	-
Jumlah Penambahan	-
Pengurangan:	
- Pengurangan	-
Jumlah Pengurangan	-
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

6.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya (Nilai Buku) per 31 Desember 2024 sebesar Rp297.320.704,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
Harga Perolehan	
a. Aset Tidak Berwujud	-
b. Aset Lain-lain	14.262.225.624,00
Jumlah	**14.262.225.624,00**
Akumulasi Amortisasi	(13.964.904.920,00)
Nilai Buku	**297.320.704,00**

Rincian Aset Lainnya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 1 Jan 2024	Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Des 2024
		Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
a. Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
b. Aset Lain-lain	15.571.545.624,00	753.615.000,00	2.062.935.000,00	14.262.225.624,00
Jumlah	**15.571.545.624,00**	**753.615.000,00**	**2.062.935.000,00**	**14.262.225.624,00**
Akumulasi Amortisasi				
a. Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
b. Aset Lain-lain	13.930.404.709,00	34.500.211,00	-	13.964.904.920,00
Jumlah	**13.930.404.709,00**	**34.500.211,00**	-	**13.964.904.920,00**
Nilai Buku				
a. Aset Tidak Berwujud	-			-
b. Aset Lain-lain	1.641.140.915,00			297.320.704,00
Jumlah	**1.641.140.915,00**			**297.320.704,00**

Selama periode berjalan Tahun 2024 terdapat Beban Penyusutan Aset lain-lain sebesar Rp34.500.211,00 *(lihat catatan no. 7.2d)*.

6.7 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.497.447.405,20, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-
b. Belanja Yang Masih Harus Dibayar	4.497.447.405,20
c. Pendapatan Diterima Dimuka	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**4.497.447.405,20**

Rincian Kewajiban Jangka Pendek di tahun 2024 terdiri dari Belanja Yang Masih Harus Dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
a. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.021.352.024,20
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	**4.021.352.024,20**
b. Belanja Barang dan Jasa Yang Masih Harus Dibayar	
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	
- *Bahan-Isi Tabung Gas*	*123.165.000,00*
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	21.000.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.080.000,00
- Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	142.254.581,00
Belanja Jasa Yang Masih Harus Dibayar	
- Beban Jasa Pengempakan dan Pengiriman	109.645.800,00
- *Beban Jasa Konversi Aplikasi Sistem Informasi*	52.500.000,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	3.450.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Yang Masih Harus Dibayar	**476.095.381,00**
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**4.497.447.405,20**

6.8 Ekuitas

Jumlah ekuitas RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.427.243.356,46, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
a. Ekuitas Awal	79.190.156.493,30
b. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	(8.361.869.381,56)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(10.401.043.755,28)
Jumlah Ekuitas	**60.427.243.356,46**

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar lihat catatan 9.3.

7. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

7.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.070.768.747,18, dengan rincian sebagai berikut.

		2024
a.	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	25.410.066.318,00
b.	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	-
c.	Pendapatan Hasil Kerjasama	21.779.880,00
d.	Pendapatan Hibah	53.836.084,15
e.	Pendapatan Lain-Lain	6.259.832,03
f.	Pendapatan APBD	12.578.826.633,00
	Jumlah	**38.070.768.747,18**

Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.410.066.318,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
1) Pasien Umum	-
Rawat Inap	229.481.862,00
Laboratorium	96.358.500,00
Transfusi Darah	3.600.000,00
Radiologi	64.830.000,00
Fisioterapi	10.830.000,00
Farmasi	68.305.617,00
IGD	65.997.722,00
Ambulance	590.000,00
OK	25.875.000,00
Pelayanan Jenazah	4.698.000,00
Tindakan Poliklinik	102.541.884,00
Qris	6.063.263,00
2) Pendapatan Pasien Jaminan	
Jasa Raharja / Taspen	58.685.163,00
Pelayanan JKN 2024	24.672.209.307,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat - LO	**25.410.066.318,00**

b. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan

Tidak terdapat saldo Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan per 31 Desember 2024.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama

Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.779.880,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
1) Sewa Gedung Kantor Kas Bank NTT	17.114.880,00
2) Sewa Lahan Fotocopy	4.665.000,00
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama - LO	**21.779.880,00**

d. Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp53.836.084,15, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
1) Hibah Bahan Lainnya	17.119.720,10
2) Hibah Obat-Obatan	36.716.364,05
Jumlah Pendapatan Hibah - LO	**53.836.084,15**

Pada Tahun 2024 terdapat hibah bantuan obat dan BMHP untuk Pusat Krisis Kesehatan kemenkes RI (RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KLB Erupsi Gunung Lewatobi) berdasarkan Surat Bukti Barang Keluar Nomor: 761/D/IFP/XI/2024, tanggal 05 November 2024 yang telah diterima oleh RSUD Larantuka tanggal 22 November 2024.

e. Pendapatan Usaha Lainnya

Total Pendapatan Usaha Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.259.832,03, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
1) Diklat dan Penelitian Tenaga Kesehatan	
Pendapatan PKL Mahasiswa	5.936.000,00
Pendapatan Penelitian Mahasiswa	250.000,00
2) Pendapatan Jasa Lainnya	
Jasa Giro	73.832,03
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya - LO	**6.259.832,03**

f. Pendapatan APBD

Total Pendapatan APBD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.578.826.633,00, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
1) Pendapatan Operasional	
- Belanja Langsung Pegawai	108.700.000,00
- Belanja Langsung Barang dan Jasa	8.028.261.760,00
2) Pendapatan Investasi	
- Belanja Modal	4.441.864.873,00
Jumlah Pendapatan APBD	**12.578.826.633,00**
Jumlah Pendapatan Operasional	**38.070.768.747,18**

7.2 Beban

Total Beban RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp46.432.638.128,74, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
a. Beban Pegawai	10.540.308.402,20
b. Beban Barang dan Jasa	22.453.534.025,08
c. Beban Penyisihan Piutang	277.118.004,95
d. Beban Penyusutan dan Amortisasi	13.161.677.696,52
e. Beban Lain-lain	-
Jumlah Beban Operasional	**46.432.638.128,74**

Rincian Beban adalah sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.540.308.402,20 dengan rincian sebagai berikut:

	2024
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	10.411.858.402,20
- Belanja Honorarium	
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	100.200.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	28.250.000,00
Jumlah Belanja Pegawai - Basis Akrual	**10.540.308.402,20**

b. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.453.534.025,08 dengan rincian sebagai berikut:

	2024
1) Beban Barang	
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.273.500,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Minyak Tanah)	114.388.067,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.288.915.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.036.491.182,68
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	50.479.000,00
Jumlah dipindahkan	*7.518.546.749,68*

	2024
Jumlah pindahan	*7.518.546.749,68*
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	52.714.100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	321.100.200,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	365.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	47.843.137,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	6.635.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	55.141.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	276.000,00
Beban Obat-Obatan	4.301.891.368,40
Beban Makanan dan Minuman Rapat	49.362.500,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.405.000,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.672.075.814,00
Jumlah Beban Barang	**14.030.355.869,08**
2) Beban Jasa	
Beban Jasa Pengepakan dan Pengiriman	112.585.800,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.250.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.633.300.000,00
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.154.120.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	127.650.000,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.779.050.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	686.550.000,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	41.400.000,00
Beban Jasa Tenaga Supir	69.000.000,00
Beban Jasa konversi Aplikasi SIstem Informasi	52.500.000,00
Beban Tagihan Air	37.079.600,00
Beban Tagihan Listrik	521.323.700,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	37.698.384,00
Beban Paket/Pengiriman	324.600,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.341.187,00
Beban Lembur	65.410.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	23.400.000,00
Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	22.500.000,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	30.949.200,00
Jumlah Beban Jasa	**7.448.432.471,00**
3) Beban Pemeliharaan	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
Beban Pemeliharaan Teknologi dan informasi	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.032.500,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	480.083.593,00
Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi	7.445.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-
Beban Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.520.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan	**526.081.093,00**
4) Beban Perjalanan Dinas	
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	438.664.592,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**438.664.592,00**
5) Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000,00
Jumlah Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**10.000.000,00**
Jumlah Beban Barang dan Jasa - Basis Akrual	**22.453.534.025,08**

c. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 adalah sebesar Rp277.118.004,95, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	277.118.004,95
Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**277.118.004,95**

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.161.677.696,52 dengan rincian sebagai berikut:

	2024
1) Beban Penyusutan	
- Peralatan dan Mesin	12.180.123.749,51
- Gedung dan Bangunan	663.369.817,96
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	283.683.918,05
- Aset Lain-lain	34.500.211,00
Jumlah Beban Penyusutan	**13.161.677.696,52**
2) Beban Amortisasi	
- Aset Tidak Berwujud Lainnya	-
Jumlah Beban Amortisasi	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**13.161.677.696,52**

e. Beban Lain-lain

Tidak terdapat saldo Beban Lain-lain per 31 Desember 2024.

7.3 Kegiatan Non Operasional

Tidak terdapat saldo Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024.

7.4 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024.

8. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

8.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	2024
a. Arus Kas Masuk	
Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari:	
1) Pendapatan APBD	12.578.826.633,00
2) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	27.988.403.954,00
3) Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	-
4) Pendapatan Hasil Kerja Sama	21.779.880,00
5) Pendapatan Hibah	-
6) Pendapatan Usaha Lainnya	6.259.832,03
Jumlah Arus Kas Masuk	**40.595.270.299,03**
b. Arus Kas Keluar	
Arus kas keluar dari aktivitas operasi terdiri dari:	
1) Belanja Pegawai	9.341.936.578,00
2) Belanja Barang dan Jasa	22.256.665.356,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**31.598.601.934,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**8.996.668.365,03**

8.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	2024
a. Arus Kas Masuk	
Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:	
1) Penerimaan Penjualan atas Tanah	-
2) Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-
3) Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-
4) Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
5) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap	-
6) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-

	2024
b. Arus Kas Keluar	
Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:	
1) Belanja Modal Tanah	-
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.538.889.293,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.252.580,00
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
5) Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	-
6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
7) Belanja Modal Aset Lainnya	-
Jumlah Arus Kas Keluar	**4.646.141.873,00**
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(4.646.141.873,00)**

8.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

a. Arus Kas Masuk	
1) Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan	-
b. Arus Kas Keluar	
1) Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan	-
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-

8.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

a. Arus Kas Masuk	
1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.417.783.198,79
b. Arus Kas Keluar	
1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.417.783.198,79
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	-

8.5 Saldo Kas

	2024
a. Saldo Awal Kas	-
b. Kenaikan/Penurunan kas per 31 Desember 2024	4.350.526.492,03
c. Saldo Akhir Kas	**4.350.526.492,03**

9. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

9.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp79.190.156.493,30.

9.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Surplus (Defisit)-LO RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2024 adalah Defisit sebesar Rp8.361.869.381,56, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
a. Pendapatan	38.070.768.747,18
b. Beban	(46.432.638.128,74)
c. Kegiatan Non Operasional	-
d. Pos Luar Biasa	-
Jumlah	**(8.361.869.381,56)**

9.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar terdiri dari koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi nilai ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	2024
a. Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Piutang	7.003.480.025,00
b. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.176.590,39
c. Koreksi Ekuitas - Harga Perolehan Aset Lain-lain	(2.593.584.324,67)
d. Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(12.021.135.846,00)
e. Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	(2.798.980.200,00)
Jumlah	***(10.401.043.755,28)***

9.4 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.427.243.356,46.

10 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian laporan keuangan sama dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 27 Maret 2025.

Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal pelaporan yang memerlukan pengungkapan dalam dan atau penyesuaian terhadap laporan keuangan.

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
I GEDE OKA
Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP:
Keputusan Menteri Keuangan
No.495/KM.1/2019

Laporan No.: 00032/ML/KAP.IGO/III/2025

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengguna Laporan Keuangan

RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 terlampir, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini Wajar yang dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00032/2.1274/AU.5/11/0463-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang kami lakukan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat seperti itu.

Manajemen RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat dari pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern, kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang. Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut diatas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami

Alamat: Jl. Muding Indah XII No. 9X, Gatot Subroto Barat, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Badung, Bali
Kode Pos: 80361. Telp. (0361) 9069498. E-mail: kapigedeoka@gmail.com. Website: www.kapigedeoka.com

atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Hasil pemeriksaan kami terhadap efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kami tidak menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap Laporan Keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Namun demikian, kami menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak berpengaruh langsung dan tidak material terhadap Laporan Keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dengan pokok-pokok temuan:

1. RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka belum sepenuhnya menyusun Laporan Keuangan (*unaudited*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Badan Layanan Umum
2. Pelaporan keuangan belum sepenuhnya didukung dengan sistem dan prosedur pencatatan memadai
3. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
4. Penatausahaan persediaan pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka belum sepenuhnya memadai
5. Terdapat persediaan kedaluwarsa sebesar Rp4.101.677.854 belum dilakukan pemusnahan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan
6. Pencatatan/penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib
7. Barang milik daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp14.262.225.624,00 yang sudah rusak berat (RB) dan tidak dimanfaatkan belum dihapuskan
8. Aset Tetap Berupa Instalasi Gas dengan Nilai Perolehan Rp5.799.948.155,00 Tidak Dimanfaatkan
9. Tidak terdapat dokumen pendukung akumulasi penyusutan aset lain-lain berupa aset tetap rusak berat pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka,

I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA., CFI., ASEAN CPA.

NRAP: AP. 0463

Badung, 27 Maret 2025

Berdasarkan Pasal 6 PMK No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, menyatakan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum selaku entitas pelaporan menggunakan laporan keuangan dengan komponen sebagai berikut: 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kekurangan SDM di bidang pelaporan keuangan utamanya tenaga yang berlatar belakang akuntansi dan RSUD belum memiliki aplikasi yang handal untuk pembukuan dan pelaporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka agar mencari solusi dengan merekrut dan/atau melatih tenaga akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

2. Pelaporan keuangan belum sepenuhnya didukung dengan sistem dan prosedur pencatatan memadai

Pada Tahun 2024 RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka belum menyajikan Laporan Keuangan berdasarkan PSAP BLU secara lengkap dan proses penyusunan laporan keuangan belum didukung dengan sistem aplikasi komputerisasi yang memadai untuk menghasilkan laporan keuangan dimaksud.

Prosedur pembukuan masih menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Penyesuaian meliputi bentuk laporan maupun perubahan pengakuan dan pengukuran saldo akun laporan keuangan dari basis kas menjadi basis akrual seperti piutang, utang, pendapatan LO, dan beban.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. Pasal 6 ayat (3) Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
b. Pasal 99 Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah:
   1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
   2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a) laporan realisasi anggaran;
      b) laporan perubahan saldo anggaran lebih;
      c) neraca;
      d) laporan operasional;
      e) laporan arus kas;
      f) laporan perubahan ekuitas; dan
      g) catatan atas laporan keuangan.
   3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

c. Pasal 88 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang menyebutkan bahwa:
1) BLUD RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2) Laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
3) Laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi Pemerintah Daerah.
4) Dalam hal standar akuntansi Pemerintah Daerah tidak mengatur jenis usaha BLUD RSUD, BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD RSUD.
6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka agar melakukan pengadaan sistem akuntansi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan software akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

3. Peraturan pelaksanaan PPK BLUD belum lengkap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 29 Mei 2023, tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen BLUD, diketahui bahwa BLUD belum sepenuhnya memiliki ketentuan yang diwajibkan sebagai BLUD sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat	Pasal 4	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non Pegawai

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Keterangan
	Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah			Aparatur Sipil Negara pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 22	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
3	*Remunerasi diatur dengan* peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin	*Pasal 24 ayat* (1)	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Remunerasi pada BLUD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
4	Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 38	Ada	*Perbup Flores Timur* Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
5	Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 41	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Renstra RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
6	Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 43	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang SPM RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
7	*Ketentuan lebih lanjut* mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	*Pasal 64 ayat* (3)	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
8	Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 73	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Keterangan
9	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 77 ayat (1)	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD
10	Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 83 ayat (6)	Tidak Ada	Belum diperbaharui
11	Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 85 ayat (2)	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
12	Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 87 ayat (5)	Tidak Ada	
13	Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah	Pasal 91 ayat (6)	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
14	Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 94	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
15	Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 96	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
16	BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah	Pasal 99 ayat (5)	Ada	Perbup Flores Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

No	Uraian	Mandat Permendagri 79/2018	Ada/Tidak Ada	Keterangan
				BLUD pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Permasalahan tersebut belum sesuai dengan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa:

a) Pasal 4, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b) Pasal 22, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh Pembina dan Pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c) Pasal 24 ayat (1), Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin;
d) Pasal 38, Pola tata kelola ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
e) Pasal 41, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
f) Pasal 43, Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
g) Pasal 64 ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
h) Pasal 73, Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
i) Pasal 77 ayat (1), Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
j) Pasal 83 ayat (6), Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
k) Pasal 85 ayat (2), Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
l) Pasal 87 ayat (5), Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
m) Pasal 91 ayat (6), Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
n) Pasal 94, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
o) Pasal 96, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
p) Pasal 99 ayat (5), *BLUD* mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk melengkapi produk hukum dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan PPK-BLUD.

4. Penatausahaan persediaan pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka belum sepenuhnya memadai

Berdasarkan laporan persediaan dan cek fisik atas data persediaan tanggal 4 dan 5 Maret 2025 pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan tidak dilakukan dengan memadai

1) Dapur/Gizi

Berdasarkan pemeriksaan persediaan pada dapur/gizi pada tanggal 4 Maret 2025, diketahui terdapat kelemahan yaitu tidak terdapat kartu *stock* secara manual untuk masing-masing persediaan, hanya terdapat buku laporan harian persediaan yang hanya memuat pemakaian persediaan dan buku *stock* harian yang memuat sisa *stock* dan permintaan barang. Hal ini mengakibatkan tidak ada dokumen pendukung yang memuat histori penambahan dan pengeluaran fisik barang yang dapat digunakan sebagai kontrol saat dilakukan pengecekan fisik secara *real time* dan sebagai pendukung *trace back.*

2) Barang Umum

Berdasarkan pemeriksaan persediaan barang umum pada tanggal 5 Maret 2025, diketahui terdapat kelemahan yaitu tidak terdapat kartu *stock* secara manual untuk masing-masing persediaan, hanya terdapat laporan mutasi masuk dan keluar persediaan yang dicatat setiap bulan dan persediaan yang masuk pada bendahara barang umum langsung dikeluarkan pada hari itu juga, sehingga pada saat pemeriksaan tidak terdapat stock persediaan yang dapat diperiksa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka agar memperbaiki penatausahaan persediaan.

b. Tidak terdapat sistem akuntansi persediaan

Pencatatan persediaan tidak menggunakan sistem sehingga menyulitkan bagian persediaan dalam melakukan mutasi dan *stok opname* persediaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka agar melakukan pengadaan sistem persediaan untuk meningkatkan pengendalian dan efektivitas dalam menyusun laporan persediaan.

5. Terdapat persediaan kedaluwarsa sebesar Rp4.101.677.854 belum dilakukan pemusnahan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan, terdapat persediaan kedaluwarsa berupa persediaan Obat, Persediaan BMHP, Persediaan Bahan Lab dan Persediaan Radiologi dan Gigi yang belum dimusnahkan dan belum terdapat berita acara penghapusan dari laporan keuangan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Obat	BMHP	Bahan lab	Radiologi dan Gigi	Jumlah
1	Tahun 2005	5.699.300	-	-	-	5.699.300
2	Tahun 2006	8.784.386	-	-	-	8.784.386
3	Tahun 2007	12.705.110	-	-	-	12.705.110
4	Tahun 2008	4.041.528	-	-	-	4.041.528
5	Tahun 2009	3.647.000	-	-	-	3.647.000
6	Tahun 2010	15.211.312	-	-	-	15.211.312
7	Tahun 2011	29.703.320	-	-	-	29.703.320
8	Tahun 2012	58.703.200	-	-	-	58.703.200
9	Tahun 2013	170.044.199	-	-	-	170.044.199

No	Tahun	Obat	BMHP	Bahan lab	Radiologi dan Gigi	Jumlah
10	Tahun 2014	158.566.218	-	-	-	158.566.218
11	Tahun 2015	130.712.909	-	-	-	130.712.909
12	Tahun 2016	155.459.299	-	-	-	155.459.299
13	Tahun 2017	201.064.206	33.941.362	32.058.200	6.460.440	273.524.208
14	Tahun 2018	211.518.815	77.025.160	69.387.010	45.221.359	403.152.344
15	Tahun 2019	230.934.569	253.162.692	29.133.468	18.013.727	531.244.456
16	Tahun 2020	276.584.345	233.247.888	124.873.372	29.738.961	664.444.566
17	Tahun 2021	186.758.804	211.232.040	77.396.125	35.475.175	510.862.143
18	Tahun 2022	302.418.579	66.684.202	56.433.392	3.228.170	428.764.343
19	Tahun 2023	219.595.150	167.069.731	10.450.000	-	397.114.881
20	*Tahun 2024*	*133.116.983*	*6.176.150*	-	-	*139.293.133*
	Jumlah	**2.515.269.232**	**1.048.539.226**	**399.731.567**	**138.137.830**	**4.101.677.854**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 421 dan Pasal 432 Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ruang lingkup pengelolaan BMD yang menyebutkan bahwa:

a. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan, atau sebab lain.

Berdasarkan wawancara terhadap pengurus obat, persediaan kedaluwarsa Obat dan BMHP pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka belum pernah dilakukan pemusnahan dan belum terdapat berita acara pemusnahan dari Tahun 2005.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka melakukan pemusnahan dan penghapusan terhadap persediaan kedaluwarsa kemudian berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut maka akan dilakukan pengusulan penghapusan persediaan yang telah kedaluwarsa dari Laporan Keuangan.

6. Pencatatan/penatausahaan Aset Tetap *belum sepenuhnya dilakukannya dengan tertib*

Berdasarkan pemeriksaan fisik atas aset tetap di lingkungan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka tanggal 4 Maret 2025, ditemukan bahwa Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang di pasang di masing-masing ruangan belum di *update*.
Hal ini mengakibatkan kesulitan mengetahui/mengontrol jenis aset/inventaris yang terdapat pada masing-masing ruangan di lingkungan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka menugaskan Pengurus Barang untuk memperbaiki penatausahaan aset tetap.

7. **Barang milik daerah dengan nilai perolehan sebesar Rp14.262.225.624,00 yang sudah rusak berat (RB) dan tidak dimanfaatkan belum dihapuskan**

Berdasarkan Laporan Keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 diketahui terdapat aset tetap dalam kondisi rusak berat (RB) dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi dengan nilai buku sebesar Rp12.635.511.761,00 yang telah disajikan pada aset lainnya belum dihapuskan, dengan perhitungan sebagai berikut:

A.	**Harga Perolehan**	
	Peralatan dan Mesin	13.183.374.624
	Gedung dan Bangunan	1.078.851.000
	Jumlah Harga Perolehan	**14.262.225.624**
B.	**Akumulasi Penyusutan**	
	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2024	(1.626.713.863)
C.	**Nilai Buku (A-B)**	**12.635.511.761**

Atas aset tetap rusak berat tersebut, RSUD belum melakukan usulan penghapusan/pemusnahan, sehingga belum terdapat SK Bupati tentang Penghapusan/Pemusnahan Barang Milik Daerah untuk menghapuskan aset tetap rusak tersebut dari laporan keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

1) Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa:
   a. Pasal 421 huruf a pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan.
   b. Pasal 422:
      (1) Ayat (1) pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
      (2) Ayat (3) pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
   c. Pasal 423 pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Pasal 424 ayat (1) pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
   e. Pasal 432:
      (1) ayat (1) barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: pemusnahan.
      (2) ayat (3) huruf d penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
2) PSAP 07 Paragraf 77 menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

3) PSAP 07 Paragraf 78 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4) *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 Paragraf 31 menyatakan* bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap rusak berat yang disajikan dalam Aset Lain-lain di Neraca RSUD tidak menggambarkan nilai manfaat bagi entitas RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka sebagai Pengguna BMD.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka memerintahkan Pengurus Barang menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang sudah rusak berat dan tidak dipergunakan lagi mengacu pada ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

8. Aset Tetap Berupa Instalasi Gas dengan Nilai Perolehan Rp5.799.948.155,00 Tidak Dapat Dimanfaatkan

Berdasarkan pemeriksaan fisik atas aset tetap berupa isstalasi gas di Gedung Instalasi Gas RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, pada tanggal 4 Maret 2025, ditemukan Instalasi Gas yang masih bisa digunakan namun tidak dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Aset	:	Instalasi Gas Lainnya
Tahun Perolehan	:	2021
Cara Perolehan	:	Pembelian
Masa Manfaat	:	30 Tahun
Usia Barang	:	4 Tahun
Sisa Usia Barang	:	26 Tahun
Nilai Perolehan	:	5.799.948.155,00
Akumulasi Penyusutan	:	773.326.420,66
Nilai Buku	:	**5.026.621.734,34**

RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk memenuhi kebutuhan gas oksigen Tahun 2024 dilakukan dengan melakukan pengadaan gas oksigen dengan pihak ketiga. Jumlah pengadaan gas oksigen tahun 2024 sebanyak 4.853 tabung dengan nilai sebesar Rp1.238.515.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan Gas Oksigen Bulan Januari	50	Tabung	275.000	13.750.000
2	Pengadaan Gas Oksigen Bulan Februari	205	Tabung	255.000	52.275.000
3	Pengadaan Gas Oksigen Bulan Maret	435	Tabung	255.000	110.925.000
4	Pengadaan Gas Oksigen Bulan April	463	Tabung	255.000	118.065.000
5	Pengadaan Gas Oksigen Bulan Mei	460	Tabung	255.000	117.300.000
6	Pengadaan Gas Oksigen Bulan Juni	525	Tabung	255.000	133.875.000
7	Pengadaan Gas Oksigen Bulan Juli	425	Tabung	255.000	108.375.000
8	Pengadaan Gas Oksigen Bulan Agustus	590	Tabung	255.000	150.450.000

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
9	Pengadaan Gas Oksigen Bulan September	340	Tabung	255.000	86.700.000
10	Pengadaan Gas Oksigen Bulan Oktober	435	Tabung	255.000	110.925.000
11	Pengadaan Gas Oksigen Bulan November	442	Tabung	255.000	112.710.000
12	Pengadaan Gas Oksigen Bulan Desember	483	Tabung	255.000	123.165.000
Jumlah		**4.853**			**1.238.515.000**

Tidak dimanfaatkannya Instalasi Gas yang masih berfungsi di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka mengakibatkan inefisiensi dalam pengelolaan aset rumah sakit. Instalasi Gas yang memiliki nilai buku sebesar Rp5.026.621.734,34 dengan sisa usia barang 26 tahun menjadi aset yang tidak memberikan manfaat optimal bagi operasional rumah sakit.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka untuk memaksimalkan penggunaan instalasi gas tersebut dengan melakukan pemeliharaan secara rutin. RSUD perlu melakukan analisis perbandingan biaya antara penggunaan Instalasi Gas yang dimiliki dengan pengadaan gas oksigen dari pihak ketiga. Jika penggunaan Instalasi Gas lebih efisien dalam jangka panjang, maka RSUD memprioritaskan pemanfaatan aset tersebut.

9. Tidak terdapat dokumen pendukung akumulasi penyusutan aset lain-lain berupa aset tetap rusak berat pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka per 31 Desember 2024 diketahui terdapat aset lain-lain senilai Rp14.792.874.948,67 dengan nilai buku sebesar 13.166.161.085,67 (*unaudited*), yang tidak didukung dengan data akumulasi penyusutan yang memadai, dengan rincian sebagai berikut:

Harga Perolehan	**14.792.874.948,67**
Akumulasi Penyusutan	1.626.713.863,00
Nilai Buku	**13.166.161.085,67**

Bendahara Barang menyatakan bahwa tidak memiliki data pendukung untuk meyakini nilai akumulasi penyusutan aset lainnya yang disajikan pada Neraca.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Aset Lain-Lain sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur sebagai berikut:

a. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
b. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti Kebijakan Akuntansi ini.

c. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang undangan

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan perhitungan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan aset lain-lain secara manual dengan melihat tahun perolehan dan masa manfaat, sehingga dalam laporan keuangan *audited* telah disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut kami merekomendasikan kepada Plt. Direktur RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka memerintahkan Bendahara Barang melakukan koordinasi dengan pengurus barang pada Dinas Kesehatan dan Bidang Aset Badan Keuangan Daerah terkait data pendukung akumulasi penyusutan aset lain-lain yang disajikan pada Neraca RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

Lampiran 22

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
INA GELEKAT
KABUPATEN FLORES TIMUR

LAPORAN KEUANGAN
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 22

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)
INA GELEKAT
Jalan Waimatan – Podor, Telp (0383) 21247 – Fax: (0383) 2325867

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUMDA AIR MINUM INA GELEKAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fransiskus Mathias Carvallo
Alamat Kantor	: Jl. Waimatan - Podor Kec. Larantuka Kab. Flores Timur
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Ina Gelekat;
2. Laporan keuangan Perumda Air Minum Ina Gelekat telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Ina Gelekat telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Ina Gelekat tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern pada Perumda Air Minum Ina Gelekat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Larantuka, 19 Februari 2025

METERAI TEMPEL
E337CALX398161188

Fransiskus Mathias Carvallo
Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00014/3.0410/AU.2/04/2042-1/1/II/2025

Yth.
Dewan Pengawas dan Direksi

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) INA GELEKAT

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) INA GELEKAT**, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan, tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan

JOJO SUNARJO & REKAN

Dedy Iswani, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP.2042

00014

19 Februari 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM INA GELEKAT
KABUPATEN FLORES TIMUR
NERACA
31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan bank	2b,3	5.815.116.911	5.143.713.306
Deposito	2b,4	2.100.000.000	1.100.000.000
Piutang usaha	2c,5	3.459.031.382	3.088.207.042
Piutang lain-lain	6	1.774.995	-
Persediaan	2d,7	1.820.416.303	1.439.802.022
Pajak dibayar dimuka	13a	-	44.765.107
Jumlah aset lancar		**13.196.339.591**	**10.816.487.477**
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih	2e,8		
Nilai perolehan aset tetap		21.675.177.207	21.211.439.180
Akumulasi penyusutan		(17.919.170.446)	(17.043.798.576)
Nilai buku		3.756.006.761	4.167.640.604
Aset lain-lain	9	589.831.642	589.831.642
Jumlah aset tidak lancar		4.345.838.403	4.757.472.246
Jumlah aset		**17.542.177.994**	**15.573.959.723**
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang usaha	10	141.163.902	101.425.730
Utang non-usaha	11	-	18.950.000
Utang lain-lain	12	32.240.290	-
Utang pajak	2i,13b	349.927.381	263.742.044
Jumlah kewajiban jangka pendek		**523.331.573**	**384.117.774**
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban imbalan pasca kerja	2j,14	3.566.493.594	3.953.883.698
Jumlah kewajiban jangka panjang		3.566.493.594	**3.953.883.698**
Jumlah kewajiban		**4.089.825.167**	**4.338.001.472**
Ekuitas			
Modal	2k,15	22.362.849.146	21.862.849.146
Saldo laba (rugi)	16	(8.910.496.319)	(10.626.890.895)
Jumlah ekuitas		**13.452.352.827**	**11.235.958.251**
Jumlah kewajiban dan ekuitas		**17.542.177.994**	**15.573.959.723**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM INA GELEKAT
KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
Pendapatan			
Pendapatan penjualan air	2f,17	8.737.509.400	7.646.820.100
Pendapatan non-air	2f,18	790.989.636	1.134.674.026
Jumlah pendapatan usaha		**9.528.499.036**	**8.781.494.126**
Beban Usaha			
Beban gaji dan honor pegawai	2f,19	4.112.863.834	4.618.553.450
Beban pemeliharaan	2f,20	548.594.486	643.789.686
Beban penyusutan dan amortisasi	2f,21	875.371.873	891.074.238
Beban listrik	2f,22	1.313.335.544	570.714.431
Beban bahan bakar	2f,23	88.182.942	75.061.100
Beban air baku	2f,24	30.663.720	31.346.591
Beban alat tulis kantor dan cetakan	2f,25	21.549.500	21.973.550
Beban operasional lainnya	2f,26	568.194.625	524.848.008
Jumlah beban usaha		**7.558.756.524**	**7.377.361.054**
Laba usaha		**1.969.742.512**	**1.404.133.072**
Pendapatan (Beban) Lain-lain			
Pendapatan (beban) lain-lain	2f,27	168.124.413	166.468.961
Jumlah pendapatan lain-lain		**168.124.413**	**166.468.961**
Laba bersih sebelum pajak		**2.137.866.925**	**1.570.602.033**
Taksiran Beban Pajak Penghasilan	2i	(349.927.381)	(263.742.044)
Laba bersih setelah pajak		**1.787.939.544**	**1.306.859.989**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM INA GELEKAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Pemerintah Daerah	Modal Pemerintah Pusat	Hibah	Defisit	Jumlah
Saldo 1 Januari 2023	**10.971.106.658**	**4.611.939.800**	**5.779.802.688**	**(11.691.601.513)**	**9.671.247.633**
Penambahan modal	500.000.000	-	-	-	500.000.000
Koreksi saldo laba	-	-	-	(242.149.371)	(242.149.371)
Laba tahun 2023	-	-	-	1.306.859.989	1.306.859.989
Saldo 31 Desember 2023	**11.471.106.658**	**4.611.939.800**	**5.779.802.688**	**(10.626.890.895)**	**11.235.958.251**
Penambahan modal	500.000.000	-	-	-	500.000.000
Koreksi saldo laba	-	-	-	(71.544.968)	(71.544.968)
Laba tahun 2024	-	-	-	1.787.939.544	1.787.939.544
Saldo 31 Desember 2024	**11.971.106.658**	**4.611.939.800**	**5.779.802.688**	**(8.910.496.319)**	**13.452.352.827**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM INA GELEKAT
KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2024	2023
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasional		
Laba Bersih	1.787.939.544	1.306.859.989
Penyesuaian terhadap laba (rugi) bersih		
Penyusutan aset tetap	875.371.869	891.074.238
Koreksi penyusutan aset tetap	-	27.404.236
Penyisihan piutang	-	(1.800.000)
Koreksi laba ditahan	(71.544.968)	(242.149.371)
Laba (rugi) sebelum perubahan modal kerja	**2.591.766.446**	**1.981.389.092**
Perubahan atas aset dan kewajiban operasional:		
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	(370.824.340)	(224.560.867)
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain	(1.774.995)	-
Penurunan (kenaikan) persediaan	(380.614.281)	74.551.798
Penurunan (kenaikan) pembayaran dimuka	44.765.107	(27.765.107)
Kenaikan (penurunan) utang usaha	39.738.172	6.202.136
Kenaikan (penurunan) utang non-usaha	(18.950.000)	18.950.000
Penurunan (kenaikan) pendapatan diterima dimuka	32.240.290	-
Penurunan (kenaikan) utang pajak	86.185.337	263.742.044
Kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang	(387.390.104)	125.403.234
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**1.690.641.632**	**2.217.912.330**
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(463.738.027)	(731.518.598)
Deposito	(1.000.000.000)	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(1.463.738.027)**	**(731.518.598)**
Arus Kas diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan modal dan pencadangan	500.000.000	500.000.000
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**500.000.000**	**500.000.000**
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	**671.403.605**	**1.986.393.732**
Kas dan bank awal periode	**5.143.713.306**	**3.157.319.574**
Kas dan bank akhir periode	**5.815.116.911**	**5.143.713.306**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Flores Timur didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 5 Februari 1993. yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1994 tanggal 29 Maret 1994. Kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2002 yang merupakan pengalihan status dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Flores Timur dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Flores Timur yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur tanggal 22 April 2015. Selanjutnya Dalam Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur telah Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Serah terima administratif dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KM/13/A/XI/1998 tanggal 27 November 1998 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan administrasi dan pengelolaan dari Pemerintah Provinsi mewakili Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Flores Timur dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: EK.539/86/2000 tanggal 21 Februari 2000.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur adalah:

a) Untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat akan kebutuhan air bersih yang memadai dan berkualitas sesuai standar yang ditetepakan dan;
b) Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Wilayah Pelayanan

Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur beralamat di Jalan Waimatan-Podor Larantuka Kabupaten Flores Timur.

Wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Flores Timur meliputi:
Wilayah Pelayanan

	2024	2023
Ibu kota Kabupaten Flores Timur-Larantuka dengan pelanggan	7.120	6.878
Ibu kota Kecamatan (IKK) Waiwerang dengan pelanggan	1.269	1.257
Jumlah	**8.389**	**8.135**

d. Manajemen

Manajemen Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur pada tanggal 31 Desember 2024 adalah:

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 37 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2015 - 2018. Selanjutnya sesuai amanat Perda Nomor 4 tahun 2019 bahwa jumlah Dewan Pengawas Maksimal sama dengan jumlah Direktur maka sesuai Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 399 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur tanggal 27 November 2019 ditetapkan Saudara Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si sebagai Dewan Pengawas Perumda Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2019 - 2023.

Dalam Perjalanan Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si mengundurkan diri sehingga ditetapkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 248 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur, Saudara Paulus Igo Geroda S.Sos.Msi ditetapkan sebagai dewan pengawas dan setelah yang bersangkutan tidak lagi aktif bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

1. UMUM (LANJUTAN)

d. Manajemen (Lanjutan)

Kemudian dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 86 Tahun 2023, tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur. Dewan Pengawas dijabat oleh Andreas Kewa Aman, SH, sampai dengan tanggal 30 November 2024 dan karena memasuki masa pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara, maka dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: 371 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur tanggal 2 Desember 2024 yang menetapkan Adrianus Benga Ama Lamabelawa, SH sebagai Dewan Pengawas.

Pengelola		2024 dan 2023
Direktur:	:	Fransiskus Mathias Carvallo
Kabag Adm. & Keu.	:	Lambertus Laba, SE
Kabag Teknik	:	Martheluther Dida
Kabag SPI	:	Petrus Watu Lolong, SH

Sejak tanggal 11 Mei 2018 saudara Fransiskus Mathias Carvallo dilantik sebagai Direktur definitif berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 147 Tahun 2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Flores Timur periode tahun 2018-2022 dan kemudian dengan Keputusan Bupati Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengangkatan kembali Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur Masa Bakti 2022-2027.

Jumlah pegawai PDAM Kabupaten Flores Timur Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
Pegawai tetap	48 Orang	54 Orang
Total	**48 Orang**	**54 Orang**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Ina Gelekat sebelumnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus Kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan investasi jangka pendek sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi kas, bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha yang berasal dari penjualan air dicatat pada saat rekening air minum diterbitkan, sedangkan yang berasal dari penjualan non-air atau sambungan dicatat saat diterbitkan rekening beban sambungan.

Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*).

d. Persediaan

Persediaan dikelompokkan menjadi persediaan Bahan Operasi (Kimia serta Bahan Operasi Lainnya) dan Persediaan Bahan Instalasi.

Metode pencatatan persediaan untuk bahan operasi kimia dan bahan operasi lainnya adalah *Physical Inventory Method.* yaitu pembelian atau penerimaan barang tidak dicatat sebagai persediaan, tetapi dibukukan langsung sebagai beban sesuai harga perolehannya pada saat barang diterima. Saldo persediaan yang ada di neraca ditentukan melalui perhitungan fisik (*stock opname*) dan ditetapkan lainnya

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

d. Persediaan (Lanjutan)

Metode pencatatan persediaan bahan instalasi adalah *Perpetual Inventory Method,* yaitu pencatatan administrasi pencatatan persediaan atas setiap mutasi penerimaan dan pengeluaran, sehingga saldo nilai dan kuantitas persediaan dapat diketahui setiap saat dari administrasi yang diselenggarakan.

Nilai persediaan ditentukan dengan menggunakan *The Lower Cost or Market Method.* Penentuan harga perolehan (*Cost*) menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak atau usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi beban untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "Kerugian penurunan nilai persediaan".

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebagai harga perolehannya, sedangkan penyusutannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap yang belum selesai diakui sebagai aset dalam penyelesaian sebesar harga perolehannya.

Pengeluaran setelah perolehan awal (*subsequent expenditures*) suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan daya guna aset tetap harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tersebut.

Aset tetap, selain hak atas tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebagai berikut:

Golongan I	:	Tarif penyusutan 25% dari nilai buku Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 4 (empat) tahun.
Golongan II	:	Tarif penyusutan 25% dari nilai buku Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 8 (delapan) tahun.
Golongan III	:	Tarif penyusutan 12.5% dari nilai buku Harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan, yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 16 (enam belas) tahun.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

e. Aset Tetap (Lanjutan)

Gol. Bangunan : Tarif penyusutan 5% dari nilai Perolehan Bangunan dan harta tidak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan dan perubahan yang dilakukan.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan.

Perolehan tanah dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan izin atas hak tanah akan ditangguhkan dan disajikan sebagai perkiraan biaya tangguhan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan laba rugi.

f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat produk (air dan non-air) telah diterima atau digunakan oleh pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya transaksi dan sesuai dengan masa manfaatnya (*Accrual Basis*).

Pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan tiap-tiap bulan pada saat rekening tagihan air diterbitkan, walaupun penerimaan uangnya baru terjadi kemudian.

Pendapatan sambungan baru dan pendapatan non-air lainnya diakui, dicatat dan dilaporkan pada saat ditandatanganinya kontrak sambungan baru untuk pembayaran angsuran penjualan atau pada saat diterimanya pembayaran untuk penjualan tunai.

Pendapatan denda atas kelambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima.

Pada dasarnya beban harus diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode terjadinya transaksi. Pembebanan beban-beban yang bersifat periodik seperti gaji, listrik, sewa, asuransi dan sebagainya harus dikaitkan dengan periode dimana beban tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan atau telah dibayar dimuka.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Pendapatan dan Beban

Untuk keperluan pisah batas periode akuntansi, beban-beban yang telah terjadi sebelum tanggal neraca walaupun belum dapat diketahui secara pasti jumlahnya harus dicatat dan dilaporkan dengan estimasi yang wajar.

g. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

h. Kelangsungan Hidup Perusahaan (*Going Concern*)

Laporan keuangan ini disusun dengan anggapan PERUMDA Air Minum Ina Gelekat dahulu PDAM Kabupaten Flores Timur akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan (*Going Concern*). Tidak terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan PERUMDA Air Minum Ina Gelekat Kabupaten Flores Timur untuk melanjutkan usaha.

i. Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan Perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 24 "Pajak Penghasilan". Perusahaan tidak mengakui penangguhan pajak (*deferred tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antar laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak. Perusahaan mencatat kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar (*tax payable concept*). Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

j. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan belum melaksanakan SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

k. Modal

Modal sebagai hak pemilik harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.

Penyetoran modal dalam bentuk kas oleh Pemerintah Kabupaten dicatat dalam klasifikasi Modal Disetor.

3. KAS DAN BANK

	2024	2023
Kas		
Kas besar	3.477.500	12.354.575
Jumlah kas	**3.477.500**	**12.354.575**
Bank		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.739.061.494	719.617.437
PT BPR Bina Usaha Dana (BUD)	1.547.743.599	2.161.359.051
PT Bank Pembangunan Daerah NTT	1.378.632.083	1.690.132.984
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.146.202.235	560.249.259
Jumlah bank	**5.811.639.411**	**5.131.358.731**
Jumlah kas dan bank	**5.815.116.911**	**5.143.713.306**

4. DEPOSITO

	2024	2023
Deposito Berjangka		
PT BPR Bina Usaha Dana (BUD) Larantuka	1.500.000.000	500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	600.000.000	600.000.000
Jumlah deposito	**2.100.000.000**	**1.100.000.000**

5. PIUTANG USAHA

	2024	2023
Piutang rekening air	4.967.806.680	4.447.751.680
Piutang rekening non-air	23.110.311	172.340.971
Jumlah piutang	**4.990.916.991**	**4.620.092.651**
Akumulasi penyisihan piutang usaha	(1.531.885.609)	(1.531.885.609)
Nilai bersih piutang usaha	**3.459.031.382**	**3.088.207.042**

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan piutang usaha tersebut cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha dikemudian hari.

Rincian Piutang Rekening Air adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang Rek. Kel. Pelanggan I		
Yayasan Sosial	33.251.100	50.175.600
Tempat Ibadah	6.228.700	10.039.900
Hidran Umum	3.382.000	2.890.000
Panti Asuhan	1.180.400	1.560.300
Kamar Mandi dan WC Umum	-	3.253.000
Piutang Rek. Kel. Pelanggan II		
Rumah Tangga	4.259.249.390	3.759.513.890
Sekolah/RSU/Puskemas/Poliklinik/Polindes	260.108.360	247.563.960
Intansi Pemerintah	45.050.980	43.553.280
Ruko/Warung	37.215.050	30.147.250
TNI-Polri	4.287.000	4.589.200
Piutang Rek. Kel. Pelanggan III		
PT, CV, Firma, Koperasi, Perbengkelan	56.034.000	50.752.500
Niaga, Ruko, Industri Rumah Tangga	30.166.700	30.946.400
Hotel/Bank/Restoran/PUB (tempat Hiburan)	25.931.300	25.915.000
Warung/Rumah Makan, Salon Kecantikan	21.553.400	19.376.300
Apotik, Pratek Bidan/Dokter	-	(175.700)
Piutang Rek. Kel. Pelanggan IV		
Pabrik Es, Pengawetan/Pengalengan Makanan	127.799.000	119.863.000
Pelabuhan Laut dan Udara	38.509.000	34.321.000
Depo Pertamina	11.384.000	9.070.000
PLTD/PLN	5.559.000	4.118.500
Lainnya	917.300	278.300
Jumlah piutang rekening air	**4.967.806.680**	**4.447.751.680**

5. PIUTANG USAHA (LANJUTAN)

Rincian piutang rekening non-air adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Sambungan baru	23.110.311	172.340.971
Jumlah sambungan baru	**23.110.311**	**172.340.971**

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	2024	2023
Piutang pegawai	1.774.995	-
Jumlah piutang lain-lain	**1.774.995**	**-**

7. PERSEDIAAN

	2024	2023
Persediaan pipa	736.343.740	777.480.740
Persediaan aksesoris	482.232.642	438.648.557
Persediaan meter air	202.070.543	202.019.725
Persediaan alat tulis dan cetakan	48.118.500	19.203.000
Rupa-rupa suku cadang lainnya	244.490.878	2.450.000
Persediaan dalam perjalanan	107.160.000	-
Jumlah persediaan	**1.820.416.303**	**1.439.802.022**

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai persediaan yang disajikan di atas tidak melebihi nilai jual atau realisasi bersihnya. Oleh sebab itu, manajemen tidak membentuk penyisihan untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan terhadap nilai realisasi bersihnya. Manajemen tidak membentuk penyisihan atas penurunan nilai maupun keusangan persediaan mengingat semua persediaan dapat digunakan.

8. ASET TETAP

Rincian aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	299.073.825	-	-	299.073.825
Instalasi sumber air	615.038.696	-	-	615.038.696
Instalasi pompa air	1.814.346.471	189.440.000	-	2.003.786.471
Instalasi transdist	15.095.541.838	109.238.699	-	15.204.780.537
Bangunan gedung	862.526.345	-	-	862.526.345
Peralatan kantor	639.823.809	115.168.328	-	754.992.137
Kendaraan bermotor	829.242.500	36.466.000	-	869.708.500
Inventaris/perabot kantor	1.055.845.696	13.425.000	-	1.069.270.696
Jumlah	**21.211.439.180**	**463.738.027**	-	**21.675.177.207**
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber air	(525.052.914)	(16.453.132)	-	(541.506.046)
Instalasi pompa air	(1.045.669.933)	(73.945.769)	-	(1.119.615.702)
Instalasi transdist	(12.735.432.923)	(559.031.512)	-	(13.294.464.435)
Bangunan gedung	(594.092.451)	(25.337.198)	-	(619.429.649)
Peralatan kantor	(553.013.064)	(75.370.198)	-	(628.383.262)
Kendaraan bermotor	(711.646.253)	(42.315.251)	-	(753.961.504)
Inventaris/perabot kantor	(878.891.038)	(82.918.810)	-	(961.809.848)
Jumlah	**(17.043.798.576)**	**(875.371.870)**	**-**	**(17.919.170.446)**
Nilai Buku Bersih	**4.167.640.604**			**3.756.006.761**

8. ASET TETAP (LANJUTAN)

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Tanah	299.073.825	-	-	299.073.825
Instalasi sumber air	615.038.696	-	-	615.038.696
Instalasi pompa air	1.670.323.971	144.022.500	-	1.814.346.471
Instalasi transdist	14.802.667.490	292.874.348	-	15.095.541.838
Bangunan gedung	716.170.095	146.356.250	-	862.526.345
Peralatan kantor	639.273.809	550.000	-	639.823.809
Kendaraan bermotor	811.292.500	17.950.000	-	829.242.500
Inventaris/perabot kantor	926.080.196	129.765.500	-	1.055.845.696
Jumlah	**20.479.920.582**	**731.518.598**	-	**21.211.439.180**
Akumulasi Penyusutan				
Instalasi sumber air	(501.861.756)	(23.191.158)	-	(525.052.914)
Instalasi pompa air	(967.043.177)	(78.626.756)	-	(1.045.669.933)
Instalasi transdist	(12.117.340.137)	(618.092.786)	-	(12.735.432.923)
Bangunan gedung	(571.343.331)	(22.749.120)	-	(594.092.451)
Peralatan kantor	(487.858.728)	(65.154.336)	-	(553.013.064)
kendaraan bermotor	(683.614.715)	(28.031.538)	-	(711.646.253)
Inventaris/perabot kantor	(796.258.258)	(82.632.780)	-	(878.891.038)
Jumlah	**(16.125.320.102)**	**(918.478.474)**	-	**(17.043.798.576)**
Nilai Buku Bersih	**4.354.600.480**			**4.167.640.604**

Disamping Perumda Ina Gelekat mengelola aset sendiri. Perumda Ina Gelekat juga diberikan untuk mengelola aset pengelolaan Jaringan GIP 75 mm 2.232 Meter dari Direktorat Jenderal Cipta Karya wilayah II Nusa Tenggara Timur dan Kendaraan Mobil Tangki dari Pemerintah kabupaten Flores Timur

9. ASET LAIN-LAIN

	2024	2023
Pembayaran dimuka kepada Pemda	589.831.642	589.831.642
Jumlah aset lain-lain	**589.831.642**	**589.831.642**

10. UTANG USAHA

	2024	2023
Biaya Listrik	139.971.202	99.297.272
Biaya telepon	805.030	1.746.338
Biaya indihome	387.670	382.120
Jumlah utang usaha	**141.163.902**	**101.425.730**

11. UTANG NON-USAHA

	2024	2023
Tunjangan kinerja	-	18.950.000
Jumlah utang non-usaha	**-**	**18.950.000**

12. UTANG LAIN-LAIN

	2024	2023
Pendapatan diterima dimuka	32.240.290	-
Jumlah utang lain-lain	**32.240.290**	**-**

13. PERPAJAKAN

	2024	2023
a. Pajak dibayar dimuka		
PPh pasal 25	-	44.765.107
Jumlah pajak dibayar dimuka	**-**	**44.765.107**
b. Utang pajak		
PPh pasal 29	349.927.381	263.742.044
Jumlah hutang pajak	**349.927.381**	**263.742.044**

13. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

c. Rekonsiliasi pajak

	2024	2023
Laba (rugi) komersial	**2.137.866.926**	**1.570.602.033**
Koreksi fiskal positif (negatif):		
Biaya representasi	84.000.000	80.000.000
Biaya jamuan	42.062.000	12.953.000
Bunga deposito dan jasa giro	(137.839.842)	(80.565.094)
Jumlah koreksi fiskal positif (negatif)	**(11.777.842)**	**12.387.906**
Jumlah laba (rugi) fiskal	**2.126.089.084**	**1.582.989.939**
Laba (rugi) kena pajak setelah kompensasi	**2.126.089.084**	**1.582.989.939**
Pembulatan	**2.126.090.000**	**1.582.990.000**
Beban pajak		
Dengan fasilitas - 11%	117.812.419	111.204.960
Tanpa fasilitas - 22%	232.114.962	152.537.085
Estimasi beban pajak	**349.927.381**	**263.742.045**
Kredit pajak		
PPh pasal 25	-	44.765.107
Hutang pajak penghasilan pasal 29	**349.927.381**	**218.976.938**

14. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

	2024	2023
Kewajiban imbalan pasca kerja	3.953.883.698	3.828.480.464
Penyesuaian imbalan pasca kerja	-	633.061.575
Dibayarkan karyawan yang pensiun	(387.390.506)	(507.658.341)
Jumlah imbalan pasca kerja	**3.566.493.192**	**3.953.883.698**

15. MODAL

	2024	2023
Modal pemerintah daerah	10.971.106.658	10.471.106.658
Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	5.611.939.800	5.611.939.800
Modal hibah pemerintah Australia	5.779.802.688	5.779.802.688
Jumlah modal	**22.362.849.146**	**21.862.849.146**

16. SALDO LABA (RUGI)

	2024	2023
Saldo awal	(10.626.890.895)	(11.691.601.513)
Koreksi saldo awal	(71.544.968)	(242.149.371)
Saldo laba (rugi) tahun lalu	(10.698.435.863)	(11.933.750.884)
Laba tahun berjalan	1.787.939.544	1.306.859.989
Jumlah saldo laba (rugi)	**(8.910.496.319)**	**(10.626.890.895)**

17. PENDAPATAN AIR

	2024	2023
Pendapatan penjualan air	6.654.111.900	6.156.317.600
Pendapatan penjualan air lainnya	2.083.397.500	1.490.502.500
Jumlah pendapatan air	**8.737.509.400**	**7.646.820.100**

18. PENDAPATAN NON-AIR

	2024	2023
Pendapatan denda	539.610.000	343.796.000
Pendapatan sambungan baru	201.624.143	701.746.026
Pendapatan penyambungan kembali	29.797.000	28.193.500
Pendapatan penggantian meter	724.000	-
Pendapatan penjualan non-air lainnya	19.234.493	60.938.500
Jumlah pendapatan non-air	**790.989.636**	**1.134.674.026**

19. BEBAN GAJI DAN HONOR PEGAWAI

	2024	2023
Beban gaji dan honor pegawai administrasi	2.156.196.579	2.729.156.659
Beban gaji dan honor pegawai trandist	1.037.722.464	1.066.918.507
Beban gaji dan honor pegawai sumber	340.527.816	289.927.549
Beban gaji dan representatif direktur	286.633.109	116.932.300
Beban honor dewan pengawas	167.413.414	7.575.942
Honor pembaca meter pelanggan	117.390.450	259.363.372
Honor penagihan rekening	6.980.002	148.679.121
Jumlah beban gaji dan honor pegawai	**4.112.863.834**	**4.618.553.450**

20. BEBAN PEMELIHARAAN

	2024	2023
Beban pemeliharaan transmisi dan distribusi	468.604.036	566.935.351
Beban pemeliharaan sumber air	59.917.200	53.255.500
Beban pemeliharaan umum	20.073.250	23.598.835
Jumlah beban pemeliharaan	**548.594.486**	**643.789.686**

21. BEBAN PENYUSUTAN AMORTISASI DAN PENYISIHAN PIUTANG

	2024	2023
Penyusutan instalasi transmisi dan distribusi	559.031.512	579.109.222
Penyusutan inventaris/perabot kantor	82.918.809	91.695.181
Penyusutan peralatan dan perlengkapan	75.370.198	72.975.160
Penyusutan instalasi pompa dan pengolahan	73.945.769	71.053.944
Penyusutan kendaraan bermotor	45.315.252	33.198.752
Penyusutan bangunan gedung	25.337.199	25.337.199
Penyusutan instalasi sumber air	16.453.134	17.704.780
Jumlah beban penyusutan amortisasi dan penyisihan piutang	**875.371.873**	**891.074.238**

22. BEBAN LISTRIK

	2024	2023
Beban listrik sumber	1.285.483.544	543.051.731
Beban listrik kantor	27.852.000	27.662.700
Jumlah beban listrik	**1.313.335.544**	**570.714.431**

23. BEBAN BAHAN BAKAR

	2024	2023
Beban bahan bakar kendaraan trandist	60.013.500	50.755.100
Beban bahan bakar kendaraan umum	28.169.442	21.306.000
Beban bahan bakar genset kantor	-	2.120.000
Beban bahan bakar operasi pengolahan	-	880.000
Jumlah beban bahan bakar	**88.182.942**	**75.061.100**

24. BEBAN AIR BAKU

	2024	2023
Beban air baku	30.663.720	31.346.591
Jumlah beban air baku	**30.663.720**	**31.346.591**

25. BEBAN TULIS KANTOR DAN CETAKAN

	2024	2023
Pemakaian alat tulis kantor dan cetakan	21.549.500	21.973.550
Jumlah beban tulis kantor dan cetakan	**21.549.500**	**21.973.550**

26. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	2024	2023
Perjalanan dinas	238.451.900	230.688.910
Jasa profesional	71.570.800	78.402.556
Rupa-rupa umum	49.735.505	49.832.178
Rupa-rupa operasi sumber	47.037.000	25.610.000
Rapat dan tamu	42.062.000	12.953.500
Telepon	37.540.420	37.523.089
Rupa-rupa kantor	31.460.000	21.612.000
Iuran berlangganan	18.000.000	53.247.775
Rupa-rupa operasi trandist	13.235.000	521.000
Perlengkapan komputer	10.824.000	7.470.000
Rupa-rupa urusan langganan	5.070.000	1.814.000
Penelitian	2.933.000	5.173.000
Keuangan	275.000	-
Jumlah beban operasional lainnya	**568.194.625**	**524.848.008**

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2024	2023
Pendapatan bunga	89.312.133	47.319.777
Pendapatan jasa giro	48.527.709	33.245.317
Pendapatan lain-lain	45.903.402	-
Pendapatan penjualan barang bekas	-	-
Penerimaan piutang yang sudah disisihkan	-	1.800.000
Rupa- rupa pendapatan lainnya	-	93.175.367
Beban lain-lain	-	(100)
Beban administrasi bank	(15.618.831)	(9.071.400)
Jumlah pendapatan - bersih	**168.124.413**	**166.468.961**

28. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2024 yang telah diuraikan dimuka dan diselesaikan pada tanggal 19 Februari 2025.

Lampiran 23

PT BPR BINA USAHA DANA

LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENT

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023/
For The Year Ended On December 31, 2024
With Comparative Balance For The Year 2023

Dan/ And

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

PT BPR BINA USAHA DANA

LAPORAN KEUANGAN /
FINANCIAL STATEMENT

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023 /
For The Year Ended On December 31, 2024
With Comparative Balance For The Year 2023

Dan / *And*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

DAFTAR ISI LAPORAN KEUANGAN/
LIST OF FINANCIAL STATEMENTS

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
DAFTAR ISI
31 Desember 2024 dan 2023

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
TABLE OF CONTENT
December 31, 2024 and 2023

		Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI			*DIRECTOR'S STATEMENT LETTER*
LAPORAN KEUANGAN POKOK			*FINANCIAL OF STATEMENTS*
NERACA		*1*	*BALANCE SHEET*
LAPORAN LABA RUGI		*3*	*STATEMENT OF PROFIT OR LOSS*
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		*4*	*STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY*
LAPORAN ARUS KAS		*5*	*STATEMENT OF CASH FLOWS*
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		*7*	*NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS*
1	**UMUM**	*7*	**1** *GENERAL*
1.1	Pendirian dan Informasi Umum	7	*1.1 The Establisment of the Bank and General Information*
1.2	Susunan Pengurus Direksi dan Komisaris Bank	8	*1.2 Composition of the Board of Directors and Commissioners of the Bank*
1.3	Tempat Kedudukan Bank	10	*1.3 The Location of Bank*
2	**IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**	11	**2** *SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES*
2.1	Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	11	*2.1 Basis preparation of financial statements*
2.2	Kas dan Setara Kas	11	*2.2 Cash and Cash Equivalents*
2.3	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	11	*2.3 Interest Receivable*
2.4	Penempatan Pada Bank Lain	12	*2.4 Placements with Other Banks*
2.5	Kredit yang Diberikan	12	*2.5 Loans*
2.6	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	13	*2.6 Allowance for Uncollectible Account on Productive Assets*
2.7	Agunan Yang Diambil Alih	16	*2.7 Foreclosed Assets*
2.8	Aset Tetap	17	*2.8 Fixed Assets*
2.9	Aset Tak Berwujud	18	*2.9 Intangible Assets*
2.10	Aset Lain-lain	18	*2.10 Other Assets*
2.11	Kewajiban Segera	18	*2.11 Accrual expenses*
2.12	Utang Bunga	19	*2.12 Interest Payable*
2.13	Utang Pajak	19	*2.13 Taxes Payable*
2.14	Simpanan Dari Nasabah	19	*2.14 Deposits from Customers*
2.15	Simpanan Dari Bank Lain	20	*2.15 Deposit from Other Banks*
2.16	Pinjaman Diterima	20	*2.16 Borrowings*
2.17	Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga	21	*2.17 Recognition of Interest Income and Expenses*
2.18	Provisi dan Komisi	21	*2.18 Provision and Commissions*
2.19	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	21	*2.19 Other Operating Income and Expenses*
2.20	Komitmen dan Kontijensi	22	*2.20 Commitmens and Contigencies*
2.21	Transaksi Dengan Pihak Berelasi	22	*2.21 Transactions With Related Parties*
2.22	Program Imbalan Kerja	22	*2.22 Employee Benefit Plan*
2.23	Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	23	*2.23 Subsequent Event*
2.24	Penggunaan Estimasi Dan Pertimbangan Akuntansi Yang Penting	23	*2.24 Use Of Critical Accounting Estimates And Judgments*
2.25	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkini	23	*2.25 Latest Financial Service Authority Regulations*
2.26	Peraturan Perpajakan Terkini	24	*2.26 Latest Tax Regulation*
2.27	Standar Akuntansi Yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif	25	*2.27 Issued But Not Yet Effective Accounting Standars*
3	**PENJELASAN POS-POS NERACA**	**26**	**3** *EXPLANATION OF BALANCE SHEET*
3.1	Kas	26	*3.1 Cash*
3.2	Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	26	*3.2 Interest Receivable*
3.3	Penempatan pada Bank Lain	26	*3.3 Placements with Other Banks*
3.4	Kredit yang Diberikan	28	*3.4 Loans*
3.5	Aset Tetap	45	*3.5 Fixed Assets*

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
DAFTAR ISI
31 Desember 2024 dan 2023

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
TABLE OF CONTENT
December 31, 2024 and 2023

		Halaman/ Page		
3.6	Aset Tak Berwujud	46	3.6	*Intangible Assets*
3.7	Aset Lain-lain	46	3.7	*Other Assets*
3.8	Kewajiban Segera	47	3.8	*Accrued Expenses*
3.9	Utang Bunga	47	3.9	*Interest Payable*
3.10	Utang Pajak	48	3.10	*Taxes Payable*
3.11	Simpanan Dari Nasabah	50	3.11	*Deposits from Customers*
3.12	Simpanan dari Bank Lain	52	3.12	*Deposits from Other Banks*
3.13	Kewajiban Lain-lain	53	3.13	*Other Liabilities*
3.14	Pinjaman yang Diterima	53	3.14	*Borrowings*
3.15	Kewajiban Imbalan Kerja	53	3.15	*Employee Benefits Liabilities*
3.16	Ekuitas	54	3.16	*Equity*
4	PENJELASAN POS-POS LABA (RUGI)	55	4	*EXPLANATION OF STATEMENT OF PROFIT OR LOSS*
4.1	Pendapatan Bunga	55	4.1	*Interest Revenue*
4.2	Beban Bunga	55	4.2	*Interest Expenses*
4.3	Pendapatan Operasional Lainnya	55	4.3	*Other Operating Income*
4.4	Beban Penyisihan Kerugian	56	4.4	*Allowance for Losses Expenses*
4.5	Beban Pemasaran	56	4.5	*Marketing Expenses*
4.6	Beban Administrasi dan Umum	57	4.6	*Administrative and General Expenses*
4.7	Beban Operasional Lainnya	57	4.7	*Other Operating Expenses*
4.8	Pendapatan Non Operasional	58	4.8	*Non-Operating Revenue*
4.9	Beban Non Operasional	58	4.9	*Non-Operating Expenses*
5	TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI	59	5	*TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*
6	KOMITMEN DAN KONTIJENSI	59	6	*COMMITMENTS AND CONTIGENCIES*
7	JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT	60	7	*COVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF RURAL BANK*
8	PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA	60	8	*SUBSEQUENTS EVENT*
9	INFORMASI TAMBAHAN	61	9	*ADDITIONAL INFORMATION*
10	REKLASIFIKASI AKUN	61	10	*RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*
11	RASIO KEUANGAN	61	11	*FINANCIAL RASTIO*
12	PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN	61	12	*COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS*
	LAMPIRAN			*APPENDIX*
1	Daftar Kredit yang Diberikan Pihak Berelasi		1	*List of Related Parties Loans*
2	Daftar Aset Tetap		2	*List of Fixed Assets*
3	Daftar Aset Takberwujud		3	*List of Intangible Assets*
4	Daftar Tabungan Pihak Berelasi		4	*List of Related Parties Saving Deposits*
5	Daftar Deposito Pihak Berelasi		5	*List of Related Parties Time Deposits*
	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN			*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI/
DIRECTOR'S STATEMENT LETTER

PT. BPR BINA USAHA DANA (Perseroda)
Kantor Pusat : Jl. Batu Ata No.5 Telp 0383-22193, Fax 0383-22266, 081239961515 Larantuka–86218
Kanto Kas Boru : Jl. Pasar Inpres, Kampung Baru, Telp 082146465379, Wulanggitang - 86253
Kantor Kas Waiwerang : Jl. Kebun Raya No. 3 Telp 0383-2524050, 081339797479 Waiwerang 86261
Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur
Email : bprbinaushadana1@gmail.com , Website: www.bprbinausahadana.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024 PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:/ *We, the undersigned:*

1 Nama/ *Name* : Moses Kopong Beda,S.Sos,CRBD
Alamat Kantor/ *Office Address* : Jl Batu Ata No. 5 PTW Bao
Jabatan/ *Title* : Direktur Utama / *President Director*

2 Nama/ *Name* : Monika Vincentia Irene Fernandez,S.Sos,CRBD
Alamat Kantor/ *Office Address* : Jl Batu Ata No. 5 PTW Bao
Jabatan/ *Title* : Direktur / *Director*

Menyatakan bahwa:

1 Kami bertanggung-jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda).

2 Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas di Indonesia.

3 a Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar.

b Laporan keuangan PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

c Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4 Kami bertanggung-jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

State that:

1 We are responsible for preparation and presentation of the financial statement of PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda).

2 The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standard's Entities Without Accountability in Indonesia.

3 a All information in the financial statements of PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) have been fully disclosed in a complete and truthful manner.

b The financial statements of PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.

c All documents of transactions, financial notes and bookkeeping and supporting documents have been completely prepared and stored by PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) in accordance with applicable laws and regulations.

4 We are responsible for the internal control system of PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda).

This statement was made with truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/ *For and on behalf of the board of Directors*
Larantuka, 03 Maret 2025 / March 03, 2025

Moses Kopong Beda,S.Sos,CRBD

Monika Vincentia Irene Fernandez,S.Sos,CRBD

No. 00014/2.1446/AU.2/07/1723-2/1/III/2025
Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda)

Opini
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) ("Bank"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami perolch adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain
Laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen kami yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 12 Februari 2024.

No. 00014/2.1446/AU.2/07/1723-2/1/III/2025
Independent Auditor's Report

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda)

Opinion
We have audited the financial statements of PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) ("Bank"), which comprise balance sheet as at December 31, 2024, and statement of profit or loss, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standard's Entities Without Public Accountability in Indonesia.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accourdance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under thosestandards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter
The financial statements of The Bank as of December 31, 2023 and for the year then ended, audited by our independent auditor, who with expressed an opinion without modification of the financial statements on February 12, 2024.

Tanggung jawab manajemen atas Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggungjawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Financial Accounting Standard's Entities Without Public Accountability, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Auditor's responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik/ ***Registered Public Accountant***
Dwi Haryadi Nugraha & Rekan

00014

Dwi Haryadi Nugraha, SST, M.Si, Ak, CA, BKP, ASEAN CPA, CPA, CFI
Nomor Registrasi Akuntan Publik/ ***Accountant Public Registered NRAP: AP-1723***
Denpasar, 03 Maret 2025/ ***March 03, 2025***

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL OF STATEMENTS

DAN/ *AND*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
NERACA
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
BALANCE SHEET
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31/12/2024	Catatan/ *Notes*	31/12/2023	
ASET				***ASSETS***
- **Aset Lancar**				***Current Assets*** -
- Kas	260.863.600	*2.2, 3.1*	228.171.600	*Cash* -
- Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	389.152.635	*2.3, 3.2*	342.596.449	*Interest Receivable* -
- Penempatan pada Bank Lain	6.109.443.350	*2.4, 3.3*	5.485.710.359	*Placements with Other Banks* -
- Penyisihan Kerugian	(118.033)	*2.6, 3.3*	-	*The Allowance for Losses* -
- Kredit yang Diberikan	73.632.537.432	*2.5, 3.4*	68.775.402.043	*Loans* -
- Penyisihan Kerugian	(1.399.204.157)	*2.6, 3.4*	(1.291.588.995)	*The Allowance for Losses* -
Jumlah	**78.992.674.827**		**73.540.291.456**	***Total***
- **Aset Tidak Lancar**				***Non Current Assets*** -
- Aset Tetap	1.837.910.001	*2.8, 3.5*	1.889.041.741	*Fixed Assets* -
Akumulasi Penyusutan	(1.579.325.813)		(1.601.579.498)	*Accumulated Depreciation*
- Aset Takberwujud	100.700.000	*2.9, 3.6*	100.700.000	*Intangible Assets* -
Akumulasi Amortisasi	(100.699.999)		(100.699.999)	*Accumulated Amortization*
- Aset Lain-lain	225.957.000	*2.10, 3.7*	254.726.218	*Other Assets* -
Jumlah	**484.541.189**		**542.188.462**	***Total***
JUMLAH ASET	**79.477.216.016**		**74.082.479.918**	***ASSETS TOTAL***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements as a whole

Direksi/ *Director*

Moses Kopong Beda,S.Sos,CRBD

Monika Vincentia Irene Fernandez,S.Sos,CRBD

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
NERACA (LANJUTAN)
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
BALANCE SHEET (CONTINUED)
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31/12/2024	Catatan/ *Notes*	31/12/2023	
KEWAJIBAN & EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
- **Kewajiban Jangka Pendek**				***Short Term Liabilities*** -
- Kewajiban Segera	76.113.202	*2.11, 3.8*	99.565.568	*Accrued Expenses* -
- Utang Bunga	68.810.021	*2.12, 3.9*	51.163.617	*Interest Payable* -
- Utang Pajak	158.332.991	*2.13, 3.10*	96.731.679	*Taxes Payable* -
- Simpanan dari Pihak Ketiga	44.974.779.367	*2.14, 3.11*	44.796.114.941	*Deposits from Customers* -
- Simpanan Dari Bank Lain	9.619.423.445	*2.15, 3.12*	4.500.000.000	*Deposits from Other Banks* -
- Kewajiban Imbalan Kerja	52.812.085	*3.15*	37.186.646	*Employee Benefits Liabilities* -
- Kewajiban Lain-lain	13.790.623	*3.13*	21.985.247	*Other Liabilities* -
Jumlah	**54.964.061.733**		**49.602.747.699**	***Total***
- **Kewajiban Jangka Panjang**				***Long Term Liabilities*** -
- Pinjaman yang Diterima	-	*2.16, 3.14*	916.634.000	*Borrowings* -
- Kewajiban Imbalan Kerja	635.119.684	*3.15*	728.149.486	*Employee Benefits Liabilities* -
Jumlah	**635.119.684**		**1.644.783.486**	***Total***
- **Ekuitas**		*3.16*		***Equity*** -
- Modal Disetor	18.751.000.000		18.251.000.000	*Paid in Capital* -
- Cadangan Umum	3.661.739.483		3.560.920.358	*General Reserve* -
- Cadangan Khusus	485.326.373		350.900.873	*Special Reserve* -
- Saldo Laba	979.968.743		672.127.502	*Retained Earnings* -
Jumlah	**23.878.034.599**		**22.834.948.733**	***Total***
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	**79.477.216.016**		**74.082.479.917**	***LIABILITIES & EQUITY TOTAL***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements as a whole

Direksi/ Director

Moses Kopong Beda,S.Sos,CRBD

Monika Vincentia Irene Fernandez,S.Sos,CRBD

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
For The Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
- Pendapatan Bunga	8.468.191.524	*2.17, 2.18, 4.1*	8.174.191.935	*Interest Income* -
- Beban Bunga	(2.733.348.683)	*2.17, 4.2*	(2.510.856.597)	*Interest Expenses* -
Pendapatan Bunga Bersih	**5.734.842.841**		**5.663.335.339**	***Net interest income***
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHERS OPERATING INCOME***
- Lainnya	613.154.790	*4.3*	704.234.037	*Others* -
Jumlah	**613.154.790**		**704.234.037**	***Total***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				***OTHER OPERATING EXPENSES***
- Penyisihan Kerugian	552.792.817	*4.4*	769.015.097	*Allowance for Losses* -
- Pemasaran	26.445.500	*4.5*	22.968.000	*Marketing* -
- Administrasi dan Umum	4.195.550.793	*4.6*	4.366.503.673	*Administrative and General* -
- Lainnya	139.183.436	*4.7*	211.104.391	*Others* -
Jumlah	**4.913.972.546**		**5.369.591.161**	***Total***
Laba Operasional	**1.434.025.085**		**997.978.215**	***Profit from Operations***
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)***
- Pendapatan Non-Operasional	11.465.864	*4.8*	14.191.402	*Non-Operating Income* -
- Beban Non-Operasional	(81.634.877)	*4.9*	(24.970.609)	*Non-Operating Expenses* -
Jumlah	**(70.169.213)**		**(10.779.207)**	***Total***
Laba Sebelum Beban Pajak	**1.363.855.872**		**987.199.008**	***Profit Before Tax Expense***
Beban Pajak	**(328.845.666)**	*2.13, 3.10*	**(244.453.116)**	***Tax Expense***
Laba Tahun Berjalan	**1.035.010.206**		**742.745.892**	***Profit for The Year***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements as a whole

Direksi/*Director*

Moses Kopong Beda,S.Sos,CRBD — Monika Vineentia Irene Fernandez,S.Sos,CRBD

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor / *Issued and paid capital*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Jumlah Ekuitas/ *Equity Total*	
		Ditentukan penggunaannya (Cadangan Umum)/ *Appropriated (General Reserve)*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
- Saldo 31 Desember 2022	17.751.000.000	3.586.976.033	721.878.217	22.059.854.250	*Balance as of December 31, 2022* -
- Setoran Modal dari Pemda	500.000.000	-	-	500.000.000	*Paid Capital from Government* -
- Tambahan Cadangan Umum	-	324.845.198	-	324.845.198	*Additional General Reserve* -
- Dividen	-	-	(721.878.217)	(721.878.217)	*Dividend* -
- Kekurangan Pembayaran Pajak 2019 (PPh 21, 23, 25)	-	-	(70.618.390)	(70.618.390)	*Underpayment of Taxes 2019 (PPh 21, 23, 25)* -
- Laba tahun berjalan	-	-	742.745.892	742.745.892	*Profit for the year* -
- **Saldo 31 Desember 2023**	**18.251.000.000**	**3.911.821.231**	**672.127.502**	**22.834.948.733**	***Balance as of December 31, 2023*** -
- Setoran Modal dari Pemda	500.000.000	-	-	500.000.000	*Paid-up Capital from Government* -
- Tambahan Cadangan Umum	-	235.244.625	-	235.244.625	*Additional General Reserve* -
- Dividen	-	-	(672.127.502)	(672.127.502)	*Dividend* -
- Kekurangan Pembayaran Pajak 2020 & 2021 (PPh 21, 23, 25)	-	-	(55.041.463)	(55.041.463)	*Underpayment of Taxes 2020 & 2021 (PPh 21, 23, 25)* -
- Laba tahun berjalan	-	-	1.035.010.206	1.035.010.206	*Profit for the year* -
- **Saldo 31 Desember 2024**	**18.751.000.000**	**4.147.065.856**	**979.968.743**	**23.878.034.599**	***Balance as of December 31, 2024*** -

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements as a whole

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Laba bersih	1.035.010.206	742.745.892	*Profit for the year*
Penyesuaian:			*Adjustment*
- Penyusutan aset tetap	108.378.414	174.241.803	*Depreciation of Fixed assets* -
- Koreksi akumulasi penyusutan	(130.632.099)	(265.782.945)	*Correction of accumulated depreciation* -
- Amortisasi aset takberwujud	-	-	*Amortization of Intangible assets* -
- Koreksi akumulasi amortisasi	-	(107.282.297)	*Correction of accumulated amortization* -
- Penyisihan penghapusan aset produktif			*Allowance for Uncollectible Account on Productive Assets* -
- Penempatan pada Bank lain	118.033	-	*Placements with other Banks* -
- Kredit yang Diberikan	107.615.162	(11.066.557)	*Loans* -
Arus kas operasi sebelum perubahan aset dan kewajiban operasi	1.120.489.715	532.855.896	*Cash flows from operating activities before changes in operating assets and liabilities*
- (Kenaikan)/ Penurunan Pendapatan bunga yang akan diterima	(46.556.166)	(18.438.830)	*(Increase)/ Decrease interest receivable* -
- (Kenaikan)/ Penurunan Kredit yang diberikan	(4.857.135.399)	(725.931.277)	*(Increase)/ Decrease loans* -
- (Kenaikan)/ Penurunan Aset lain-lain	28.769.218	(163.209.040)	*(Increase)/ Decrease Other assets* -
- Kenaikan/ (Penurunan) Kewajiban	(23.452.366)	(1.555.535)	*Increase/ (Decrease) Accrued expenses* -
- Kenaikan/ (Penurunan) Utang bunga	17.646.404	(20.700.956)	*Increase/ (Decrease) Interest payable* -
- Kenaikan/ (Penurunan) Utang pajak	61.601.313	(17.652.914)	*Increase/ (Decrease) Tax payable* -
- Kenaikan/ (Penurunan) Simpanan nasabah			*Increase/ (Decrease) Deposits from customer* -
- Tabungan	(2.796.791.229)	2.451.454.773	*Saving deposit* -
- Deposito berjangka	2.975.455.654	(715.498.297)	*Time deposit* -
- Kenaikan/ (Penurunan) Simpanan dari Bank lain	5.119.423.445	500.000.000	*Increase/ (Decrease) Deposits from other Banks* -
- Kenaikan/ (Penurunan) Kewajiban lain-lain	(8.194.624)	15.593.910	*Increase/ (Decrease) Other liabilities* -
- Kenaikan/ (Penurunan) Pinjaman Yang diterima	(916.634.000)	(1.999.976.000)	*Increase/ (Decrease) Borrowings* -
- Kenaikan/ (Penurunan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (Jangka Pendek)	15.625.439	(10.005.643)	*Increase/ (Decrease) Employee Benefits Liabilities (Short Term)* -
- Kenaikan/ (Penurunan) Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (Jangka Panjang)	(93.029.802)	109.442.245	*Increase/ (Decrease) Employee Benefits Liabilities (Long Term)* -
Jumlah	**597.217.590**	**(63.621.068)**	***Total***

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONTINUED)
For The Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			*CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*
- (Kenaikan)/ Penurunan Aset tetap	51.131.740	245.016.710	*(Increase)/ Decrease Fixed assets* -
- (Kenaikan)/ Penurunan Aset takberwujud	-	107.282.300	*(Increase)/ Decrease Intangible assets* -
Jumlah	51.131.740	352.299.010	*Total*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			*CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*
- Tambahan Modal Disetor	500.000.000	500.000.000	*Additional Paid in Capital* -
- Dividen	(672.127.502)	(721.878.217)	*Dividend* -
- Kekurangan Pembayaran Pajak 2019 (PPh 21, 23, 25)	(55.041.463)	(70.618.390)	*Underpayment of Taxes 2019 (PPh 21, 23, 25)* -
- Tambahan Cadangan Umum	235.244.625	324.845.198	*Additional General Reserve* -
Jumlah	8.075.660	32.348.591	*Total*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH	656.424.990	321.025.033	*NET INCREASE (DECREASE)*
KAS DAN SETARA KAS DI:			*CASH AND CASH EQUIVALENTS AT:*
AWAL TAHUN	4.213.881.959	3.892.856.026	*BEGINNING OF YEAR*
AKHIR TAHUN	4.870.306.950	4.213.881.959	*END OF YEAR*
Kas dan setara kas terdiri dari:			*Cash and cash equivalents consist of :*
- Kas	260.863.600	228.171.600	*Cash* -
- Penempatan Pada Bank Lain			*Placements with Other Banks* -
- Giro Pada Bank Lain	88.217.867	92.079.863	*Demand Deposits with Other Banks* -
- Tabungan Pada Bank Lain	4.521.225.483	3.893.630.496	*Saving Deposits* -
Jumlah	4.870.306.950	4.213.881.959	*Total*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements from an integral part of these financial statements as a whole

1 UMUM

1.1 Pendirian dan informasi umum

PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) ("Bank") yang sebelumnya bernama PT BPR Bina Usaha Dana didirikan berdasarkan Akta No. 116 tanggal 4 Maret 1994 dari Djedjem Widjaya, Notaris, di Jakarta. Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank dengan Akta No. 02 tanggal 7 September 2023, yang dibuat dihadapan Rosalina Ansi Da Costa, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Flores Timur. Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH-01.09-0160737 tanggal 7 September 2023.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 1 Tahun 2015, Pasal 3, PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) merupakan badan usaha milik daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 1 Tahun 2015, Pasal 6, Bank didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. Pasal 7, Bank didirikan dengan tujuan:

a) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat; dan
b) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 1 Tahun 2015, Pasal 9, kegiatan usaha PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) adalah:

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
b) Memberikan dan menyalurkan kredit;
c) Memberikan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
d) Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan antar bank lainnya;

1 GENERAL

1.1 The establisment of the Bank and general information

PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) (the "Bank"), was previously named PT BPR Bina Usaha Dana established by Deed No. 116 dated March 4, 1994 from Djedjem Widjaya, Notary in Jakarta. The Articles of Associations have been amended several times. The latest amendment of the Bank's Articles of Association is by the Deed No. 02 dated September 7, 2023, of Rosalina Ansi Da Costa, SH, M.Kn, Notary in East Flores Regency. The Deed of The Meeting Decision Statement has been received and recorded in Legal Entity Administration System, Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia, in its letter No. AHU-AH-01.09-0160737 dated September 7, 2023.

Based on Flores Timur's Local Regulation No. 1 year 2015, article 3, PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) is regional owned enterprises.

Based on Flores Timur Regency Regulation No. 1 year 2015, article 6, the intent establised Bank helping and supporting economic growth and regional development. Article 7, the purpose established are to:

a) Elevate standard of living and society elfare; and
b) Elevate Own-Source Revenue

Based on Flores Timur Regency Regulation No. 1 year 2015, article 9, the business activity of PT BPR Bina Usaha Dana (Perseroda) are to:

a) Raising fund from society in form of saving deposit, time deposit, and or other equal form;
b) Providing and distribute loans;
c) Provide guidance for micro, small & medium enterprises;
d) Placing funds in the form of Bank Indonesia Sertificates (SBI), time deposit, deposit sertificate, saving deposits with other Bank;

1 UMUM (LANJUTAN)

1.1 Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

e) Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan/atau Milik Swasta dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;

Ijin-ijin yang dimiliki oleh Bank adalah sebagai berikut:

1) Ijin melanjutkan usaha Bank Perkreditan Rakyat dengan Surat Keterangan No. Kep 3/1022/DPBPR/IDBPR dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktur Lembaga Keuangan, tanggal 19 Juni 2001.
2) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) No. PM&PTSP.503/02/PP/SITU tanggal 30 Januari 2020.
3) Tanda Daftar Perseroan -Perseroan Terbatas (TDP-PT) No. 240316400004 tanggal 30 Januari 2020 dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2024.
4) NPWP No. 01.569.807.9-921.000 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.

1.2 Susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris Bank

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR.1224.035/PT.BPR-BUD/2024 pada tanggal 31 Desember 2024, susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		
- Komisaris Utama	Drs. Petrus Pedo Maran, M.Si	
- Komisaris	Dominikus Demon,S.H	
Direksi		
- Direktur Utama	Moses Kopong Beda,S.Sos,CRBD	
- Pjs. Direktur Kepatuhan	Monika Vincentia Irene Fernandez,S.Sos,CRBD	

1 GENERAL (CONTINUED)

1.1 The establisment of the Bank and general information (continued)

e) Collaborate between banks of Rural Banks Owned by Regional Government and/or Private Ownership with financial institutions/ other institutions;

The legals had been owned by The Bank are as follows:

1) Permission to continue the Rural Bank business based on Information Decree No. Kep 3/1022/DPBPR/IDBPR from Minister of Finance of the Repubic of Indonesia, Director of Financial Institution, dated June 19, 2001.
2) Domicile License No. PM&PTSP.503/02/PP/SITU dated January 30, 2020.
3) Company Registration Certiificate No. 240316400004 dated January 30, 2020 from Regional Government of Kabupaten Flores Timur, State Ministry For Investment Overative time to January 18, 2024.
4) Taxpayer Registration No. 01.569.807.9-921.000 from Republic of Indonesia Department Directorates General Tax.

1.2 Composition of the Board of Commissioners and Directors of the Bank

Based ondecree of Director No. DIR.1224.035/PT.BPR-BUD/2024 dated December 31, 2024, composition of Board of Commissioners and Directors are as follows:

Board of Commissioners		
President Commissioner		-
Commissioner		-
Directors		
President Director		-
Acting Director's Compliance		-

1 UMUM (LANJUTAN)

1.2 Susunan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris Bank (lanjutan)

1 GENERAL (CONTINUED)

1.2 Composition of the Board of Commissioners and Directors of the Bank (continued)

Informasi Tambahan		Additional Information
Pimpinan Kantor Kas Boru ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR.1224.035/PT.BPR-BUD/2024		Boru's Cash Service Office Leader is determined based on decree of Director No. DIR.1224.035/PT.BPR-BUD/2024
- Pimpinan Kantor Kas Boru	Cornelius Varmollen Liwu, S.M	Boru's Cash Service Office Leader -
Pimpinan Kantor Kas Waiwerang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR.0222.008/PT BPR-BUD/2022		Waiwerang's Cash Service Office Leader is determined based on decree of Director No. DIR.0222.008/PT BPR-BUD/2022
- Pimpinan Kantor Kas Waiwerang	August Elias Weru,SE	Waiwerang's Cash Service Office Leader -
PE Audit Internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR.0220.004/PT BPR BUD/2020		EO of Intern Audit is determined based on decree of Director No. DIR.0220.004/PT BPR BUD/2020
- PE Audit Internal	Maria Ri Lewar,S.Pt	Intern Auditor EO -
PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR.0220.004/PT BPR BUD/2020		EO of Compliance and Risk Manage No. DIR.0220 004/PT BPR BUD/2020ment is determined based on decree of Director
- PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Jupiter M.A Maromon, A.Md	Compliance and Risk Management EO -
PE Marketing, Literasi & Inklusi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR.1224.035/PT.BPR-BUD/2024		EO of Marketing, Literacy and Inclusion is determined based on decree of Director No. DIR.1224.035/PT.BPR-BUD/2024
- PE Marketing, Literasi & Inklusi	Yoseh Watun De Rosari	Marketing, Literacy and Inclusion EO -
PE Kredit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR.1224.035/PT.BPR-BUD/2024		EO of Credit is determined based on decree of Director No. DIR.1224.035/PT.BPR-BUD/2024
- PE Kredit	Maria G.A F Aikoli, SE	Loan EO -
PE Operasional ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR.0220.004/PT BPR-BUD/2020		EO of Operational is determined based on decree of Director No. DIR.0220.004/PT BPR-BUD/2020
- PE Operasional	Agnes Lama Tokan,S.E	Operational EO -

Pada tanggal 31 Desember 2024, kantor pusat bank memiliki karyawan tetap sebanyak 32 orang.

As at December 31, 2024, the head office Bank has 32 permanent employees.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kantor pusat bank memiliki karyawan tetap sebanyak 30 orang, dan karyawan tidak tetap sebanyak 9 orang.

As at December 31, 2023, the head office Bank has 30 permanent employees, and 9 nonpermanent employees.

1 UMUM (LANJUTAN)

1.3 Tempat kedudukan Bank

- Kantor Pusat/ *Head Office*	:	Jl. Batu Ata No.5 PWT Bao- Larantuka
- Kantor Pelayanan Kas/ *Cash Service Office*		
- Boru	:	Jl. Pasar Inpres, Boru, Wulanggitang, Flores Timur
- Waiwerang	:	Jl. Kebun Raya No. 3 Waiwerang, Adonara Timur

Bank tidak memiliki Kantor Cabang.

1 GENERAL (CONTINUED)

1.3 The location of Bank

The bank does not have any branch office yet.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2.1 Dasar penyusunan laporan keuangan

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan Pedoman Akuntansi BPR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun 2010, serta prinsip akuntansi yang berlaku lainnya.

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dan berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2.2 Kas dan setara kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik Rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain dan fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

2.3 Pendapatan bunga yang akan diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima dinyatakan sebesar bunga dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

2 SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

2.1 Basis preparation of financial statements

The reporting curency used in the preparation of the financial statements in Indonesian Rupiah (IDR).

The financial statements were prepared and presented in accordance with the Accounting Financial Standard's Entities Without Public Accountability, and Accounting Guidlines issued by Bank Indonesia in year 2010, and accounting principle which became other.

The financial statements were prepared under the accrual basis of accounting and based on historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other basis as described in the related accounting policies.

The statement of cash flows were prepared using indirect method by classifiying the cash flows into operating, investing, and financing activities.

2.2 Cash and cash equivalents

Cash is the currency of paper and metal, both Rupiah and foreign currency, which is still valid as a valid payment instrument.

Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia Deposits Facility maturiting within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

2.3 Interest receivable

The interest income to be received is stated at interest from the credit with the current quality (performing) which has been recognized as income but not yet received the payment. Included in this sense is the recognition of interest income from placements with other banks.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.4 Penempatan pada bank lain

- Giro dan Tabungan
  Dana pada bank lain yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan bertujuan untuk menunjang aktivitas operasional.
- Deposito Berjangka
  Penanaman dana bank pada bank lain, dalam bentuk deposito berjangka, dan lain-lain yang sejenis, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

2.5 Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan disajikan sebesar pokok kredit/baki debet. Provisi dan biaya transaksi ditanggung oleh nasabah yang bersangkutan.

Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai penghasilan bunga yang ditangguhkan.

Kredit diklasifikasikan sebagai *non-performing* pada saat pokok pinjaman telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok kredit atau bunga kredit tersebut mulai kurang lancar. Penghasilan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai *non-performing* tidak diperhitungkan dan akan diakui sebagai penghasilan pada saat diterima.

Kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikasi ataupun penerusan kredit diakui sebagai porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.4 Placements with other banks

- *Demand Deposits and Saving Deposits*
  Funds in other banks that are very liquid, short-term and can quickly be used as cash in a certain amount without facing the risk of significant value changes aims to support operational activities.
- *Time Deposits*
  Placement of bank funds with other banks, in the form of time deposits, and others of a kind, which is intended to earn income.

2.5 Loans

Loans is based on agreements with borrowers, where in aborrower is required to repay the debt after a certain period of time with interest.

Loans are presented at the loan principal amount / credit. Transaction fees and fees are borne by the respective customer.

For restructured loans, the loan principal, including interest and other costs is transferred to the loan principal. Interest transferred is recognized as deferred interest income.

Loans are classified as non-performing when loan principal are past due and/or when management believes that the collection of principal or interest on these loans becomes doubtful. Interest income on loans that have been classified as non-performing is not taken into account and reccognized as income when received.

Loans with a syndication agreement or loan agreement are recognized with risks will be borne by the Bank.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.5 Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Agunan digunakan untuk memitigasi risiko kredit dan kebijakan mitigasi risiko menentukan jenis agunan yang dapat diterima oleh Bank. Umumnya jenis agunan yang diterima Bank untuk memitigasi risiko kredit diantaranya adalah deposito berjangka, tanah dan bangunan, dan kendaraan bermotor.

Umumnya agunan yang diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit *(secondary source of credit repayment)* dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Kredit dihapuskan jika tidak ada peluang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank.

Kriteria penghapusbukuan kredit kepada debitur adalah sebagai berikut:

a Kriteria yang memiliki kualitas macet;
b Fasilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset sebesar 100% dari pokok kredit;
c Hapus buku dilakukan terhadap seluruh kewajiban kreditnya, sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya *(partial write-off);*
d Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil;
e Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar.

2.6 Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP)

Aset produktif terdiri dari penempatan pada bank lain selain giro, surat berharga, kredit yang diberikan dan penyertaan termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif.

Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing aset produktif sesuai dengan POJK Nomor 1 Tahun 2024.

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.5 *Loans (continued)*

Collateral is held to mitigate credit risk mitigation policies determine the eligibility of collateral types. Generally, the Bank uses time deposits, land and buildings, and vehicles.

Generally, collateral is required in each credits extended as secondary sources of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

Loans are written-off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Bank.

The criteria for loan write-off to debtors are as follows:

a "Loss" loan category;
b Loan facility has been provided with 100% provision from the loan principal;
c The write-off are performed for all loan obligations, the loan obligations shall not be written-off partially;
d Collection and recovery efforts have been performed, but the results are unsuccessful;
e The debtor's business has no prospect or performance is bad or they do not have the ability to repay the loan.

2.6 *Allowance for uncollectible account on productive assets*

Productive assets consist of assets placed in banks other than demand deposits, securities, loans and investments, including commitments and contingencies in transactions.

The Bank provides allowance for uncollectible productive assets based on a review of the collectibility of each earning asset in accordance with POJK No. 1 of 2024.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.6 Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) (lanjutan)

Penempatan Pada Bank Lain
Bagian Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP umum dan khusus.

Persentase penyisihan kerugian ditetapkan sebesar:

	%
PPAP Umum	
- Lancar	0,50%
PPAP Khusus	
- Kurang Lancar	10,00%
- Macet	100,00%

Kredit Yang Diberikan
PPAP umum dan PPAP khusus untuk kredit yang diberikan, dengan penjelasan sebagai berikut:

	%
PPAP Umum	0,50%
- Lancar	
PPAP Khusus	
- Dalam Perhatian Khusus	3,00%
- Kurang Lancar	10,00%
- Diragukan	50,00%
- Macet	100,00%

Persentase tersebut dikalikan dengan baki debet setelah dikurangi nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan adalah sebesar:
- 100% dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan, dan logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai;
- 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan atau fiducia;

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.6 *Allowance for uncollectible account on productive assets (continued)*

Placement at Other Banks
The portion of Placement at Other Banks that meets the guarantee requirements by LPS can be made as a deduction factor in the formation of general and special PPAP.

The allowance for possible losses is set at:

	General PPAP
Current	-
	Special PPAP
Substandards	-
Loss	-

Loans
General PPAP and special PPAP for loans, with the following explanation:

	General PPAP
Current	-
	Special PPAP
Special Mention	-
Substandards	-
Doubtfull	-
Loss	-

The percentage multiplied by outstanding loan after deducting the collateral value.

Collateral value that can be calculated are as follows:
- *100% of collateral held in the form of SBIs, savings deposits and / or deposits that are blocked on the respective BPR, precious metal accompanied by a letter of Attorney;*
- *85% of the market value of collateral in the form of gold jewelry;*
- *80% of the value of the mortgage rights for collateral in the form of land, buildings and / or houses that have certificates tied to mortgage rights or fiduciary;*

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.6 Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) (lanjutan)

- 70% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- 60% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan atau fidusia;
- 50% dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar bedasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang;
- 50% dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 bulan sampai dengan 18 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;

2 SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.6 Allowance for uncollectible account on productive assets (continued)

- *70% of the collateral value in the form of warehouse receipts whose valuations are carried out up to 12 months and in accordance with the provisions of the legislation concerning warehouse receipts;*
- *50% of the Selling Value of the Tax Object (NJOP) for collateral in the form of land, buildings and/or houses having certificates not tied to mortgages or fiduciary;*
- *50% of NJOP based on the Notice of Tax Tuition (SPPT) or the latest NJOP statement from the authorized agency, or from the market value based on the appraisal by an independent appraiser or authorized agency, for collateral in the form of land and / or buildings with ownership in the form of a customary land recognition certificate;*
- *50% of the market price, rental price or transfer price, for collateral in the form of business/ stall/ stall/ stall/ usage right/ cultivation rights issued by the legal manager and accompanied by a power of attorney selling or transfer of rights made / or made by other authorized officers;*
- *50% of the mortgage value or fiduciary in the form of motorized vehicles, vehicles, ships, motorized boats, heavy equipment and/or machinery that are integrated with the land, accompanied by proof of ownership and binding of the mortgage or fiduciary in accordance with statutory provisions;*
- *50% of the market value for collateral in the form of warehouse receipts whose assessment is made more than 12 months to 18 months and in accordance with the provisions of the legislation concerning warehouse receipts;*

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.6 Penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) (lanjutan)

- 50% untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perekonomian rakyat;

- 30% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melampaui 24 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang.

2.7 Agunan yang diambil alih

Agunan (jaminan) yang diambil alih merupakan agunan kredit yang diberikan yang telah diambil alih oleh Bank dan telah diikat secara notariil.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit diakui sebagai aset sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan kredit setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan jika dijual. Apabila terdapat penurunan nilai permanen dari agunan kredit yang diambil alih, maka nilai agunan kredit tersebut wajib

Dalam hal taksiran nilai agunan lebih rendah dari nilai kredit, maka selisih lebih dari saldo pinjaman yang tidak dapat ditagih lagi dibebankan sebagai kerugian tahun berjalan.

Apabila agunan yang diambil alih mengalami pemulihan penurunan nilai, maka bank mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengambil-alihan agunan tersebut dibebankan ke rekening nasabah.

Laba atau rugi akibat realisasi penjualan agunan yang diambil alih dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

2 SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.6 Allowance for uncollectible account on productive assets (continued)

- *50% for the portion of the funds secured by the state-owned enterprises/ enterprises which do business as credit guarantor by meeting the criteria as referred to in the Otoritas Jasa Keuangan's Regulation regarding the obligation to provide minimum capital and fulfill the minimum core capital of rural banks;*

- *30% of the value of collateral in the form of warehouse receipts whose assessment is more than 18 months but not exceeding 24 months and in line with the Law and the applicable provisions and procedures.*

2.7 Foreclosed assets

Collateral foreclosed is a credit collateral granted that has been taken over by the Bank and has been secured notarized.

Foreclosed collateral in connection with a credit settlement is recognized as an asset of realizable value, the fair value of collateral for the loan after deducting the estimated disposal costs when it is sold. If there is a permanent decline in the value of the foreclosed loan collateral, the collateral value of such credit shall be adjusted.

In case the estimated collateral value is lower than the credit score, then the excess of the outstanding balance of the uncollectible loan is charged as current loss.

If the foreclosed collateral experiences a recovery of the impairment, the Bank recognizes that the impairment loss is at a maximum of the recognized impairment loss.

The costs incurred in connection with the acquisition of such collateral are charged to the customer's account.

Gains or losses from the sale of foreclosed properties are reported in the statement of income for the year.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.8 Aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Seluruh aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

2 SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.8 Fixed assets

Fixed assets are presented at cost less accumulated depreciation and impairment.

The acquisition cost includes the purchase price and all expenses directly attributable to bringing the asset to the location and conditions necessary to allow these assets to operate as determined by management.

Fixed assets are depreciated using the method as follows:

	Metode/ *Method*	Masa Manfaat Tahun/ *The Estimated Useful Life Year*	% per tahun/ *% per year*	
Bangunan	Garis Lurus/ *Straight Line*	20	5%	*Building*
Kendaraan	Garis Lurus/ *Straight Line*	4 8	25% 12,5%	*Vehicle*
Inventaris	Garis Lurus/ *Straight Line*	4 8	25% 12,5%	*Equipment*

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Expenditures to repair and maintenance are charged to income as incurred. Expenditures that extend the useful life or economic benefits in the future in the from of increased capacity, quality of output or standard of performance, are capitalized. Property and equipment which unused or otherwise disposed are removed from the related fixed assets, and the gains or losses are credited or charged to current operations.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the statement profit or loss in the year the asset is derecognized.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.9 Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak yang dibeli Bank.

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan di masa mendatang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat dari perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai.

2.10 Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari aset yang tidak dapat digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya dan masa manfaat (jangka waktu) telah diperjanjikan sejak awal. Biaya dibayar dimuka diamortisasi secara sistematis berdasarkan jangka waktu perjanjian.

2.11 Kewajiban segera

Kewajiban yang telah jatuh tempo dan/atau segera dapat ditagih dan harus segera dibayar. Transaksi kewajiban segera diakui pada saat:

1) Kewajiban telah jatuh tempo; atau
2) Kewajiban menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak.

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.9 *Intangible assets*

Intangible assets consist of software acquired by the Bank.

Software acquired by Bank is stated at cost less accumulated amortization.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increase the future economic benefits embodied in the specific asset which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

An intengible asset is derecognized on disposal or when there is no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Amortization is recognized in statements of profit or loss on a straight-line method over the estimated useful life of the software, from the date it is available for use.

2.10 *Other assets*

Other assets consist of assets that cannot be classified under the above accounts and not material to establish its own post.

Prepaid expenses are costs incurred but not recognized as expenses in the period in which they are incurred and their useful life (term) has been agreed from the start. Prepaid expenses are amortized systematically based on the term of the agreement.

2.11 *Accrued expenses*

Accrued expenses that have matured and / or immediately can be billed and must be paid immediately. Liability transactions are immediately recognized when:

1) Liabilities have matured; or
2) The obligation to be immediately can be billed by the owner either by an order from the trustee or not.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.12 Utang bunga

Kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

2.13 Utang pajak

Utang pajak adalah kewajiban pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR. Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka.

Utang pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara.

Beban pajak ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2.14 Simpanan dari nasabah

Simpanan adalah dana dalam bentuk tabungan dan deposito yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Tabungan
- Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung.
- Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
- Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
- Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.

Deposito Berjangka
- Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal atau sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.
- Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
- Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.12 Interest payable

Interest payable that have matured and / or which can be immediately collected by the owner and must be paid immediately.

Interest payable is recognized at the amount of the contractual interest, either for accrual of interest or that has matured.

2.13 Taxes payable

Taxes payable is the corporate income tax liability owed on the income of e BPR. Taxes payable represents the lesser of the income tax liability after taking into account the prepaid tax or prepayment tax.

Taxes payable is recognized at the amount to be deposited into the treasury.

The taxes expense is determined based on the taxable income in the corresponding period, which is calculated on the prevailing tax rates.

2.14 Deposit from customers

Deposits are funds in the form of savings and deposits entrusted by the public to the bank under the depositary agreement.

Saving Deposits
- *Savings transactions are recognized at the nominal value of deposits or withdrawals made by savers.*
- *The deposit is recognized when the money is received.*
- *Interest on savings is recognized as a nominal increase in savings.*
- *The balance of savings is presented at the amount of BPR's liabilities to the savings owner.*

Time Deposits
- *The deposit transaction is recognized at nominal value or at the nominal value stated in the deposit.*
- *The deposit is recognized when the money is received.*
- *Deposits are presented at the nominal amount or the amount of the BPR's liabilities.*

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.14 Simpanan dari nasabah (lanjutan)

- Kewajiban bunga bank deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

2.15 Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

Tabungan
- Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain.
- Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima.
- Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
- Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.

Deposito Berjangka
- Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal atau sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito.
- Setoran deposito diakui pada saat uang diterima.
- Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
- Kewajiban bunga bank deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

2.16 Pinjaman diterima

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank lain dan/atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.14 *Deposit from customers (continued)*

- *The liabilities of bank deposit interest which have not matured are presented in the post interest payable.*

2.15 *Deposit from other banks*

Deposit from other banks consist of the liability to other banks in the form of saving deposits and time deposits.

Saving Deposits
- *Savings transactions are recognized at the nominal value of deposits or withdrawals made by other banks.*
- *The deposit is recognized when the money is received.*
- *Interest on savings is recognized as a nominal increase in savings.*
- *The balance of savings is presented at the amount of BPR's liabilities to the savings owner.*

Time Deposits
- *The deposit transaction is recognized at nominal value or at the nominal value stated in the deposit.*
- *The deposit is recognized when the money is received.*
- *Deposits are presented at the nominal amount or the amount of the BPR's liabilities.*
- *The liabilities of bank deposit interest which have not matured are presented in the post interest payable.*

2.16 *Borrowings*

Borrowings are funds received from other banks and/ or other parties with the obligation of repayment in accordance with the terms set in the loan agreement.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.17 Pengakuan pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual *(acrual basis)*.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Seluruh penerimaan kas atas kredit yang diklasifikasikan sebagai *non-performing*, diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan kas diatas pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pengakuan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dihentikan pada saat kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai. Pendapatan bunga dari kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai dilaporkan sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima *(cash basis)*.

Beban diakui pada saat terjadinya.

2.18 Provisi dan komisi

Provisi dan komisi yang berkaitan dengan kegiatan perkreditan diakui sebagai pendapatan (beban) provisi dan komisi secara proporsional atau ditangguhkan, serta diamortisasi selama jangka waktu kreditnya.

Pendapatan dan beban provisi atau komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan pengkreditan dan jangka waktu tertentu ataupun tidak material menurut Bank diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

2.19 Pendapatan dan beban operasional lainnya

Seluruh pendapatan dan beban operasional lainnya dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.17 Recognition of interest income and expenses

Interest income and expenses are recognized on an accrual basis.

Loans in which their principal and interest have been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt-exist as to their timely collecction, are generally classified as impaired loans.

All cash receipts from loans classified as non-performing, are first applied as a reduction of the principal. The excess of cash receipts over the outstanding principal is recognized as interest income in the current year statements of profit or loss.

The recognition of interest income on loans are discontinued when the loans are classified as impaired loans. Interest income from impaired loans is reported as contingent receivables and to be recognized as income when the cash is received (cash basis).

Expenses are recognized when incurred.

2.18 Provision and commissions

Provision and commissions which directly related to lending activities are recognized as provision and commissions income (expenses) on proportional or deferred, and amortized over its credit term.

Income and provision expense or other commissions not related to the loan activities and certain time period or not material according to the Bank are recognized as income or expense at the time of the transaction occurred.

2.19 Other operating income and expenses

All of other operating income and expenses are charged into statements of profit or loss as incurred.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.20 Komitmen dan kontijensi

Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.

Kontijensi adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat diinformasikan setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan.

Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi dibentuk sebesar taksiran kerugiannya serta diakui sebagai beban dan kewajiban secara terpisah.

2.21 Transaksi dengan pihak berelasi

Bank melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, seperti didefinisikan dalam Pernyataan SAK ETAP Bab 28 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dalam jumlah signifikan, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama, atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak tidak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.22 Program imbalan kerja

Berdasarkan SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja terdiri dari:

- Imbalan Kerja Jangka Pendek terdiri dari:
  - Upah, gaji dan iuran jaminan sosial
  - Bonus terutang dalam waktu 12 bulan
- Imbalan Pasca Kerja terdiri dari:
  - Tunjangan Pensiun
  - Asuransi Jiwa dan perawatan kesehatan
- Imbalan Jangka Panjang terdiri dari:
  - Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja

2 SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

2.20 Commitmens and contigencies

Commitments is an irrevocable unilateral contract or contract and should be executed if mutually agreed terms are met.

Contingencies is a condition or situation with the final result of a new gain or loss that can be informed after the occurrence of one or more events in the future.

The estimated losses on commitments and contingencies are determined at their estimated cost and recognized as a separate liability and expense.

2.21 Transactions with related parties

The Bank makes certain transactions with related parties, as defined in SAK ETAP Statement of Chapter 28 concerning Disclosure of Related Parties.

All transactions with related parties in significant amounts, whether carried out under the same terms and conditions, or not with the same terms and conditions with non-related parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

2.22 Employee benefits plan

Based SAK ETAP Chapter 23 concerning Employee Benefits consists of:

- *Short-term employee benefits consist of:*
  - *Wages, salaries and social security contributions*
  - *Bonus payable within 12 months*
- *Post-employment benefits consist of:*
  - *Pension allowances*
  - *Life insurance and health care*
- *Long term rewards consist of:*
  - *Termination benefits*

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.23 **Peristiwa setelah tanggal neraca**

Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal neraca (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Kejadian-kejadian setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.24 **Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan kekuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan kewajiban.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan kewajiban atas tahun keuangan satu tahun ke depan.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

2.25 **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkini**

1 POJK No. 1 Tahun 2024 Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat. Berlaku mulai tanggal 01 Nopember 2024.
2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Bab IV Perbankan Bagian Kedua Pasal 1 Nomor 4 yaitu Pergantian Nama BPR dari Bank Perekonomian Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
3 POJK No. 19 Tahun 2023 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia BPR dan BPRS. Berlaku mulai tanggal 02 Nopember 2023.

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.23 ***Subsequent event***

Post year-subsequents event that provide additional information about the Bank's financial position at the date of the balance sheet (adjusting event), if any, are reflected in the financial statements. Post year-subsequent event that do not need adjustment are disclosed in the notes to financial statements when material.

2.24 ***Use of critical accounting estimates and judgments***

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining in the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year.

Although these estimates and assumtions are by management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

2.25 ***Latest Financial Service Authority Regulations***

1 POJK No. 1 Year 2024 Asset Quality of People's Economic Banks. Effective from November 01, 2024.
2 Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector Chapter IV Banking Part Two Article 1 Number 4 namely Changing the Name of Rural Bank from "Bank Perkreditan Rakyat" to "Bank Perekonomian Rakyat".
3 POJK No 19 of 2023 concerning Development of Human Resources Quality BPR and BPRS. Valid from November 02, 2023.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkini (lanjutan)

4 POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Berlaku mulai tanggal 11 Juli 2023.

2.26 Peraturan Perpajakan Terkini

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi - Menggunakan Tarif Efektif (TER). Peraturan ini ditetapkan pada 27 Desember 2023 dan berlaku mulai 1 Januari 2024. Tarif pemotongan yang digunakan adalah Tarif Efektif (TER) yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu kategori A, B, dan C dengan tarif sesuai status PTKP. Cara perhitungan Masa Pajak Januari sampai November adalah Tarif Efektif (TER) x Penghasilan Bruto. Masa Pajak Terakhir (Desember) tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Pemerintah menerbitkan PMK No. 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto pada 18 Oktober 2024. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) aturan ini, wajib pajak boleh mengurangkan pembentukan cadangan piutang tak tertagih dari penghasilan bruto. Perhitungan berdasarkan pada standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak melebihi batasan tertentu.

Nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir tahun pajak harus menggunakan nilai yang lebih kecil antara nilai yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; atau nilai batasan tertentu.

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.25 *Latest Financial Service Authority Regulations (continued)*

4 *POJK No. 9 of 2023 concerning Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities. Valid from July 11, 2023.*

2.26 *Latest Tax Regulations*

Income Tax - Article 21

The government issued Government Regulation (PP) Number 58 of 2023 concerning Article 21 Income Tax Withholding Rates on Income in Connection with Work, Services or Activities of Individual Taxpayers - Using Effective Rates (TER). This regulation was stipulated on December 23, 2023 and takes effect from January 1, 2024. The withholding rate used is the Effective Rate (TER) which is divided into 3 categories, namely categories A, B and C with rates according to PTKP status. The method for calculating the January to November Tax Period is Effective Rate (TER) x Gross Income. The last tax period (December) still uses the rates of Article 17 paragraph (1) letter a of the Income Tax.

Provision for bad debts that may be deducted from gross income

The government issued PMK No. 74 Year 2024 concerning the Establishment of Bad Debt Reserves that May Be Deducted from Gross Income on October 18, 2024. Based on Article 4 Paragraph (1) of this regulation, taxpayers may deduct the establishment of bad debt reserves from gross income. The calculation is based on the financial accounting standards (SAK) applicable in Indonesia as long as it does not exceed certain limits.

The carrying amount of the allowance for bad debts at the end of the tax year should be the lesser of the value calculated based on financial accounting standards applicable in Indonesia; or the value of certain limits.

2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

2.26. Peraturan Perpajakan Terkini (lanjutan)

PPN atas Penyerahan AYDA

Pemerintah telah menerbitkan PMK No. 41 Tahun 2023 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih Oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan, berlaku tanggal 31 Mei 2023.

Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah menerbitkan PMK No. 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud pada 17 Juli 2023. Melalui Pasal 6 PMK ini, Wajib Pajak kini dapat memilih melakukan penyusutan atas harta berwujud bangunan permanen selama 20 tahun atau sesuai masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

PMK No. 72 Tahun 2023 Pasal 7 menegaskan bahwa biaya perbaikan harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi pada nilai sisa buku fiskal harta berwujud dan dibebankan melalui penyusutan.

2.27 Standar Akuntansi Yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang akan menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitaas Publik (SAK ETAP). SAK EP ini mengacu pada IFRS for SMEs dan pengaturannya lebih komprehensif. Laporan keuangan ini belum mengadopsi SAK EP, standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan Bank yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan.

2 *SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)*

2.26 *Latest Tax Regulations (continued)*

VAT on Delivery of Foreclosed Asset

The government has issued PMK No. 41 of 2023 concerning Value Added Tax on the Delivery of Collateral Taken Over by Creditors to Collateral Buyers, valid from May 31, 2023.

Depreciation of Fixed Assets

The government issued PMK No. 72 of 2023 concerning Depreciation of Tangible Assets and/or Amortization of Intangible Assets on July 17, 2023. Through Article 6 of this PMK, Taxpayers can now choose to depreciate tangible assets of permanent buildings for 20 years or according to the actual useful life based on bookkeeping Taxpayers.

PMK No. 72 of 2023 Article 7 confirms that the costs of repairing tangible assets that have a useful life of more than one year are capitalized in the remaining fiscal book value of the tangible assets and charged through depreciation.

2.27 *Issued But Not Yet Effective Accounting Standars*

The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) has issued Private Entity Financial Accounting Standards (SAK EP) which will replace the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP). This SAK EP refers to the IFRS for SMEs and its arrangements are more comprehensive. This financial report has not yet adopted SAK EP, the accounting standards will be effective or applicable on the Bank's financial statements for the period beginning on or after January 1, 2025.

As at the authorisation date of this financial statement, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

3 PENJELASAN POS-POS NERACA / *EXPLANATION OF BALANCE SHEET*

3.1 Kas / *Cash*

Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: / *Cash as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

	31/12/2024	31/12/2023	
- Kas	260.863.600	228.171.600	*Cash* -
Jumlah	**260.863.600**	**228.171.600**	***Total***

3.2 Pendapatan bunga yang akan diterima / *Interest receivable*

Pendapatan bunga yang akan diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: / *Interest receivable as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

	31/12/2024	31/12/2023	
- Penempatan Pada Bank Lain	4.149.480	4.006.151	*Placements with Other Banks* -
- Kredit yang Diberikan	385.003.155	338.590.298	*Loans* -
Jumlah	**389.152.635**	**342.596.449**	***Total***

3.3 Penempatan pada Bank lain / *Placements with other Banks*

Penempatan pada Bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: / *Placements with other Banks as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

	31/12/2024	31/12/2023	
Giro			***Demand Deposit***
- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	30.059.775	30.224.409	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur* -
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Larantuka	5.336.096	5.633.111	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Larantuka* -
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Larantuka	21.341.916	24 516.476	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Larantuka* -
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	31.480.080	31.705.867	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk* -
Jumlah	**88.217.867**	**92.079.863**	***Total***
Tabungan			***Saving Deposits***
- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur - Simpeda	668.032.309	335.060.175	*PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur - Simpeda* -
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Larantuka-Taplus	1.486.993.066	1.783.737.904	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCP Larantuka-Taplus* -
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Larantuka-Britama	246.861.253	135.991.603	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Larantuka-Britama* -
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waiwerang	82.647.613	136.476.430	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Waiwerang* -
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Larantuka-Bisnis	60.270.496	59.909.062	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Larantuka-Bisnis* -
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Boru-Simpedes	112.485.356	98.715.397	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Boru-Simpedes* -

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.3 Penempatan pada Bank lain (lanjutan)

3 *EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)*

3.3 Placements with other Banks (continued)

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.587.384.417	1.223.365.540	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP* -
- PT BPR Tanaoba Lais Manekat	182.249.798	27.993.963	*PT BPR Tanaoba Lais Manekat* -
- PT BPR Lestari Bali	38.701.692	38.426.531	*PT BPR Lestari Bali* -
- PT BPR Christa Jaya Perdana	55.599.482	53.953.891	*PT BPR Christa Jaya Perdana* -
Jumlah	**4.521.225.483**	**3.893.630.496**	***Total***
Deposito			***Time Deposits***
Jangka Waktu > 3 Bulan			***Time Period > 3 Months*** -
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Larantuka	1.500.000.000	1.500.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Larantuka* -
Jumlah	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	***Total***
Jumlah	**6.109.443.350**	**5.485.710.359**	***Total***
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(118.033)	-	*Allowance for Uncollectible Account on Productive Assets*
Jumlah Bersih	**6.109.325.317**	**5.485.710.359**	***Net Total***

Tingkat suku bunga per tahun

Tingkat suku bunga rata-rata giro pada bank lain adalah 0,69% per tahun, tabungan pada bank lain adalah 1,89% per tahun, dan deposito pada bank lain adalah 3,25% per tahun.

Interest rates per annum

The average interest rates of demand deposits with other banks are 0,69% per year, saving deposits with other banks are 1,89% per year, and time deposits are 3,25% per year.

Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024 tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi.

By relationship

As of December 31, 2023 and 2024, the Bank had no funds placed with related parties.

Berdasarkan kolektibilitas

Semua penempatan pada Bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024 digolongkan lancar.

By collectibility

All placements with other banks as of December 31, 2023 and 2024 were classified as current.

Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah:

Placements with other banks pledged as collateral

There were placements with other banks pledged as collateral as of December 31, 2024 are:

Nama Bank/ *Bank Name*	Giro/ *Demand Deposits*	Tabungan/ *Saving Deposits*	Deposito *Time Deposits*
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Larantuka	-	-	1.500.000.000
Jumlah/ *Total*	-	-	1.500.000.000

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.3 Penempatan pada Bank lain (lanjutan)

Terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah:

3 *EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)*

3.3 *Placements with other Banks (continued)*

There were placements with other banks pledged as collateral as of December 31, 2023 are:

Nama Bank/ *Bank Name*	Giro/ *Demand Deposits*	Tabungan/ *Saving Deposits*	Deposito *Time Deposits*
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Larantuka	-	-	1.500.000.000
Jumlah/ *Total*	-	-	1.500.000.000

Penyisihan kerugian penurunan nilai

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

Allowance for impairment losses

The changes in the allowance for impairment losses on placements with other banks are as follows:

	2024	2023	
- Saldo awal tahun	-	-	*Balance of beginning of year* -
- Penyisihan tahun berjalan	1.078.915	-	*Provision during the year* -
- Pemulihan Tahun Berjalan	(960.882)	-	*Recovery during the year* -
- **Saldo akhir tahun**	118.033	-	***Balance at end of year*** -

3.4 **Kredit yang diberikan**

Kredit yang diberikan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

3.4 *Loans*

Loans as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	Rekening/ *Accounts*	31/12/2024	31/12/2023	Rekening/ *Accounts*	
- Lancar	764	68.904.027.881	64.151.527.362	742	*Current* -
- Perhatian Khusus	53	966.820.944	1.960.285.362	42	*Special Mention* -
- Kurang Lancar	24	1.901.644.100	640.544.613	27	*Substandard* -
- Diragukan	19	677.988.238	467.658.000	32	*Doubtfull* -
- Macet	74	1.675.828.909	1.976.343.570	73	*Loss* -
Jumlah	934	74.126.310.072	69.196.358.907	916	*Total*
- Provisi		(439.296.553)	(385.601.764)		*Provision* -
- Pendapatan yang ditangguhkan		(34.013.078)	(35.355.100)		*Deffered Revenue* -
- Cadangan Kerugian Restrukturisasi		(20.463.010)	-		*Restructuring Loss Reserve*
Kredit Yang Diberikan		**73.612.074.422**	**68.775.402.043**		***Loans***
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		**(1.399.204.157)**	**(1.291.588.995)**		***Allowance for Uncollectible Account on Productive Assets***
Jumlah Bersih		**72.212.870.265**	**67.483.813.048**		***Net Total***

	31/12/2024	31/12/2023	
Baki debet kredit dengan agunan likuid	532.381.788	4.423.489.303	*Outstanding loans with liquid collateral*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)

Berdasarkan jenis kredit

By type of loans

1 Performing

Jenis	31/12/2024 Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Modal Kerja				*Working Capital*
- Terkait	-	-	-	*Related* -
- Tidak Terkait	7.361.972.390	551.243.744	7.913.216.134	*Third Parties* -
Investasi				*Investment*
- Terkait	-	-	-	*Related* -
- Tidak Terkait	444.422.900	95.700.000	540.122.900	*Third Parties* -
Konsumsi				*Consumer*
- Terkait	2.295.793.000	-	2.295.793.000	*Related* -
- Tidak Terkait	58.801.839.591	319.877.200	59.121.716.791	*Third Parties* -
Jumlah	68.904.027.881	966.820.944	69.870.848.825	*Total*

Jenis	31/12/2023 Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Modal Kerja				*Working Capital*
- Terkait	97.546.100	-	97.546.100	*Related* -
- Tidak Terkait	9.238.577.462	703.573.876	9.942.151.338	*Third Parties* -
Investasi				*Investment*
- Terkait	-	-	-	*Related* -
- Tidak Terkait	556.783.311	154.233.334	711.016.645	*Third Parties* -
Konsumsi				*Consumer*
- Terkait	2.702.003.620	170.322.200	2.872.325.820	*Related* -
- Tidak Terkait	51.556.616.869	932.155.952	52.488.772.821	*Third Parties* -
Jumlah	64.151.527.362	1.960.285.362	66.111.812.724	*Total*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berdasarkan jenis kredit (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)

3.4 Loans (continued)

By type of loans (continued)

2 Nonperforming

Jenis	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	*Type*
		31/12/2024			
Modal Kerja					*Working Capital*
- Terkait	-	-	-	-	*Related* -
- Tidak Terkait	732.747.800	290.241.004	797.158.995	1.820.147.799	*Third Parties* -
Investasi					*Investment*
- Terkait	-	-	-	-	*Related* -
- Tidak Terkait	-	138.733.334	584.456.547	723.189.881	*Third Parties* -
Konsumsi					*Consumer*
- Terkait	-	-	-	-	*Related* -
- Tidak Terkait	1.168.896.300	249.013.900	294.213.367	1.712.123.567	*Third Parties* -
Jumlah	1.901.644.100	677.988.238	1.675.828.909	4.255.461.247	*Total*

Jenis	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	*Type*
		31/12/2023			
Modal Kerja					*Working Capital*
- Terkait	-	-	-	-	*Related* -
- Tidak Terkait	520.831.995	362.389.900	674.431.153	1.557.653.048	*Third Parties* -
Investasi					*Investment*
- Terkait	-	-	-	-	*Related* -
- Tidak Terkait	-	47.880.600	659.598.712	707.479.312	*Third Parties* -
Konsumsi					*Consumer*
- Terkait	-	-	-	-	*Related* -
- Tidak Terkait	119.712.618	57.387.500	642.313.705	819.413.823	*Third Parties* -
Jumlah	640.544.613	467.658.000	1.976.343.570	3.084.546.183	*Total*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)

Berdasarkan sektor ekonomi / ***By economic sectors***

1 Performing

Jenis	31/12/2024 Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	243.061.600	22.635.244	265.696.844	*Agriculture, Forestry and Fisheries*
Pertambangan dan Penggalian	6.750.000	-	6.750.000	*Mining and Excavacation*
Industri Pengolahan	207.291.000	24.115.000	231.406.000	*Processing Industry*
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
Pengelolaan Air, Air Limbah dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	*Management of Water, Wastewater and Waste Recycling and Remediation Activities*
Kontruksi	-	-	-	*Construction*
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	7.119.791.435	491.943.500	7.611.734.935	*Wholesale and Retail Trade, Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles*
Pengangkutan dan Pergudangan	-	95.700.000	95.700.000	*Transportation and Warehousing*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)
Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)
By economic sectors (continued)

Informasi dan Komunikasi	3.333.200	-	3.333.200	*Information and Communication*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	*Financial and Insurance Activities*
Real Estate	-	-	-	*Real Estate*
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	49.334.100	-	49.334.100	*Professional, Scientific and Technical Activities*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya	39.983.355	-	39.983.355	*Leasing and Lease Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents and other Business Support*
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	*Government Administration, Defense and Compulsory Social Security*
Pendidikan	-	-	-	*Education*
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial			-	*Human Health Activities and Social Activities*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	63.037.700	12.550.000	75.587.700	*Arts, Entertainment and Recreation*
Aktivitas Jasa Lainnya	73.812.900	-	73.812.900	*Other Service Activities*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)
Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)
By economic sectors (continued)

Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	*Household Activities As Employers, Activities That Produce Goods and Services By Households That Are Used To Meet Their Own Needs*
Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*
Rumah Tangga	744.651.600	-	744.651.600	*Household*
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	60.352.980.991	319.877.200	60.672.858.191	*Non Business field (Others)*
Jumlah	68.904.027.881	966.820.944	69.870.848.825	*Total*

	31/12/2023			
Jenis	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	720.704.354	130.587.350	851.291.704	*Agriculture, Plantation and Forestry*
Perikanan, Peternakan			-	*Fishery, Farming*
Pertambangan dan Penggalian	833.800	84.248.900	85.082.700	*Mining and Excavacation*
Kontruksi	-	-	-	*Construction*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)
Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)
By economic sectors (continued)

Perdagangan Besar dan Eceran	8.655.888.988	487.441.626	9.143.330.614	*Large and Retail Trade*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	*Accommodation provider and food-beverage providers*
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	*Transportation, Warehousing and Communication*
Real Estate	-	-	-	*Real Estate*
Administrasi Pemerintah, Pertanahan, dan jaminan sosial	-	-	-	*Government Administration, Land, and Social Security*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	400.590.200	-	400.590.200	*Arts, Entertainment and Recreation*
Aktivitas Jasa Lainnya	61.734.675	155.529.334	217.264.009	*Other Service Activities*
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	*Human Health Activities and Social Activities*
Jasa Kemasyarakat-an, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	*Community Service, Social Culture, Entertainment and Individual Others*
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	*Private Services Serving the Household*
Industri Pengolahan	104.385.086	-	104.385.086	*Manufacture*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)
Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)
By economic sectors (continued)

Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	*Electricity, Gas, and Water*
Rumah Tangga	-	-	-	*Household*
Perantara Keuangan	-	-	-	*Financial Intermediaries*
Pengangkutan dan Pergudangan	545.944.670	-	545.944.670	*Transportation and Warehousing*
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	53.661.445.589	1.102.478.152	54.763.923.741	*Non Business field (Others)*
Jumlah	64.151.527.362	1.960.285.362	66.111.812.724	*Total*

2 Nonperforming

Jenis	31/12/2024 Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	130.018.700	156.805.534	37.596.300	324.420.534	*Agriculture, Forestry and Fisheries*
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	*Mining and Excavation*
Industri Pengolahan	10.330.000	-	6.694.530	17.024.530	*Processing Industry*
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
Pengelolaan Air, Air Limbah dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	*Management of Water, Wastewater and Waste Recycling and Remediation*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)
Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)

3.4 Loans (continued)
By economic sectors (continued)

Kontruksi	-	-	-	-	*Construction*
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.399.600	124.139.904	1.337.324.712	1.978.864.216	*Wholesale and Retail Trade, Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles*
Pengangkutan dan Pergudangan	74.999.500	-	-	74.999.500	*Transportation and Warehousing*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*
Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	*Information and Communication*
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	*Financial and Insurance Activities*
Real Estate	-	-	-	-	*Real Estate*
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	*Professional, Scientific and Technical Activities*
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya	-	44.975.000	-	44.975.000	*Leasing and Lease Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents and other Business Support*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)
Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)
By economic sectors (continued)

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	*Government Administration, Defense and Compulsory Social Security*
Pendidikan	-	-	-	-	*Education*
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	*Human Health Activities and Social Activities*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	103.053.900	-	103.053.900	*Arts, Entertainment and Recreation*
Aktivtas Jasa Lainnya	-	-	-	-	*Other Service Activities*
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	*Household Activities As Employers, Activities That Produce Goods and Services By Households That Are Used To Meet Their Own Needs*
Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)
Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)
By economic sectors (continued)

Rumah Tangga	-	-	-	-	*Household*
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	1.168.896.300	249.013.900	294.213.367	1.712.123.567	*Not Other Business Fields*
Jumlah	1.901.644.100	677.988.238	1.675.828.909	4.255.461.247	*Total*

	31/12/2023				
Jenis	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	8.860.000	13.775.700	26.931.720	49.567.420	*Agriculture, Plantation and Forestry*
Perikanan, Peternakan	-	-	-	-	*Fishery, Farming*
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	*Mining and Excavecation*
Kontruksi	-	-	-	-	*Construction*
Perdagangan Besar dan Eceran	507.280.395	346.333.000	1.265.037.330	2.118.650.725	*Large and Retail Trade*
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	*Accommodation provider and food-beverage providers*
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-	*Transportation, Warehousing and Communication*
Real Estate	-	-	-	-	*Real Estate*
Administrasi Pemerintah, Pertanahan, dan jaminan sosial	-	-	-	-	*Government Administration, Land, and Social Security*
Jasa Pendidikan	-	-	-	-	*Education Services*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)
Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)

3.4 Loans (continued)
By economic sectors (continued)

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	*Health and Social Activities Services*
Jasa Kemasyarakat-an, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	*Community Service, Social Culture, Entertainment and Individual Others*
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	*Private Services Serving the Household*
Industri Pengolahan	-	-	4.028.600	4.028.600	*Manufacture*
Listrik, Gas, dan Air	-	-	-	-	*Electricity, Gas, and Water*
Rumah Tangga	-	-	-	-	*Household*
Perantara Keuangan		-	-	-	*Financial Intermediaries*
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	24.282.215	24.282.215	*Arts, Entertainment and Recreation*
Aktivitas Jasa Lainnya	4.691.600	50.161.800	13.750.000	68.603.400	*Other Service Activities*
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	119.712.618	57.387.500	642.313.705	819.413.823	*Non Business field (Others)*
Jumlah	640.544.613	467.658.000	1.976.343.570	3.084.546.183	*Total*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)

Berdasarkan jangka waktu Kredit

By loan period

1 Performing

Jenis	31/12/2024 Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Sampai dengan 1 Tahun	139.104.100	5.813.000	144.917.100	*Less than until 1 Year*
Lebih dari 1 s/d 2 Tahun	839.090.917	119.761.744	958.852.661	*More than 1-2 Year*
Lebih dari 2 s/d 5 Tahun	25.027.649.795	680.551.500	25.708.201.295	*More than 2-5 Year*
Lebih dari 5 Tahun	42.898.183.069	160.694.700	43.058.877.769	*More than 5 Year*
Jumlah	68.904.027.881	966.820.944	69.870.848.825	*Total*

Jenis	31/12/2023 Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Sampai dengan 1 Tahun	595.957.700	2.583.340	598.541.040	*Less than until 1 Year*
Lebih dari 1 s/d 2 Tahun	2.111.867.744	48.808.866	2.160.676.610	*More than 1-2 Year*
Lebih dari 2 s/d 5 Tahun	17.585.890.764	958.460.244	18.644.351.008	*More than 2-5 Year*
Lebih dari 5 Tahun	43.757.811.154	950.432.912	44.708.244.066	*More than 5 Year*
Jumlah	64.151.527.362	1.960.285.362	66.111.812.724	*Total*

2 Nonperforming

Jenis	31/12/2024 Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Sampai dengan 1 Tahun	-	8.228.200	29.059.600	37.287.800	*Less than until 1 Year*
Lebih dari 1 s/d 2 Tahun	29.245.400	21.092.654	68.354.996	118.693.050	*More than 1-2 Year*
Lebih dari 2 s/d 5 Tahun	703.502.400	429.110.684	832.968.299	1.965.581.383	*More than 2-5 Year*
Lebih dari 5 Tahun	1.168.896.300	219.556.700	745.446.014	2.133.899.014	*More than 5 Year*
Jumlah	1.901.644.100	677.988.238	1.675.828.909	4.255.461.247	*Total*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berdasarkan jangka waktu Kredit (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)

3.4 Loans (continued)

By loan period (continued)

Jenis	31/12/2023 Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Sampai dengan 1 Tahun	430.000	-	6.366.700	6.796.700	*Less than until 1 Year*
Lebih dari 1 s/d 2 Tahun	-	67.963.200	100.274.615	168.237.815	*More than 1-2 Year*
Lebih dari 2 s/d 5 Tahun	329.146.613	399.694.800	1.087.043.759	1.815.885.172	*More than 2-5 Year*
Lebih dari 5 Tahun	310.968.000	-	782.658.496	1.093.626.496	*More than 5 Year*
Jumlah	640.544.613	467.658.000	1.976.343.570	3.084.546.183	*Total*

Berdasarkan sisa jatuh tempo ***By remaining maturity***

1 Performing

Jenis	31/12/2024 Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Jatuh Tempo	5.029.700	-	5.029.700	*Over Due*
Sampai dengan 1 Tahun	574.209.186	67.279.444	641.488.630	*Less than until 1 Year*
Lebih dari 1 s/d 2 Tahun	3.664.741.384	197.315.100	3.862.056.484	*More than 1-2 Year*
Lebih dari 2 s/d 5 Tahun	24.844.856.230	541.531.700	25.386.387.930	*More than 2-5 Year*
Lebih dari 5 Tahun	39.815.191.381	160.694.700	39.975.886.081	*More than 5 Year*
Jumlah	68.904.027.881	966.820.944	69.870.848.825	*Total*

Jenis	31/12/2023 Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Jatuh Tempo	-	1.845.649	1.845.649	*Over Due*
Sampai dengan 1 Tahun	2.940.995.720	45.063.657	2.986.059.577	*Less than until 1 Year*
Lebih dari 1 s/d 2 Tahun	1.670.446.132	320.400.460	1.990.846.592	*More than 1-2 Year*
Lebih dari 2 s/d 5 Tahun	18.611.660.713	642.542.484	19.254.203.197	*More than 2-5 Year*
Lebih dari 5 Tahun	40.928.424.797	950.432.912	41.878.857.709	*More than 5 Year*
Jumlah	64.151.527.362	1.960.285.362	66.111.812.724	*Total*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)
Berdasarkan sisa jatuh tempo (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.4 Loans (continued)
By remaining maturity (continued)

2 Nonperforming

Jenis	31/12/2024 Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Jatuh Tempo	2.032.000	8.228.200	761.412.265	771.672.465	*Over Due*
Sampai dengan 1 Tahun	7.598.000	54.765.954	301.191.126	363.555.080	*Less than until 1 Year*
Lebih dari 1 s/d 2 Tahun	46.774.300	120.671.800	241.909.600	409.355.700	*More than 1-2 Year*
Lebih dari 2 s/d 5 Tahun	676.343.500	274.765.584	371.315.918	1.322.425.002	*More than 2-5 Year*
Lebih dari 5 Tahun	1.168.896.300	219.556.700	-	1.388.453.000	*More than 5 Year*
Jumlah	1.901.644.100	677.988.238	1.675.828.909	4.255.461.247	*Total*

Jenis	31/12/2023 Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	*Type*
Jatuh Tempo	3.400.195	3.585.000	812.269.566	819.254.761	*Over Due*
Sampai dengan 1 Tahun	40.186.600	60.220.400	170.589.288	270.996.288	*Less than until 1 Year*
Lebih dari 1 s/d 2 Tahun	46.074.500	114.593.200	305.055.616	465.723.316	*More than 1-2 Year*
Lebih dari 2 s/d 5 Tahun	273.282.400	289.259.400	340.859.400	903.401.200	*More than 2-5 Year*
Lebih dari 5 Tahun	277.600.918	-	347.569.700	625.170.618	*More than 5 Year*
Jumlah	640.544.613	467.658.000	1.976.343.570	3.084.546.183	*Total*

Penyisihan kerugian penurunan nilai

Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

Allowance for impairment losses

The changes in the allowance for impairment losses on loans are as follows:

	2024	2023	
- Saldo awal tahun	1.291.588.995	1.302.655.552	*Balance of beginning of year* -
- Penyisihan tahun berjalan	530.785.824	769.015.097	*Provision during the year* -
- Pemulihan tahun berjalan	(310.486.878)	(428.810.454)	*Recovery during the year* -
- Hapus buku	(112.683.784)	(351.271.200)	*Write-off* -
- **Saldo akhir tahun**	**1.399.204.157**	**1.291.588.995**	***Balance at end of year*** -

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Agunan pinjaman

Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh Bank.

Pinjaman karyawan

Pinjaman yang diberikan kepada karyawan Bank merupakan kredit yang umumnya digunakan untuk biaya pendidikan, renovasi dan pembangunan rumah, pernikahan, pelunasan pinjaman, pembelian tanah, dan pengobatan.

	2024	2023
- Baki debet	6.639.015.291	6.127.980.415
- Bunga	6,00%-7,56%	6,00%-7,56%
- Kolektibilitas	Lancar/ *Current*	Lancar/ *Current*

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Sesuai dengan SEOJK No. 11/SEOJK.03/2023, BMPK adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Dana Kepada Seluruh Pihak Terkait 10%
- Masing-masing Peminjam Pihak Tidak Terkait 20%
- Satu Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait 30%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik pihak ketiga maupun pihak terkait.

Informasi Pokok Lainnya

Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya. Kredit konsumtif terdiri dari kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.

3 *EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)*

3.4 *Loans (continued)*

Collateral loans

Loans are generally secured by collateral in the form of land and building under encumbrance or power of attorney to sell, time deposits or other collateral acceptable to the Bank.

Employee loans

The loans to employees of the Bank are loans that are generally used for education costs, medical treatment and house construction, weddings, loan repayments, purchasing land, and medical treatment.

Outstanding loan	-	
Interest	-	
Collectibility	-	

Legal Lending Limit (LLL)

In accordance with SEOJK No. 11/SEOJK.03/2023, LLL are as follows:

Provision of Funds to Related Parties	-	
Each of Borrowers Who Are Not Related Parties	-	
A Group of Borrowers Who Are Not Related Parties	-	

For the year ended December 31, 2024 there were no violations for the provisions of Lending Limit (LLL) either for third parties or related parties.

Other Basic Information

Working capital dan investment loans to customers for working capital requirements and capital goods. Consumer loans consist of mortgages and vehicle loans.

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain.

Kebijakan Bunga

Suku bunga pinjaman berdasarkan Surat Kekutusan Direksi No. DIR.1024.028/PT.BPR-BUD/2024 tanggal Oktober 2024.

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)

3.4 Loans (continued)

Loans are collateralized by registered mortgages, power of attorney to mortgage or shell pledged assets, time deposits or other guarantees.

Interest Policy

Interest rate based on the Director's No. No. DIR.1024.028/PT.BPR-BUD/2024 dated October 2024.

Kredit Modal Kerja	
Plafond	**Suku bunga**
≤ 1.000.000.000,-	1,25% p.m atau 15% p.a flat
> 1.000.000.000,- s.d ≤ 1.500.000.000,-	1,125% p.m atau 13,5% p.a flat
> 1.500.000.000,-	1,1% p.m atau 12% p.a flat

Kredit Usaha Mikro		
Jenis	**Suku Bunga**	**Suku Bunga Flat**
Debitur dengan anguran Bulanan	18,00% p.g	1,50% p.m

Kredit Investasi
Debitur dengan angsuran Bulanan dikenakan suku bunga sebesar 1% p.m atau sebesar 12% p.a flat

Kredit Konsumsi
1. Kredit konsumsi khusus kepada Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai atau Karyawan BUMN/BUMD, Profesional, Anggota TNI/POLRI, Pensiunan dengan Sistem Angsuran Bulanan dengan suku bunga sebesar 12,00% per tahun flat atau 1% per bulan flat.
2. Kredit konsumsi khusus kepada Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai atau Karyawan BUMN/BUMD, Profesional, Anggota TNI/POLRI, Pensiunan yang sebelumnya diberikan suku bunga promi atau suku bunga di bawah 12,00% dapat melakukan top up dengan suku bunga sebesar 11% per tahun.
3. Kredit konsumsi umum yang diperuntukan bagi petani, nelayan, buruh dan swasta dikenakan suku bunga sebesar 1,25% per bulan flat atau 15% per tahun flat. Khusus untuk menggunakan agunan liquid dikenakan suku bunga 1,125% per bulan flat atau 13,50% per tahun flat.
4. Kredit konsumsi umum tanpa agunan dikenakan suku bunga sebesar 1,5% per bulan atau sebesar 18% per tahun flat.

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN) / *3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)*

3.4 Kredit yang Diberikan (lanjutan) / *3.4 Loans (continued)*

Restrukturisasi / ***Restructurisation***

Kredit yang direstukturisasi adalah sebagai berikut: / *The restructured loans are as follows:*

	31/12/2024	
- Jumlah debitur	33	*Debtor total* -
- Baki debet	1.769.710.798	*Outstanding loan* -
- Pendapatan bunga yang ditangguhkan	34.488.078	*Deferred interest income* -

3.5 Aset tetap / *3.5 Fixed assets*

Aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: / *Fixed assets as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:*

	31/12/2023	Mutasi/ *Movements* Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	31/12/2024	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
- Kendaraan	374.929.000	-	-	374.929.000	*Vehicle* -
- Inventaris	1.514.112.741	80.330.700	131.462.440	1.462.981.001	*Equipment* -
Jumlah	**1.889.041.741**	**80.330.700**	**131.462.440**	**1.837.910.001**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
- Kendaraan	373.560.591	1.368.400	-	374.928.991	*Vehicle* -
- Inventaris	1.228.018.907	107.010.014	130.632.099	1.204.396.822	*Equipment* -
Jumlah	**1.601.579.498**	**108.378.414**	**130.632.099**	**1.579.325.813**	***Total***
Nilai Buku	**287.462.243**			**258.584.188**	***Book Value***

	30/12/2022	Mutasi/ *Movements* Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	31/12/2023	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
- Kendaraan	374.929.000	-	-	374.929.000	*Vehicle* -
- Inventaris	1.759.129.451	-	245.016.710	1.514.112.741	*Equipment* -
Jumlah	**2.134.058.451**	**-**	**245.016.710**	**1.889.041.741**	***Total***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
- Kendaraan	357.139.587	16.421.004	-	373.560.591	*Vehicle* -
- Inventaris	1.335.981.053	-	107.962.146	1.228.018.907	*Equipment* -
Jumlah	**1.693.120.640**	**16.421.004**	**107.962.146**	**1.601.579.498**	***Total***
Nilai Buku	**440.937.811**			**287.462.243**	***Book Value***

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN) / *3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)*

3.6 Aset takberwujud / *Intangible assets*

Aset takberwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Intangible assets as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31/12/2024	31/12/2023	
- Program Aplikasi	100.700.000	100.700.000	*Program Aplikasi* -
- Akumulasi Amortisasi	(100.699.999)	(100.699.999)	*Accumulated Amortization* -
Jumlah	1	1	*Total*

3.7 Aset lain-lain / *Other assets*

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Other assets as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31/12/2024	31/12/2023	
- Biaya Dibayar Dimuka			*Prepaid Expenses* -
- Sewa Gedung/Kantor	41.925.000	59.583.250	*Office Rental's* -
- Persediaan Barang	4.032.000	5.184.000	*Gift Supply* -
- Premi Asuransi Tali Kasih	-	7.200.000	*Tali Kasih Insurance Premium* -
- Premi Asuransi Jasa Raharja	-	2.758.968	*Jasa Raharja Insurance Premium* -
- Deposit Echannel	-	-	*Deposit Echannel* -
- Panjar Kompensansi Jual Beli Sertifikat Tanah	180.000.000	180.000.000	*Panjar Compensation for Sale and Purchase of Land Certificates* -
Jumlah	225.957.000	254.726.218	*Total*

31/12/2024

Tanggal/ *Date*	Keterangan/ *Information*	Periode/ *Periode/*	Biaya/ *Cost*	Amortisasi/ *Amortization*	Akm Amor/ *Acc Amor*	Nilai Bersih/ *Net Value*
02/08/2023	Sewa Gedung K.Kas/ *Boru Cash Office Rent*	02/08/2023-31/12/2028	65.000.000	1.083.350	23.075.002	41.925.000
Jumlah/ *Total*			**65.000.000**	**1.083.350**	**23.075.002**	**41.925.000**

31/12/2023

Tanggal/ *Date*	Keterangan/ *Information*	Periode/ *Periode/*	Biaya/ *Cost*	Amortisasi/ *Amortization*	Akm Amor/ *Acc Amor*	Nilai Bersih/ *Net Value*
02/08/2023	Sewa Gedung K.Kas/ *Boru Cash Office Rent*	02/08/2023-31/12/2028	65.000.000	1.083.350	5.416.752	59.583.250
Jumlah/ *Total*			**65.000.000**	**1.083.350**	**5.416.752**	**59.583.250**

Penjelasan tentang sewa

a **Kantor Pusat**
- Pemilik : Pemerintah Kab. Flotim Pemegang Saham Pengendali
- Status : Masih dalam proses negosiasi

b **Kantor Pelayanan Kas Boru**
- Pemilik : Desa Boru Pihak Tidak Terkait
- Biaya : Rp 65.000.000
- Periode : 5 tahun 02/08/2023 - 31/12/2028

Explanation of Rent

a *Head Office*
- *Lessor* : *Pemerintah Kab. Flotim Controlling Shareholder*
- *Status* : *Still in the negotiation process*

b *Cash Service Office - Boru*
- *Lessor* : *Desa Boru Non Related Parties*
- *Cost* : *Rp 65.000.000*
- *Period* : *5 year 02/08/2023 - 31/12/2028*

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.7 Aset lain-lain (lanjutan)

c Kantor Pelayanan Kas Waiwerang
- Pemilik : Pemerintah Kab. Flotim
  Pemegang Saham Pengendali
- Status : Masih dalam proses negosiasi

3.8 Kewajiban segera

Kewajiban segera per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31/12/2024	31/12/2023	
- PPn Pasal 4 (2) Bunga Tabungan	8.282.279	9.754.179	Income Tax - Article 4 (2) (Saving Deposits Interest) -
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	22.953.868	19.461.362	Income Tax - Article 4 (2) (Time Deposits Interest) -
- PPh Pasal 21	20.240.574	4.363.898	Income Tax - Article 21 -
- PPh Pasal 23/26	151.345	2.084.653	Income Tax - Article 23/26 -
- PPh Pasal 25 Badan Tahun 2019	-	44.259.912	Corporate Income Tax - Article 25 for 2019 -
- Tabungan Berjangka Sudah Jatuh Tempo	5.653.087	4.375.570	Due Saving Deposit -
- Titipan Transfer	7.848.921	7.348.921	Deposit for Transfer -
- Titipan Notaris	9.325.500	6.195.000	Deposit for Notary -
- Titipan Pokok Deposito	-	-	Deposit for Time Deposit -
- Titipan BPJS	1.444.629	1.509.074	Deposit for BPJS
- Lainnya	212.999	212.999	Others -
Jumlah	**70.113.202**	**99.565.568**	***Total***

3.9 Utang bunga

Utang bunga per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31/12/2024	31/12/2023	
- Deposito Pihak Ketiga			Time Deposit From Customers -
- Deposito Pihak Ketiga Belum Jatuh Tempo	52.674.062	45.643.069	Due Time Deposit From Customers Not Yet -
- Simpanan Dari Bank Lain	16.135.959	5.520.548	Deposits from other Banks -
Jumlah	**68.810.021**	**51.163.617**	***Total***

Bunga tabungan telah dilakukan perhitungan dan pembayaran langsung pada akhir bulan bersangkutan.

3 *EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)*

3.7 *Other assets (continued)*

c *Cash Service Office - Waiwerang*
- *Lessor* : *Pemerintah Kab. Flotim*
  Controlling Shareholder
- *Status* : *Still in the negotiation process*

3.8 *Accrued expenses*

Accrued expenses as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Interest on savings has been calculated and direct payments at the end of the month.

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN) / *3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)*

3.10 Utang pajak / *Taxes payable*

Utang pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Taxes payable as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31/12/2024	31/12/2023	
- PPh Pasal 25 (Desember)	-	-	*Corporate Income Tax - Article 25* -
- PPh Pasal 29 (Kurang Bayar)	158.332.991	96.731.679	*Corporate Income Tax - Article 29* -
Jumlah	**158.332.991**	**96.731.679**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi, dan penghasilan kena pajak Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

A reconsiliation between income before tax, as a presented in the statement of profit or loss, and the Bank's taxable income for the period ended December 31, 2024 are as follows:

Laba (Komersial)/ *Profit (Commercial)*		1.363.855.872
Koreksi Fiskal Positif:/ *Positive Fiscal Correction:*		
- Beban Non Operasional/ Non Operating Expenses	49.025.179	
- Promosi/ *Promotion*	26.445.500	
- Konsumsi/ *Consumption*	2.467.000	
- Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Kredit Yang Diberikan/ *Allowance for Impairment Losses (Loan)*	530.785.824	
- Selisih Kurang Dampak Perubahan Nilai Tercatat / *Difference Less Impact of Changes in Carrying Value*	115.743.605	
- Ekualisasi PPh Pasal 21/ *Equalization of Income Tax - Article 21*	79.958.040	
- Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Penempatan Pada Bank Lain (ABA)/ *Allowance for Impairment Losses (Placements)*	1.078.915	
		805.504.063
Koreksi Fiskal Negatif:/ *Negative Fiscal Correction:*		
- Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Kredit)/ Recovery of *Allowance for Impairment Losses (Loans)*	(68.844.765)	
- Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Penempatan Pada Bank Lain (ABA)/ *Recovery for Impairment Losses (Placements)*	(960.882)	
- Pengembalian Kredit Hapus Buku/ *Return for Write-off Loans*	(68.792.100)	
		(138.597.747)
Jumlah koreksi fiskal/ *Fiscal correction total*		666.906.316
Laba (Fiskal)/ *Profit (Fiscal)*		2.030.762.188

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)
3.10 Utang pajak (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)
3.10 Taxes payable (continued)

Laba (Fiskal)/ *Profit (Fiscal)*							2.030.762.000
Penghasilan kena pajak/ *Taxable income*							
Pasal 31E/ *Article 31E*					4.800.000.000		
Peredaran bruto:/ *Gross income:*					9.092.811.978		
Laba dengan fasilitas/ *Profit with facility*							1.072.017.944
Laba tanpa fasilitas/ *Profit with non-facility*							958.744.056
Taksiran pajak penghasilan/ *Estimated of income tax*							
- Dengan Fasilitas/ *With Facility*	22%	x	50%	x	1.072.017.944	=	117.921.974
- Tanpa Fasilitas/ *With non-facility*	22%	x			958.744.056	=	210.923.692
Jumlah pajak penghasilan badan terutang/ *Corporate taxes payable total*							328.845.666
PPh Pasal 25 Tahun/ *Income Tax - Article 25* (Jan-Nov)							170.512.675
Kurang pembayaran pajak badan/ *Under payment of corporate income tax*							**158.332.991**
PPh Pasal 25 Tahun/ *Income Tax - Article 25* (Des)							133.939.369
Kurang pembayaran pajak badan/ *Under payment of corporate income tax*							**24.393.622**

Akumulasi koreksi fiskal positif PPAP Kredit yang Diberikan dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The accumulated positive fiscal corrections of Allowance for Impairment Losses Expenses (Loans) Distributed from previous years to the current year are as follows:

- Saldo Awal/ *Beginning of Balance*	-
- Koreksi Fiskal 2020/ *Fiscal 2020 Correction*	221.790.015
- Koreksi Fiskal 2021/ *Fiscal 2021 Correction*	276.267.444
- Koreksi Fiskal 2022/ *Fiscal 2022 Correction*	8.291.271
- Koreksi Fiskal 2023/ *Fiscal 2023 Correction*	372.713.325
Akumulasi Koreksi Fiskal Positif PPAP Kredit Yang Diberikan (31/12/2023)/ *Accumulation of Positive Fiscal Corrections PPAP Loan Distributed (31/12/2023)*	879.062.055
- Koreksi Fiskal 2024/ *Fiscal 2024 Correction*	715.374.195
Akumulasi Koreksi Fiskal Positif PPAP Kredit Yang Diberikan (31/12/2024)/ *Accumulation of Positive Fiscal Corrections PPAP Loan Distributed (31/12/2024)*	1.594.436.250

Akumulasi koreksi fiskal sebesar Rp1.594.436.250,- akan dikoreksi fiskal negatif saat ada pemulihan PPAP.

The accumulated fiscal correction amounting to Rp1.594.436.250,- will be corrected negatively fiscally when there is recovery of allowance for impairment losses.

Akumulasi koreksi positif tahun-tahun sebelumnya untuk PPAP Penempatan Pada Bank Lain yang dapat dinegatifkan tahun berikutnya sebesar Rp1.976.954,-.

The accumulation of positive corrections in previous years for allowance for impairment losses expenses placements with other banks which can be negative in the following year is Rp1.976.954,-.

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.10 Utang pajak (lanjutan)

Pajak yang terutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp328.845.666,- dan telah dibayarkan sampai bulan Nopember sebesar Rp170.512.675,- sehingga kurang bayar pajak penghasilan adalah sebesar Rp158.332.991,-.

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)

3.10 Taxes payable (continued)

The tax payable as of December 31, 2024 amount to Rp328.845.666,- and has been paid up to November amount to Rp170.512.675,- so the underpayment of income tax is Rp158.332.991.-.

3.11 Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

3.11 Deposits from customers

Deposits from customers as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31/12/2024	31/12/2023	
- Tabungan	17.129.479.338	19.926.270.566	*Saving Deposits* -
- Deposito Berjangka	27.861.682.696	24.894.529.324	*Time Deposits* -
- Biaya Transaksi	(16.382.667)	(24.684.949)	*Transaction Expenses* -
Jumlah	**44.974.779.367**	**44.796.114.041**	***Total***

Rincian tabungan dan deposito adalah sebagai berikut:

Details of savings and deposits are as follows:

1) Tabungan

1) Saving Deposits

Jenis/ *Type*	31/12/2024 Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Pihak Ketiga/ *Third Parties*	Jumlah/ *Total*
- Tabungan BUD	52.554.219	5.429.143.111	5.481.697.330
- Tabungan TABERNAS	631.030.664	4.943.430.735	5.574.461.399
- Tabungan KU	53.103.473	3.645.686.561	3.698.790.034
- Tabungan TABERNAS NA	-	551.414.136	551.414.136
- Tabungan SIMPEL BUD	1.678.989	1.821.437.449	1.823.116.438
Jumlah/ *Total*	**738.367.345**	**16.391.111.992**	**17.129.479.337**
	50 rekening	5.292 rekening	5.342 rekening

Jenis/ *Type*	31/12/2023 Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Pihak Ketiga/ *Third Parties*	Jumlah/ *Total*
- Tabungan BUD	85.122.044	6.251.113.228	6.336.235.272
- Tabungan TABERNAS	529.224.429	5.574.332.052	6.103.556.481
- Tabungan KU	55.246.244	5.320.773.636	5.376.019.880
- Tabungan TABERNAS NA	-	485.663.142	485.663.142
- Tabungan SIMPEL BUD	1.758.441	1.623.037.350	1.624.795.791
Jumlah/ *Total*	**671.351.158**	**19.254.919.408**	**19.926.270.566**
	52 rekening	5.111 rekening	5.163 rekening

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.11 Simpanan dari nasabah (lanjutan)

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)

3.11 Deposits from customers (continued)

2) Deposito Berjangka

2) *Time Deposits*

Jangka Waktu/ *Period* Bulan/ *Month*	31/12/2024 Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Pihak Ketiga/ *Third Parties*	Jumlah/ *Total*
- ≤ 3	-	7.429.428.518	7.429.428.518
- 4 - 6	-	3.781.659.190	3.781.659.190
- 7 - 12	-	8.255.092.526	8.255.092.526
- > 12	37.079.067	8.358.423.395	8.395.502.462
Jumlah/ *Total*	**37.079.067**	**27.824.603.629**	**27.861.682.696**
	2 rekening	203 rekening	205 rekening

Jangka Waktu/ *Period* Bulan/ *Month*	31/12/2023 Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Pihak Ketiga/ *Third Parties*	Jumlah/ *Total*
- ≤ 3	-	5.929.881.508	5.929.881.508
- 4 - 6	-	1.621.930.458	1.621.930.458
- 7 - 12	112.218.414	7.969.183.563	8.081.401.977
- > 12	83.149.241	9.178.166.140	9.261.315.381
Jumlah/ *Total*	**195.367.655**	**24.699.161.669**	**24.894.529.324**
	5 rekening	198 rekening	203 rekening

Simpanan dari nasabah yang diblokir dan/atau dijadikan jaminan kredit dan transaksi/fasilitas perbankan lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Deposits from customers blocked and/or pledged as loan collateral as of December 31, 2024 and 2023 are as follows.

	31/12/2024	31/12/2023	
- Tabungan dan Deposito	538.414.131	2.550.357.074	*Saving Deposits and Time Deposits* -

Kebijakan Bunga

Suku bunga tabungan dan deposito dari nasabah, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR.0522.010/PT.BPR-BUD/2022 tanggal 26 Juli 2022.

Interest Policy

Interest rate of saving deposits and deposits from customer, based on the memo of Directors No. DIR.0522.010/PT.BPR-BUD/2022 dated July 26, 2022.

Tingkat suku bunga tabungan per tahun, sebagai berikut:

The interest rates of saving deposits per year, as follows:

Keterangan/ *Explanation*	Bunga/ *Interest*
Tabungan BUD	
- < Rp50.000,-	Tidak ada Bunga
- ≥ Rp 50.000,-	2% p.a
- 36 bulan	6,5% p.a
- 48 - 60 bulan	6,75% p.a
- Di atas 60 bulan	Suku bunga LPS

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3.11 Simpanan dari nasabah (lanjutan)

Tabungan Berencana Sejahtera	6% p.a
Terbanas Non Aktif	0,50% P.a
TabunganKu	2% p.a
Simpanan Pelajar (Simpel BUD)	2% p.a

Tingkat suku bunga deposito per tahun, sebagai berikut:

Keterangan/ *Explanation*	Bunga/ *Interest*
1 Bulan/ *Month*	4,00%
6 Bulan/ *Month*	4,50%
12 Bulan/ *Month*	5,00%
24 Bulan/ *Month*	6,00%

Kebijakan Bunga

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan adalah 2,66% per tahun dan deposito adalah 5,24% per tahun.

3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)

3.11 Deposits from customers (continued)

The interest rates of time deposits per year, as follows:

Interest Policy

The average interest rates of saving depiosit are 2,66% and time deposits are 5,24% per year.

3.12 Simpanan dari Bank lain

Simpanan dari Bank lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31/12/2024	31/12/2023	
Tabungan			*Saving Deposits*
- PT BPR Timor Raya Makmur	68.418.395	-	*PT BPR Timor Raya Makmur* -
- PT BPR Indra Chandara	1.005.050	-	*PT BPR Indra Chandara* -
Jumlah	69.423.445	-	*Total*
Deposito			*Saving Deposits*
Jangka Waktu ≤ 3 Bulan			*Time Period ≤ 3 Months*
- PT BPR Tanjung Pratama	1.000.000.000	1.000.000.000	*PT BPR Tanjung Pratama* -
- PT BPR Bank Jombang Perseroda	-	1.000.000.000	*PT BPR Bank Jombang Perseroda* -
Jumlah	1.000.000.000	2.000.000.000	*Total*
Jangka Waktu > 3 Bulan			*Time Period > 3 Months*
- PT BPR Talenta Raya	1.000.000.000	1.000.000.000	*PT BPR Talenta Raya* -
- PT BPR Timor Raya Makmur	1.000.000.000	1.000.000.000	*PT BPR Timor Raya Makmur* -
- PT BPR Sari DinarKencana	2.000.000.000	500.000.000	*PT BPR Sari DinarKencana* -
Jumlah	4.000.000.000	2.500.000.000	*Total*
Jumlah	5.000.000.000	4.500.000.000	*Total*

Kebijakan Bunga

Tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka dari Bank lain adalah 6,20% per tahun.

Interest Policy

The average interest rates of time deposits from other Banks are 6,20% per year.

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN) / *3 EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)*

3.13 Kewajiban Lain-lain / *Other liabilities*

Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Other liabilities as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31/12/2024	31/12/2023	
- Dana CSR	13.790.623	21.985.247	*Corporate Social Responsibility* -
Jumlah	**13.790.623**	**21.985.247**	***Total***

3.14 Pinjaman yang Diterima / *Borrowings*

Pinjaman yang Diterima per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Borrowings as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31/12/2024	31/12/2023	
- LPDB-KUMKM	-	916.634.000	*LPDB-KUMKM* -
Jumlah	**-**	**916.634.000**	***Total***

Rincian pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut: / *The details of borrowings are as follows:*

LPDB-KUMKM / ***LPDB-KUMKM***

31/12/2024

Keterangan/ *Explanation*	Suku Bunga/ *Interest rate* (% p.a.)	Jangka Waktu/ *Period* (Bulan/ Month)	Jatuh tempo/ *Ending Period*	Plafond/ *Plafond*	Baki Debet/ *Balance*
075/SP3/LPDB/2019	6,00%	60	31/10/2024	5.000.000.000	-
				5.000.000.000	**-**

31/12/2023

Keterangan/ *Explanation*	Suku Bunga/ *Interest rate* (% p.a.)	Jangka Waktu/ *Period* (Bulan/ Month)	Jatuh tempo/ *Ending Period*	Plafond/ *Plafond*	Baki Debet/ *Balance*
075/SP3/LPDB/2019	6,00%	60	31/10/2024	5.000.000.000	916.634.000
				5.000.000.000	**916.634.000**

3.15 Kewajiban imbalan kerja / *Employee benefits liabilities*

Kewajiban imbalan kerja per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Employee benefits liabilities as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31/12/2024	31/12/2023	
- Imbalan Pasca Kerja			*Post-Employment Benefits* -
- Jangka Pendek	52.812.085	37.186.646	*Short Term* -
- Jangka Panjang	635.119.684	728.149.486	*Long Term* -
Jumlah	**687.931.769**	**765.336.132**	***Total***

3 PENJELASAN POS-POS NERACA (LANJUTAN)

3 *EXPLANATION OF BALANCE SHEET (CONTINUED)*

3.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

3.16 *Equity*

Equity as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31/12/2024	31/12/2023	
- Modal Dasar (Saham)	20.000.000.000	20.000.000.000	*Authorized Capital (Share)* -
- Modal Yang Belum Disetor	(1.249.000.000)	(1.749.000.000)	*Unpaid Capital* -
- Cadangan Umum	3.661.739.483	3.560.920.358	*General Reserve* -
- Cadangan Khusus	485.326.373	350.900.873	*Special Reserve* -
- Laba Tahun-Tahun Sebelumnya	(55.041.463)	(70.618.390)	*Retained Earnings* -
- Laba Tahun Berjalan	1.035.010.206	742.745.892	*Profit for the Year* -
Jumlah	**23.878.034.599**	**22.834.948.733**	***Total***

Perubahan modal dasar dan disetor bank berdasarkan Akta No. 01 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Rosalina Ansi Da Costa, SH, M.Kn, yaitu modal dasar bank menjadi Rp18.251.000.000,- (Delapan belas miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari 18.251 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh satu) lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah). Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 18.251 (Delapan belas ribu dua ratus lima puluh satu) saham dengan nominal seluruhnya Rp18.251.000.000,- (Delapan belas miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah). Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Changes in authorized and paid-up capital of the bank based on Deed. 01 dated December 11, 2023 of Roalina Ansi Da Costa, SH, M.Kn, the authorized capital of the bank to Rp18.251.000.000,- (Eighteen billions two hundred fifty and one milion rupiah), consisting of 18.251 (Eighteen two hundred and fifty one) shares each valued at Rp1.000.000,- (One million rupiah). The authorized capital, 18.251 (Eighteen thousand two hundred and fifty one) shares have been issued and paid up to the nominal value of Rp18.251.000.000 (Eighteen billions two hundred fifty and one milion rupiah). The composition of share ownership as follows:

No	Nama/ *Name*	Jumlah lembar saham/ *Number of Shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah nilai nominal/ *Total amount of shares*
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur	18.750	99,99%	18.750.000.000
2	Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Dana	1	0,01%	1.000.000
	Jumlah/ *Total*	**18.751**	**100,00%**	**18.751.000.000**

4 PENJELASAN POS-POS LABA (RUGI)

4.1 Pendapatan bunga

Pendapatan bunga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
- Bunga Penempatan Pada Bank Lain			*Placements with Other Banks Interest* -
- Giro	720.527	6.926.787	*Demand Deposits* -
- Tabungan	54.725.176	33.277.925	*Saving Deposits* -
- Deposito	38.866.437	39.606.162	*Time Deposits* -
- Bunga Kredit yang Diberikan	8.216.093.173	7.929.793.416	*Loans Interest* -
- Provisi	157.786.211	164.587.645	*Provision* -
Jumlah	**8.468.191.524**	**8.174.191.935**	***Total***

4.2 Beban bunga

Beban bunga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
- Bunga Kepada Nasabah			*Interest for Customers* -
- Tabungan	648.562.409	664.109.748	*Saving Deposits* -
- Deposito	1.507.601.587	1.404.954.655	*Time Deposits* -
- Bunga Kepada Bank Lain			*Interest for Other Bank* -
- Tabungan	320.953	-	*Saving Deposits* -
- Deposito	405.450.375	206.381.257	*Time Deposits* -
- Bunga Kepada Pihak Ketiga			*Interest for Non Bank* -
- Pinjaman Yang Diterima	27.623.146	119.255.251	*Borrowings* -
- Biaya Transaksi	34.845.282	10.556.741	*Transaction Fee* -
- Premi LPS	101.901.479	99.702.323	*Deposit Insurance Premium* -
- Koreksi atas Pendapatan Bunga	7.043.452	5.896.622	*Correction of Interest Revenue* -
Jumlah	**2.733.348.683**	**2.510.856.597**	***Total***

4.3 Pendapatan operasional lainnya

Pendapatan operasional lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
- Penerimaan Kredit Yang Dihapusbuku	68.792.100	48.615.900	*Payment from Write-Off Loans* -
- Penerimaan Bunga Kredit Yang Dihapusbuku	-	300.000	*Interest Payment from Write-Off Loans* -
- Pemulihan PPAP			*Recovery of Allowance for Impairment Losses* -
- Pemulihan PPAP Penempatan Pada Bank Lain	960.882	-	*Recovery of Allowance for Impairment Losses (Placements for Other Banks)* -

4 EXPLANATION OF STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

4.1 *Interest revenue*

Interest revenue from January 1 to December 31, 2024 and 2023 are as follows:

4.2 *Interest expenses*

Interest expenses from January 1 to December 31, 2024 and 2023 are as follows:

4.3 *Other operating income*

Other operating income from January 1 to December 31, 2024 and 2023 are as follows:

4 PENJELASAN POS-POS LABA (RUGI) (LANJUTAN)

4.3 Pendapatan operasional lainnya (lanjutan)

- Pemulihan PPAP Kredit Yang Diberikan	310.486.878	428.810.454	*Recovery of Allowance for Impairment Losses (Loans)*
- Administrasi Pemeliharaan	104.893.062	110.722.211	*Saving Deposit Administrasion*
- Administrasi Tutup Rekening Tabungan	3.885.000	4.190.000	*Administration for Closing Account*
- Denda Kredit & Adm Pelunasan	8.030.868	18.556.208	*Sanction Lately & Repayment Loans*
- Pinalty Deposito	3.200.000	4.225.000	*Pinalty of Time Deposit*
- Fee Asuransi	63.064.210	49.517.250	*Insurance Fee*
- Admin/Komisi Atas Pengikatan	27.540.000	18.020.000	*Admin/Commission of Warmecking*
- Administrasi Ganti Buku Tabungan	3.411.237	2.895.000	*Administration for Change Passbook*
- Admin/Komisi Premi Atas	7.477.980	12.312.464	*Administration/Commission on HT*
- Kelebihan Pencadangan Jasprod/Tantiem	1.783.180	-	*Excess Bonus Reserves*
- Fee Base Income	-	20.939	*Fee Base Income*
- Pendapatan Atas Pengembalian By Proses Hukum	6.000.000	6.000.000	*Income from Refunds of Legal Process Costs*
- Lainnya	3.629.393	39.611	*Others*
Jumlah	**613.154.790**	**704.234.937**	***Total***

4 *EXPLANATION OF STATEMENT OF PROFIT OR LOSS (CONTINUED)*

4.3 Other operating income (continued)

4.4 Beban penyisihan kerugian

Beban penyisihan kerugian dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

4.4 Allowance for losses expenses

Allowance for losses expenses from January 1 to December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
- Penempatan Pada Bank Lain	1.078.915	-	*Placements with Other Banks*
- Kredit yang Diberikan	530.785.824	769.015.097	*Loans*
- Kerugian Restrukturisasi Kredit	20.928.078	-	*Credit Restructuring Losses*
Jumlah	**552.792.817**	**769.015.097**	***Total***

4.5 Beban pemasaran

Beban pemasaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

4.5 Marketing expenses

Marketing expenses from January 1 to December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Beban Pemasaran	26.445.500	22.968.000	*Marketing Expenses*
Jumlah	**26.445.500**	**22.968.000**	***Total***

4 PENJELASAN POS-POS LABA (RUGI) (LANJUTAN)

4 EXPLANATION OF STATEMENT OF PROFIT OR LOSS (CONTINUED)

4.6 Beban administrasi dan umum

Beban administrasi dan umum dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

4.6 Administrative and general expenses

Administrative and general expenses from January 1 to December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
- Tenaga Kerja:			*Employee:* -
Gaji & Upah	1.866.410.013	1.887.802.042	*Salaries & Wages* -
- Honorarium	172.256.562	172.017.648	*Honorarium* -
- Lainnya	1.025.040.972	1.145.364.370	*Others* -
- Pendidikan	332.235.160	92.300.430	*Education* -
- Premi Asuransi	204.031.759	206.786.948	*Insurance* -
- Sewa	17.658.250	5.416.750	*Rent* -
- Pajak-Pajak	5.854.000	6.188.469	*Taxes* -
- Pemeliharaan dan Perbaikan	73.958.045	202.709.350	*Maintenance and Services* -
- Penyusutan & Amortisasi	108.378.414	175.402.766	*Depreciation & Amortization* -
- Barang dan Jasa	389.667.618	471.512.900	*Goods and Services* -
Jumlah	**4.195.550.793**	**4.366.503.673**	***Total***

Perincian gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk tahun yang berakhir 2024 adalah sebagai berikut:

Details of salaries and allowances for the Board of Commissioners and Directors of the Bank for the year ended 2024 are as follows:

	2024	Persentase/ Percentage	
- Dewan Komisaris	172.018.202	28%	*Board of Commissioners* -
- Direksi	444.684.406	72%	*Directors* -
Jumlah	**616.702.608**	**100%**	***Total***

4.7 Beban operasional lainnya

Beban operasional lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

4.7 Other operating expenses

Other operating expenses from January 1 to December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
- Administrasi Bank	1.755.000	1.678.000	*Bank Administrations* -
- RUPS/RUPS Luar Biasa	13.625.000	6.493.000	*Extraordinary RUPS* -
- Iuran Perbarindo	12.000.000	12.000.000	*Contribution for Perbarindo* -
- Biaya Pembuatan / Pengurusan	-	44.785.000	*Cost of Making / Managing* -
- Penagihan Kredit Instansi	85.192.097	86.961.881	*Agency Loans Collection* -
- Administrasi Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Kejaksaan	275.000	2.880.000	*Administration of Problem Loan Settlement with the Prosecutor's Office* -
- Administrasi Penyelesaian Kredit Bermasalah (Penguasaan Agunan)	150.000	450.000	*Non Performing Loans Administration Fee (Collateral Mastery)* -
- HUT RI	4.336.000	5.892.500	*RI Anniversary* -

4 PENJELASAN POS-POS LABA (RUGI) (LANJUTAN) / *4 EXPLANATION OF STATEMENT OF PROFIT OR LOSS (CONTINUED)*

4.7 Beban operasional lainnya (lanjutan) / ***4.7 Other operating expenses (continued)***

- HUT BPR	16.570.000	10.000.000	*BPR Anniversary* -
- Seleksi Penerimaan Pegawai	1.975.000	-	*Recruitment of Employee* -
- Tugas Jaga Kantor	1.700.000	-	*Office Guard Duty* -
- Kerugian Komprehensif Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	27.344.010	*Comprehensive Loss of Post-Employment Benefits* -
- Penyusunan/Revisi Sosialisasi Peraturan	700.000	-	*Preparation/Revision of Socialization of Regulations* -
- Admin Pengurusan Jaminan Debitur	75.000	200.000	*Admin for Debtor Collateral Management* -
- Akomodasi Team Founding	-	12.420.000	*Team Founding Accommodation* -
- Lainnya	830.339	-	*Others* -
Jumlah	**139.183.436**	**211.104.391**	***Total***

4.8 Pendapatan non operasional / ***4.8 Non-operating revenue***

Pendapatan non operasional dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Non-operating revenue from January 1 to December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
- Keuntungan Penjualan Aset Tetap	1.769.998	-	*Gain on Sale of Fixed Assets* -
- Selisih Lebih Kas Teller	252.757	284.493	*Teller Cash Excess* -
- Sanksi Admin Absensi Karyawan	9.442.909	13.906.909	*Employee Attendance Admin Sanction* -
Jumlah	**11.465.664**	**14.191.402**	***Total***

4.9 Beban non operasional / ***4.9 Non-operating expenses***

Beban non operasional dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Non-operating expenses from January 1 to December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
- Konsumsi	12.565.000	12.704.000	*Consumption* -
- Sumbangan Pihak Ketiga (Umum)	29.289.300	6.372.500	*Donation for Third Party (General)* -
- Sumbangan Pihak Ketiga (Keagamaan)	250.000	500.000	*Donation for Third Party (Religious)* -
- Denda/Sanksi Keterlamatan	10.428.852	4.110.000	*Penalty/ Sanction* -
- Cinderamata	5.010.000	-	*Souvenirs* -
- Sanksi Administrasi Perpajakan	4.047.027	51.304	*Administration Saction of Taxes* -
- Entertaiment dan Lainnya	20.044.698	-	*Entertainment and Others* -
- Kerugian Penjualan Aset Tetap	-	32.805	*Losses on Sales of Fixed Assets* -
- Biaya Dana Bantuan IWABUD	-	1.200.000	*IWABUD Assistance Fund Fees* -
Jumlah	**81.634.877**	**24.970.609**	***Total***

5 TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Pemilik gedung kantor pusat dan kantor pelayanan kas Waiwerang adalah Pemegang Saham Pengendali atas nama Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Harga sewa yang disepakati untuk kantor pusat adalah Rp65.000.000,- selama 5 tahun.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat pada lampiran 1, 4, dan 5.

5 TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal activities of business, the Bank also entered into certain transactions with related parties.

Transactions with related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

The owner of head office building and the Waiwerang cash service office is the Controlling Shareholder on behalf of the East Flores Regency Government. The agreed rental price for the head office is Rp65.000.000,- for 5 years.

The details of the relationship and type of significant transactions with related parties as of December 31, 2024, could be seen on appendix 1, 4, and 5.

6 KOMITMEN DAN KONTIJENSI / *6 COMMITMENTS AND CONTIGENCIES*

	31/12/2024	31/12/2023	
Komitmen			***Commitments***
Tagihan Komitmen			***Committed Claims***
- Fasilitas Pinjaman Yang belum Ditarik	-	-	*Unused Borrowing* -
Jumlah	-	-	*Total*
Kewajiban Komitmen			***Committed Liabilities***
- Fasilitas Kredit Nasabah yang Belum Ditarik	-	-	*Undisbursed loan facilities* -
- Lainnya	-	-	*Others* -
Jumlah	-	-	*Total*
Kontijensi			***Contigencies***
Tagihan Kontijensi			
- Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	1.156.166.535	1.004.894.991	*Accrued Interest* -
- Aset Produktif (Kredit) yang Dihapusbuku			*Productive Assets (Loans) Written-off* -
- Kredit yang Diberikan	2.763.855.496	2.719.663.812	*Loans* -
- Pendapatan Bunga atas Kredit yang dihapusbuku	112.975.048	119.544.648	*Revenue from Written-off Loans* -
Jumlah	4.032.997.079	3.844.103.451	*Total*

7 JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, LPS dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, yang menyatakan bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2008 besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula maksimal Rp100.000.000,-, diubah menjadi maksimal Rp2.000.000.000,-.

7 *GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF RURAL BANK*

Based on Law No. 24 concerning the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005 which was amended by Law No. 7 Year 2009 dated January 13, 2009 regarding with the Determination of Government Regulation as Substitution of Law No 3 Year 2008, LPS was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be adjusted if certain criterias are met.

In accordance with Indonesia Government Regulation No. 66 Year 2008 dated October 13, 2008 the "Lembaga Penjaminan Simpanan" will guarantee bank deposits of each customers in one bank for maximum of Rp100.000.000,-, previously, then was changed to maximum of Rp2.000.000.000,-.

Periode	%
01/10/2023-31/01/2024	6,75%
01/10/2023-31/01/2024	6,75%
01/02/2024-31/05/2024	6,75%
01/06/2024-30/09/2024	6,75%
01/10/2024-31/01/2025	6,75%
01/11/2024-31/01/2025	6,75%

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank is a participant of the program

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp101.901.479,- dan Rp99.702.323,-. (catatan 4.2).

The Government guarantee's premium haid paid in the year of 2024 and 2023 amounting to Rp101.901.479,- and Rp99.702.323,- respectively (note 4.2).

8 PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tidak terdapat peristiwa-peristiwa penting setelah tanggal neraca yang memerlukan pengungkapan dan atau penyesuaian terhadap laporan keuangan.

8 *SUBSEQUENTS EVENT*

Management is responsible for the preparation of the financial statements. There were no significant subsequentevents after the balance sheet date that require disclosure or adjustment to the financial statements.

9 INFORMASI TAMBAHAN

Pada 31 Maret 2023 pemerintah menetapkan Undang - Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang. Bank telah menghitung kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan hitungan dari Kantor Konsultan Aktuaria Setya Widodo sampai dengan 31 Desember 2024, kewajiban yang harus dibentuk adalah sebesar Rp898.942.444,-. Pada laporan keuangan bank, jumlah kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang masih senilai Rp635.119.684,-. Namun terdapat komitmen bank akan dibebankan pada tahun 2025 setiap bulannya hingga Bulan November sehingga nilainya akan sama dengan laporan aktuaris tersebut.

9 ADDITIONAL INFORMATION

On March 31, 2023, the government enacted Law (UU) Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Subtitute of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The Bank has calculated post-employment benefit based on calculations from the Setya Widodo Actuarial Consultant Office until December 31 2024, the obligation that must be formed is Rp898.942.444,-. The bank has made it. In the bank's financial report, the amount of long-term post-employment benefit obligations is still worth Rp635,119,684. However, there is a bank commitment that will be charged in 2025 every month until November so that the value will be the same as the actuarial report.

10 REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan hasil audit tahun 2024.

10 RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the financial statements has been reclassified to conform with the presentation of the audited financial statements in 2024.

11 RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

11 FINANCIAL RATIO

Financial ratio in 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/ *Capital Adequacy Ratio (CAR)*	*49,32%*	*62,58%*
- Rasio Modal Inti Terhadap Aset Produktif Bermasalah (MIAPB)/ *Core Capital to Problematic Productive Assets*	*1320,87%*	*1060,22%*
- Kualitas Aset Produktif (KAP)/ *Earnings Asset Quality*	*3,91%*	*3,54%*
- *Rasio Non-Performing Loans*	*4,33%*	*3,07%*
- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)/ *Provision for Loan Losses*	*100,00%*	*130,08%*
- Rasio Laba Sebelum Pajak Terhadap Total Aset/ *Return on Assets* (ROA)	*1,79%*	*1,36%*
- Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)/ *Operational Efficiency Ratio (OER)*	*84,21%*	*88,76%*
- *Rasio Margin Bunga Bersih/ Net Interest Margin (NIM)*	*7,50%*	*7,80%*
- *Rasio Kas/ Cash Ratio (CR)*	*10,93%*	*9,39%*
- Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga yang Diterima oleh Bank/ *Loan to Deposit Ratio (LDR)*	*164,82%*	*97,81%*

12 PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 03 Maret 2025.

12 COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on March 03, 2025.

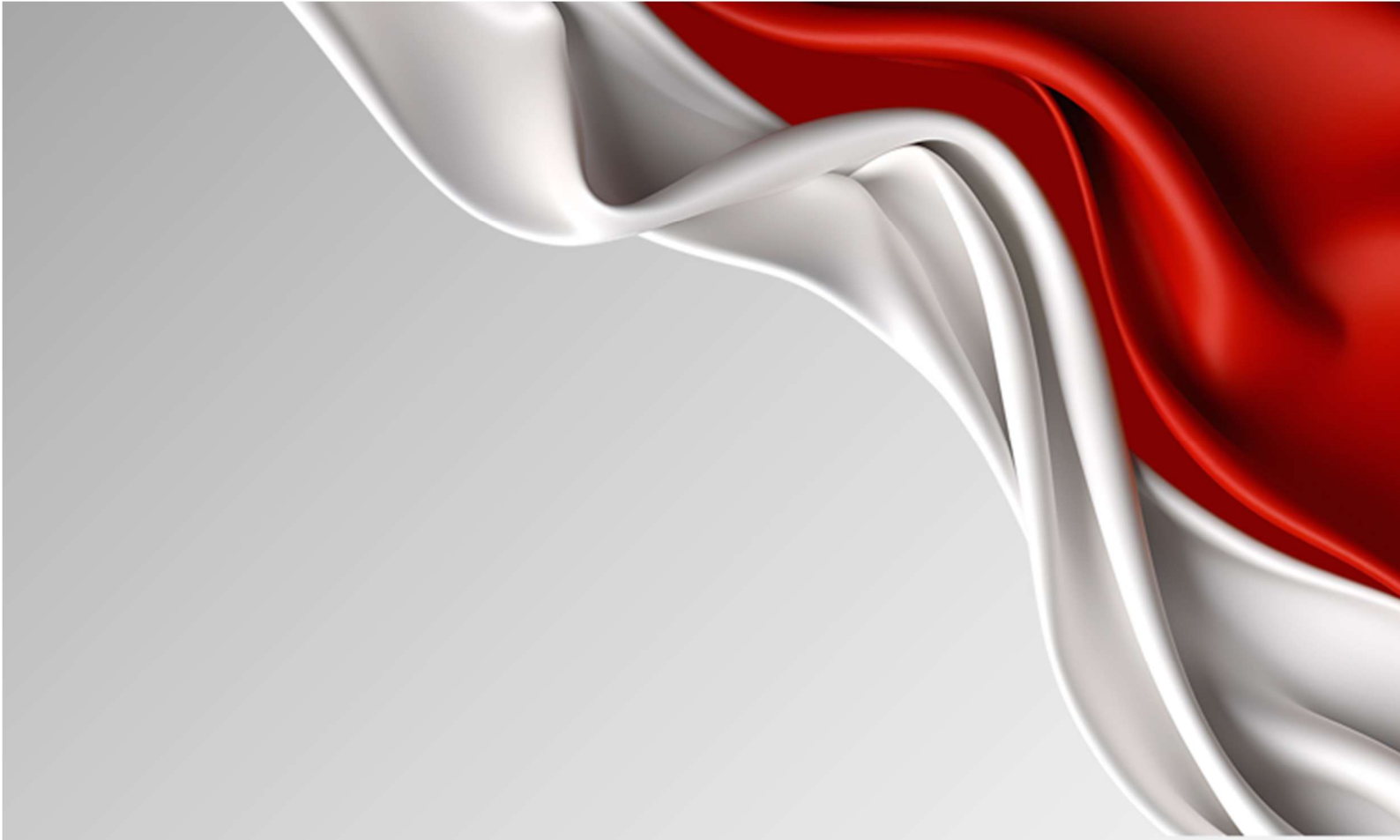
LAMPIRAN/
APPENDIX

LAMPIRAN 1/ *APPENDIX 1*

DAFTAR KREDIT PIHAK BERELASI/ *LIST OF RELATED PARTIES LOANS*

PT BPR BINA USAHA DANA (PERSERODA)
KREDIT YANG DIBERIKAN (PIHAK BERELASI)/ *LOANS (RELATED PARTIES)*
31 Desember 2024 / *December 31, 2024*
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) / *(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

No	Nama/ *Name*	Plafond/ *Plapond*	Baki Debet/ *Outstanding*	Bunga (%)/ *Interest*	Agunan/ *Collateral*	Hubungan dengan Bank/ *Related to Bank*
1	Maria Gabriela Agnes Fernandez Aikoli	485.000.000	377.424.700	0,625%	SHM No.12845, Luas 620 M2 Di Kelurahan Sarotari Tengah, Atas Nama Maria G A F Aikoli	PE Kredit/ *Loans Executive Officer*
2	Maria Ri Lewar	420.000.000	311.301.200	0,625%	SHM No.128, Luas 374 M2 Di Kelurahan Lohayong, Atas Nama Don Erwyn A DVG	PE Audit Internal / *Intern Audit Executive Officer*
3	Jupiter M A Maromon	260.000.000	128.211.300	0,625%	SHM No.1360, Luas 368 M2 Di Kelurahan Sarotari Timur, Atas Nama Jupiter M A Maromon	PE Kepatuhan & Manajemen Risiko / *Compliance and Risk Management Executive Officer*
4	Dominikus Demon	150.000.000	99.670.900	0,625%	SHM No.36, Luas 654 M2 Di Kelurahan Sarotari Timur, Atas Nama Dominikus Demon	Anggota Komisaris/*Commissioner Member*
5	Moses Kopong Beda	390.000.000	331.876.200	0,625%	SHM No.722, Luas 399 M2 Di Kelurahan Sarotari Timur, Atas Nama Moses Kopong Beda	*Direktur Utama/President Director*
6	Agnes Lamatokan	285.000.000	278.125.900	0,625%	Buku Tabernas, No.001.202.001400, atas nama Agnes Lamatokan	Kabag Operasional/*Head of Operations*
7	Yoseh Watun Derosari	377.000.000	290.028.700	0,625%	SHM No.716, Luas 569 M2 Di Boru, Atas Nama Yoseph W Derosari	Kabag Literasi & Inklusi Keuangan/*Head of Financial Literacy & Inclusion*
8	Putu Juli Rahmawati	500.000.000	378.076.300	0,85%	SHM No.02795, Luas 164 M2 Di Kelurahan Sarotari, Atas Nama Putu Juli Rahmawati	Istri Komisaris Utama/ *President Commissioner' Wife*
9	Kristina Bahy	125.000.000	101.077.800	0,92%	SK 80%, SK 100%, Kartu TASPEN	Istri Direktur Kepatuhan / *Compliance Director's Wife*
	Jumlah/ *Total*	**2.992.000.000**	**2.295.793.000**			



BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan . W.J. Lalamentik No. 91, Kupang-NTT, 85111,
Telp (0380) 840605
ntt.bpk.go.id